



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjar terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan singkat menjadi RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rincian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- | | | |
|---------|---|--|
| Bab I | : | Pendahuluan. |
| Bab II | : | Gambaran Umum Kondisi Daerah. |
| Bab III | : | Gambaran Keuangan Daerah. |
| Bab IV | : | Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah. |
| Bab V | : | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. |
| Bab VI | : | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. |

- Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Bab IX : Penutup.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun:

- a. Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026; serta
- b. RKPD.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/ urusan Pemerintahan Daerah dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.

- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (5-85/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Kabupaten Banjar memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah serta sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 5

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021–2026

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 5 (lima) tahun. RPJMD disusun sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan Pemilihan Kepala Daerah setiap lima tahun sekali. Kepala Daerah wajib menyusun RPJMD dengan visi, misi dan program prioritas yang harus mengacu pada permasalahan dan isu strategis daerahnya, yang berlandaskan pada kinerja masa lalu dan kemampuan keuangan daerah beserta potensi daerah yang dapat dikembangkan kedepannya di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Gambar 1. 1. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar



Sumber : Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian program dan anggaran sesuai dengan target sasaran dan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

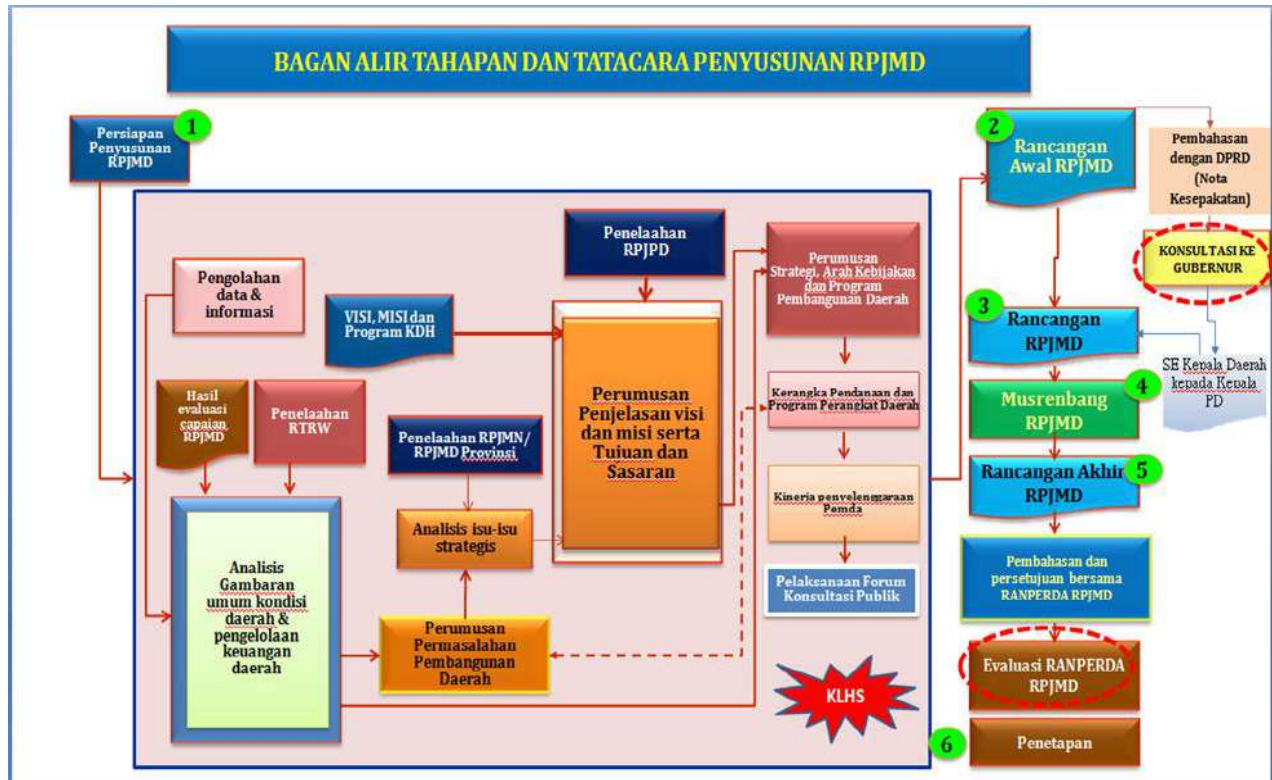
Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan RPJM Nasional.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses tersebut dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (e) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (f) penyusunan rancangan RPJMD.

Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya. Selanjutnya sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun RPJMD diterjemahkan kedalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan RKPD diterjemahkan kedalam Rencana kerja (Renja) perangkat daerah tahunan. Selanjutnya tahapan penyusunan sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD tersebut, digambarkan lebih detail dalam gambar berikut ini.

Gambar 1. 2. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017

Proses penyusunan RPJMD sebagai tahapan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah ini mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD dengan tahapan sebagai berikut :

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan;
- pelaksanaan Musrenbang;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD. berkaitan hal tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Banjar secara menyeluruh dan terpadu dengan menekankan kepada percepatan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen KLHS berdasarkan capaian TPB/SDG's, diperoleh berdasarkan capaian TPB, adalah Kemiskinan, Pendidikan, Air Bersih dan Sanitasi, Energi Bersih dan Terjangkau, Industri dan Infrastruktur, Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem. Setelah dilakukan proses untuk menetapkan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas,

didapatkan 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Alih Fungsi Lahan, 4) Air (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas), 5) Infrastruktur, 6) Sanitasi (Sampah dan Limbah).

Hasil pengkajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 79 indikator (35,43%), telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 54 indikator (24,22%), tidak ada data sebanyak 87 indikator (39,01%), dan indikator di luar wilayah kajian sebanyak 3 indikator (1,35%).

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum memenuhi target nasional dan indikator TPB yang tidak ada data akan menjadi prioritas dalam penentuan skenario RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026. Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas (1) Sasaran (2) Strategi dan arah kebijakan (3) Outcome/Program (4) Kegiatan dan (5) Instansi pelaksana. Alternatif dan Rekomendasi yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD 2021 – 2026 terdiri atas (1) Indikator TPB yang terkait DDDTL sejumlah 11 indikator; dan (2) indikator yang tidak terkait DDDTL sejumlah 43 indikator.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banjar, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup. Selain itu juga mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yang merupakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam konsultasi publik oleh pemangku kepentingan yang perlu diselesaikan adalah pendidikan, kesehatan, alih fungsi lahan, air (kualitas, kuantitas dan kontinuitas), infrastruktur, dan sanitasi (sampah dan limbah).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dokumen

RPJMD Kabupaten Banjar ini disusun dengan berpedoman pada Pancasila sebagai landasan ideologis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta beberapa landasan operasional antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana di ubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
38. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
39. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
40. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
41. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
45. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

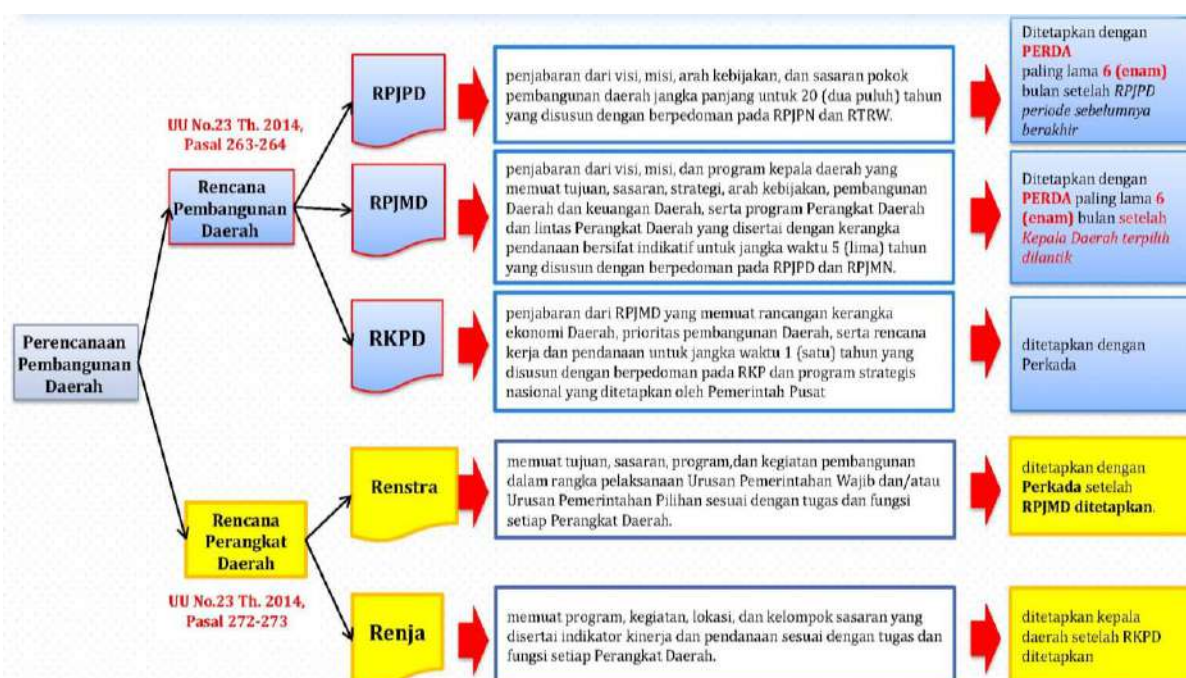
52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 93);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Prinsip hirarki perencanaan menjadi acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pemerintah pusat menjadi pedoman bagi perumusan dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku dalam penetapan periode perencanaan. Dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP) menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan dengan jangka menengah dan tahunan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan harus dapat memastikan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.

Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di level pusat seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian serta dokumen perencanaan di level daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar. Hubungan antar dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam proses penganggaran dapat dilihat pada Gambar 1. 3 berikut :

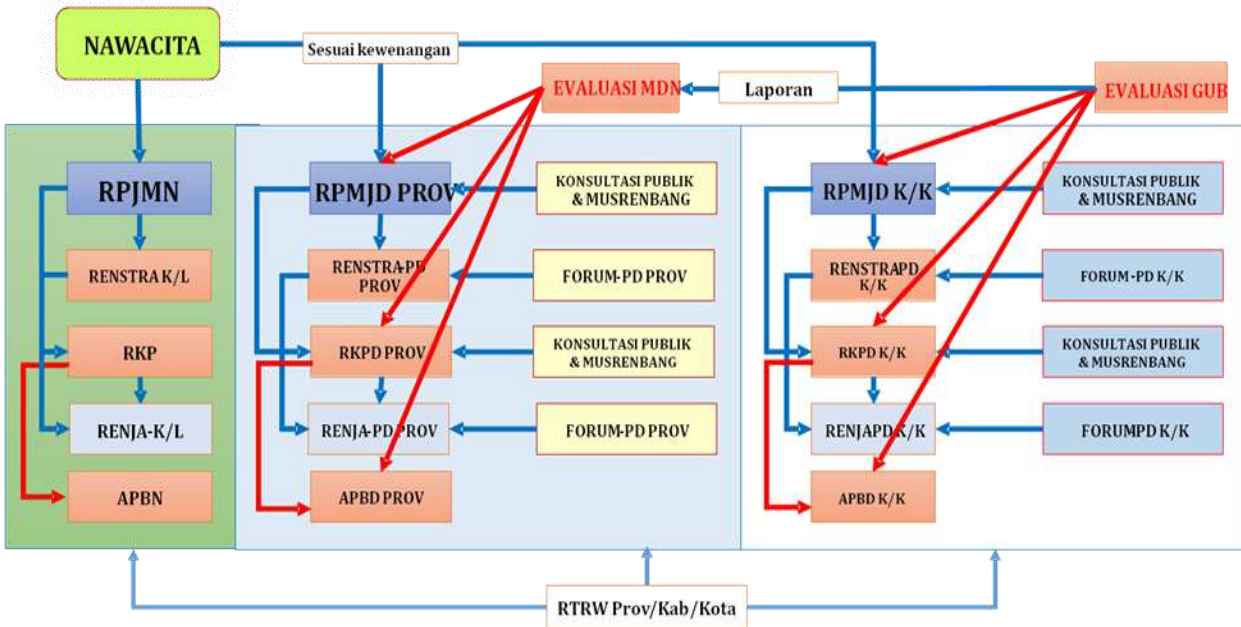
Gambar 1. 3. Dokumen Rencana Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017 data diolah

Adapun keterkaitan hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya digambarkan dalam diagram dibawah ini.

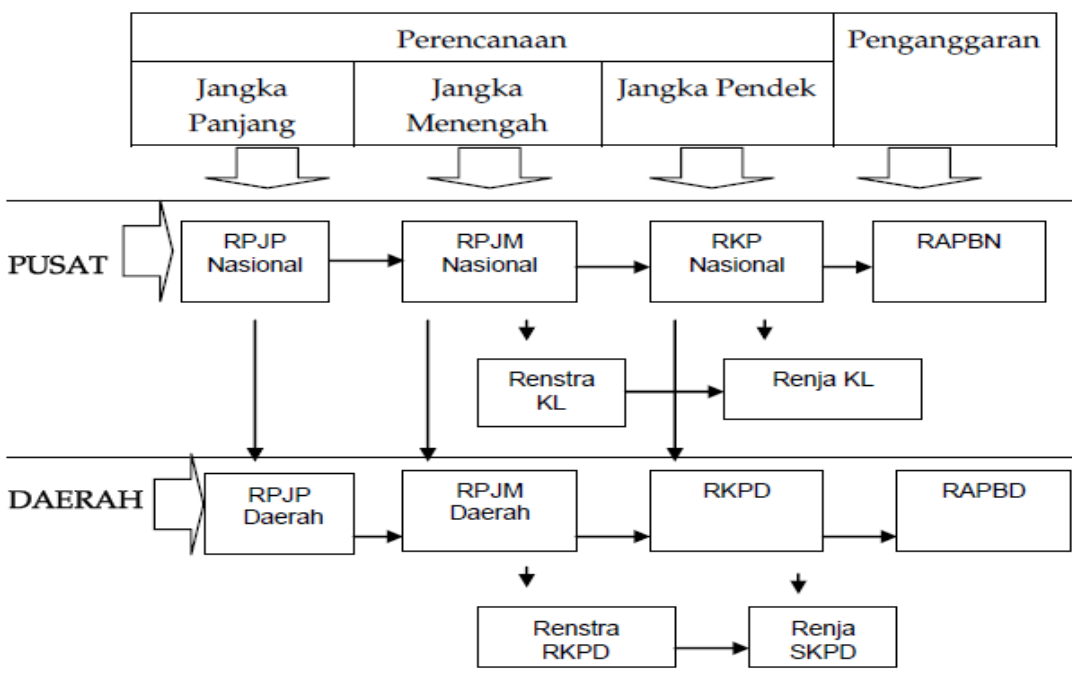
Gambar 1. 4. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Kemendagri, 2016 data diolah

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan juga erat kaitannya dengan keselarasan antar jangka waktu perencanaan. Setiap dokumen perencanaan yang disusun harus memastikan adanya sinergi dengan dokumen lain pada skala waktu berbeda. Oleh karena itu, penyusunan dokumen jangka menengah harus memperhatikan pedoman yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka panjang. Pada level yang lebih mikro, dokumen perencanaan tahunan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) mencakup RPJP dan RTRW menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan jangka menengah (5 tahunan), yaitu RPJM, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta dokumen perencanaan sektoral yaitu Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah). Pada level yang lebih operasional, dokumen jangka menengah menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hubungan antar waktu dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1. 5 berikut :

Gambar 1. 5 Hubungan Antar Waktu Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Data diolah

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan berkaitan dengan informasi hubungan antara RPJMD dengan masing-masing dokumen perencanaan lainnya, yaitu :

1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN;
2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten;
3. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RTRW Kabupaten;
4. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan Renstra Perangkat Daerah;
5. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RKPD Kabupaten; dan
6. RPJMD Kabupaten dengan KLHS RPJMD, yang memuat isu strategis daerah yang telah disesuaikan dengan capaian TPB/ SDG'S Kabupaten Banjar.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah disusun berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Prosedur itu memungkinkan terjadi sinkronisasi antara RPJM Daerah dengan RPJM Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sedangkan RPJM Nasional adalah penjabaran visi, misi dan Program Presiden terpilih.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 juga tidak lepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah diadopsi sebagai satu pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan periode waktu 20 tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Sehingga kedudukan RPJP Daerah ini menggantikan kedudukan Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Daerah yang selama ini menjadi dokumen induk pemerintah daerah. RPJP Daerah menurut undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sehingga tidak menjamin bahwa dalam 20 tahun tersebut dokumen RPJP Daerah tidak berubah seiring dengan pergantian pimpinan daerah. Jika setiap 5 tahun sekali diubah maka nasib dokumen RPJP Daerah itu mungkin tidak berbeda dengan RPJP Daerah yang setiap 5 tahun sekali disusun.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RTRW Kabupaten

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032 dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2041 yang akan diperdakan pada tahun 2021, yang menyangkut rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah. Sedangkan Indikasi Program Utama (IPU) sebagai acuan dalam penyesuaian program kegiatan yang dilaksanakan secara lima tahunan untuk acuan dalam pelaksanaan dengan Renstra Perangkat Daerah dan program tahunan terhadap Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Gambar 1. 6. Konsep Sinkronisasi Program Pemanfaatan R

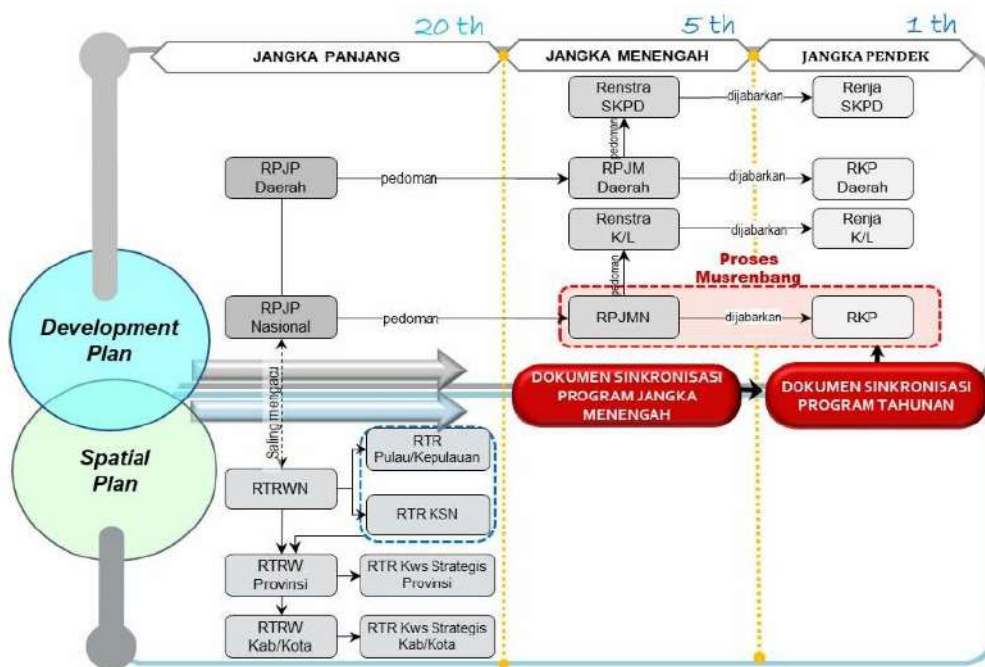
KONSEP SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG



Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2021

RTRW Kabupaten Banjar memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar secara berkelanjutan.

Gambar 1. 7. Diagram Alur Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang



Sumber, Bahan Paparan Sosialisasi PP 21/2021, Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang sebagai berikut :

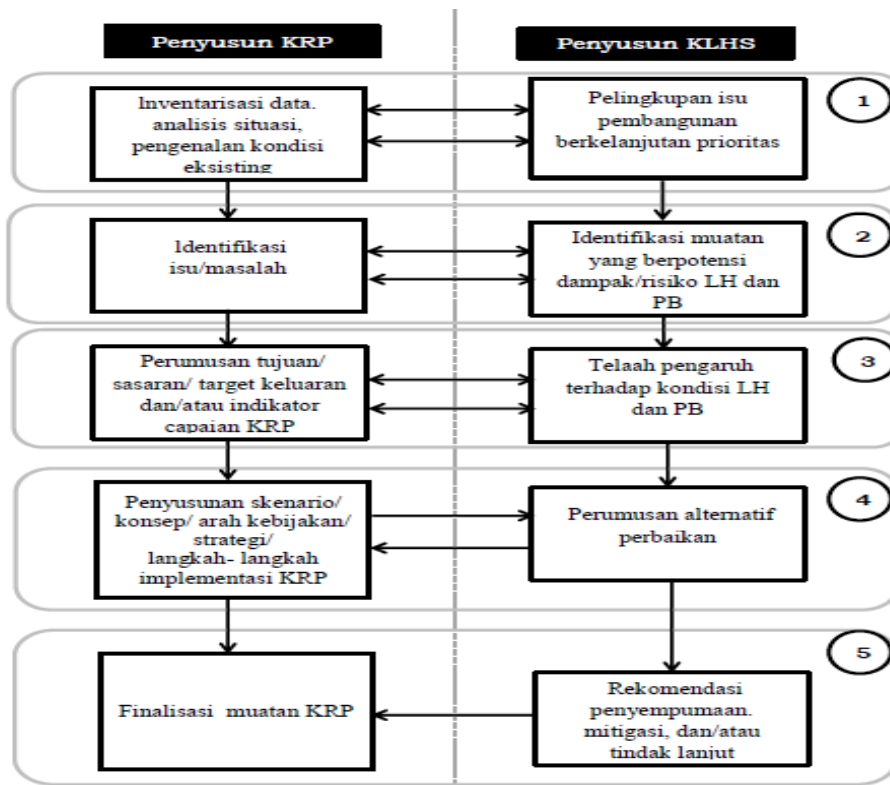
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Harus Berpedoman pada Rencana Tata Ruang, melalui sinkronisasi program pemanfaatan ruang ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
2. Rencana Tata Ruang Daerah harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah (sebagai panglima pembangunan di daerah)
3. Rencana Tata Ruang Daerah sebagai perwujudan rencana struktur dan pola ruang dipastikan terlaksana, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang.

4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan. Konsistensi pemanfaatan ruang dapat tercapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

1.3.5. RPJMD Kabupaten dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat isu strategis daerah yang telah disesuaikan dengan capaian TPB/ SDG'S Kabupaten Banjar. Pelaksanaan KLHS dimulai dengan mengidentifikasi dan merumuskan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam berdasarkan capaian TPB/ SDG's dan menetapkan Isu Pembangunan berkelanjutan Prioritas. Dan berakhir dengan merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banjar.

Gambar 1. 8. Kerangka Umum Integrasi Proses KLHS dengan Proses Kebijakan, Rencana, dan atau/ Program



Sumber : Kemendagri, 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar dimaksudkan untuk menyelaraskan antara visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan. Adapun Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar, yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan dokumen RPJMD ini juga digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja kepala daerah dalam 5 tahun kedepan.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar ini meliputi 9 (sembilan) Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum atau Publik
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2.6. Dampak Covid -19 dan Bencana Banjir
- 2.7. Pencapaian SDGs Kabupaten Banjar

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah . Bab ini menjelaskan dan menyajikan

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bagian ini memuat berbagai permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan isu strategis yang akan memberi pengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan dalam periode RPJMD mendatang, terdiri dari:

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar selama periode RPJMD yang disertai tujuan dan sasarannya, bagian ini memuat:

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan atau tema pada setiap tahun. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih serta *major project* Bupati, meliputi:

- 6.1. Strategi
- 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan
- 6.3. Program Pembangunan Daerah
- 6.4. Major Project

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat pendanaan indikatif yang diperlukan pada setiap program dalam rangka pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat penjelasan dukungan yang diperlukan untuk menyempurnakan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2. 1.Aspek Geografi dan Demografi

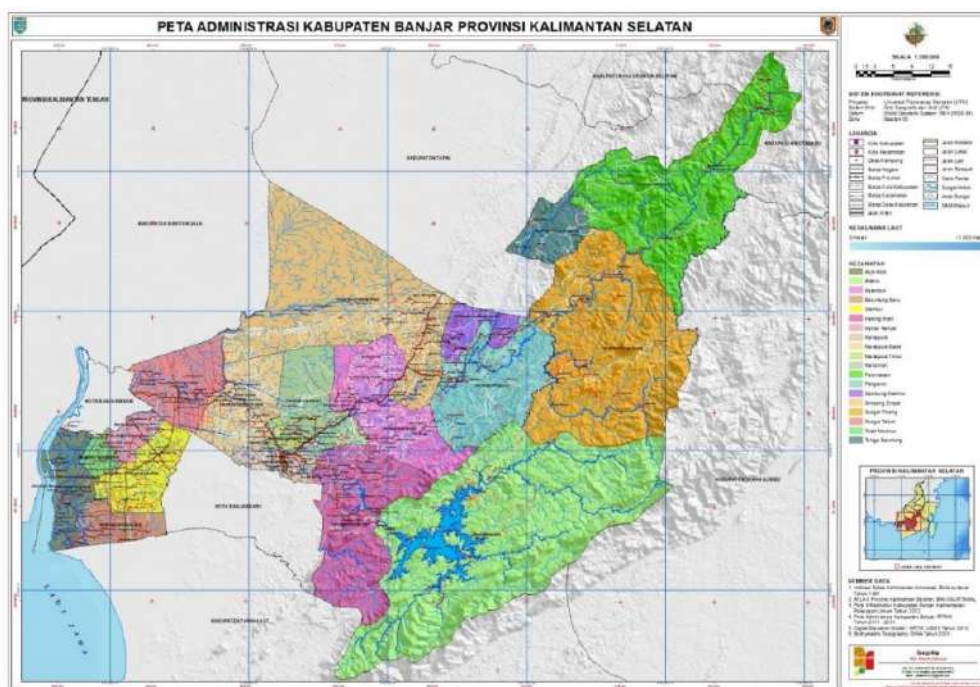
Aspek geografi dan demografi, dua aspek ini memberikan pengaruh cukup signifikan dalam kegiatan pembangunan suatu daerah. Hal ini disebabkan karena sebelum dilakukannya perencanaan pembangunan maka perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan juga kondisi demografi suatu wilayah tersebut agar sasaran dan tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Aspek geografi di Kabupaten Banjar mencakup beberapa hal, yaitu administrasi dan geografi, karakteristik wilayah, risiko dan kerawanan bencana, potensi pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kependudukan.

2.1.1. Aspek Administrasi Dan Geografi

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Kota dari Kabupaten Banjar adalah Kota Martapura atau sering disebut dengan nama Kota Serambi Mekkah. Luas wilayah Kabupaten Banjar sendiri adalah sekitar 12,20% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya adalah 4.668,50 km².

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Banjar



Sumber : Pemerintah Kabupaten Banjar, 2013

Kabupaten Banjar terbagi menjadi 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu Kecamatan Aranio dengan luas 1.166,35 km² (24,98%), dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Martapura Timur dengan luas wilayah hanya 29,99 km² (0,64%). Secara lebih rinci terkait luas wilayah di Kabupaten Banjar akan disajikan dalam bentuk Tabel 2. 1 seperti berikut:

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Banjar

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (km ²)	Persentase
		Desa	Kelurahan		
1.	Aluh-Aluh	19	0	82,48	1,77
2.	Beruntung Baru	12	0	61,42	1,32
3.	Gambut	12	2	129,30	2,77
4.	Kertak Hanyar	10	3	45,83	0,98
5.	Tatah Makmur	13	0	35,47	0,76
6.	Sungai Tabuk	20	1	147,30	3,16
7.	Martapura	19	7	42,03	0,90
8.	Martapura Timur	20	0	29,99	0,64
9.	Martapura Barat	13	0	149,38	3,20
10.	Astambul	22	0	216,50	4,64
11.	Karang Intan	26	0	215,35	4,61

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (km ²)	Persentase
		Desa	Kelurahan		
12.	Aranio	12	0	1.116,35	24,98
13.	Sungai Pinang	11	0	458,65	9,82
14.	Paramasan	4	0	560,85	12,01
15.	Pengaron	12	0	433,25	9,28
16.	Sambung Makmur	7	0	134,65	2,88
17.	Mataraman	15	0	148,40	3,18
18.	Simpang Empat	15	0	141,10	3,02
19.	Telaga Bauntung	4	0	158,00	3,38
20.	Cintapuri Darussalam*	11	0	312,20	6,69
Jumlah		277	13	4.668,50	100,00

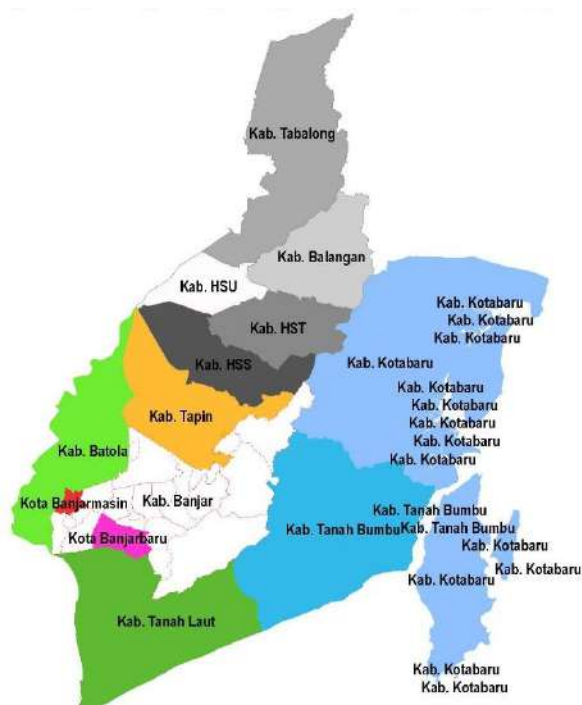
Sumber: BPS Kab. Banjar, 2021

Berdasarkan Tabel 2. 1. di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan di Kabupaten Banjar yang memiliki jumlah desa paling banyak adalah Kecamatan Simpang Empat dan Karang Intan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Telaga Bauntung dengan 4 desa, juga Kecamatan Paramasan yang memiliki 4 desa, serta Kecamatan Sambung Makmur dengan 7 desa. Selanjutnya untuk Kota Martapura yang menjadi wilayah pusat administrasi memiliki perpaduan desa dan kelurahan sebanyak 26, yaitu 19 desa dan 7 kelurahan.

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara;
- 2) Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur;
- 3) Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan; serta
- 4) Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

Gambar 2. 2. Peta Kabupaten Banjar terhadap Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : PUPR Kabupaten Banjar, 2020

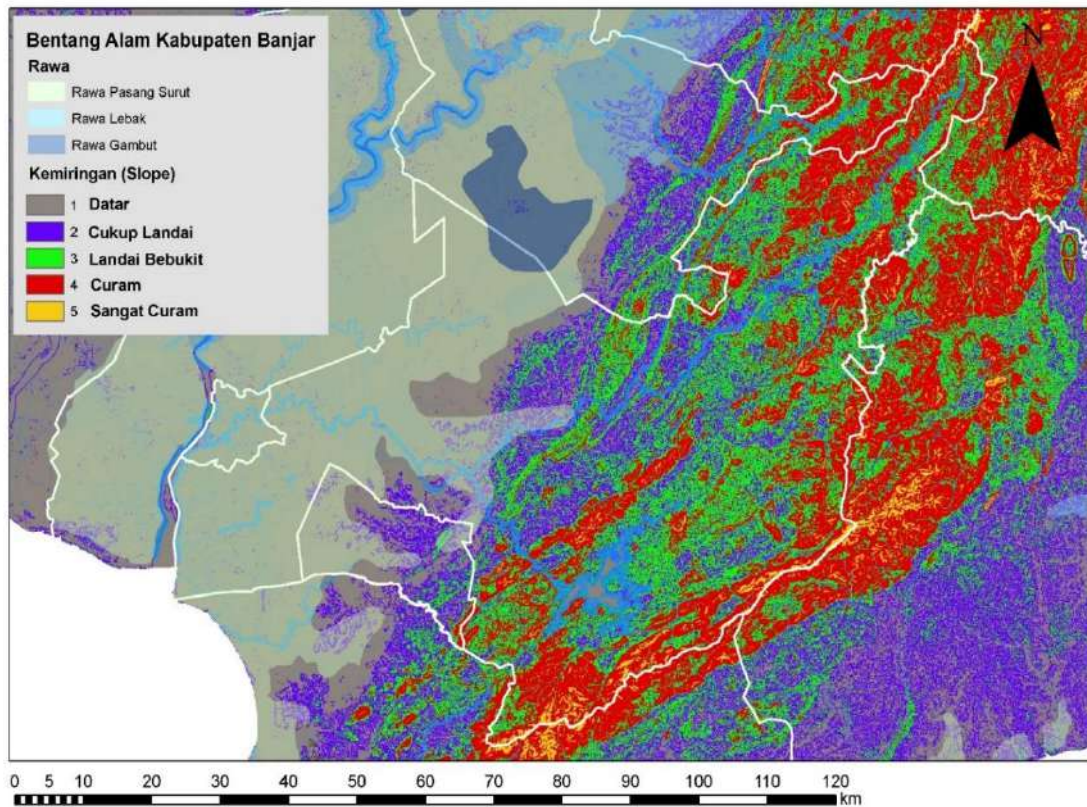
Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai letak strategis, yaitu perlintasan dari kabupaten di daerah hulu sungai menuju Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di antara provinsi di Pulau Kalimantan. Letak geografis Kabupaten Banjar berada di antara 114°30'20" sampai dengan 115°35'37" Bujur Timur dan pada 2°49'55" sampai dengan 3°43'38" Lintang Selatan. Luas wilayah dari Kabupaten Banjar adalah 4.668,50 km² atau sekitar 12,20% dari luas wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.2.1. Kondisi Topografi

Secara kondisi topografi, wilayah Kabupaten Banjar merupakan daerah daratan dan pegunungan yang memiliki ketinggian dari permukaan laut bervariasi yaitu antara 0 hingga 1.878 meter. Ketinggian dari suatu wilayah ini menjadi salah satu faktor yang memberikan penentu untuk letak kegiatan penduduk, juga digunakan sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha. Sebesar 35% berada pada ketinggian 0-7 m dpl, 55,54% pada ketinggian 50-300

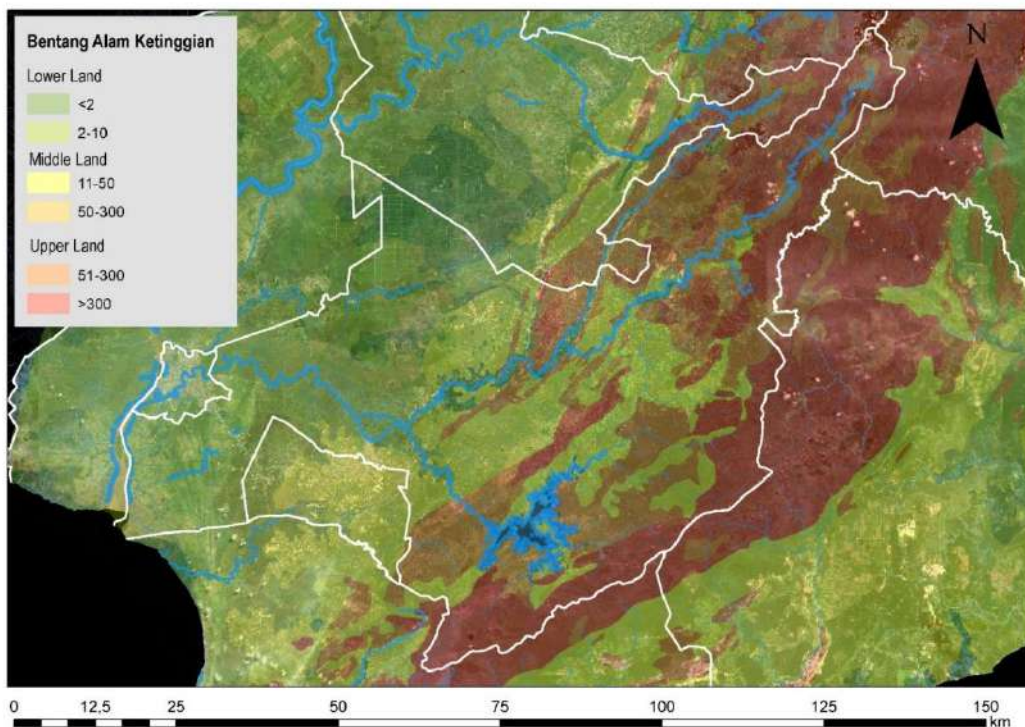
m dpl, dan sisanya sebesar 9,45% berada pada ketinggian lebih dari 300 m dpl. Kondisi topografi di Kabupaten Banjar beraneka ragam, tidak sepenuhnya wilayah di Kabupaten Banjar berada pada daerah dataran. Dapat dilihat pada Gambar 2. 3 berikut :

Gambar 2. 3. Kemiringan Kabupaten Banjar



Sumber : PUPR Kabupaten Banjar, 2020

Gambar 2. 4. Ketinggian Kabupaten Banjar



Sumber : PUPR Kabupaten Banjar, 2020

Sebelah utara dan timur dari Kabupaten Banjar merupakan daerah perbukitan dan pegunungan, sedangkan sebelah barat dan selatan merupakan daerah dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa. Kondisi tersebut mengakibatkan aliran air pada permukaan tanah kurang lancar. Sehingga sebesar 299,93% wilayah di Kabupaten Banjar selalu tergenang oleh air dan sebesar 0,58% wilayah lainnya tergenang air secara periodik.

2.1.2.2. Kondisi Klimatologi

Keadaan iklim di Kabupaten Banjar secara umum sama dengan daerah lain di tanah air, yaitu termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei sampai dengan Oktober) dan musim hujan (November sampai dengan sekitar bulan April). Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Secara spesifik, sesuai dengan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Banjarbaru, kondisi klimatologi Kabupaten Banjar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Keadaan Iklim Bulanan di Kabupaten Banjar Tahun 2020

Bulan	Rata-rata suhu Udara (°C)		Kelembaban Udara (%)		Tekanan Udara (Mb)		Kecepatan Angin (m/det)		Sinar Matahari (%)	Curah Hujan (mm3)
	Min	Mak	Min	Mak	Min	Mak	Min	Mak		
Januari	22,80	34,80	48,00	100,00	1000,20	1009,10	Calm	13,38	51,85	527,40
Februari	22,40	34,60	55,00	99,00	1000,20	1008,80	Calm	5,14	49,01	334,30
Maret	23,00	35,40	48,00	98,00	1000,40	1009,10	Calm	6,69	63,91	302,40
April	23,90	34,80	54,00	98,00	1000,70	1011,80	Calm	12,35	64,08	266,40
Mei	23,60	34,80	53,00	97,00	998,10	1008,90	Calm	6,69	70,40	138,00
Juni	23,40	33,60	54,00	99,00	999,90	10111,60	Calm	6,69	53,92	218,00
Juli	21,20	33,20	53,00	100,00	1000,00	1007,30	Calm	5,66	66,13	62,40
Agustus	21,40	34,60	45,00	100,00	1000,20	1009,70	Calm	7,20	73,59	57,20
September	21,00	34,80	44,00	100,00	999,10	1007,50	Calm	5,14	54,75	163,50
Oktober	22,00	34,80	45,00	100,00	998,70	1008,00	Calm	7,72	57,86	190,40
November	23,00	34,40	50,00	99,00	999,40	1009,00	Calm	5,66	57,76	282,10
Desember	21,90	33,00	57,00	99,00	1000,10	1023,00	Calm	8,75	38,15	554,40

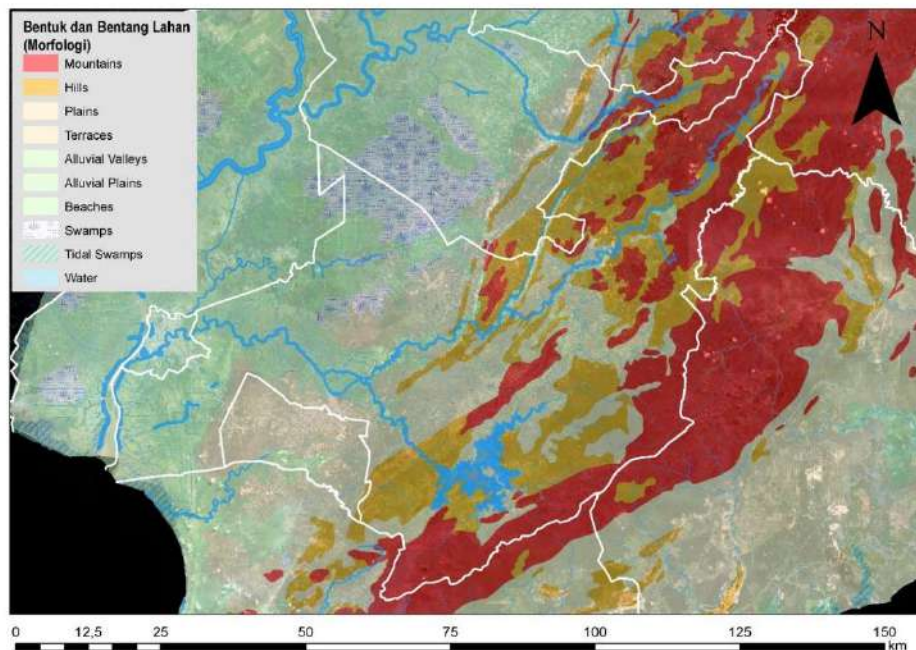
Sumber: BPS Kab. Banjar, 2021

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Banjar memiliki keadaan suhu dengan rata-rata kisaran minimum 27,5 derajat celcius pada bulan Desember dan kisaran maksimum 29,38 derajat celcius yang terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban udara terendah mencapai 44,00% dan maksimal 100,00%. Curah hujan di Kabupaten Banjar pada musim kemarau (Mei sampai dengan Oktober) paling rendah terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan 57,20 mm3. Pada musim hujan (Nopember sampai dengan sekitar bulan April) curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari dengan angka 572,40 mm3 dengan intensitas 25 hari hujan.

2.1.2.3. Kondisi Geologi

Secara umum, kondisi tanah di 77,62% wilayah Kabupaten Banjar memiliki tekstur halus yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sedangkan 14,93% wilayah lainnya memiliki tekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir. Selanjutnya untuk 5,39% wilayah bertekstur kasar yaitu pasir berlempung dan pasir berdebu. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Banjar mayoritas lebih besar dari 90 cm yaitu sebanyak 66,45%, sementara kedalaman 60–90 cm sebanyak 18,77%, dan 30–60 cm hanya sebanyak 14,83%. Menurut Peta Tanah eksplorasi tahun 1981 dengan skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor, di wilayah Kabupaten Banjar banyak ditemui jenis tanah yaitu tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran mencakup 3,72%. Selanjutnya untuk jenis tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran mencakup 14,29%. Lalu untuk jenis tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi instruksi mencakup 24,84 %. Serta untuk jenis tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf mencakup 28,57%.

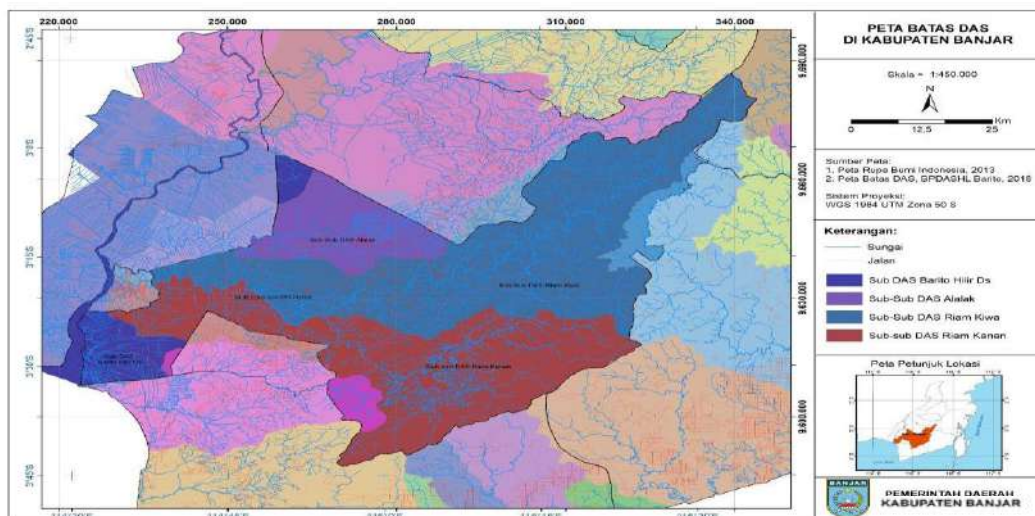
Gambar 2. 5. Peta Bentuk Lahan dan Bentang Alam (Morfologi) Kabupaten Banjar



Sumber : PUPR Kabupaten Banjar, 2020

2.1.2.4. Kondisi Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati oleh beberapa sungai besar dan juga sungai kecil. Beberapa sungai besar tersebut meliputi sungai Martapura, sungai Riam Kanan dan sungai Riam Kiwa. Kondisi hidrologi Kabupaten Banjar dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya oleh curah hujan, dan terdapat daerah rawa yang terdiri dari 3 bagian kedalaman, yaitu kedalaman air tanah 90cm (66,45%), kedalaman 60-90 (18,72%), dan kedalaman 30-60 (14,38%).



Gambar 2. 6. Daerah Rawa di Kabupaten Banjar

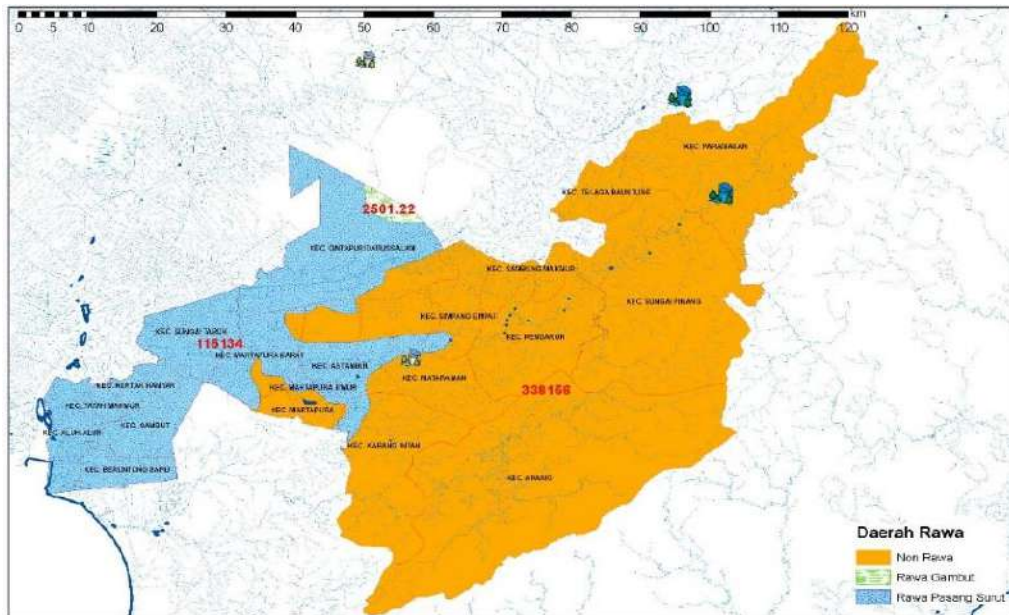
Sumber : PUPR Kabupaten Banjar, 2020

Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura Kabupaten Banjar mempunyai luas sekitar 453,88 km² atau 45.388 hektar, dengan sungai utamanya yang keluar dari sungai Riam Kanan melewati kota Martapura sepanjang 36.566 m, serta jika dihitung termasuk anak-anak sungainya mempunyai jumlah panjang 375,91 Km, sehingga tingkat kerapatan sungainya 0.828 km/km².

Beda tinggi dari Hulu ke Hilir adalah 8,00 m, sehingga diperoleh gradien sungai sebesar 0.022%. DAS Martapura adalah jenis DAS yang berbentuk paralel yang tersusun dari percabangan dua sub-DAS maupun sungai yang cukup besar di bagian hulu, tetapi menyatu

di bagian hilirnya. DAS Martapura adalah sub-DAS dari DAS Barito yang merupakan bagian dari WS (Wilayah Sungai) Barito.

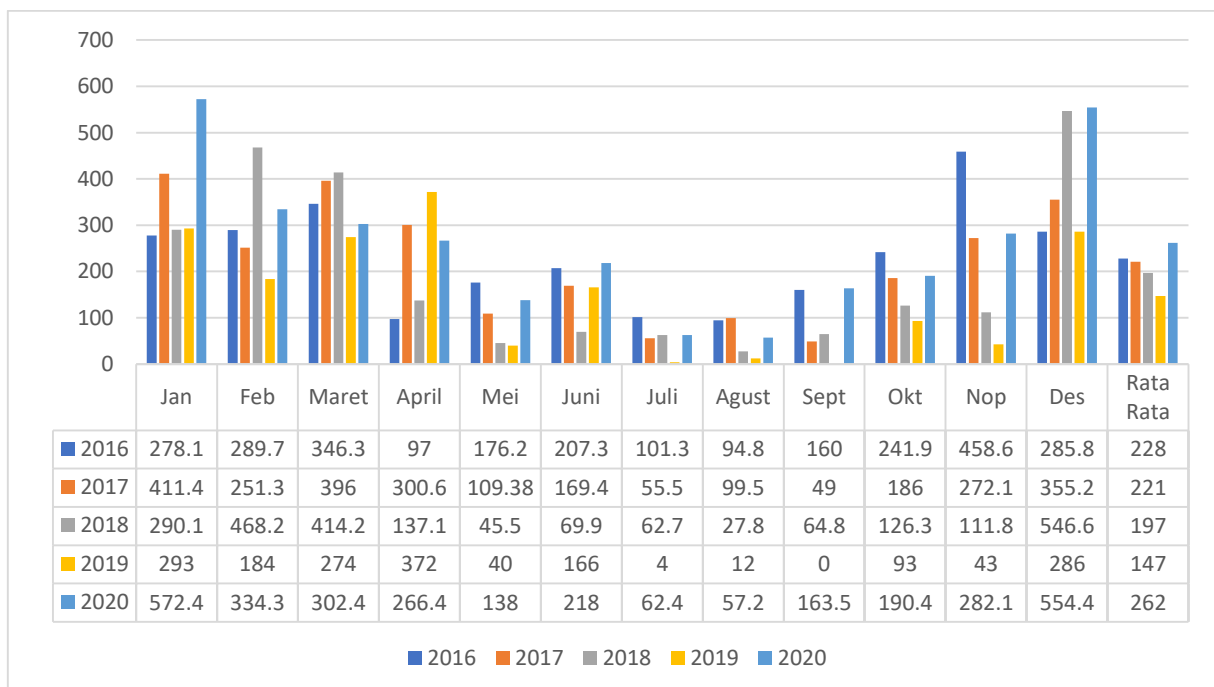
Gambar 2. 7. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Banjar



Sumber : PUPR Kabupaten Banjar, 2020

Pada Tahun 2020 di Kabupaten Banjar curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebanyak 28 hari hujan dengan jumlah curah hujan sebanyak 554,40 mm. secara kuantitas, curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sebanyak 572,40 mm dengan 25 hari jumlah hujan. Sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus dan Juli dengan curah hujan masing-masing sebanyak 11 dan 17 hari. Selama periode 2016-2020 curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember – Desember dan Januari hingga bulan April, rata-rata selama curah hujan diatas 200 mm per bulan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019 curah hujan rendah yaitu sebesar 147 mm, Lebih rinci sebagaimana Gambar 2. 8 berikut :

Gambar 2. 8. Gambar Curah Hujan di Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020

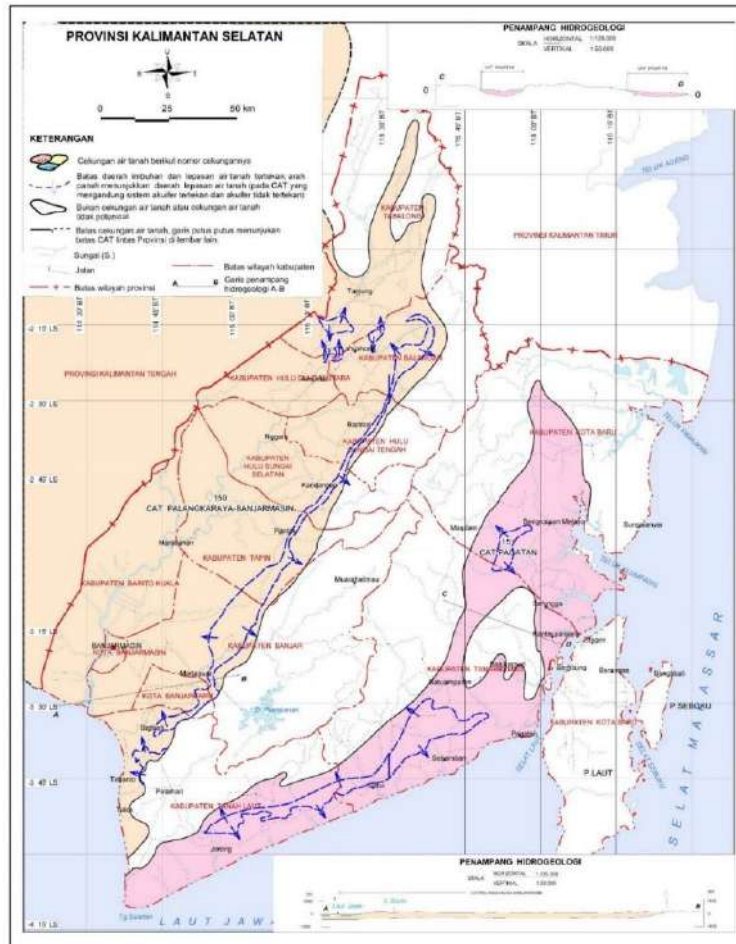


Sumber: BPS Kab. Banjar, 2017 – 2021 data diolah

Berdasarkan perhitungan dari dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Banjar, dapat dilihat bahwa wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Banjar memiliki sumber daya air tanah yang relatif cukup baik dengan cakupan area kategori sedang sebesar 79,41% atau sekitar 366.297,12 ha yang merupakan bagian dari wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Palangkaraya-Banjarmasin. Daerah bawahan (low land) Kabupaten Banjar sebagian bagian paling bawah dari morfologi gunung secara hidrogeomorfologi berfungsi sebagai daerah pencadangan air tanah (storage ground water) dan

daerah penurapan air tanah (discharge area) yang berperan sebagai cekungan hidrogeologi dengan akuifer yang potensial dan penyebaran luas

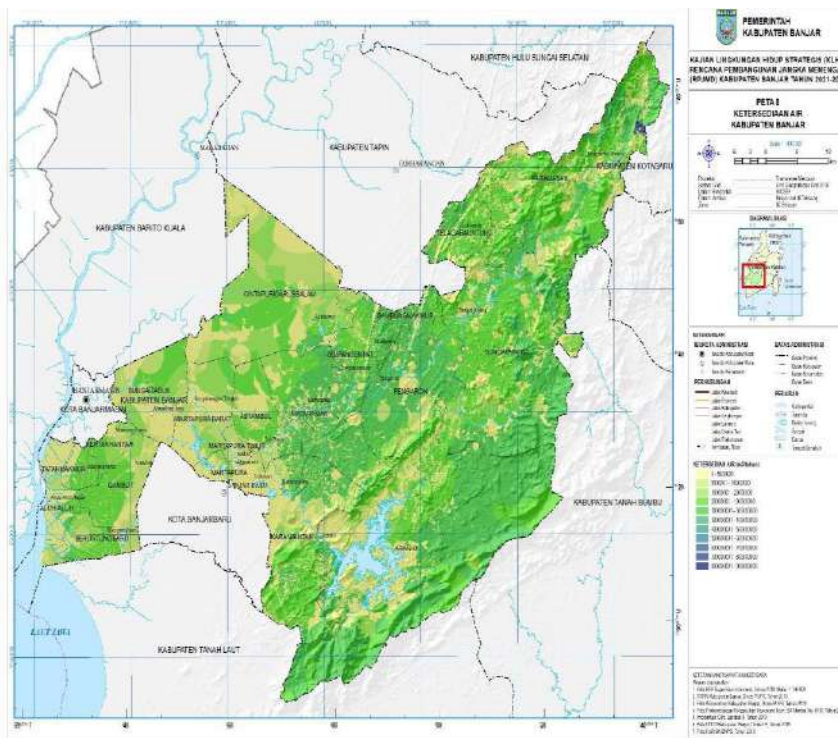
Gambar 2. 9. Sumber Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Banjar



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, 2019

Wilayah dengan penyedia air paling baik di Kabupaten Banjar didominasi kelas jasa lingkungan tinggi adalah Kecamatan Martapura Timur 71,65% atau seluas 1.607,3 ha. Sedangkan wilayah dengan pemurnian air yang buruk didominasi kelas jasa lingkungan rendah adalah Kecamatan Beruntung Baru yang didominasi kelas jasa lingkungan rendah 54,74% atau seluas 3.047,27 ha. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan – kebutuhan (supply – demand) diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki ketersediaan air terbesar di Kabupaten Banjar adalah Kecamatan Aranio ketersediaan sebesar 1.345.567.741 m³/tahun dengan jumlah rasio ketersediaan dan kebutuhan kecamatan ini mencapai 39,67. Artinya semakin besar rasio ketersediaan, maka potensi terjadinya kekurangan air tidak terjadi.

Gambar 2. 10. Peta Ketersediaan Air Kabupaten Banjar



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, 2019

2.1.2.5. Penggunaan Lahan

Data luas tutupan lahan di Wilayah Kabupaten Banjar pada tahun 2020 adalah luasan lahan untuk badan air, belukar, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, kebun campuran, rawa, padang rumput, sawah, dan tanah terbuka. Tutupan lahan Kabupaten Banjar dapat dilihat Tabel 2. 3 berikut:

Tabel 2. 3. Luas Tutupan Lahan Kabupaten Banjar

Jenis Tutupan Lahan	Luasan (Ha)	Persentase
Badan Air	10.903,75	2,36
Belukar	59.142,16	12,82
Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	152.336,70	33,02
Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan	92,55	0,02
Perkebunan/Kebun	146.421,82	31,74
Permukiman/Lahan Terbangun	11.556,05	2,51
Pertambangan	1.663,65	0,36
Pertanian Lahan Kering	6.622,50	1,44
Pertanian Lahan Kering campur semak/Kebun campur	2.909,84	0,63
Rawa	998,88	0,22
Savana/Padang Rumput	7.763,70	1,68
Sawah	54.970,56	11,92
Tanah Terbuka	5.903,91	1,28
Jumlah	461.286,08	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, 2019

Berdasarkan Tabel 2. 3 di atas, jenis tutupan lahan terbesar di Kabupaten Banjar pada tahun 2020 adalah hutan lahan kering sekunder yaitu sebesar 152.336,70 ha, diikuti oleh perkebunan yaitu sebesar 146.421,82 ha. Persentase luas hutan lahan sekunder di Kabupaten Banjar adalah sebesar 33,02%, sedangkan perkebunan adalah sebesar 31,74% dari luas wilayah Kabupaten Banjar.

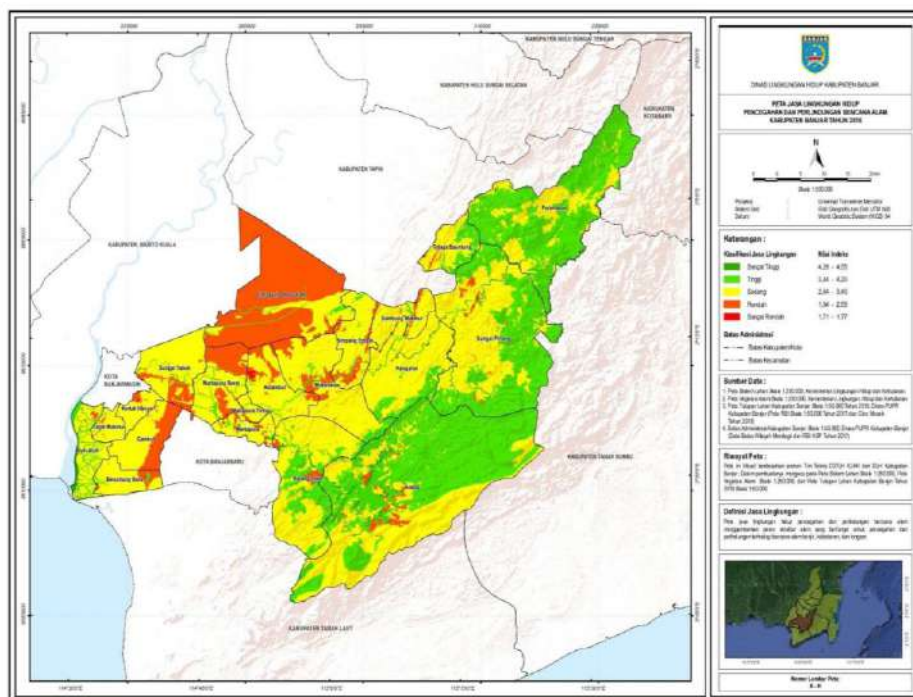
2.1.2.6. Risiko Dan Kerawanan Bencana

Kajian wilayah rawan bencana ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah Kabupaten Banjar terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Wilayah rawan bencana mengacu pada hasil kajian Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNBP) tahun 2018.

Peta yang digunakan adalah peta risiko bencana. Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (*overlay*) peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah.

Pemetaan risiko multi bahaya dipersiapkan untuk mengkaji risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan penggabungan hasil kajian peta risiko untuk setiap sejenis bencana. Pemetaan risiko multi bahaya dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi di daerah. Penentuan indeks risiko multi bahaya dilakukan berdasarkan analisis penggabungan nilai indeks bahaya untuk semua jenis bahaya, nilai indeks kerentanan untuk semua jenis bahaya, dan nilai indeks kapasitas untuk semua jenis bahaya.

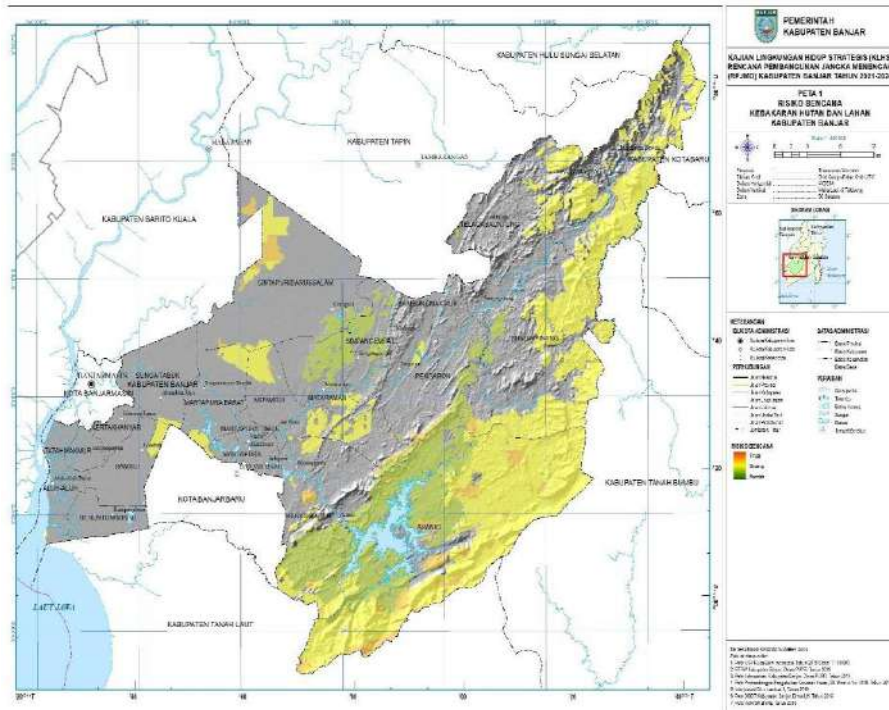
Gambar 2. 11. Peta Jasa Lingkungan Hidup Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam Kabupaten Banjar



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, 2018

Selanjutnya berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan analisis khusus untuk daerah Kabupaten Banjar, dimana di wilayah ini memiliki potensi risiko bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan khusus multi bencana sebagaimana disajikan pada Gambar dibawah ini.

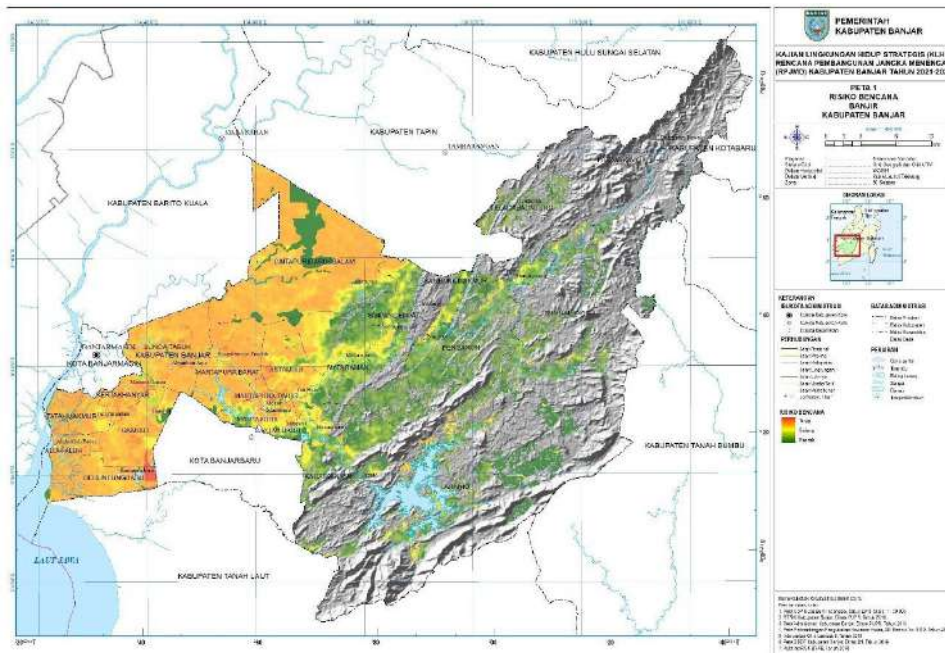
Gambar 2. 12. Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Banjar



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Banjar, 2020

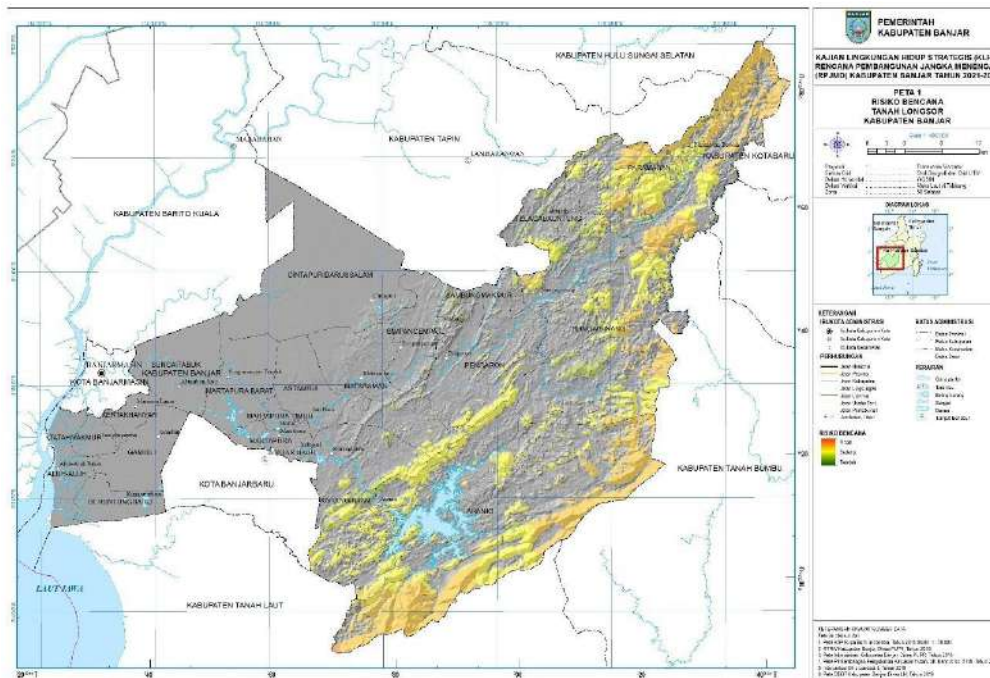
Banjir masih menjadi potensi bencana yang cukup besar di daerah Kabupaten Banjar yang hampir terdapat di semua kecamatan. Kebakaran hutan di sebagian kecamatan juga menjadi ancaman bagi Kabupaten Banjar. Untuk itu perlu kewaspadaan dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir dampak risiko dari bencana tersebut.

Gambar 2. 13. Rawan Bencana Banjir Kabupaten Banjar



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Banjar, 2020

Gambar 2. 14. Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Banjar



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Banjar, 2020

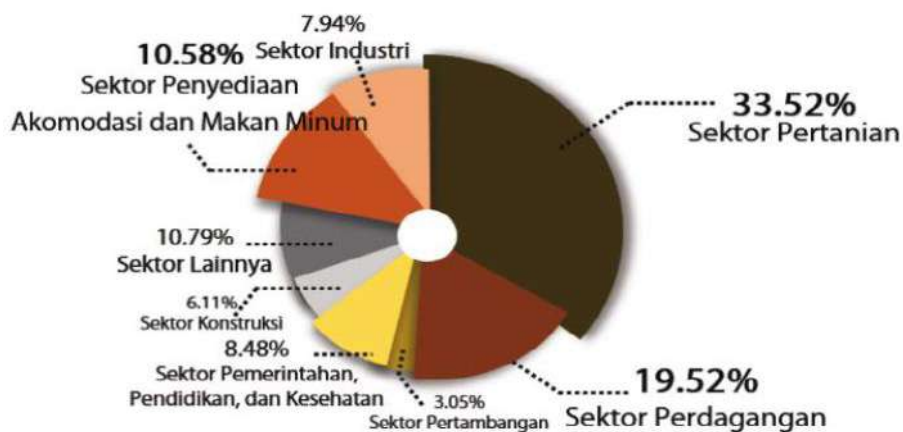
Di Kabupaten Banjar terdapat 4 potensi bencana yang biasa terjadi yang tersebar di beberapa wilayah antara lain:

- 1) Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, dan Kecamatan Sungai Pinang.
- 2) Kawasan rawan banjir (ROB) terdapat di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, dan Aluh-Aluh.
- 3) Kawasan rawan kebakaran terdapat di Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Gambut.
- 4) Kawasan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Martapura dan Beruntung Baru.

2.1.2.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu yang berorientasi pada proses penentuan potensi daerah yang dimiliki suatu berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah daerah tersebut terutama yang memiliki potensi sumber daya yang ada terutama yang berasal dari alam yang dimiliki daerah. Karakteristik utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah penekanan pada pembangunan endogen yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, daerah untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2. 15. Persentase Pekerjaan Penduduk berdasarkan bidang sektor

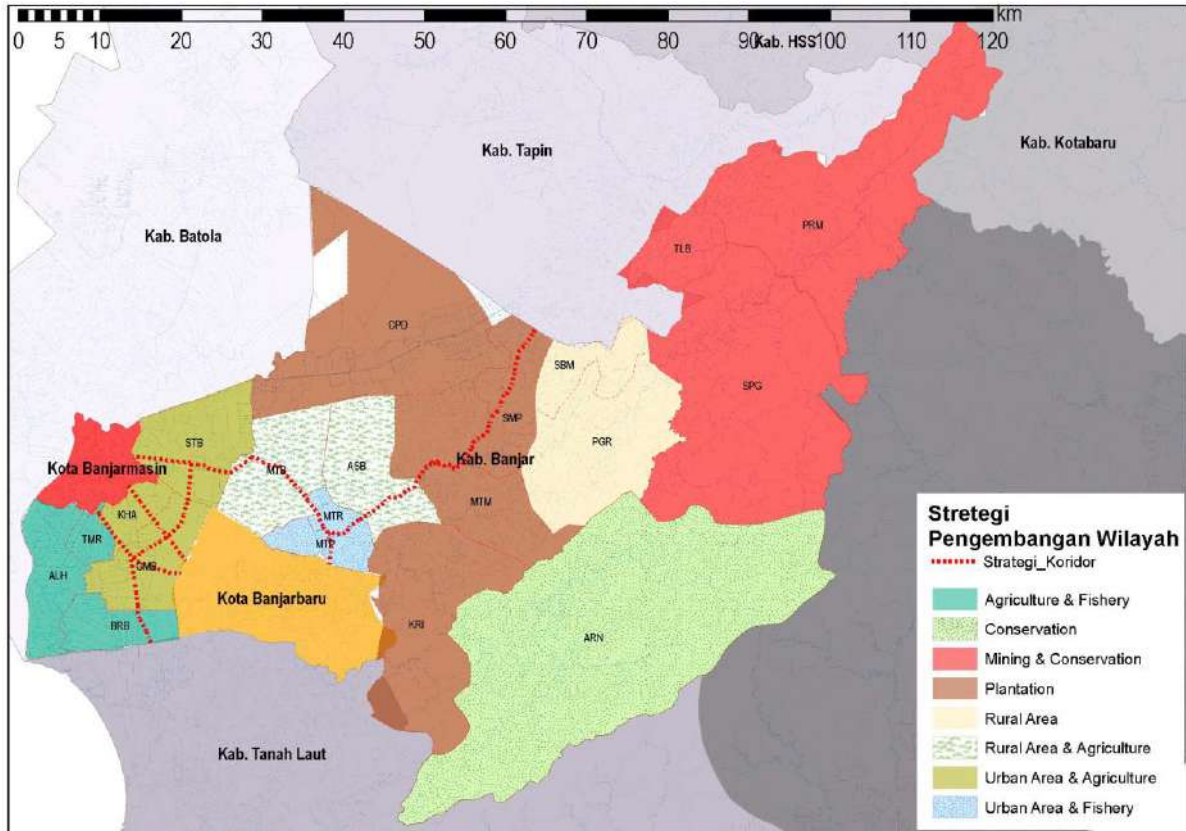


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Sektor yang dapat menjadi sektor unggulan Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan dan perikanan 33,5%, sektor perdagangan 19,52% dan Sektor

akomodasi dan makan minum 10,58% (pariwisata). Dengan tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal untuk membangun daerah demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan penataan ruang dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Gambar 2. 16. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Banjar



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Banjar, 2020

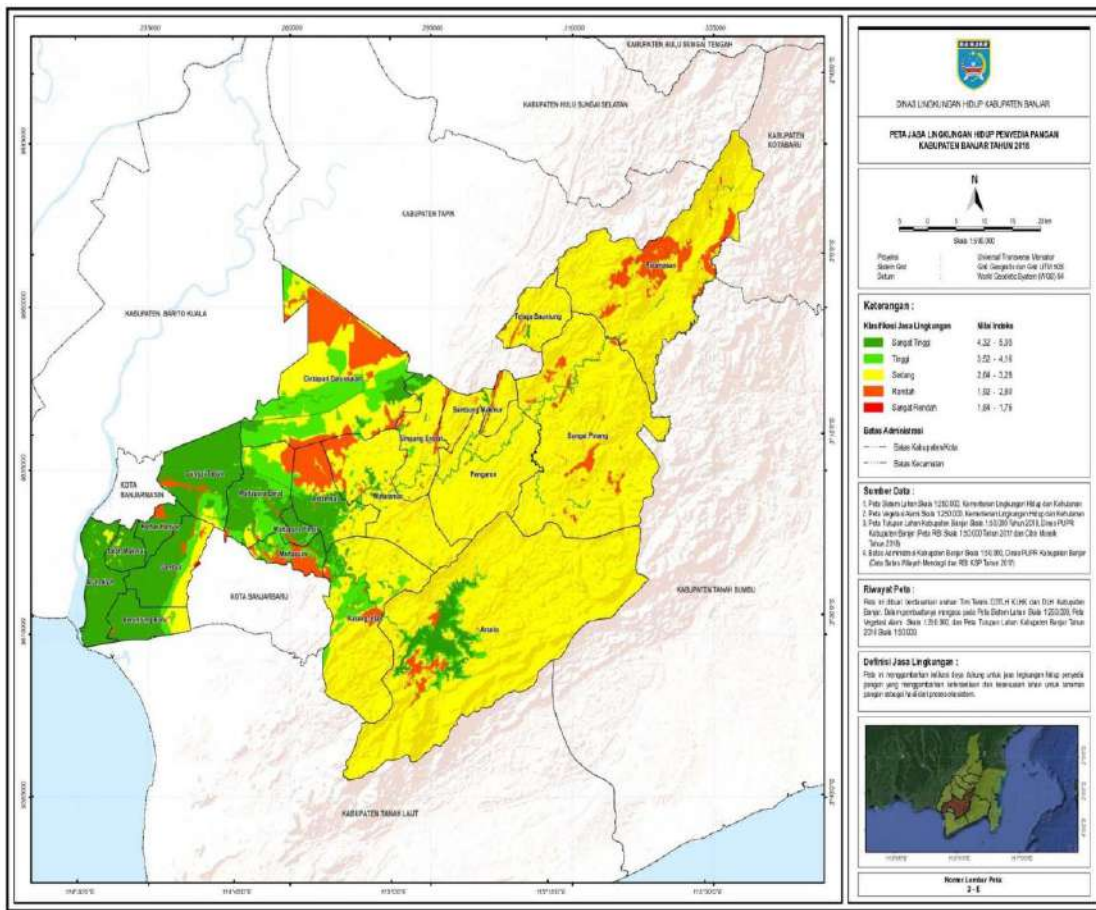
Serta ditinjau dari kondisi geografis, potensi sektor pertanian dalam arti luas, potensi perdagangan dan potensi pariwisata Kabupaten Banjar. Pembangunan harus memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia dimana nantinya perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar harus lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan tersebut.

1) Potensi Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Banjar sendiri terdiri dari dua sub. sektor yaitu pangan (padi) dan sub. sektor hortikultura Unggulan (Jeruk, Pisang, Durian dan Cabe). Dimana komoditas tersebut juga di perlukan untuk menunjang kedaulatan pangan baik secara nasional maupun daerah terutama pangan (padi). Sektor pertanian pangan dan hortikultura Kabupaten Banjar ini juga di dukung oleh adanya UPTD Penyuluh, UPTD Alsintan dan Balai Benih.

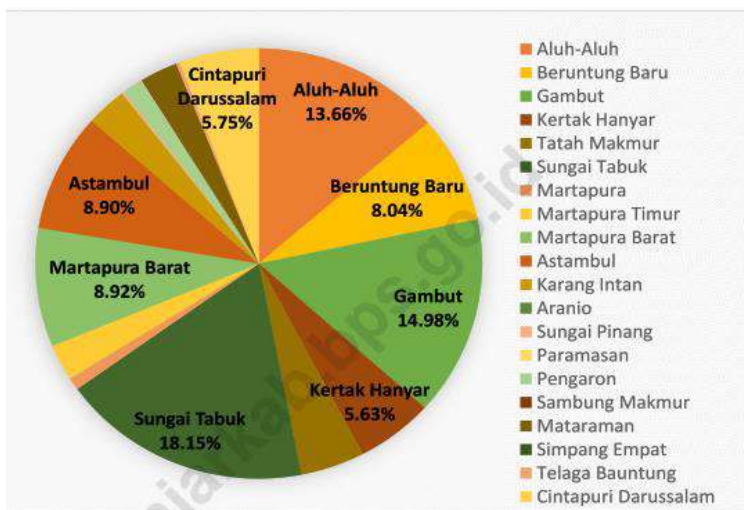
Potensi pertanian di kabupaten Banjar dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 17. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Banjar



Sumber: Dinas LH Kabupaten Banjar

Gambar 2. 18. Persentase Luas Lahan Sawah di Kabupaten Banjar



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

2) Potensi Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sektor dalam sektor pertanian dan menjadi salah satu penunjang kedaulatan pangan baik secara nasional maupun daerah. Salah satu ciri negara yang berdaulat dan mandiri adalah memiliki kedaulatan pangan yang kuat. Untuk menunjang pencapaian sasaran tersebut maka pembangunan sektor perikanan perlu dilakukan secara serius, terencana dan lebih terarah sehingga menjadi tepat sasaran.

Perhatian terhadap pengembangan perikanan diimplementasikan melalui dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Harapan dari dampak kebijakan yang telah dilakukan adalah peningkatan kemandirian masyarakat perikanan,

peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penunjang kedaulatan pangan daerah.

Pembangunan bidang perikanan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Dengan mempertimbangkan Kabupaten Banjar yang memiliki potensi budidaya ikan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar dengan luas lahan kawasan Minapolitan sebesar 5.091 ha, Balai benih ikan, unit pengolahan ikan, dan potensi budidaya air payau sebesar 713 ha.

Kabupaten Banjar produksi perikanan budidaya yang memang lebih menonjol dengan wadah budidaya yang dominan adalah kolam dan jala apung. Dan dengan jenis ikan patin 33.717,8 ton, nila 14.377,15 ton, lele 2.221,5 ton, ikan mas 1.052,9 ton, bawal dan lain-lain 1.746,5 ton yang tersebar yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 4. Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2020

Kecamatan	Produksi (Ton)
Aluh-Aluh	435,3
Beruntung Baru	34,65
Gambut	9,6
Kertak Hanyar	6,8
Tatah Makmur	24,4
Sungai Tabuk	19,6
Martapura	20682,6
Martapura Timur	6,3
Martapura Barat	19492,6
Astambul	1,5
Karang Intan	5819,2
Aranio	6306,9
Sungai Pinang	3,5
Paramasan	-
Pengaron	6,2
Sambung Makmur	0,9
Mataraman	40,8
Simpang Empat	105,4
Telaga Bauntung	5,8
Cintapuri Darussalam	13,7
Jumlah	53 115,9

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

3) Potensi Peternakan

Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya perikanan dalam hal ini pun sektor peternakan merupakan salah satu sektor dalam sektor pertanian dan menjadi salah satu penunjang kedaulatan pangan baik secara nasional maupun daerah. Dan pada saat pandemi covid-19 pun sektor peternakan masih memiliki angka pertumbuhan PDRB positif yaitu 0,50%. Dan pada saat terjadinya bencana banjir pada awal tahun 2021 di Kabupaten Banjar tidak mengalami kerugian yang besar.

Di Kabupaten Banjar pun sudah terbentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Sehingga terciptanya suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar.

Peternakan di Kabupaten Banjar juga sudah di dukung dengan adanya Rumah Potong Hewan (RPH) untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas dan Pusat Kesehatan Hewan. Dengan adanya Rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Banjar ini setidaknya dapat mengurangi kegiatan ternak yang dipotong diluar Rumah Potong Hewan (RPH). Sehingga terjaganya mutu protein yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Banjar dan juga dapat mencegah pemotongan ternak besar serta kecil yang berjenis kelamin betina jadi angka populasi ternak pun dapat dijaga. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5. Jumlah ternak yang dipotong di luar Rumah Potong Hewan (RPH) Martapura Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, 2020

Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing
Aluh-Aluh	28	-	3
Beruntung Baru	-	-	-
Gambut	74	-	5
Kertak Hanyar	154	-	12
Tatah Makmur	69	-	3
Sungai Tabuk	60	-	-
Martapura	654	-	36
Martapura Timur	121	-	12
Martapura Barat	47	-	3
Astambul	86	-	9
Karang Intan	154	-	5
Aranio	46	1	-
Sungai Pinang	18	-	20
Paramasan	-	-	-
Pengaron	68	-	-
Sambung Makmur	63	-	-
Mataraman	41	-	19
Simpang Empat	5	-	-
Telaga Bauntung	7	-	-
Cintapuri Darussalam	9	-	2
JUMLAH	1 704	1	129

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Tabel 2. 6. Jumlah hewan yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Martapura Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, 2020

Jenis Hewan	Jumlah
Sapi	1 782
Kerbau	220
JUMLAH	1 704

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Sampai dengan tahun 2020 jumlah populasi ternak besar (sapi 18.867 ekor, kerbau 2.375 ekor, kuda 20 ekor), ternak kecil (kambing 11.536 ekor, domba 44 ekor) dan ternak unggas (Ayam Ras Petelur 130.680 ekor, Ayam Ras Pedaging 17.161.916 ekor, Ayam Buras 1.140.502 ekor, Itik 391.380 ekor) yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Banjar. Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka, 2021. Sehingga produksi telur susu daging dan kulit menurut jenis untuk Kabupaten Banjar dapat terpenuhi.

4) Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan di Kabupaten banjar hasil produksinya bertahan dan cenderung meningkat adalah Kelapa Sawit 959 ton, karet 18. 186,64 ton, dan yang sedang di kembangkan kopi 467,68 ton. Dilihat dari penanganan akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian yang sedang di kembangkan mutu hasil produksinya di Kabupaten Banjar yaitu karet/ lateks menjadi karet sheet dan Kopi Pengaron serta kopi Aranio yang akan menjadi brand kopi lokal Kabupaten Banjar. Untuk mendukung sektor potensial pertanian dalam arti luas yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan dan perikanan. Kedepannya akan dilakukan beberapa pembangunan atau kebijakan seperti, pengembangan UPTD penyuluhan, UPTD Alsintan, balai benih ikan/tanaman, Agrowisata berbasis teknologi pertanian, Food Estate untuk mendukung kemandirian pangan, meningkatnya jumlah petani milenial dan penguatan bantuan sarana dan prasarana pertanian bagi petani yang potensial untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

5) Potensi Perdagangan

Potret dari struktur perekonomian Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan memiliki kontribusi terbesar ketiga setelah kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan dengan total kontribusi sebesar 14,25 persen di tahun 2017. Besarnya postur perdagangan ini turut didorong oleh aktivitas yang terjadi di kategori pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur.

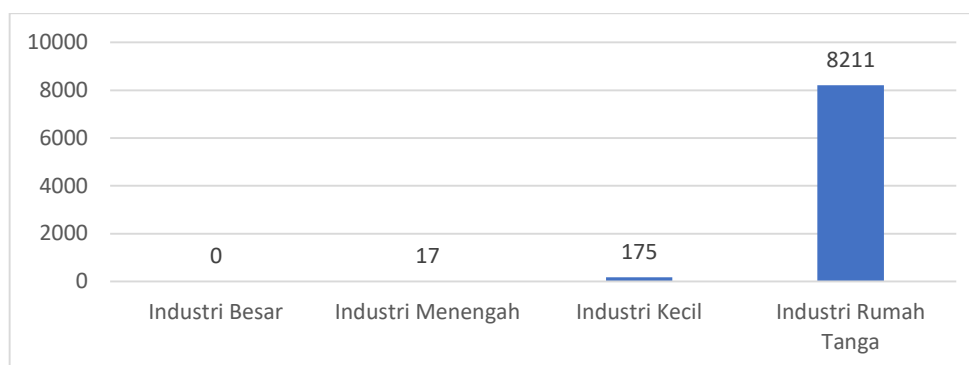
Kategori ini juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja yang cukup besar bagi penduduk kabupaten banjar, tercatat ada sebanyak 71.609 orang atau 24,91 persen yang

bekerja disektor ini, merupakan penyedia lapangan kerja terbesar kedua setelah kategori pertanian. Selain itu perdagangan juga berfungsi sebagai sarana pendistribusian barang/jasa kebutuhan pokok bagi masyarakat.

6) Potensi Perindustrian

Letak Kabupaten Banjar yang cukup strategis, yaitu di sebelah utara Kota Banjarmasin dan dikelilingi oleh 7 Kabupaten/Kota di sekitar Kalimantan Selatan yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah, menjadikan daerah Kabupaten Banjar mempunyai daya tarik tersendiri untuk menjadi pusat industri di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 565.635 jiwa pada tahun 2020, direncanakan untuk menjadi salah satu kota metropolitan.

Gambar 2. 19. Jumlah Industri di Kabupaten Banjar 2020.



Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka, 2021

Berdasarkan pada data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, jumlah perusahaan industri tahun 2020 yang ada sebanyak 8.403 perusahaan, jumlah ini berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 10.085 buah. Sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang diserap dengan total 18.741 tenaga kerja, jumlah perusahaan industri tersebut terdiri dari 12 industri sedang, 175 industri kecil dan 8211 industri rumah tangga.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan pada jenis industri, terdiri dari industri makanan, minuman dan tembakau sebanyak 2696 buah; industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit sebanyak 677 buah; industri kayu dan hasil barang dari kayu sebanyak 304 buah; industri kertas, barang dari kertas dan percetakan berjumlah 104 buah; industri kimia, karet, dan plastik sebanyak 808 buah; industri barang galian bukan logam sebanyak 2674; industri bahan dasar dari logam sebanyak 418 buah; industri barang logam dan mesin sebanyak 733 buah; serta industri lain dengan jumlah 591 buah.

Berdasarkan data dibawah ini dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah Industri Sedang adalah kecamatan Karang Intan dengan 10 perusahaan dan Industri Kecil terdapat di Kecamatan Martapura dengan 87 Perusahaan dan Industri Rumah Tangga tertinggi di wilayah kecamatan Martapura dengan jumlah 2.077 Industri, dengan adanya potensi industri di daerah Kabupaten Banjar di berbagai sektor harusnya menjadikan kegiatan industri dapat mendukung perekonomian daerah untuk bangkit dari adanya pandemi Covid-19

Tabel 2. 7. Jumlah Industri Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banjar 2020

Kecamatan	Industri Besar	Industri Menengah	Industri Kecil	Industri Rumah Tangga
Aluh-Aluh	-	-	9	377
Beruntung Baru	-	-	1	158
Gambut	-	3	12	416
Kertak Hanyar	-	2	43	524
Tatah Makmur	-	-	-	58
Sungai Tabuk	-	-	14	894
Martapura	-	1	87	2077
Martapura Timur	-	1	12	1202
Martapura Barat	-	-	2	835
Astambul	-	-	6	473
Karang Intan	-	10	4	206
Aranio	-	-	1	71
Sungai Pinang	-	-	-	37

Kecamatan	Industri Besar	Industri Menengah	Industri Kecil	Industri Rumah Tangga
Paramasan	-	-	-	32
Pengaron	-	-	3	505
Sambung Makmur	-	-	-	62
Mataraman	-	-	1	513
Simpang Empat	-	-	3	190
Telaga Bauntung	-	-	-	10
Cintapuri Darussalam	-	-	-	150
Jumlah	-	17	198	8 790

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Sebelumnya, tingginya jumlah kasus sengketa industrial yang terjadi pada tahun 2020 adalah merupakan dari dampak pandemi yang terjadi di awal tahun 2020, yang menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebanyak 21 kasus perusahaan melakukan PHK massal terhadap karyawannya pada tahun 2020 dan angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 7 kasus. pemerintah daerah perlu menangani permasalahan tersebut dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan ke perusahaan untuk pencegahan kasus hubungan industrial dan memfasilitas penyelesaian pihak yang bersengketa dengan mekanisme bipartit dan mediasi serta melakukan pembinaan dan penyuluhan di perusahaan.

7) Potensi Pertambangan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dikenal dengan produsen intan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, sampai dengan tahun 2020 terdapat 22 perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Banjar yang terdaftar. Kegiatan pertambangan ini menyumbangkan 13,50 % distribusi PDRB Kabupaten Banjar dan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Kegiatan pendulangan dan penggosokan intan, salah satunya dapat ditemui di Kota Martapura, yaitu salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Banjar. Selain dikenal dengan potensi tambang intan, Provinsi Kalimantan Selatan juga dikenal dengan potensi tambang batubara, termasuk di daerah Kabupaten Banjar yang terdapat perusahaan batubara sebanyak 55 perusahaan. Kabupaten Banjar juga terdapat endapan kaolin paling banyak di Provinsi Kalimantan Selatan.

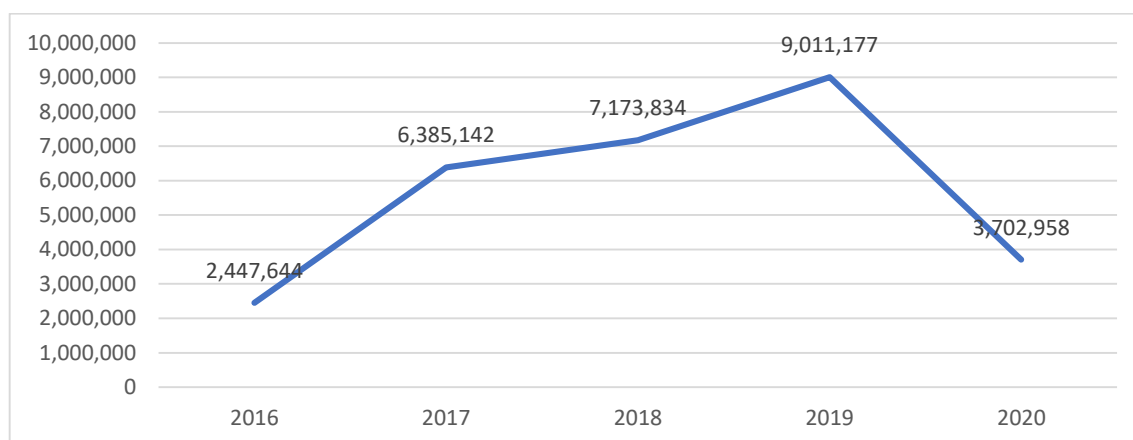
Walaupun menjadi salah satu dalam tiga kategori lapangan usaha unggulan di Kabupaten Banjar namun untuk pekerjanya hanya sebesar 3,05%, hal ini mengindikasikan bahwa pertambangan termasuk industri padat modal. Besarnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Banjar tersebut terdorong karena aktivitas niaga ekspor komoditas penting seperti batubara, kelapa sawit, dan karet. Selain itu, perdagangan di Kabupaten Banjar juga didorong oleh aktifnya kegiatan di kategori lapangan usaha konstruksi. Kontribusi diperkirakan akan meningkat di tahun 2021 karena pengaruh peningkatan kinerja produksi di pertanian dan pertambangan serta pemulihan pasca banjir yang terjadi di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar.

8) Potensi Pariwisata

Kepariwisata Kabupaten Banjar lebih diarahkan pada kegiatan pembenahan potensi dan produk wisata yang bernuansa Islam, Budaya dan Alam atau nature. Hal ini sesuai dengan karakteristik Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah dan Kota Intan. Destinasi Wisata yang dikembangkan di Kabupaten Banjar adalah pesona wisata Budaya dan Alam yang menawarkan keberagaman dan karakteristik budaya serta keindahan alam yang menantang serta mempesona. Pesona wisata tersebut tersebar di daerah Kabupaten Banjar yang merupakan modal dasar dan potensi besar dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan dan perlu didayagunakan secara efektif dalam rangka menuju Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis. Dalam Rencana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2034 ditetapkan kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri dari wisata alam sejumlah 17 Objek Destinasi dan Tujuan Wisata (ODTW), wisata belanja dengan 2 ODTW dan wisata budaya & cagar budaya sejumlah 35 ODTW. Sementara itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan Kabupaten Banjar sebagai kawasan strategis dalam peningkatan jumlah kunjungan wisata Kalimantan Selatan dengan pengembangan destinasi wisata pada beberapa ODTW yang ada di Kabupaten Banjar yang terdiri dari Taman Hutan

Raya Sultan Adam, Lembang Kahung, Air Terjun Mandin Mangapan, Waduk Riam Kanan, Makam Datuk Kalampayan, Pasar Terapung Lok. Baintan, Masjid Al Karomah, Keraton Banjar dan Makam Sultan Adam.

Gambar 2. 20. Jumlah wisatawan pada tahun 2016-2020.



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Potensi Pariwisata di Kabupaten Banjar dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang di wilayah tersebut pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan adalah sebesar 6.385.142, tahun 2018 tercatat sejumlah 7.173.834 orang dan pada tahun 2019 tercatat sejumlah 9.011.177 orang dan merupakan jumlah wisatawan tertinggi selama tahun 2019. Tahun 2020 jumlah wisatawan menurun drastis selama 4 tahun terakhir di titik terendah yaitu berada pada angka 3.702.958.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya di Kabupaten Banjar yang ikut terdampak di segala sektor, termasuk pariwisata yang mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. jumlah wisatawan di Kabupaten Banjar pada tahun 2020 adalah sebesar 3.702.958 orang, berkurang sebesar 5.308.219 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan pada data Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Banjar berjumlah 565.635 jiwa yang terdiri dari 285.885 jiwa penduduk laki-laki dan 279.750 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Banjar terjadi sebesar 1,07%. Untuk tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Kecamatan Gambut sebesar 2,14%, Martapura sebesar 1,73%, dan Kertak Hanyar sebesar 1,52%. Sedangkan tingkat kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Simpang Empat yang mencapai -3,25% per tahun.

Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aluh-Aluh	28.588,00	30.370,00	30.815,00	28.592,00	28.363,00
Beruntung Baru	13.946,00	14.559,00	14.742,00	14.813,00	14.254,00
Gambut	7.043,00	40.736,00	41.398,00	41.513,00	44.751,00
Kertak Hanyar	38.350,00	44.509,00	45.242,00	39.120,00	45.489,00
Tatah Makmur	12.273,00	12.442,00	12.638,00	12.380,00	12.545,00
Sungai Tabuk	59.710,00	63.041,00	63.863,00	59.710,00	64.890,00
Martapura	109.266,00	115.828,00	117.898,00	117.325,00	121.153,00
Martapura Timur	32.896,00	32.115,00	32.516,00	29.499,00	29.370,00
Martapura Barat	17.753,00	18.570,00	18.764,00	19.019,00	18.833,00
Astambul	37.075,00	36.334,00	36.720,00	35.313,00	34.531,00
Karang Intan	34.459,00	34.415,00	34.849,00	35.064,00	34.912,00
Aranio	6.684,00	9.410,00	9.578,00	9.305,00	8.982,00
Sungai Pinang	10.231,00	16.734,00	16.990,00	14.275,00	13.938,00
Paramasan	4.512,00	5.289,00	5.438,00	3.708,00	3.755,00

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengaron	18.061,00	17.668,00	17.871,00	16.251,00	16.557,00
Sambung Makmur	11.388,00	13.068,00	13.315,00	11.388,00	11.841,00
Mataraman	26.547,00	25.994,00	26.282,00	25.715,00	24.586,00
Simpang Empat	26.585,00	37.000,00	26.819,00	22.987,00	22.927,00
Telaga Bauntung	3.327,00	3.491,00	3.538,00	3.261,00	3.322,00
Cintapuri Darussalam	-	-	10.750,00	11.026,00	10.636,00
JUMLAH	563.062,00	571.573,00	580.026,00	550.264,00	565.635,00

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Banjar di tahun 2020 mencapai 121,16 jiwa per km². Kepadatan penduduk tingkat kecamatan Kabupaten Banjar paling tinggi terjadi di Kecamatan Martapura yaitu sebesar 2.883 jiwa per km², kemudian terdapat Kecamatan Kertak Hanyar sebesar 993 jiwa per km², serta Kecamatan Martapura Timur sebesar 979 jiwa per km². Sedangkan wilayah kecamatan Kabupaten Banjar yang memiliki jumlah kepadatan penduduk paling jarang adalah Kecamatan Paramasan sebesar 7 jiwa per km², kemudian Kecamatan Aranio sebesar 8 jiwa per km², dan juga Kecamatan Telaga Bauntung yang hanya sebesar 21 orang per km².

Tabel 2. 9. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2020

Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Aluh-Aluh	82,48	28.363	344
Beruntung Baru	61,42	14.254	232
Gambut	129,30	44.751	346
Kertak Hanyar	45,83	45.489	993
Tatah Makmur	35,47	12.545	354
Sungai Tabuk	147,3	64.890	441
Martapura	42,03	121.153	2883
Martapura Timur	29,99	29.370	979
Martapura Barat	149,38	18.833	126
Astambul	216,50	34.351	160
Karang Intan	215,35	34.912	162
Aranio	1.166,35	8.982	8
Sungai Pinang	458,65	13.938	30
Paramasan	560,85	3.755	7
Pengaron	433,25	16.557	38
Sambung Makmur	134,65	11.841	88
Mataraman	148,40	24.596	166
Simpang Empat	141,10	22.927	162
Telaga Bauntung	158,00	3.322	21
Cintapuri Darussalam	312,20	10.636	34
JUMLAH	4668,50	565 635	121

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

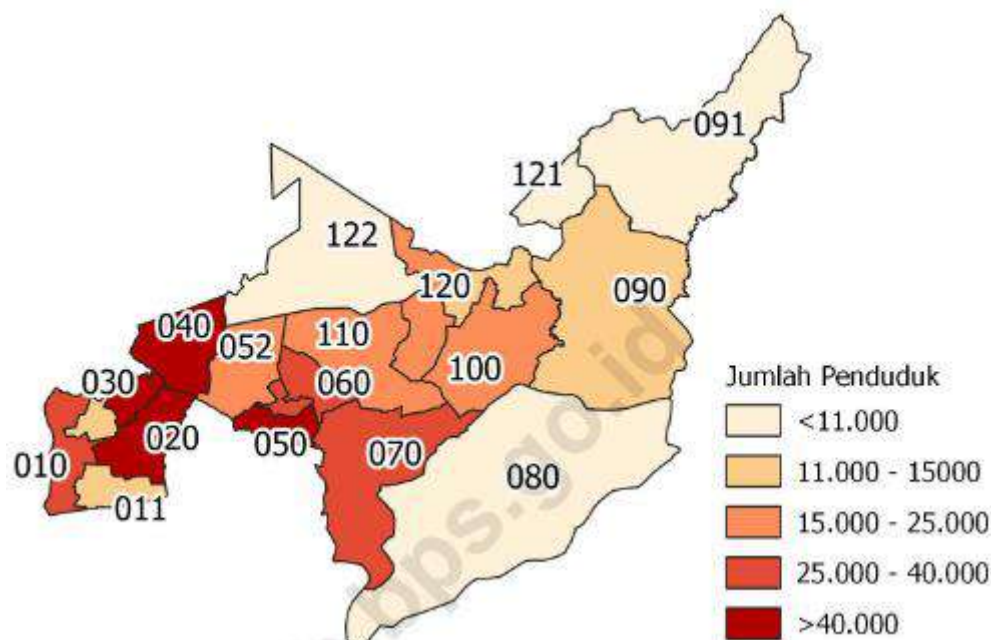
Tabel 2. 10. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Aluh-Aluh	14.684	14.169	28.853	348
Aranio	4.795	4.448	9.243	8
Astambul	18756	18259	37015	171
Beruntung Baru	7104	6927	14031	228
Cintapuri Darussalam	5.652	5.393	11.045	47,87
Gambut	20.574	20.532	41.106	318
Karang Intan	17.343	16.939	34.282	5.550
Kertak Hanyar	19728	19537	39265	857
Martapura Barat	9369	9193	18.562	128

Kecamatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Martapura	55.506	57.393	112.899	2.686
Martapura Timur	17.457	15.059	32.516	1.084
Mataraman	13047	12761	25808	173,91
Paramasan	2373	2117	4490	8,01
Pengaron	8212	7849	16061	37,07
Sambung Makmur	5677	5477	11154	82,84
Simpang Empat	13141	13444	26585	109,25
Sungai Pinang	8222	7869	16091	41,86
Sungai Tabuk	30397	29336	52675	357,60
Tatah Makmur	6267	6130	12397	349,51
Telaga Bauntung	1730	1667	3393	33,73

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Banjar, 2020

Gambar 2. 21. Peta Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2020

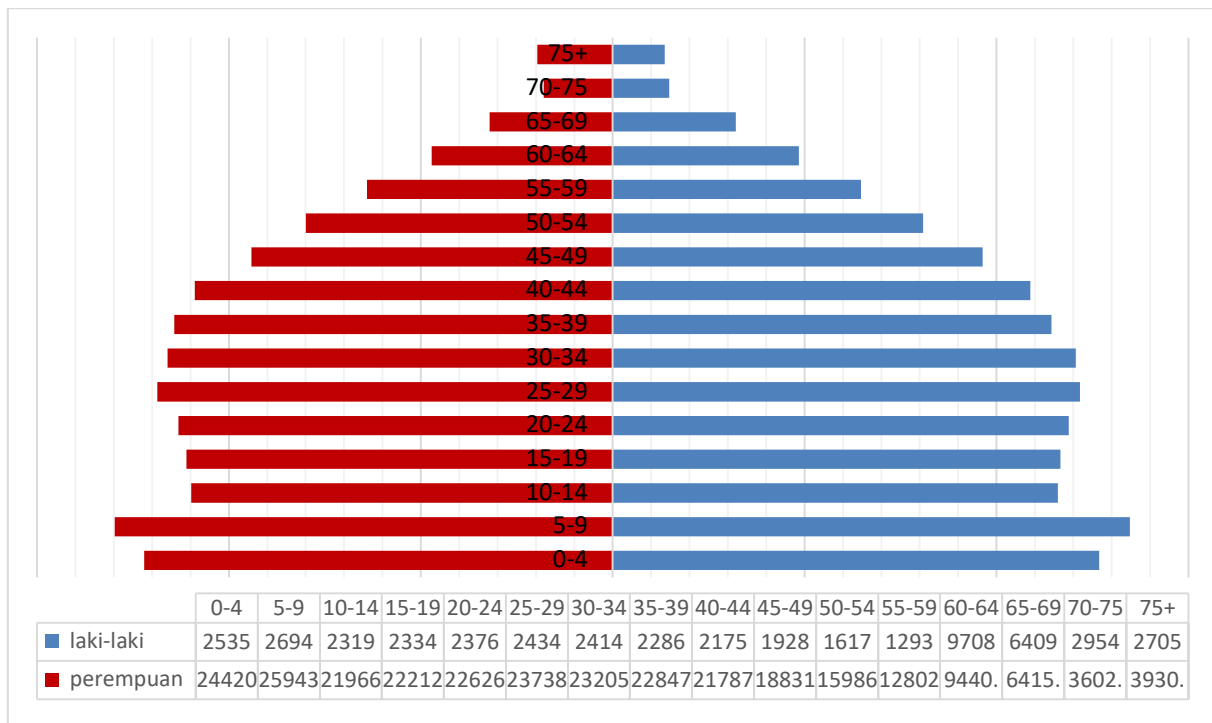


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Penyebab belum meratanya penyebaran penduduk Kabupaten Banjar adalah kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau pada beberapa daerah di Kabupaten Banjar. Seperti halnya di Kecamatan Aranio, Kecamatan Telaga Bauntung dan juga Kecamatan Paramasan yang berada pada lokasi dengan medan cukup sulit, transportasi sulit menjangkau, serta berbagai fasilitas yang kurang memadai. Hal ini mengakibatkan penduduk yang berada pada lokasi tersebut sulit untuk berkembang, dan bahkan sebagian dari penduduk daerah tersebut memilih untuk migrasi keluar demi mendapatkan penghidupan dan juga kehidupan yang lebih layak.

Selanjutnya berdasarkan pada struktur kelompok umur dan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Banjar pada posisi seimbang. Artinya, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Banjar memiliki jumlah yang hampir sama atau seimbang. Pada tahun 2020, rasio penduduk Kabupaten Banjar berdasarkan jenis kelamin jumlah jenis kelamin laki-laki di kabupaten banjar dari semua kelompok umur sebesar 285.885 jiwa, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 279.750 jiwa. Artinya penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Banjar lebih banyak daripada jenis kelamin perempuan.

Gambar 2. 22. Piramida Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Selanjutnya Gambar piramida di atas menunjukkan bahwa terdapat hal yang cukup menarik dari komposisi penduduk Kabupaten Banjar berdasarkan pada kelompok umur. Bahwa pada rentang usia 0-64 tahun, atau usia yang termasuk dalam kelompok usia muda hingga kelompok usia produktif, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, kecuali pada kelompok usia 30 hingga 34 tahun. Akan tetapi pada kelompok usia tua yaitu usia 64 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk perempuan lebih dapat bertahan hidup lebih lama atau hingga usia tua dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk pada tahun 2020, Kabupaten Banjar didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 99% sedangkan sebesar 1% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kabupaten Banjar harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2. 11. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Agama Tahun 2020

Agama	Pengikut	Persen
Islam	551253	99.216
Protestan	1454	0.262
Katolik	643	0.116
Hindu	1775	0.319
Budha	374	0.067
Konghucu	17	0.003
Lainnya	95	0.017
Jumlah	555611	100

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

2. 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar merupakan bagian yang menjelaskan tentang kondisi umum masyarakat Kabupaten Banjar sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan. Aspek ini memberikan informasi terkait kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar khususnya fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

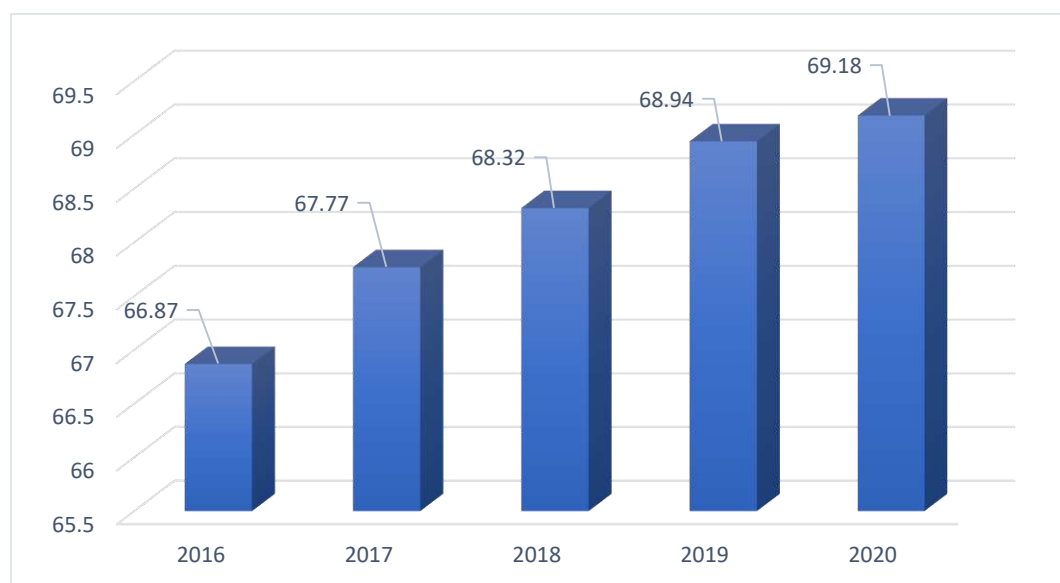
Perkembangan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Banjar di ukur melalui capaian indikator makro sebagai berikut :

2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banjar tahun 2016-2020 dapat dilihat dari gambar di bawah :

Gambar 2. 23. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar 2016-2020

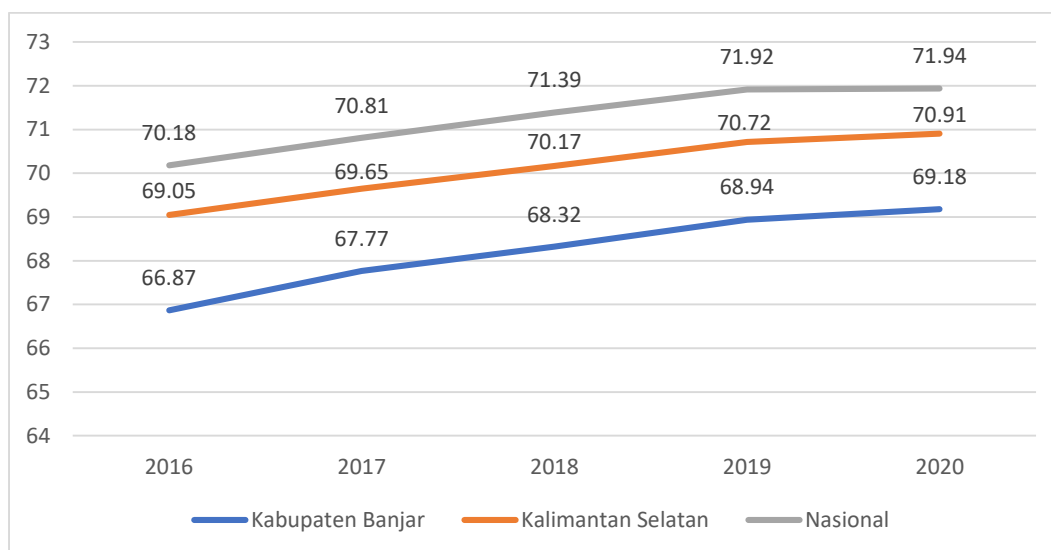


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Dari Gambar di atas dapat dilihat IPM Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Banjar tercatat sebesar 66,87 pada tahun 2016, meningkat sebesar 0,9 poin menjadi 67,77 di tahun 2017. Indeks Pembangunan Manusia terus menunjukkan trend positif atau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2019 sebesar 68,94 dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 69,18 atau naik sebesar 0,24 poin. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional yang juga sama-sama mengalami trend positif setiap tahunnya. Untuk IPM Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2019 diposisi 70,72 dan di tahun 2020 diposisi 70,91 atau mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin, sedangkan untuk IPM secara Nasional terjadi peningkatan di tahun 2020 sebesar 71,94 dari 71,92 di tahun 2019 (bertambah sebesar 0,02 poin).

Melihat trend perkembangan IPM di Kabupaten Banjar terus menunjukkan perkembangan yang baik dan pertumbuhan melebihi dari peningkatan Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan beberapa tahun ke depan, IPM Kabupaten Banjar dapat menyamai IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya perbandingan perkembangan IPM dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 24. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016 -2020

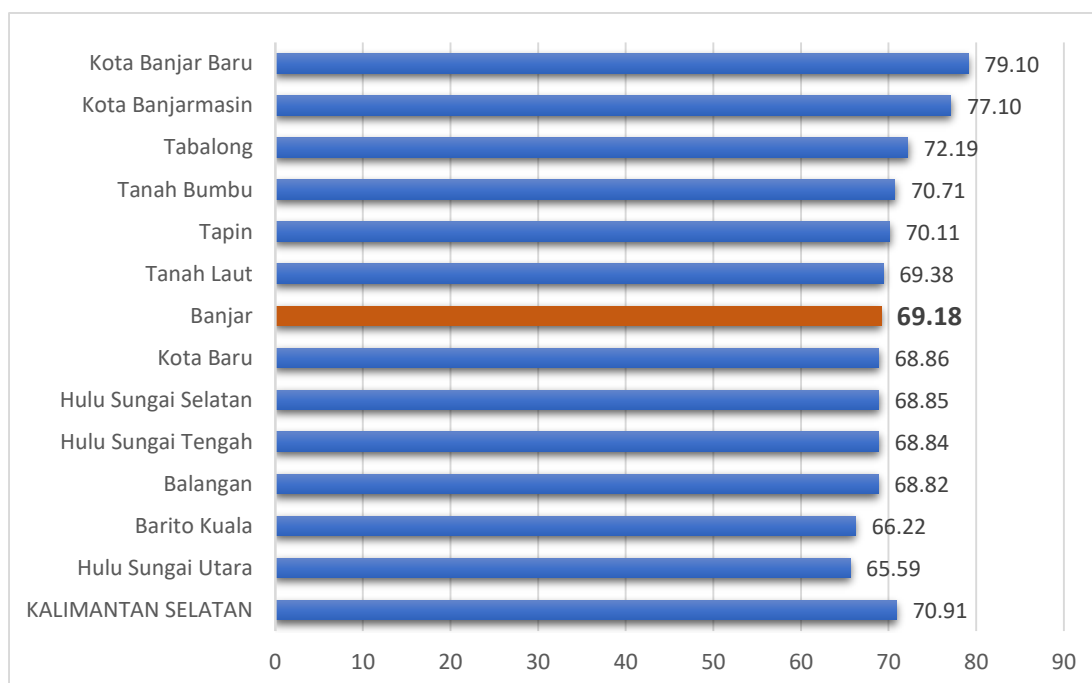


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, Data diolah

Dilihat gambar di atas, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar dari tahun 2016-2020, masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong peningkatan IPM yang menjadi patokan hasil pencapaian pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi)

Pada tahun 2020, Peringkat IPM Kabupaten Banjar meningkat menjadi 7 (69,18) dari sebelumnya Tahun 2019 berada pada peringkat 8 (68,94). IPM tertinggi dicapai Kota Banjarbaru yaitu sebesar 79,10 dan terendah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 65,59. Terdapat 10 Kabupaten dengan capaian IPM yang masih dibawah capaian rata - rata IPM di Provinsi Kalimantan Selatan. Persentase ini merupakan suatu catatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan terutama di sepuluh Kabupaten yang masih berada di bawah nilai rata – rata provinsi, terutama untuk bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang menjadi patokan utama indeks pembangunan manusia (IPM). Perbandingan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banjar dan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 25. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020



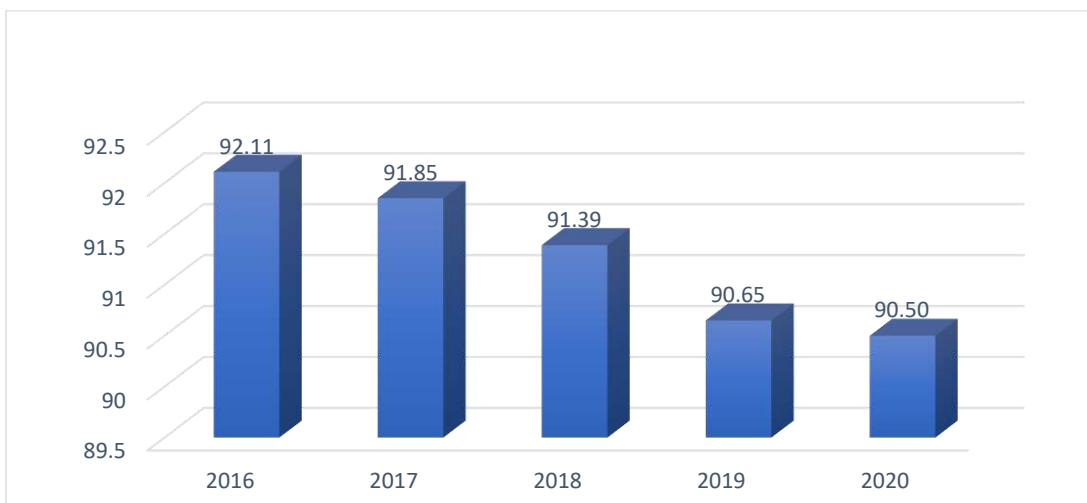
Sumber : BPS Provinsi Kalsel 2021, Data diolah

2.2.1.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

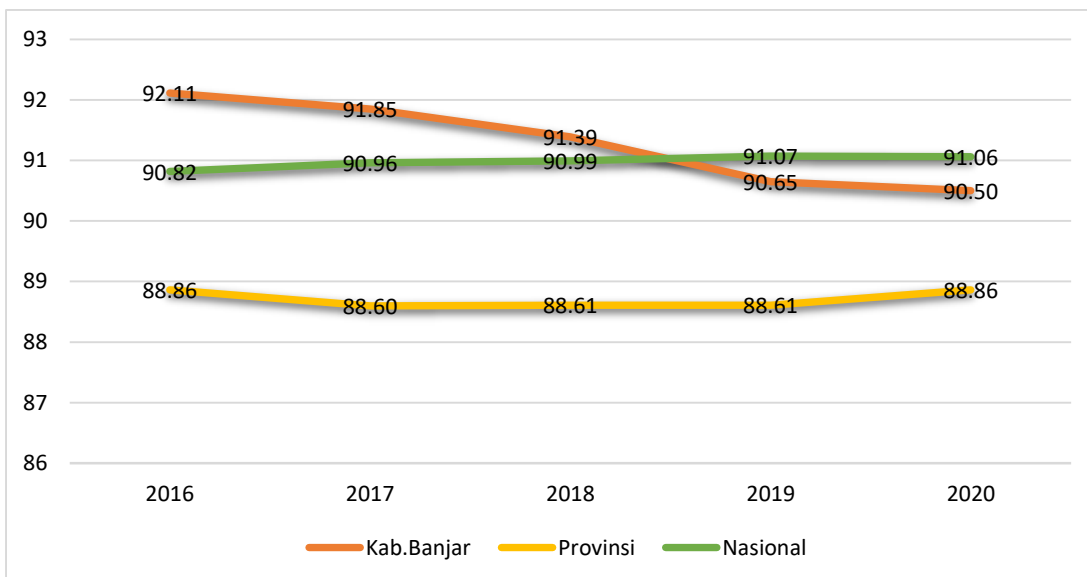
Dilihat dari gambar di bawah, perkembangan IPG di Kabupaten Banjar selama 5 tahun (2016-2020), menunjukkan tren penurunan. Dimana angka penurunan ini memperlihatkan semakin besar jarak angka IPG dengan 100, maka dapat dikatakan terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki, dimana capaian pembangunan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Gambar 2. 26. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Kalsel 2021, data diolah

Gambar 2. 27. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, data diolah

Dilihat gambar di atas, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banjar dari tahun 2016-2020, berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Hal ini menunjukkan kesenjangan di Kabupaten Banjar lebih rendah dibandingkan lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi di Kabupaten Banjar menunjukkan tren penurunan sedangkan perkembangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan peningkatan.

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1) Pertumbuhan PDRB

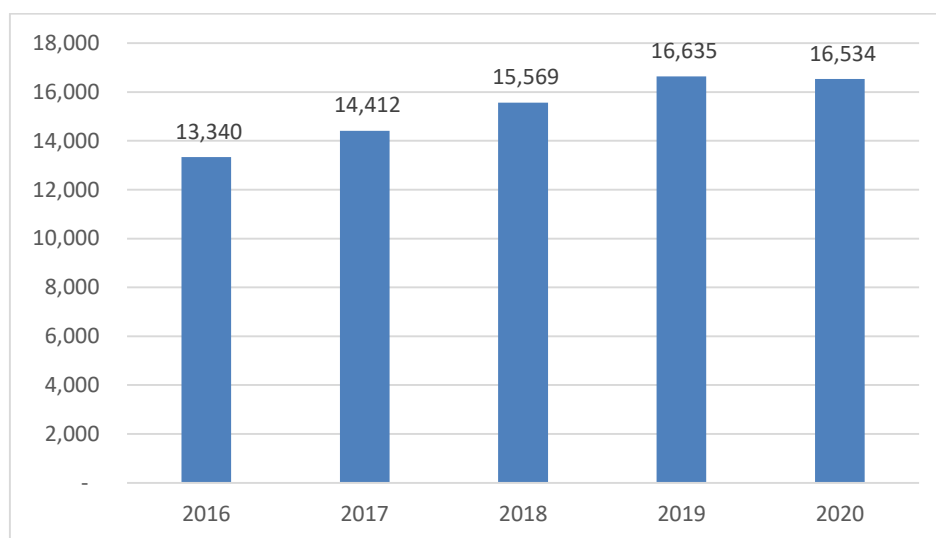
Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha dengan berbagai alternatif kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian (taraf hidup masyarakat). Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai adanya perubahan kondisi dimasyarakat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, memiliki kaitan yang erat dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan aktivitas produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu.

Parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi adalah pertumbuhan PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit usaha di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah.

PDRB dibagi menjadi dua, yaitu PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan PDRB dihitung atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah dalam tiap sektornya serta gambaran perekonomian pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan dan juga secara sektoral. Selain digunakan untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, fungsi lain PDRB dapat berupa sebagai bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan, sebagai *feedback* terhadap perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai dasar untuk proyeksi perkembangan perekonomian di masa mendatang, untuk mengetahui peranan masing-masing sektor perekonomian dalam suatu wilayah, dan yang terakhir PDRB dapat digunakan sebagai bahan perencanaan investasi untuk masa yang akan datang.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020), pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2016 nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar mencapai Rp.13.339,970 Milyar . Kemudian pada tahun 2017 nilainya menjadi Rp. 14.411, 980 Milyar Juta. Capaian tersebut meningkat menjadi Rp. 15.569,050 Milyar Juta pada tahun 2018, yang berarti terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 nilai PDRB sebesar Rp.16.634,740 Milyar dan angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi penurunan menjadi Rp. 16.533,980 Milyar.

Gambar 2. 28. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Milyar rupiah)

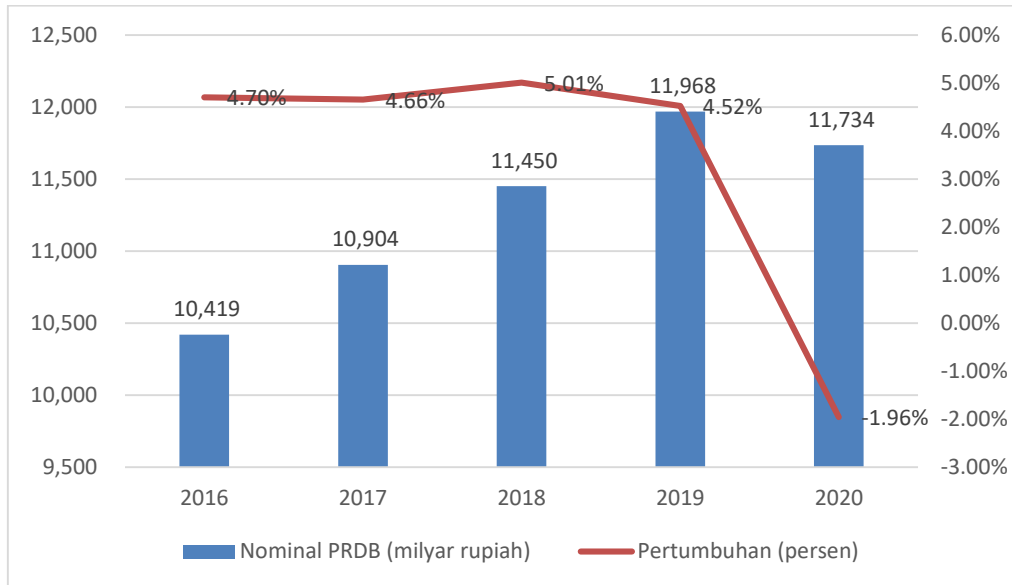


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Setiap daerah mengharapkan peningkatan angka PDRB diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada Tahun 2020, 17,65% PDRB Kabupaten Banjar disumbangkan oleh sektor pertanian, 14,67% pada sektor perdagangan, dan 13,50% sektor pertambangan. Terjadinya penurunan PDRB Kabupaten Banjar tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,52% kemudian tahun 2020 mengalami penurunan yang mencapai angka -1,96%. Penurunan ini sebagai dampak dari pandemik Covid-19 yang melanda hingga menghambat ritme ekonomi nasional, maka perekonomian kabupaten Banjar sebagai bagian dari perekonomian nasional juga ikut terdampak. Perekonomian Kabupaten

Banjarnegara mulai tahun 2018 pada posisi 5,01% melambat menjadi 4,52% pada tahun 2019 dan terus menurun hingga berkontraksi menjadi minus di tahun 2020 sebesar -1,96%.

Gambar 2. 29. Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2020 (dalam persen dan milyar rupiah)



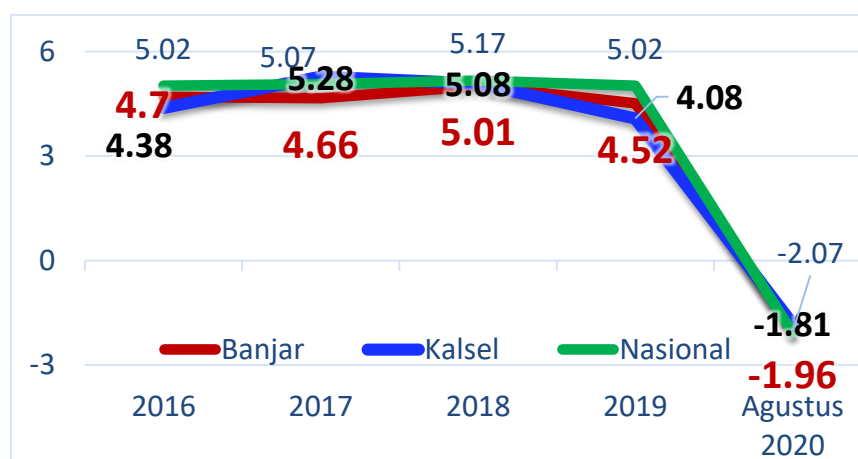
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara, 2021

Perlambatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga disebabkan penurunan daya beli masyarakat seiring implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemi. Capaian PDRB Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu informasi yang menunjukkan gambaran struktur ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Struktur ekonomi itu sendiri dimaknai sebagai deskripsi tentang kecenderungan tipe/ komposisi ekonomi yang membentuk tipe suatu daerah. Sehingga, struktur ekonomi tidak akan mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat karena proses pembentukan dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing. Perubahan secara signifikan dapat dilakukan apabila ada investasi yang difokuskan pada bidang/ sektor tertentu yang diikuti oleh penggunaan teknologi yang sesuai. Di Kabupaten Banjarnegara sendiri sektor perekonomian masih didominasi beberapa sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar; sektor pertambangan dan penggalian; sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan dan terakhir adalah sektor industri.

Gambar diatas menjelaskan bahwa tahun 2016 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjarnegara Rp. 10.418,68 (miliar rupiah). Tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjarnegara mencapai Rp. 10.903,97 (miliar rupiah) atau mengalami kenaikan sebanyak Rp. 485.287,12 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebanyak 4,66% dari tahun 2016. Trend positif kenaikan PDRB terus berlanjut tahun 2018 menjadi Rp. 11.450,22 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebanyak 5,01% atau Rp. 545.845,6 (miliar rupiah). Hingga tahun 2019, posisi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjarnegara mencapai nilai Rp. 11.968,28 (miliar rupiah)/ mengalami kenaikan sebanyak Rp. 519.719,1 (miliar rupiah)/ 4,54%. Namun pada tahun 2020, PDRB ini mengalami penurunan yaitu sebesar 234,2 dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 11.734,08 (miliar rupiah)

Dibanding dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2016-2020 tidak pernah berada diatas capaian tingkat pertumbuhan PDRB Nasional.

Gambar 2. 30. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari gambar diatas diketahui tingkat pertumbuhan PDRB antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar diantara kedua didapati saling menggeser satu dengan lainnya. Tahun 2016 tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar mencapai 4,70% yang berada diatas capaian tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Kalsel yang hanya mencapai 4,40%. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami penurunan menjadi 4,66% (terjadi penurunan 0,04%). Sedangkan pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan justru sebaliknya mengalami kenaikan sebanyak 0,88% atau menjadi 5,28%. Kondisi tersebut membuat capaian Kabupaten Banjar masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018 posisi tersebut tidak mengalami perubahan dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar masih berada dibawah capaian pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan dimana pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar berada pada angka 5,01% dan Provinsi Kalimantan Selatan pada angka 5,12%. Perubahan posisi baru terjadi pada tahun 2019 dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar mampu berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada angka 4,54%, sedangkan provinsi pada angka 4,08%. Tahun 2020 terjadi penurunan drastis pertumbuhan ekonomi baik secara nasional, provinsi dan regional Kabupaten Banjar. Berdasarkan data statistik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase dari tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,54% dan tahun 2020 turun menjadi -1,96%.

Ditinjau dari PRDB pengeluaran, Selama periode 2016-2020 berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah Kabupaten Banjar sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan akhir baik konsumsi rumah tangga, LRPRT maupun pemerintah. Konsumsi rumah tangga merupakan kontribusi terbesar karena memberikan kontribusi terbesar lebih dari 60 persen. Hal ini berarti jika dilihat dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga di masyarakat adalah faktor penggerak terbesar perekonomian di Kabupaten Banjar. Berikut disajikan tabel PDRB pengeluaran atas harga berlaku dan kontribusi masing-masing sektor

Tabel 2. 12. PDRB dan Kontribusi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

Komponen pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi rumah tangga	8.887.250	9.572.763	10.353.561	11.313.007	11.399.065
<i>Kontribusi</i>	66,62%	66,42%	66,50%	68,01%	68,94%
konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT)	125.753	137.774	152.184	168.042	168.959
<i>Kontribusi</i>	0,94%	1,26%	1,33%	1,40%	1,44%
<i>Pertumbuhan</i>		9,56%	10,46%	10,42%	0,55%
konsumsi pemerintah	1.963.989	2.018.511	2.194.947	2.302.396	2.248.390
<i>Kontribusi</i>	14,72%	18,51%	19,17%	19,24%	19,16%
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4.038.008	4.321.973	4.799.130	5.319.083	5.365.227
<i>Kontribusi</i>	30,27%	39,64%	41,91%	44,44%	45,72%
Perubahan Inventori	7.527	73.075	226.711	6.703	930

Komponen pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Kontribusi</i>	0,06%	0,67%	1,98%	0,06%	0,01%
Ekspor	7.121.955	8.367.303	10.606.719	10.428.723	9.707.047
Impor (-)	8.804.514	10.079.417	12.764.197	12.903.214	12.355.639
	(1.682.559)	(1.712.114)	(2.157.478)	(2.474.491)	(2.648.592)
<i>Kontribusi</i>	-12,61%	-15,70%	-18,84%	-20,68%	-22,57%
Jumlah	13.339.968	14.411.982	15.569.055	16.634.740	16.533.979

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar tumbuh negatif sebesar -1,96 persen. Angka itu menunjukkan penurunan bila dibanding pertumbuhan tahun 2019 yang tumbuh positif sebesar 4,52 persen. Penurunan ini terjadi akibat dari dampak covid 19 dan kebijakan pemerintah dalam membatasi pergerakan masyarakat dalam rangka memutus rantai penyebaran covid 19. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dalam konsumsi rumah tangganya, kemudian penurunan konsumsi dalam bentuk investasi dan belanja modal, penurunan konsumsi / belanja pemerintah, dan penurunan permintaan ekspor baik di dalam maupun luar negeri.

Pertumbuhan dapat diketahui melalui PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2. 13. PDRB dan Pertumbuhan menurut pengeluaran atas dasar harga konstan kabupaten banjar tahun 2016 - 2020 (dalam juta rupiah)

Komponen pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi rumah tangga	6.997.980	7.311.773	7.678.553	8.051.708	8.045.545
<i>Pertumbuhan</i>		4,48%	5,02%	4,86%	-0,08%
Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT)	91.692	96.594	103.190	110.845	108.367
<i>Pertumbuhan</i>		5,35%	6,83%	7,42%	-2,24%
Konsumsi pemerintah	1.328.362	1.328.949	1.378.254	1.427.954	1.371.123
<i>Pertumbuhan</i>		0,04%	3,71%	3,61%	-3,98%
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3.003.965	3.124.756	3.356.922	3.571.567	3.554.922
<i>Pertumbuhan</i>		4,02%	7,43%	6,39%	-0,47%
Perubahan Inventori	6.394	61.034	179.402	4.253	631
<i>Pertumbuhan</i>		854,55%	193,94%	-97,63%	-85,16%
Ekspor	6.380.095	6.898.103	7.102.738	7.264.699	6.770.320
Impor (-)	7.389.807	7.917.241	8.348.839	8.462.746	8.116.825
	(1.009.712)	(1.019.138)	(1.246.101)	(1.198.047)	(1.346.505)
<i>Pertumbuhan</i>		0,93%	22,27%	-3,86%	12,39%
Jumlah	10.418.681	10.903.968	11.450.220	11.968.280	11.734.083
<i>Pertumbuhan</i>		4,66%	5,01%	4,52%	-1,96%

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Dari tabel diatas diketahui pada tahun 2020 semua komponen PDRB terjadi penurunan, konsumsi rumah tangga yang merupakan kontribusi terbesar mengalami kontraksi tipis sebesar -0,08 persen atau Rp. 6,163 milyar. Kontraksi cukup tertinggi terjadi pada komponen ekspor yakni sebesar minus Rp. 494.379 atau -6,81 persen namun juga diiringi penurunan impor sebesar 4,09 persen. Belanja pemerintah mengalami penurunan sebagai dampak dari penurunan pendapatan baik dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah, yakni sebesar Rp. 56, 831 Milyar atau 3,98 persen.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu daerah dapat menggambarkan kecenderungan tipe ekonomi suatu daerah. Pada dasarnya struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, misalnya penanaman modal secara besar-besaran pada suatu sektor tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru.

Struktur perekonomian Kabupaten Banjar sebelum maupun sesudah perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010, masih tetap menunjukkan bahwa corak perekonomian berada pada tipe agraris. Hal ini terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha pertanian terhadap Total PDRB Kabupaten Banjar sebesar 17,65 persen pada tahun 2020. Lebih lanjut mengenai Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Persen) dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 14. Distribusi Per Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku, 2016-2020- (Persen)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,79	18,17	17,72	17,73	17,65
B	Pertambangan dan Penggalian	16,18	16,18	16,04	14,55	13,50
C	Industri Pengolahan	7,03	7,24	7,06	6,90	6,86
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15
E	Pengadaan Air	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24
F	Konstruksi	10,05	10,06	10,30	10,47	10,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,91	14,23	14,52	14,99	14,67
H	Transportasi dan Pergudangan	4,57	4,65	4,70	4,85	4,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,08	3,09	3,17	3,26	3,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,46	3,60	3,64	3,75	4,09
K	Jasa Keuangan	2,21	2,23	2,22	2,20	2,26
L	Real Estate	3,50	3,39	3,37	3,41	3,61
M,N	Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,31	7,09	7,08	7,37	7,70
P	Jasa Pendidikan	5,38	5,46	5,50	5,73	5,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26	2,26	2,27	2,32	2,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,61	1,64	1,69	1,74	1,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada kategori lapangan usaha pertambangan menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Kabupaten Banjar dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang dari Kabupaten Banjar mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. Postur ekonomi (dilihat dari kontribusi PDRB) Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Banjar masih tergantung pada eksploitasi sumber daya alamnya. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian dan pertambangan yang secara agregat menyumbang 13,50 persen terhadap PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2019. Kabupaten Banjar didukung oleh wilayah produsen komoditas pertambangan batubara terutama di Kecamatan Sungai Pinang, Paramasan, dan Sambung Makmur.

Kontribusi PDRB terbesar ketiga dalam perekonomian di Kabupaten Banjar adalah kategori perdagangan. Kategori ini terus mengalami peningkatan dari 13,91 persen pada tahun 2016 menjadi 14,52 persen pada tahun 2018, pada tahun 2020 menyumbang sebesar 14,67 persen yakni menurun daripada tahun 2019. Berikutnya kontribusi terbesar keempat adalah Kategori konstruksi dengan perkembangan yang selalu meningkat selama lima tahun ini, dari 10,05 persen di tahun 2016 menjadi 10,48 persen di tahun 2020. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya jumlah bangunan yang sangat menonjol di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Martapura, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut yang merupakan pusat perekonomian di Kabupaten Banjar.

Selain berdasarkan tujuh belas kategori lapangan usaha, analisis struktur ekonomi dapat pula disimpulkan menjadi tiga sektor ekonomi yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pengelompokan kategori ke dalam tiga sektor tersebut adalah sebagai berikut :

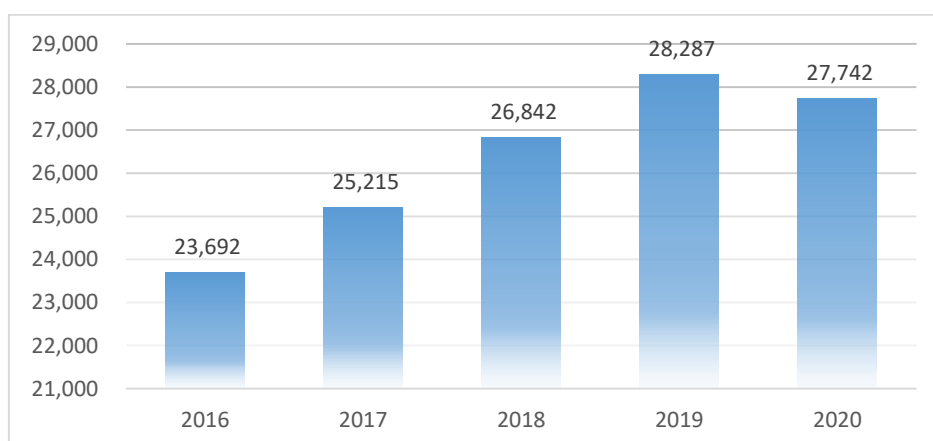
Primer	Sekunder	Tersier
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Pertambangan dan Pengalihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Perdagangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan • Real Estate • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya

Pengelompokan ke dalam tiga sektor ini lebih memperjelas apa yang terjadi pada struktur perekonomian Kabupaten Banjar. Postur ekonomi (dilihat dari kontribusi PDRB) Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 didominasi oleh Sektor tersier. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi lapangan usaha yang tergabung dalam sektor tersier yang secara agregat menyumbang sebesar 50,21 persen terhadap PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2019. Di posisi kedua adalah sektor primer yang identik dengan eksploitasi sumber daya alamnya yaitu pertanian dan pertambangan yang secara agregat menyumbang 32,03 persen. Kabupaten Banjar didukung oleh wilayah produsen komoditas pertambangan batubara terutama di Kecamatan Sungai Pinang, Paramasan, dan Sambung Makmur.

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Data ini dipergunakan sebagai salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kemakmuran/ kesejahteraan suatu wilayah/provinsi. Semakin tinggi, PDRB Perkapita suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut pun demikian sebaliknya.

Gambar 2. 31. PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

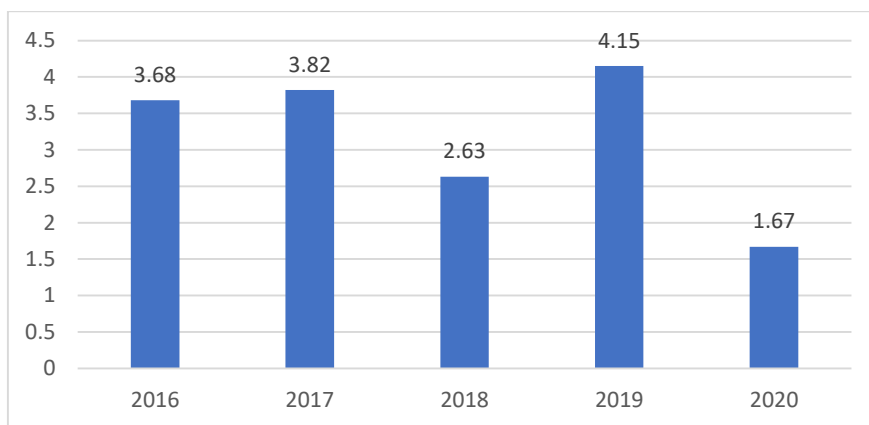
PDRB Per Kapita di Kabupaten Banjar Selama kurun waktu 2016-2019 secara konsisten menunjukkan tren yang positif, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 PDRB Per Kapita Rp. 23,69 juta rupiah. Kenaikan PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar terus berlanjut hingga tahun 2017 mencapai 25,21 juta rupiah. Sementara tahun 2018 PDRB perkapita sebanyak 26,84 Juta rupiah. Tahun 2019 angka PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar mencapai Rp.28,25 juta rupiah. Selama periode 2016-2019 PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar mengalami kenaikan sebanyak Rp. 7,69 juta rupiah. Tahun 2020 mengalami

penurunan di angka Rp. 27,74 juta rupiah, turun sebesar Rp. 0,545 juta atau -1,93 persen . Adanya penurunan ini yang terjadi pada PDRB Per Kapita di Kabupaten Banjar 2020 mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian masyarakat Banjar tahun 2020 mengalami penurunan kesejahteraan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 sehingga diperlukan intervensi program dan kegiatan yang mengarah pada pembangunan sektor perekonomian masyarakat untuk dapat bangkit dari adanya masalah ini.

2.2.1.5. Inflasi

Menurut Bank Indonesia (BI), inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan laju Inflasi digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak tahun 2014, penghitungan inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kota Tanjung. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota di sekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin. Perkembangan tingkat inflasi pada periode tahun 2016-2020 sebagaimana grafik berikut:

Gambar 2. 32. Perkembangan Inflasi Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS Prov. Kalsel, 2021

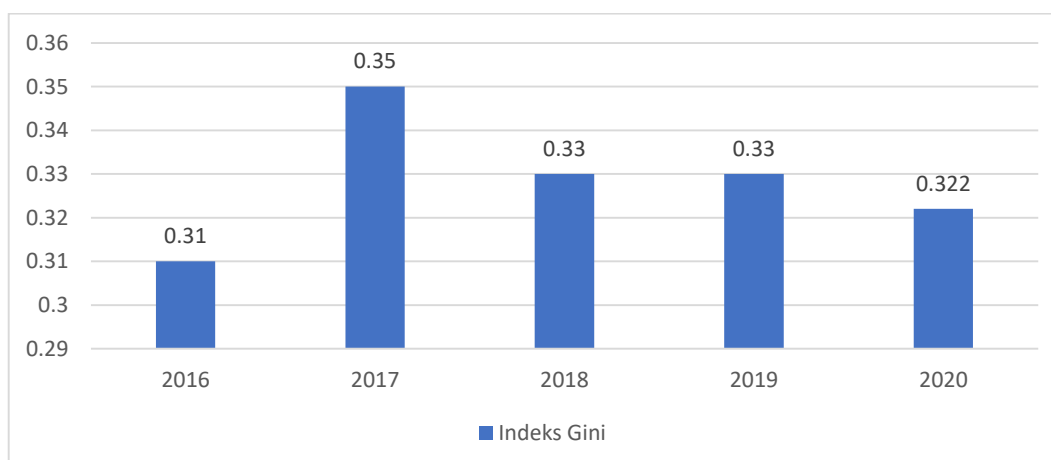
Laju inflasi Kabupaten Banjar pada tahun 2016 sebesar 3,68%. Pada tahun 2017 laju inflasi Kabupaten Banjar naik menjadi 3,82%. Tahun 2018 laju inflasi Kabupaten Banjar menurun sebesar 3,62%. Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Banjar naik sebesar 4,15%. Pada tahun 2020 laju inflasi Kabupaten Banjar mengalami penurunan pada angka 1,67%.

2.2.1.6. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kriteria koefisien gini didasarkan atas 3 kriteria yaitu

- 0 < GR < 0,3 : Ketimpangan Rendah
- 0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : Ketimpangan Sedang
- 0,5 < GR < 1 : Ketimpangan Tinggi
- GR = 1 : Ketimpangan Sempurna

Gambar 2. 33. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021

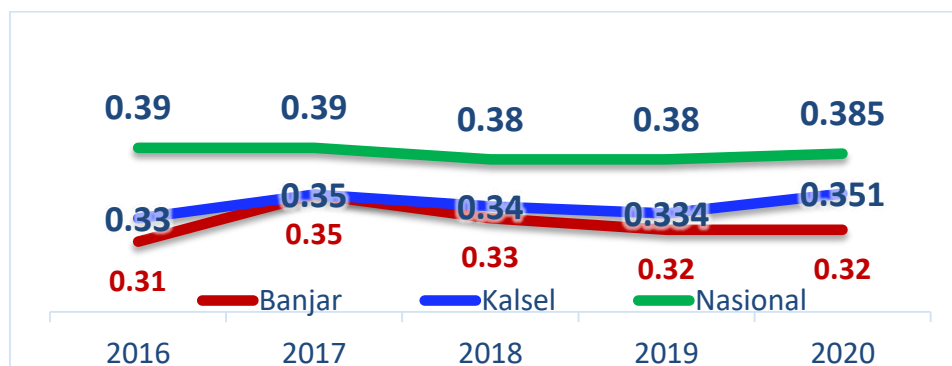


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Koefisien gini Kabupaten Banjar pada tahun 2016 di angka 0,31. Pada tahun 2017 koefisien gini Kabupaten Banjar naik di angka 0,35. Tahun 2018 koefisien gini Kabupaten Banjar naik di angka 0,33. Pada tahun 2019 koefisien gini Kabupaten Banjar turun di angka 0,33. Pada tahun 2020 koefisien gini Kabupaten Banjar menurun pada angka 3,22. Maka berdasarkan capaian dalam 5 tahun terakhir, koefisien gini di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa berada di kriteria ketimpangan sedang.

Dibandingkan dengan capaian Nasional dan Prov. Kalimantan Selatan, maka selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 capaian indeks gini kabupaten banjar sangat baik selalu dibawah provinsi dan nasional, lebih rinci dapat dilihat pada tabel gambar berikut.

Gambar 2. 34. Perkembangan Indeks Gini Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

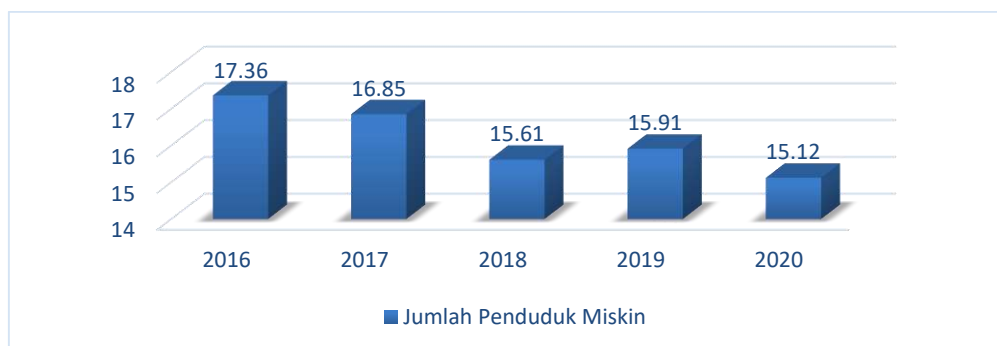
2.2.1.7. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, entah itu sandang, pangan, maupun papan. Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan dapat dilihat dari aspek-aspek lainnya, seperti sosial dan budaya. Apabila kemiskinan tidak mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini bisa menyebabkan lingkaran kemiskinan yang akan terus berlanjut ke generasi setelahnya

1) Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 35. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020

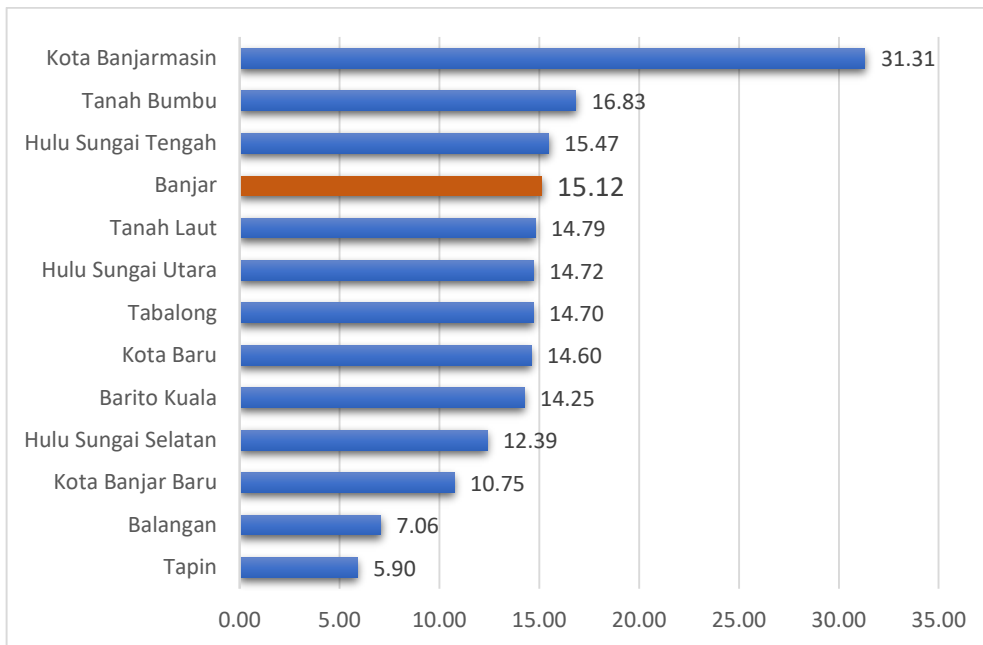


Sumber: BPS Kabupaten Banjar , 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar dapat dikatakan fluktuatif. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar adalah sebanyak 17.360 orang dan menjadi angka paling tinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar turun pada angka 16.850 orang. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar mengalami penurunan pada angka 15.610 orang. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar adalah sebanyak 15.910 orang dan mengalami kenaikan. Tahun 2020 angka tersebut menurun di angka 15.120 orang.

Namun apabila dibandingkan jumlah penduduk miskin antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2020, maka jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Banjar berada di posisi ke empat terbanyak yaitu sebesar 15.120 jiwa. Untuk penduduk yang hidup berada di bawah garis kemiskinan terbanyak ada di Kota Banjarmasin sebanyak 31.510 jiwa, Tanah Bumbu sebanyak 16.830 jiwa, Hulu Sungai Tengah sebanyak 15.470 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Tapin sebanyak 5.900 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 36. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribuan Orang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

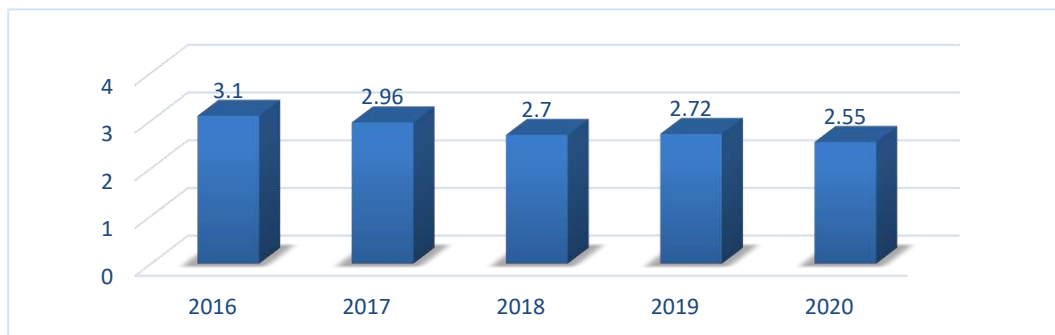


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

2) Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Gambar 2. 37. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2016- 2020

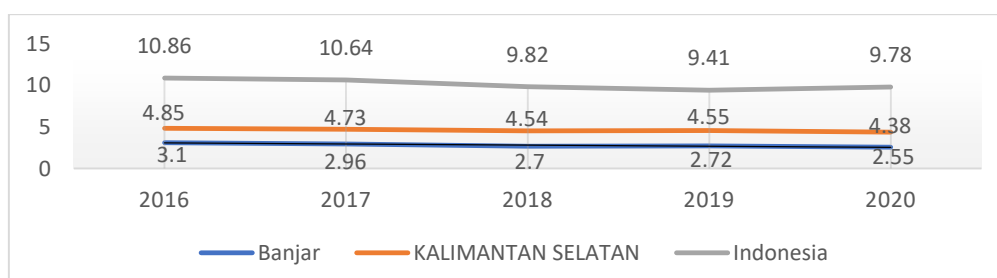


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjar selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 -2020 menunjukkan tren yang baik (menurun), meskipun pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebesar 0,02 poin menjadi 2,72 %. Namun di tahun 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 0,17 poin menjadi 2,55%.

Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar lebih rendah. Di Tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar pada posisi 2,55% sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,38%. Sementara untuk perkembangan persentase penduduk miskin secara umum di Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 9,78 dari 9,41 di tahun 2019 (meningkat sebesar 0,37).

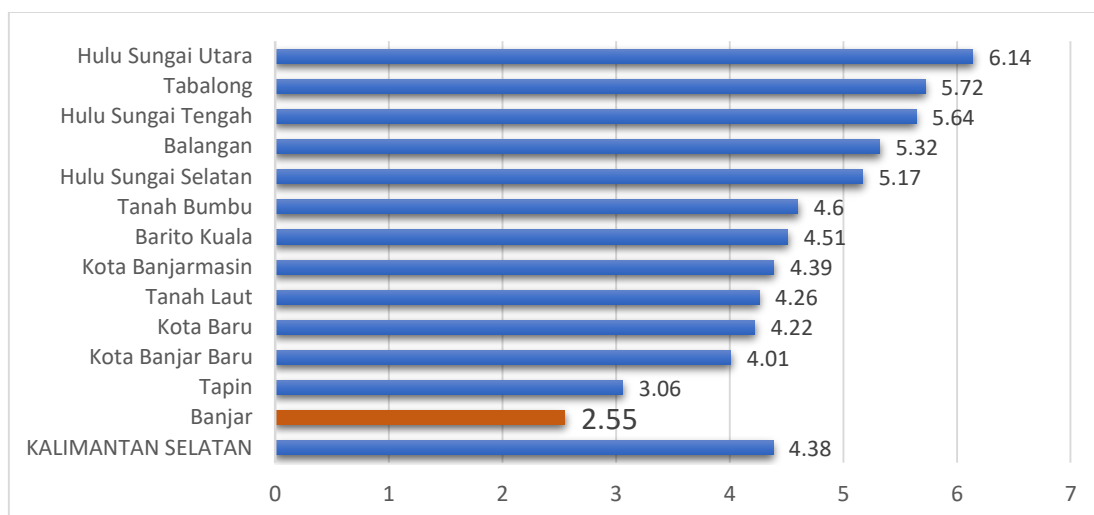
Gambar 2. 38. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS RI, 2021

Apabila dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar berada di posisi pertama yang paling rendah, diikuti Kabupaten Tapin dengan persentase kemiskinan sebesar 3,06. Sementara Persentase penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 6,14 persen.

Gambar 2. 39. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dalam kurun 5 tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banjar menurun dari awalnya 0,32 pada tahun 2016, menjadi 0,31 pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu pada angka 0,39. Tahun 2019 mengalami penurunan pada angka 0,26 dan tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banjar sama pada tahun sebelumnya yaitu 0,26.

Gambar 2. 40. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

4) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun tahun 2016-2020 terdapat dalam tabel dibawah ini. Pada tahun 2016 dengan nilai indeks 0,7 menjadi 0,05 pada tahun 2017. Tahun 2018 nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar mengalami

kenaikan pada angka 0,1. Tahun 2019 mengalami penurunan di angka 0,03 dan tahun 2020 mengalami kenaikan pada angka 0,04.

Gambar 2. 41. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020

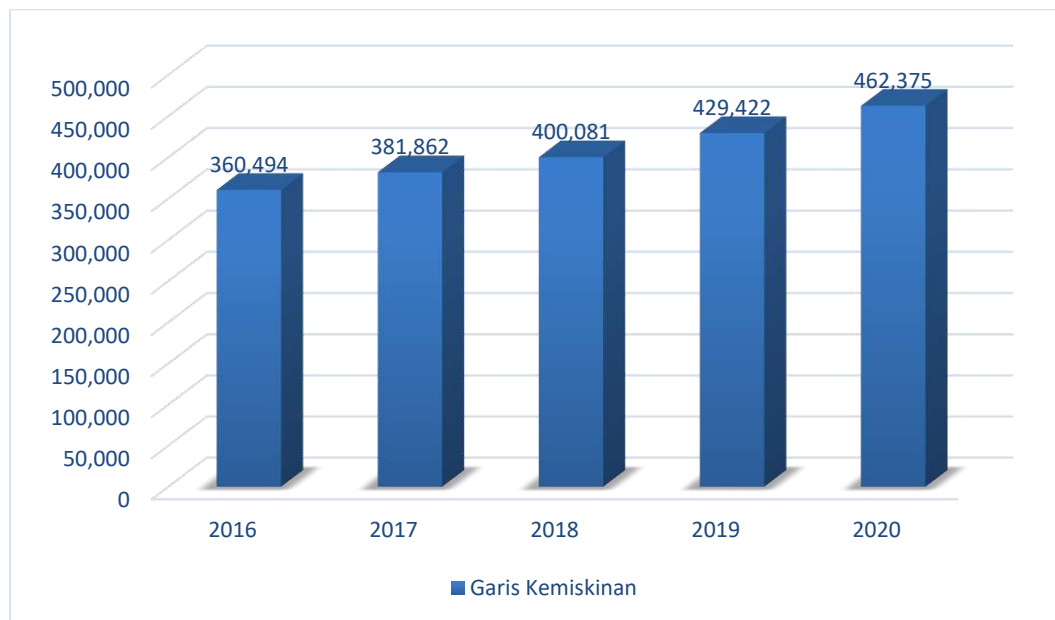


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

5) Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan. Yang pada tahun 2016 sebesar 360.494 Rp/kapita/bulan menjadi 381.862 Rp/kapita/bulan pada tahun 2017. Tahun 2018 garis kemiskinan naik menjadi 400.081Rp/kapita/bulan. Tahun 2019 juga mengalami kenaikan pada angka 429.422 Rp/kapita/bulan. Tahun 2020 juga mengalami kenaikan di angka 462.375 Rp/kapita/bulan. Artinya terjadi peningkatan pengeluaran dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin Kabupaten Banjar.

Gambar 2. 42. Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

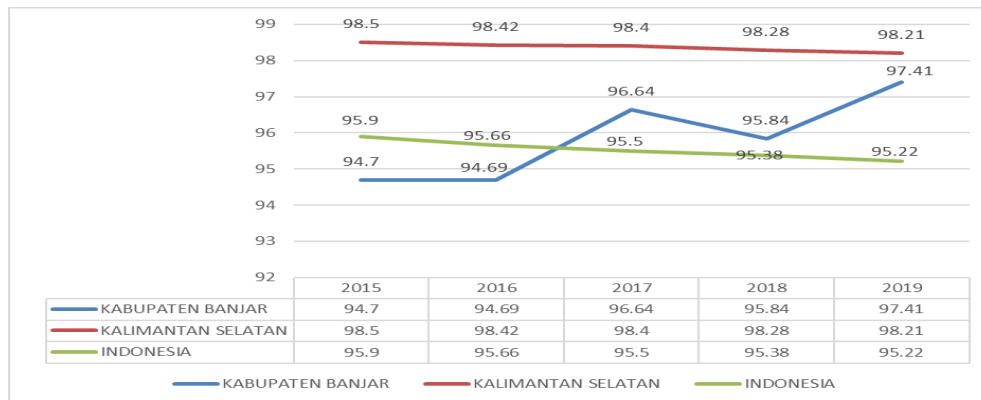
2.2.2.1. Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin atau huruf arab atau huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf di suatu daerah. Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dan memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca

dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf

Gambar 2. 43. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Banjar Tahun 2015- 2019



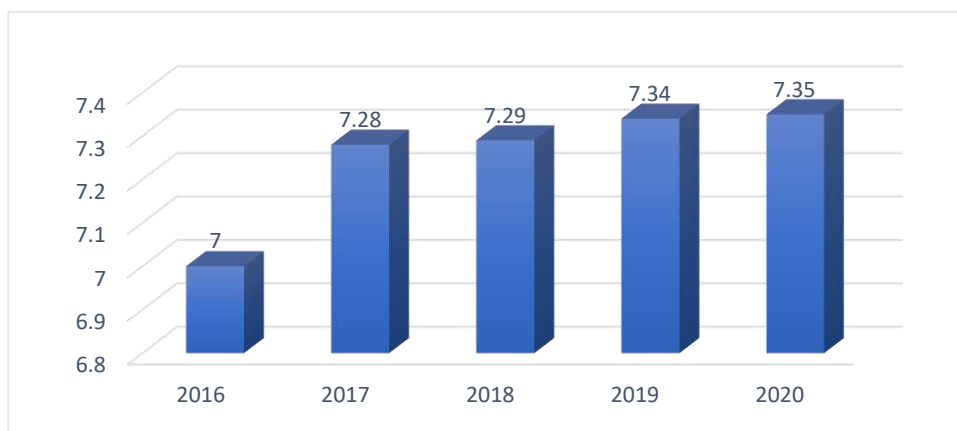
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2019

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dipergunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2016-2020 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,00 pada tahun 2016 menjadi 7,35 pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,35 poin selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2017 yaitu meningkat sebesar 0,28 poin dari tahun 2016, dari 7,00 di tahun 2016 menjadi 7,28 di tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 44. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

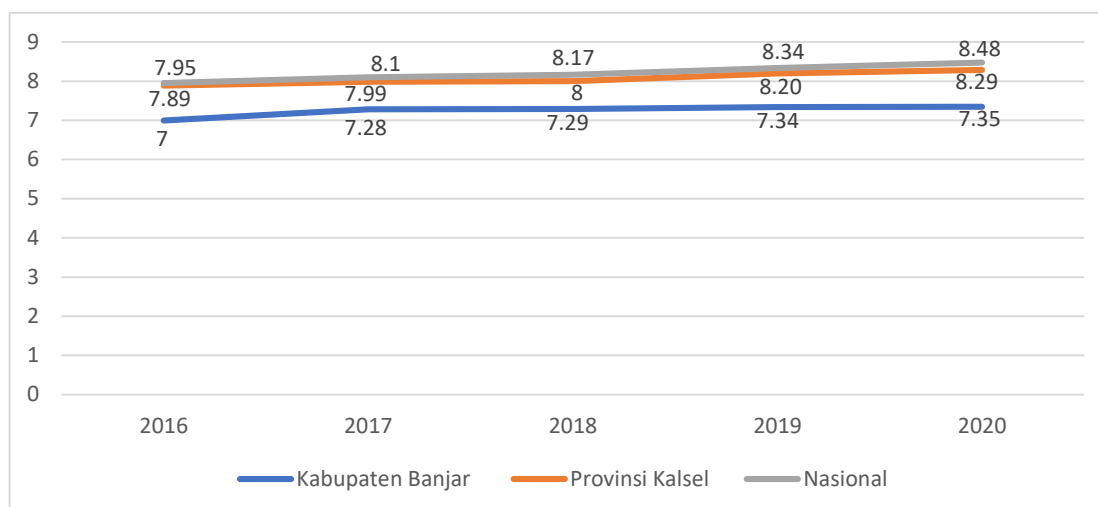


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2020

Kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjar relevan bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, dimana Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Selatan di tahun 2016 sebesar 7,89 tahun terus kontinyu mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 8,29 tahun. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah Nasional tahun 2016 tahun 7,95 dan naik kontinyu hingga tahun 2020 menjadi sebesar 8,48 tahun.

Dilihat dari gambar di bawah ini , rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Selisih antara Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 masih cukup besar yaitu 0,94 poin.

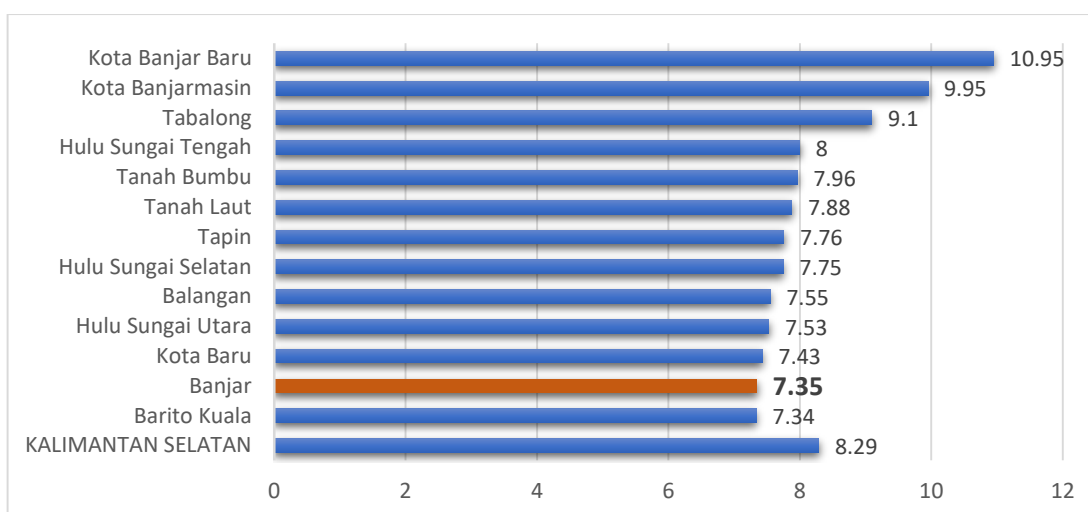
Gambar 2. 45. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Kalimantan Selatan dan BPS RI, tahun 2021, Data diolah

Apabila dibandingkan Kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, posisi rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjar pada tahun 2020 berada pada urutan ke dua belas (12) dari 13 Kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan urutan pertama untuk Angka Rata-rata Lama Sekolah tertinggi di provinsi Kalimantan Selatan dipegang oleh Kota Banjarbaru sebesar 10,95. Sedangkan RRLS yang rendah dipegang oleh Barito Kuala dengan nilai sebesar 7,34

Gambar 2. 46. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020

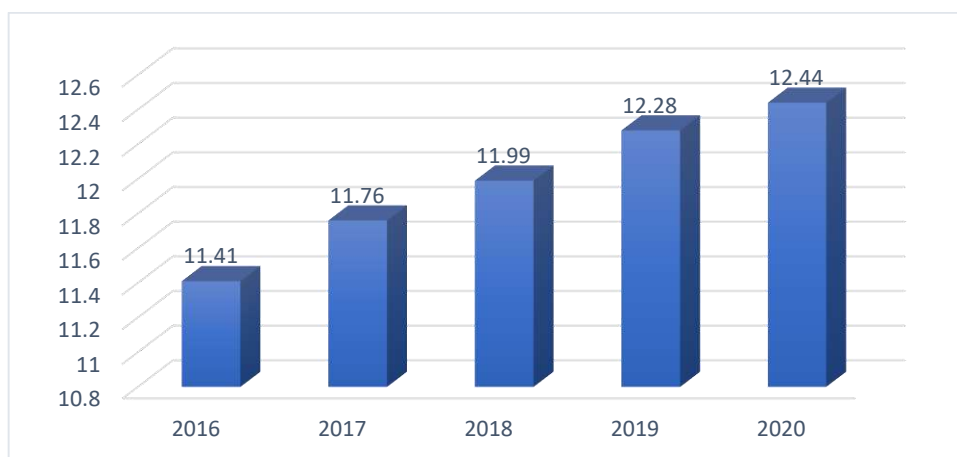


Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

3) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan lama sekolah di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar 11,41 (tahun 2016) mengalami kenaikan yang signifikan hingga menjadi 12,44 (tahun 2020) atau naik sebesar 1,03 poin selama 5 tahun terakhir, seperti pada gambar di bawah ini

Gambar 2. 47. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



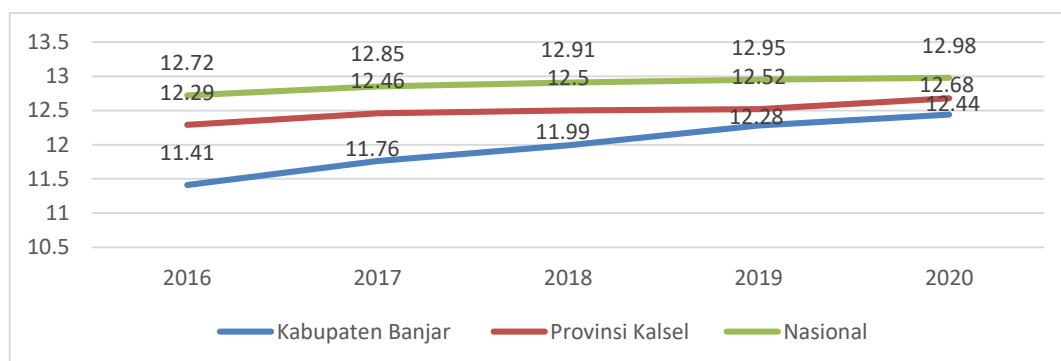
Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Kenaikan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar relevan dengan kenaikan Harapan Lama Sekolah di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, dimana Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2016 sebesar 12,29 terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 12,68 atau naik sebesar 0,39 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan di level nasional, Harapan Lama Sekolah tahun 2016 sebesar 12,72 dan meningkat menjadi sebesar 12,98 di tahun 2020 atau naik sebesar 0,26 poin selama kurun waktu 5 tahun.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar masih berada di bawah Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun bila Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar konsisten naik, maka di harapkan dalam beberapa tahun kedepan dapat menyamai atau bahkan lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Nasional. Untuk lebih jelasnya perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 48. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar, Provinsi

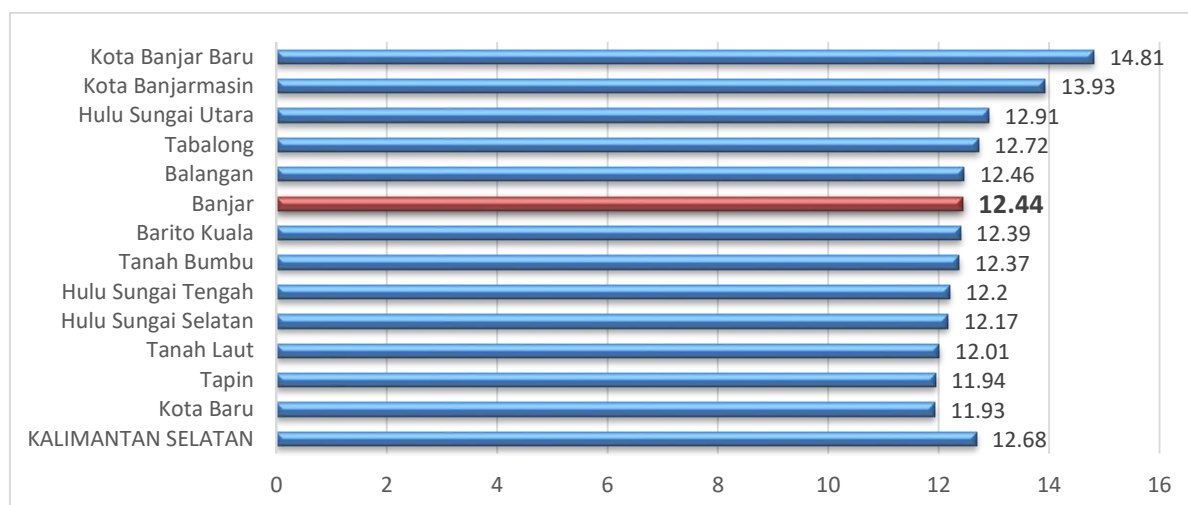
Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, tahun 2021. Data diolah

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian harapan lama sekolah di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, harapan lama sekolah Kabupaten Banjar menempati posisi ke delapan. Perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 49. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021., Data diolah

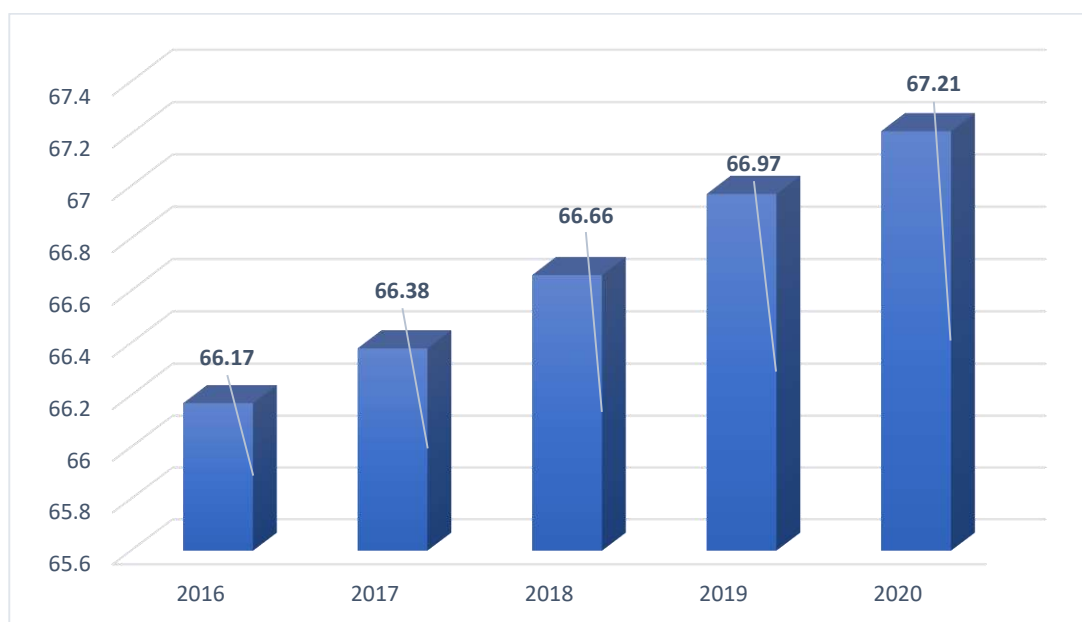
2.2.2.2. Kesehatan

1) Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Usia harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Apabila kesehatan fisik tidak mendukung, akan berkontribusi timbulnya penyakit yang memicu pada kematian. Hal ini akan membuat penurunan usia harapan hidup, begitu juga sebaliknya. Besarnya usia harapan hidup menurut standar UNDP adalah $20 < x < 85$.

Perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Banjar selama 5 tahun (Tahun 2016 - 2020), menunjukkan tren yang baik yaitu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2. 50. Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Banjar , 2021. Data diolah

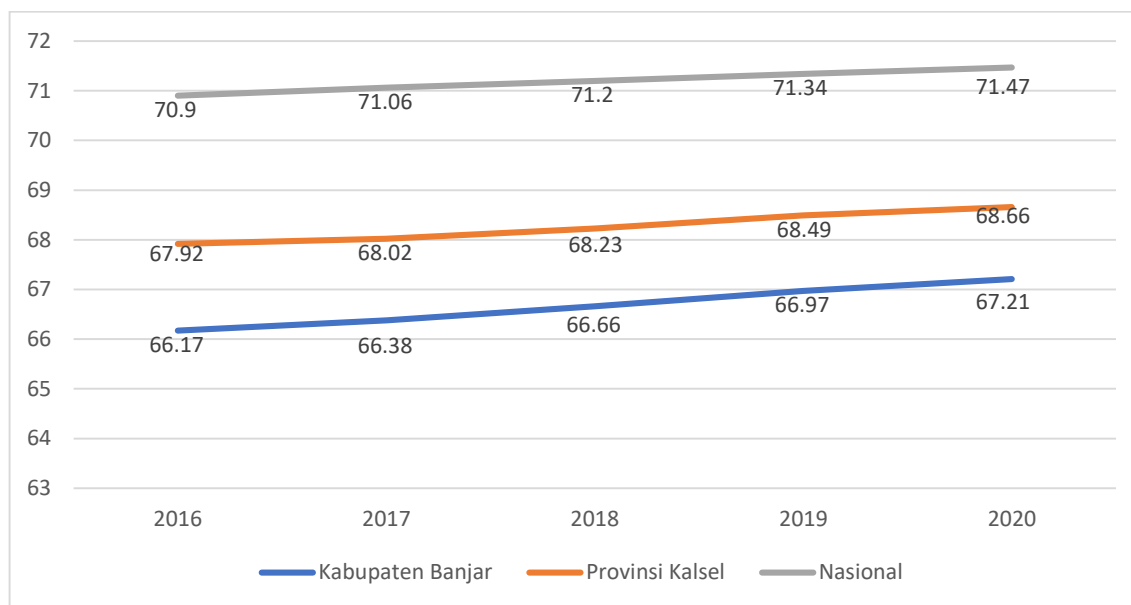
Capaian rata-rata usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar 66,17 pada tahun 2016 menjadi 66,38 di tahun 2017, di tahun 2018 kembali terjadi peningkatan menjadi 66,66. Sedangkan di tahun 2019 di angka 66,97 dan tahun 2020 mencapai 67,21. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,04 poin.

Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banjar tersebut relevan dengan perkembangan Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, di tahun 2016 sebesar 67,92 mengalami kenaikan tipis di tahun

2017 menjadi 68,02. Ditahun 2018 naik sebesar 0,11 poin menjadi 68,23 dan naik kembali di tahun 2019 68,49 (naik 0,26 poin), sementara di tahun 2020 Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 68,66. Sementara untuk kondisi Nasional di tahun 2016 sebesar 70,9 dan di tahun 2017 sebesar 71,06 (atau naik sebesar 0,16 poin), di tahun 2018 naik sebesar 0,14 poin menjadi 71,2. Untuk kondisi di tahun 2019 dan 2020, UHH Nasional berada di angka 71,34 dan 71,47.

Secara umum, kondisi Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjar masih berada di bawah Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 51. Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016 -2020



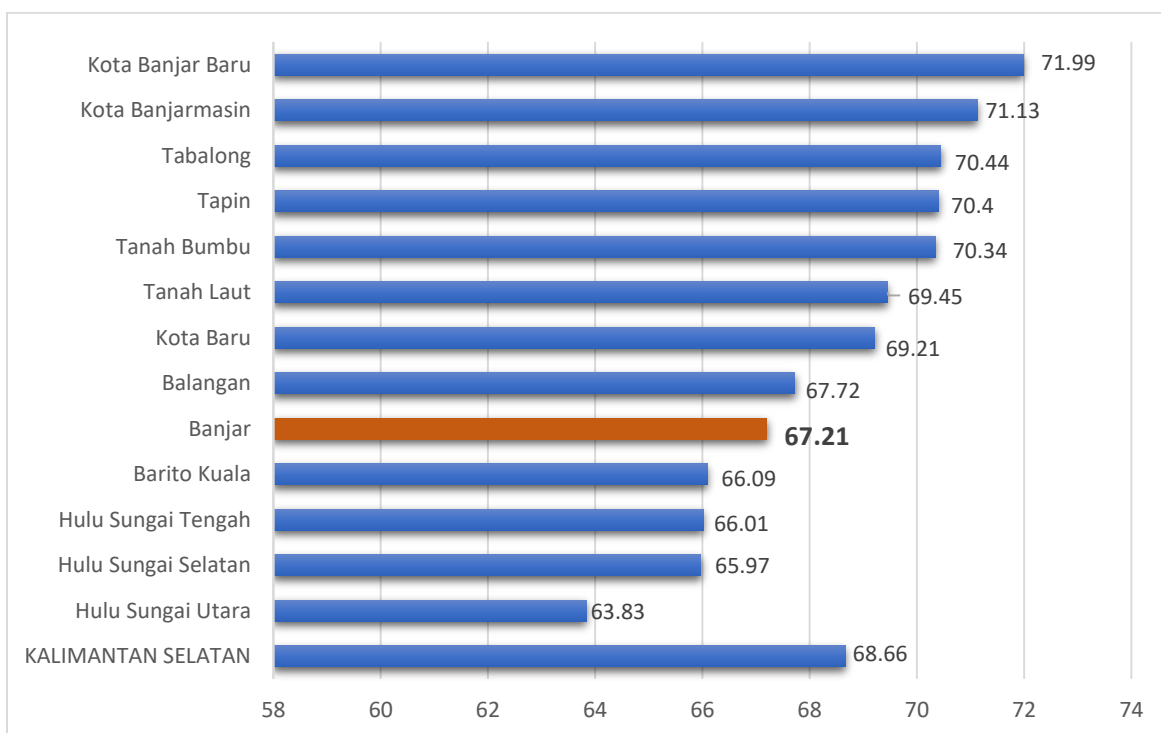
Sumber: BPS Provinsi Kalsel , BPS RI 2021. Data diolah

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian Usia harapan hidup di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, usia harapan hidup Kabupaten Banjar di tahun 2020 menempati posisi ke Sembilan sama dengan kondisi di tahun 2019.

Sedangkan Usia Harapan Hidup yang tertinggi di tempati Kota Banjarbaru dengan Usia Harapan Hidup sebesar 71,99 tahun, sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 63,83 tahun. Kondisi usia harapan hidup Kabupaten/kota di bandingkan dengan kondisi Provinsi Kalimantan, maka terdapat 7 kabupaten yang mempunyai UHH lebih rendah dari UHH Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbandingan usia harapan hidup Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 52. Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Data diolah

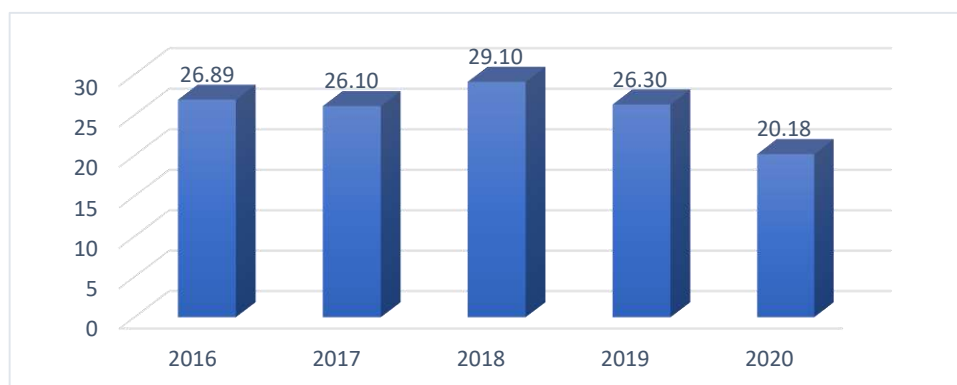
2) Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan seorang anak. Selain faktor lingkungan, juga dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Akan tetapi, sebagian besar perawakan pendek disebabkan oleh malnutrisi.

Berdasar data Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM merupakan bagian dari Sigizi Terpadu yang dapat digunakan untuk mencatat data sasaran individu dan penimbangan atau pengukurannya yang dapat memberikan feedback secara langsung status gizi sasaran tersebut, kondisi stunting di Kabupaten Banjar mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2018 terjadi peningkatan dari tahun 2017. Ditahun 2018 sebesar 29,1 turun menjadi 26,3 di tahun 2019 dan terus turun di tahun 2020 menjadi 20,18.

Gambar 2. 53. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

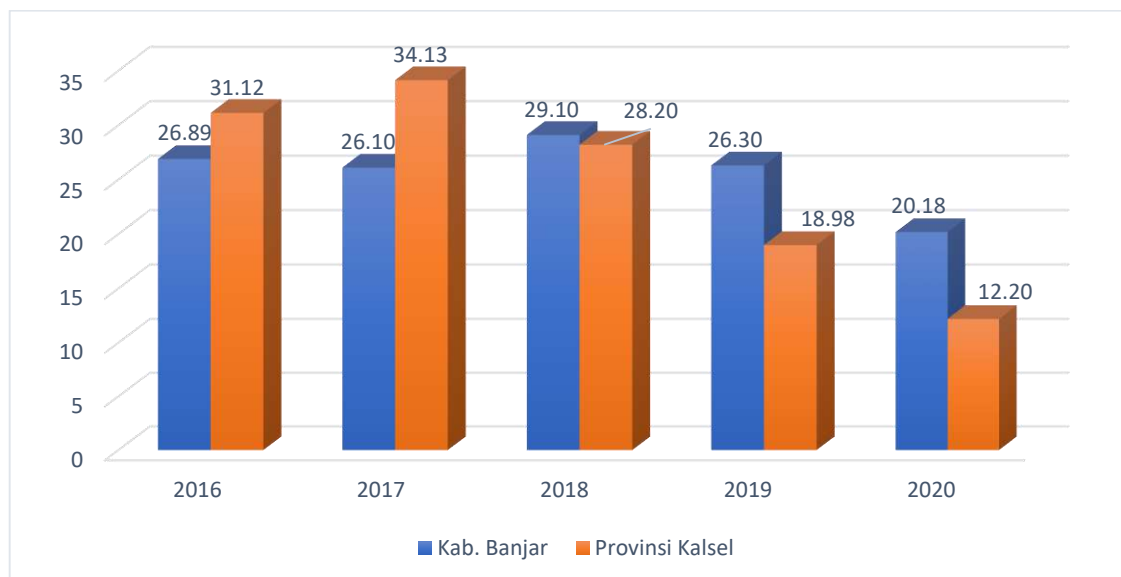


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (E-PPGBM)

Kondisi stunting Kabupaten Banjar walaupun terus turun tetapi masih berada di atas angka rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di angka 28,2 di tahun 2018 terus turun di tahun 2019 menjadi 18,98 dan di tahun 2020 sebesar 12,2. Meskipun pada tahun

2016 dan 2017, prevalensi stunting di Kabupaten Banjar lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 54 dibawah ini.

Gambar 2. 54. Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

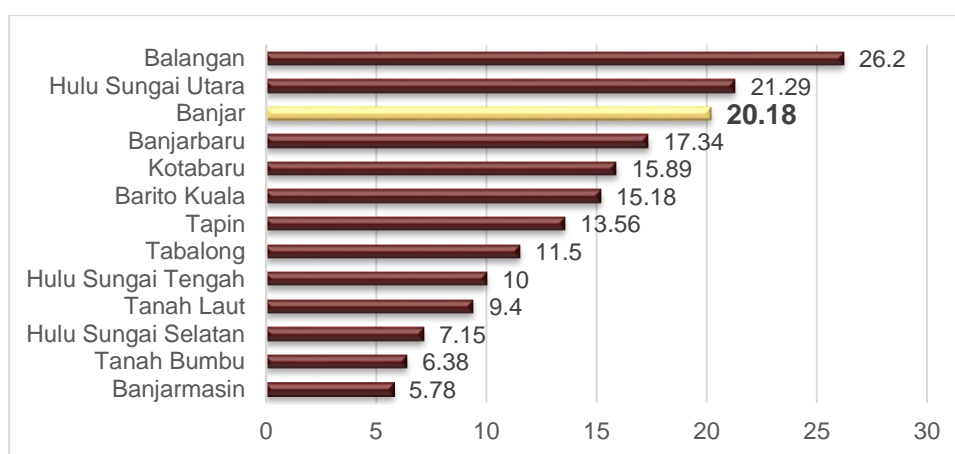


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (E-PPBGM)

Kondisi prevalensi stunting Kabupaten Banjar dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Kabupaten Banjar berada pada posisi ke sebelas tertinggi setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Sementara angka stunting terendah berada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang berada di angka 12,18, maka terdapat 6 kabupaten/kota yang memiliki angka stunting di bawah rata-rata Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tabalong.

Gambar 2. 55. Prevalensi Stunting Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (E-PPBGM)

Penanganan stunting melalui intervensi Gizi Spesifik dan intervensi sensitif secara terintegrasi sangat diperlukan sehingga anak-anak di Kabupaten Banjar dapat terbebas dari stunting.

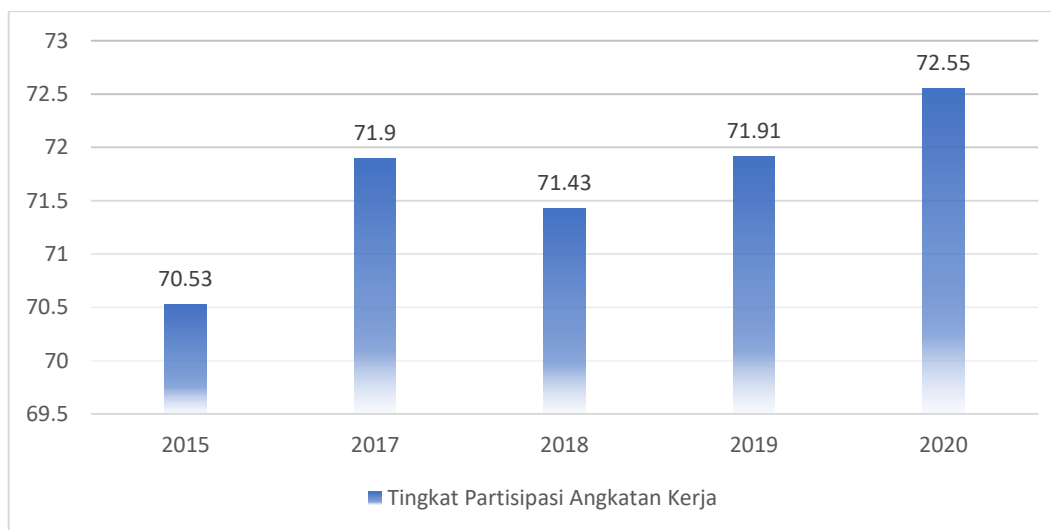
2.2.2.3. Ketenagakerjaan

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Dilihat dari sisi usia, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka banyak yang masih menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. TPAK yang rendah juga akan ditemui pada

kelompok penduduk usia kerja wanita. Keadaan ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, namun dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut, Partisipasi Angkatan Kerja juga akan mulai berubah sehingga angka TPAK ini juga cenderung untuk meningkat. Perkembangan capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banjar pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 56. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2015 - 2020



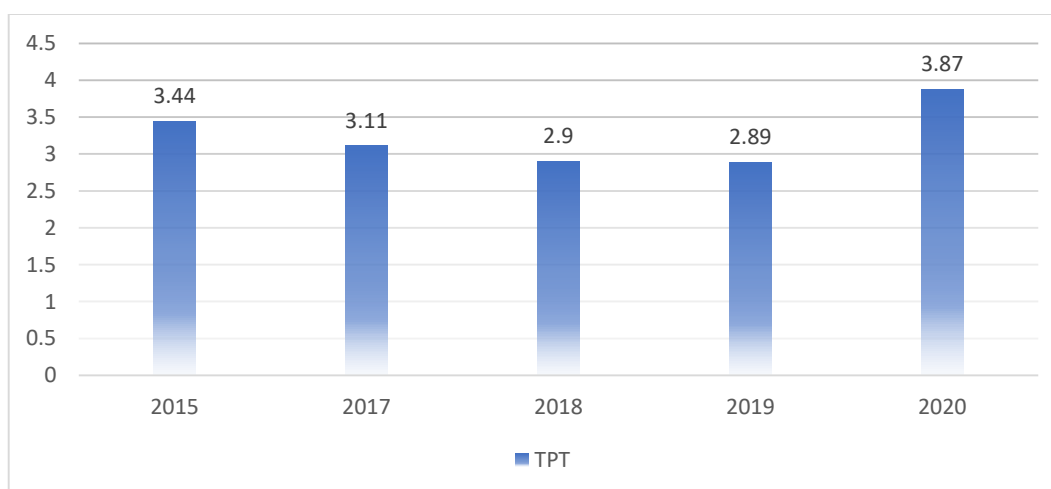
Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka 2021

Dalam 5 tahun terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Banjar fluktuatif. Pada tahun 2015 TPAK Kabupaten Banjar 70,53%, pada tahun 2016 BPS tidak melakukan perhitungan sehingga datanya langsung lompat ke tahun 2017 yang meningkat menjadi 71,90%. Data TPAK tahun 2018 adalah sebesar 71,43% dan meningkat pada tahun 2019 pada angka 71,91. Tahun 2020 mengalami peningkatan lagi pada angka 72,55%. Hal ini perlu diantisipasi karena, dilihat dari sisi tingkat kemudahan atau kesulitan untuk mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator yang cukup penting dalam masalah ketenagakerjaan yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran secara konseptual didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur dengan total penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja. Perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjar pada tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 57. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020



Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka 2021

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banjar fluktuatif. Pada tahun 2016, TPT Kabupaten Banjar adalah 3,44% dan pada tahun 2017 turun menjadi 3,11%. Tahun 2018 dan tahun 2019 juga mengalami penurunan yang masing - masing pada

angka 2,90 dan 2,89. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan persentase TPT sebesar 3,87%. Ini disebabkan pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 dan terjadiannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup besar sebagai konsekuensi pembatasan kegiatan masyarakat pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini menunjukkan perlu adanya intervensi kebijakan untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Banjar. Disisi lain, juga hal ini perlu diantisipasi karena lapangan kerja semakin terbatas namun kebutuhan akan pekerjaan terus meningkat.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Seni Budaya

Fokus pada seni budaya dan olahraga merupakan salah aspek yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus ini menggambarkan indikator-indikator seni dan budaya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kondisi perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah group kesenian aktif per 10.000 penduduk	36,43	37,9	39,2	40,3	41,5
2	Grup kesenian (jumlah)	398	405	415	424	424

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Tahun 2016, persentase jumlah grup kesenian aktif per 10.000 penduduk sebesar 36,43%, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 38,02%. Persentase jumlah grup kesenian yang aktif per 10.000 penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga sampai dengan tahun 2020 persentase jumlah grup kesenian aktif per 10.000 penduduk sebesar 41,51%. Sementara itu, jumlah grup kesenian di Kabupaten Banjar juga mengalami kenaikan. Dari tahun 2016 sebanyak 398 kelompok pada tahun 2018 menjadi 415 kelompok, kemudian selang 2 tahun berikutnya, pada tahun 2020 jumlah grup kesenian di Kabupaten Banjar sebanyak 424 kelompok. Kelompok jenis kesenian terbesar adalah kelompok Maulid Habsyi, Penabuh Bedug, dan Rudat. Namun demikian, fokus seni dan budaya di Kabupaten Banjar masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, masih terdapat beberapa hambatan dalam melestarikan seni dan budaya di Kabupaten Banjar, antara lain yang disebabkan oleh: belum optimalnya pelestarian budaya, kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya, kurangnya pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya, kurangnya ketersediaan data kebudayaan, kurangnya kajian sejarah lokal, belum optimalnya ekspresi budaya, kurangnya even festival budaya yang bernuansa religi, belum optimalnya perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya, belum optimalnya partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, belum optimalnya kajian warisan/cagar budaya, belum optimalnya pelestarian budaya yang berkaitan dengan keagamaan, masih rendahnya manajemen perayaan hari besar keagamaan, dan belum selarasnya pengamalan agama dengan seni dan budaya.

2.2.3.2. Olahraga

Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pemuda dan Olahraga, jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Banjar, baik yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Banjar, milik desa, swasta maupun pribadi/swadaya masyarakat sampai dengan tahun 2020, kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga baru 11 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, seperti tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 16. Sarana & Prasarana Olah Raga Kabupaten Banjar Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa/kelurahan	Jenis sarana/ prasarana	Kepemilikan
1.	Martapura	Indra Sari	Venue Atletik	Pemkab Banjar
2.	Martapura	Indra Sari	Dinding Panjat	Pemkab Banjar
3.	Martapura	Indra Sari	Lapangan takraw	Pemkab Banjar
4.	Martapura	Indra Sari	Stadion Demang Lehman	Pemkab Banjar

No	Kecamatan	Desa/kelurahan	Jenis sarana/ prasarana	Kepemilikan
5.	Martapura	Indra Sari	Lapangan bola volly	Pemkab Banjar
6.	Martapura	Indra Sari	Lapangan SMAN 2/ lapangan panahan	Pemkab Banjar
7.	Martapura	Kelurahan Jawa	Stadion mini barakat	Pemkab Banjar
8.	Martapura	Kelurahan Jawa	Lapangan bola basket	Pemkab Banjar
9.	Martapura	Kelurahan Jawa	Lapangan bola Volly	Pemkab Banjar
10.	Martapura	Kelurahan Jawa	Lapangan tenis	Pemkab Banjar
11.	Martapura	Cindai Alus	Gedung Dojo	Pemkab Banjar
12.	Martapura	Cindai Alus	Lapangan bulu tangkis	Swadaya masyaraakat
13.	Martapura	Sungai Sipai	Lapangan bola volly	Swadaya masyarakat
14.	Sungai Pinang	Sungai pinang	Lapangan bola volly	Pemkab Banjar
15.	Sungai Pinang	Sungai Pinang	Tanah lapangan sepak bola	Pemkab Banjar
16.	Pengaron	Kertak Empat	Lapangan bola volly	Pemkab Banjar
17.	Martapura Timur	Mekar	Gedung Tenis Meja	Swasta
18.	Gambut	Malintang	Gedung bulu tangkis	Desa
19.	Karang Intan	Mandiingin	Lapangan sepk bola	Pemkab Banjar
20.	Karang Intan	Awang Bangkal	Gedung Bulu tangkis	Desa
21.	Beruntung Baru	Kampung Baru	Gedung Bulu tangkis	Pemkab Banjar
22.	Kertak Hanyar	Mandar sari	Lapangan bulu tangkis/kuntau	Milik pribadi /masyaraakat
23.	Kertak Hanyar	Tatah pemangkih Laut	Lapangan bulu tangkis	Swadaya masyarakat
24.	Kertak Hanyar	Manarap lama	Lapangan bulu tangkis	Milik pribadi
25.	Kertak Hanyar	Kertak Hanyar 1	Lapangan bulu tangkis	Milik swasta
26.	Kertak Hanyar	Manarap baru	Lapangan bulu tangkis	Swadaya masyarakat
27.	Telaga Bauntung	Telaga Baru	Lapangan sepak bola, bulu tangkis dan bola volly	Pemkab Banjar
28.	Telaga Bauntung	Rampah	Lapangan sepak bola, bulu tangkis dan bola volly	Pemkab Banjar
29.	Telaga Bauntung	Lok Tanah	Lapangan sepak bola, bulu tangkis dan bola volly	Pemkab Banjar
30.	Telaga Bauntung	Rantau Bujur	Lapangan sepak bola, bulu tangkis dan bola volly	Pemkab Banjar
31.	Aranio	Aranio	Lapangan sepak bola, bulu tangkis dan bola volly	Desa
32.	Aranio	Tiwingan	Lapangan Bulu tangkis	Desa
33.	Aranio	Kalaan	Lapangan sepk bola dan bulu tangkis	Desa
34.	Aranio	Benua Riam	Lapangan Sepak bola, bulu tangkis dan tenis meja	Desa
35.	Aranio	Paau	Lapangan Sepak bola, bulu tangkis dan tenis meja	Desa
36.	Aranio	Artain	Lapangan sepak bola	Desa

No	Kecamatan	Desa/kelurahan	Jenis sarana/ prasarana	Kepemilikan
37.	Aranio	Apuai	Lapangan bulu tangkis	Desa
38.	Aranio	Rantau Bujur	Lapangan sepak bola dan bulu tangkis	Desa
39.	Aranio	Rantau Balai	Lapangan bulu tangkis	Desa
40.	Aranio	Tiwingan Lama	Lapangan bulu tangkis	Desa
41.	Aranio	Belangian	Lapangan sepak bola dan bulu tangkis	Desa
42.	Aranio	Bunglai	Lapangan sepak bola dan bulu tangkis	Desa
43.	Martapura Barat	Sungai Rangas Tengah	Gedung tenis meja	Desa
44.	Martapura Barat	Tangkas	Lapangan sepak bola dan lapangan Futdsal	Desa/swadaya masyarakat
45.	Martapura Barat	Sungai Rangas	Peralatan dayung	Desa/swadaya masyarakat
46.	Martapura Barat	Teluk Selong	Lapangan sepak bola	Swadaya masyarakat
47.	Martapura Barat	Keliling Benteng Ulu	Jukung tradisional dan peralatan catur	Desa/swadaya masyarakat
48.	Martapura Barat	Antasan Sutun	Lapangan tenis meja	Swadaya masyarakat
49.	Martapura Barat	Sungai Batang	Lapangan sepak bola	Swadaya masyarakat
50.	Martapura Barat	Sungai Rangas Ulu	Lapangan bulu tangkis	Milik swasta

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar

2. 3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang penting dalam upaya mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan di Kabupaten Banjar. Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar agar masyarakat memperoleh Pendidikan yang layak. Pendidikan yang komprehensif merupakan investasi jangka Panjang yang harus dipersiapkan dengan cermat jika suatu wilayah ingin mewujudkan pembangunan di seluruh bidang. Pembangunan sumber daya manusia terutama di sisi pendidikan krusial dalam mencapai sumber daya manusia yang unggul, inovatif, cerdas dan kompetitif. Semakin tinggi tingkat pendidikan rakyat suatu bangsa maka semakin besar akses dan peluang bangsa tersebut untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata.

1) Fasilitas Sekolah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program penyelenggaraan pendidikan. Pencapaian pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana serta peralatan yang cukup memadai dan berkualitas. Salah satu penyediaan sarana pendidikan yaitu ketersediaan sekolah dan kapasitas ruang kelas yang dapat menampung siswa. Jumlah sekolah di Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 17. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun Ajaran 2020/2021

Kecamatan	SD	MI	SMP	MTs	SMA/SMK	MA
Aluh	26	7	8	5	2	2
Beruntung Baru	10	4	1	-	1	-
Gambut	25	6	3	5	4	2
Kertak Hanyar	18	9	3	3	1	2
Tatah Makmur	11	13	1	2	-	1
Sungai Tabuk	31	5	4	4	2	1
Martapura	39	6	10	3	10	2
Martapura Timur	18	3	2	4	-	1
Martapura Barat	13	11	2	13	2	8
Astambul	29	3	4	1	1	1
Karang Intan	29	4	8	3	3	1
Aranio	11	3	4	1	-	-
Sungai Pinang	17	5	3	2	-	1
Paramasan	9	3	1	3	3	-
Pengaron	16	3	3	1	1	-
Sambung Makmur	8	14	3	6	2	5
Mataraman	22	5	4	2	1	1
Simpang Empat	34	-	4	-	1	-
Telaga Bauntung	5	-	1	-	-	-
Cintapuri Darussalam	-	-	4	-	-	-
Kabupaten Banjar	371	104	73	58	34	38

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2021, Diolah

Pada tahun ajaran 2020/2021 di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 475 SD/MI, 131 SMP/MTs dan 72 SMA/SMK/MA. Kecamatan Martapura mendominasi jumlah sekolah di semua jenjang Pendidikan yaitu sebanyak 45 SD/MI, 13 SMP/MTs. Jumlah SD/MI yang paling sedikit berada di Kecamatan Telaga Bauntung sebanyak 5 sekolah sedangkan jumlah SMP/MTs yang paling sedikit berada di Kecamatan Paramasan dan Telaga Bauntung. Sedangkan Kecamatan yang hanya memiliki sekolah jenjang SMP/MTs adalah Kecamatan Cintapuri Darussalam yaitu sebanyak 4 sekolah.

Tabel 2. 18. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun Ajaran 2020/2021.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. SD Sederajat			
- SD	371	43287	3064
- MI	104	15019	1260
2. SMP Sederajat			
- SMP	73	13092	1196
- MTs	58	9361	1018
3. SMA Sederajat			
- SMA & SMK	34	13249	851
- MA	38	5267	435

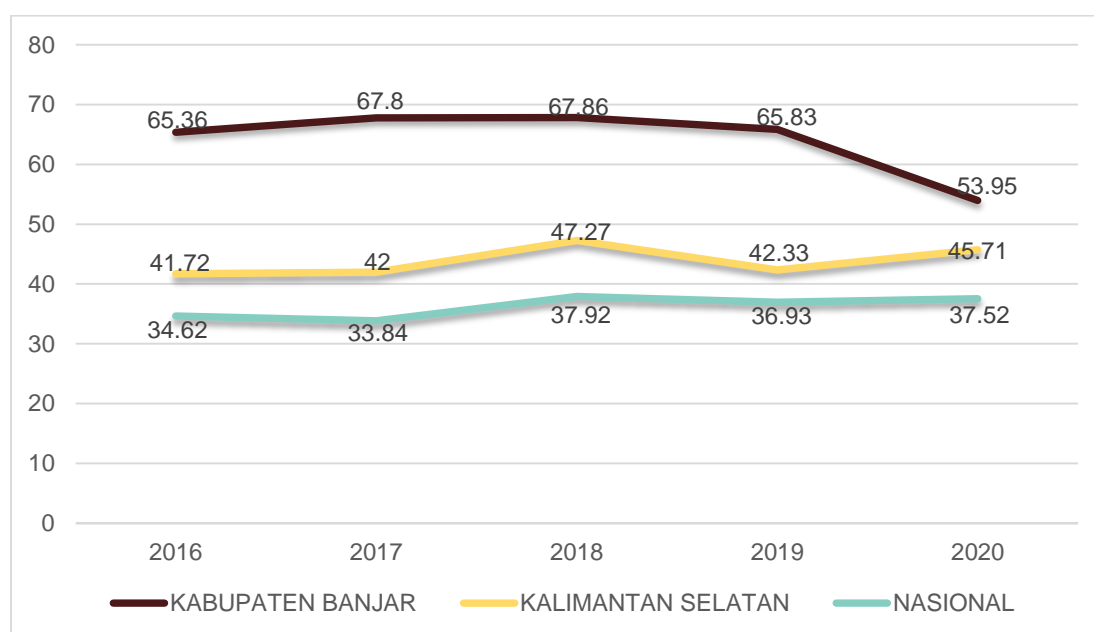
Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021, Diolah

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang sebelum jenjang dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu jenjang yang diselenggarakan sebelum jenjang dasar tetapi bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi halus dan kasar), kecerdasan (daya, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosial-emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Gambar 2. 58. Perbandingan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kab Banjar, 2021, BPS RI tahun 2021

Berdasar gambar di atas, APK PAUD/TK/RA/SPS di Kabupaten Banjar di tahun 2016 sampai dengan 2018 stabil mengalami peningkatan secara tipis yaitu sebesar 65,36 di tahun 2016, 67,8 di tahun 2017 dan 67,86 di tahun 2018. Namun di tahun 2019, APK PAUD terkoreksi turun di angka 65,83 dan menurun tajam sebesar 53,96 di tahun 2020.

Namun demikian, APK PAUD Kabupaten Banjar masih berada di atas APK PAUD tingkat Provinsi dan Nasional, dimana APK PAUD Provinsi Kalimantan Selatan berada di angka 45,71 di tahun 2020 sedangkan Nasional berada di angka 37,52.

Pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah satuan pendidikan dan rombongan belajar PAUD di Kabupaten Banjar per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 19. Jumlah Satuan Pendidikan Dan Rombel PAUD di Kabupaten Banjar Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN		ROMBONGAN BELAJAR	
		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA
1	ALUH ALUH	2	4	5	8
2	ARANIO				2
3	ASTAMBUL		6		12
4	BERUNTUNG BARU	1	2	3	6
5	CINTAPURI DARUSSALAM	1	3	1	7
6	GAMPUT		13		35
7	KARANG INTAN		13		30
8	KERTAK HANYAR	1	10	6	30
9	MARTAPURA BARAT		5		7

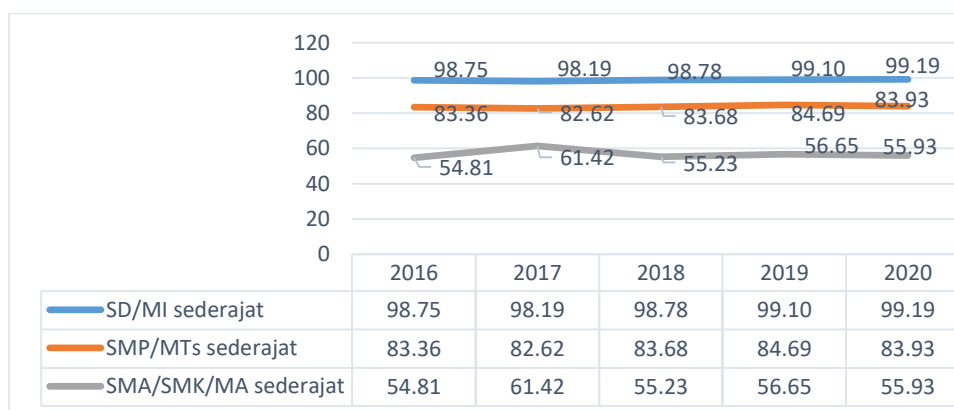
NO	NAMA KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN		ROMBONGAN BELAJAR	
		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA
10	MARTAPURA KOTA	7	35	30	96
11	MARTAPURA TIMUR	1	6	2	14
12	MATARAMAN	1	17	4	33
13	PARAMASAN				
14	PENGARON	1	4	3	9
15	SAMBUNG MAKMUR		1		2
16	SIMPANG EMPAT	1	5	2	14
17	SUNGAI PINANG	1	5	2	10
18	SUNGAI TABUK		20		58
19	TATAH MAKMUR		2		4
20	TELAGA BAUNTUNG	1	1	2	1
	JUMLAH	18	152	60	378

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Banjar, 2020

3) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan yang mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Banjar pada Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2. 59 berikut :

Gambar 2. 59. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

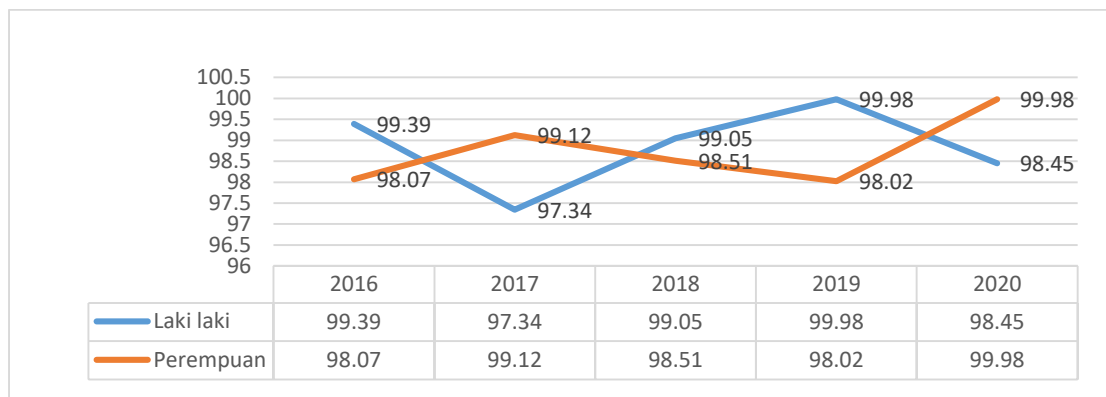
Angka partisipasi sekolah SD/MI dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Banjar bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016, yaitu dari 98,75 % menjadi 98,19 % atau turun sebesar 0,56 poin, dan pada tahun 2018 meningkat kembali sebesar 0,59 poin menjadi 98,78% dan di tahun 2019 bertambah 0,32 poin menjadi 99,10 serta pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 99,19.

Angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam rentang tahun 2016-2020 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan diangka 82,62% ,dan meningkat kembali pada tahun 2018 diangka 83,68% sedangkan di tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu terjadi penambahan sebesar 1,01 poin menjadi 84,69 akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 83,93.

Angka partisipasi sekolah SMA/MA dalam 3 tahun terakhir cenderung berfluktuasi, tetapi pada tahun 2018 menurun sebesar 6,19 poin menjadi 55,23 dari tahun 2017 di angka 61,42, namun kondisi ini membaik di tahun 2019 dengan adanya peningkatan sebesar 1,42 poin menjadi 56,65 tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 55,93.

Jika APS tersebut dilihat secara lebih detail berdasar jenis kelamin, disajikan melalui gambar di bawah ini:

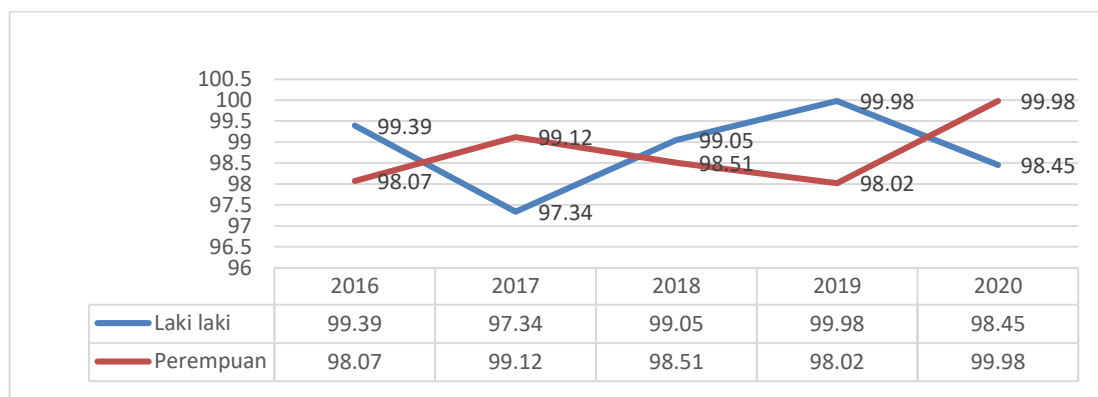
Gambar 2. 60. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 -2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Berdasarkan gambar di atas, untuk APS SD/MI baik laki-laki maupun perempuan berfluktuasi dari tahun ke tahun, untuk APS laki-laki di tahun 2016 sebesar 99,39 berada di atas APS SD/MI perempuan di angka 98,07 atau selisih 1,32 poin. Namun kondisi ini berbalik di tahun 2020 dimana APS SD/MI laki-laki menjadi lebih rendah dari APS SD/MI perempuan yaitu untuk laki-laki di angka 98,45 sementara perempuan sebesar 99,98 atau terdapat selisih sebesar 1,53 poin.

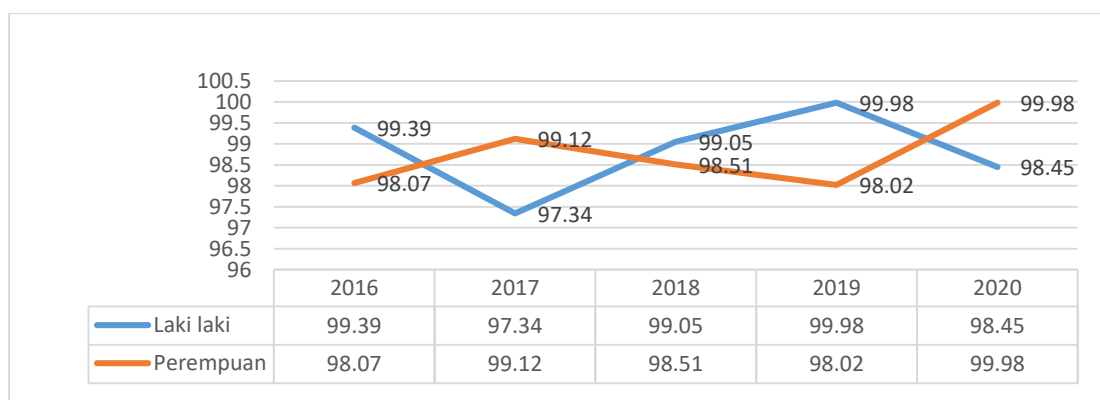
Gambar 2. 61. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2020

Dari gambar di atas, kondisi APS SMP/MTs baik laki-laki maupun perempuan mengalami fluktuatif, dimana untuk tahun 2016 APS SMP/MTs perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dengan selisih 8,11 poin yaitu untuk APS laki-laki di angka 78,89 dan APS perempuan 87. Kondisi ini berbalik di tahun 2020 dimana APS SMP/MTs laki-laki lebih tinggi di banding perempuan dengan selisih sebesar 2,96 dimana APS laki-laki sebesar 85,42 sedangkan perempuan sebesar 82,46

Gambar 2. 62. Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

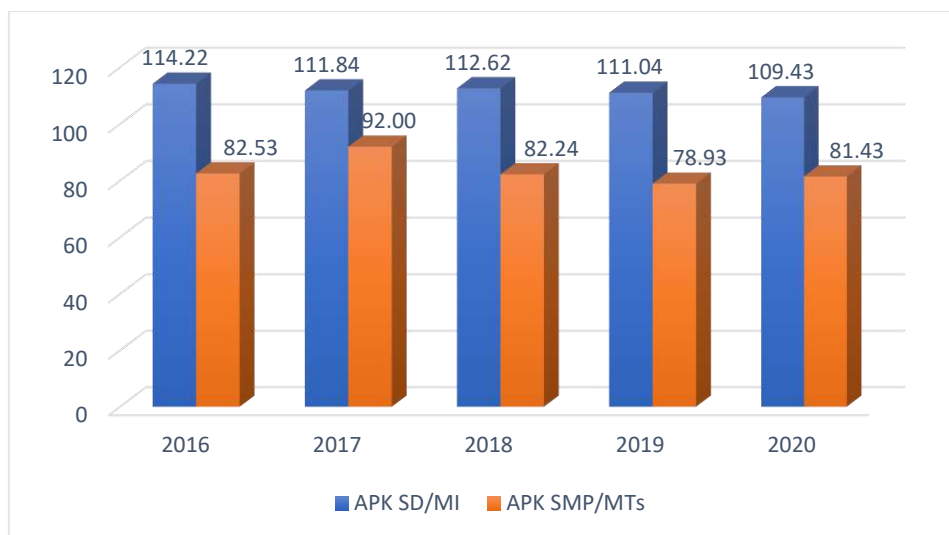
Dari gambar di atas, kondisi APS SMA/SMK/MA baik laki-laki maupun perempuan mengalami fluktuatif, dimana untuk tahun 2016 APS SMA/SMK/MA perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dengan selisih 10,76 poin yaitu untuk APS laki-laki di angka 50,14 dan APS perempuan 60,9. Kondisi ini berbalik di tahun 2020 dimana APS SMA/SMK/MA laki-laki lebih tinggi

di banding perempuan dengan selisih sebesar 20,76 dimana APS laki-laki sebesar 65,73 sedangkan perempuan sebesar 44,97.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Secara umum APK SD/MI naik dan turun selama 5 tahun terakhir, sedangkan APK/SMP/MTs juga demikian. APK SD/MI pada tahun 2016 sebesar 114,22 menurun menjadi 111,84 pada tahun 2017. Tahun 2018 mengalami kenaikan pada angka 112,62. Tahun 2019 mengalami penurunan di angka 111,04 dan 2020 juga mengalami penurunan pada angka 109,43. APK SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 82,53 meningkat menjadi 92,00 pada tahun 2017. Tahun 2018 mengalami penurunan pada angka 82,24. Tahun 2019 mengalami penurunan yang pada angka 78,93 dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 81,47..

Gambar 2. 63. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020

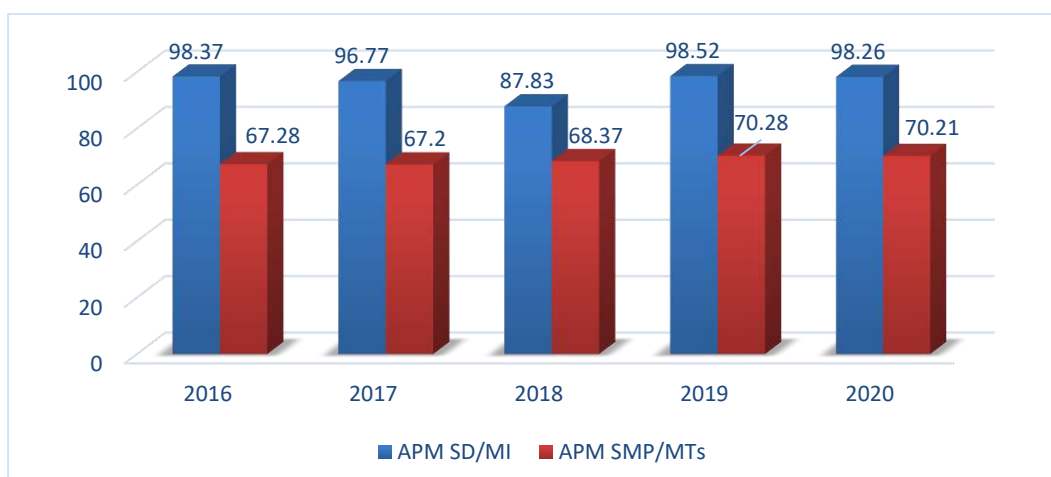


Sumber: BPS Kabupaten Banjar , data diolah

5) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada usia yang sama. Secara umum APM SD/MI selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif, sedangkan APM/SMP/MTs juga sama. APM SD/MI pada tahun 2016 sebesar 98,37% menurun menjadi 96,77% pada tahun 2017. Tahun 2018 mengalami penurunan pada angka 87,83%. Namun di tahun 2019 mengalami kenaikan pada angka 98,52%, dan tahun 2020 mengalami penurunan di angka 98,26%. APM SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 67,28 turun menjadi 80,53% pada tahun 2017. Tahun 2018 mengalami kenaikan pada angka 68,37%. Tahun 2019 APM Kabupaten Banjar naik pada angka 70,28 dan tahun 2020 turun menjadi 70,21%.

Gambar 2. 64. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar , data diolah

6) Angka Putus Sekolah

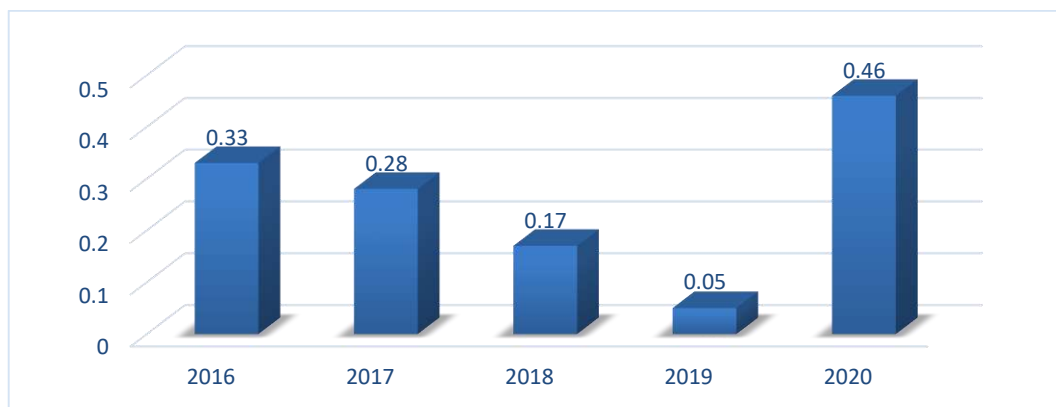
Angka putus sekolah dipergunakan Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah (APtS). Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

a) Angka Putus Sekolah SD

Angka putus sekolah jenjang Pendidikan SD usia 7-12 tahun di Kabupaten Banjar tahun 2016 - 2019 mengalami penurunan setiap tahun tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup besar. Peningkatan angka putus sekolah tahun 2020, diduga salah satunya disebabkan oleh dampak pandemi covid-19, dimana pembelajaran tatap muka di sekolah tidak dilakukan tetapi secara daring sehingga minat sekolah anak menjadi turun.

Gambar 2. 65. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



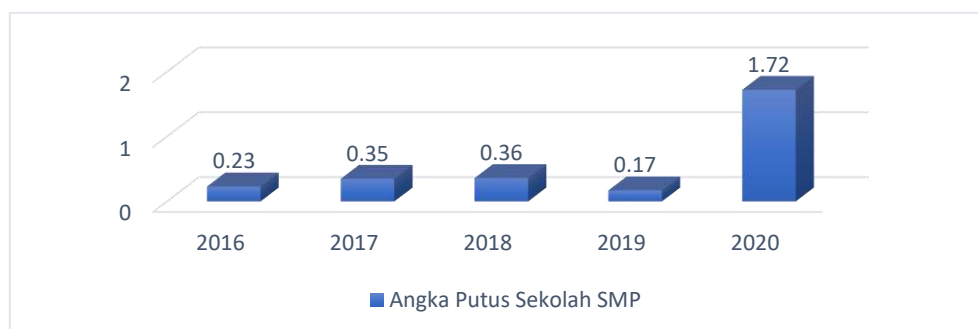
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Banjar

Berdasarkan Gambar diatas diketahui bahwa tahun 2016 rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat kurang dari 1 anak yang putus sekolah dan tidak ada anak yang putus sekolah. Capaian tersebut mampu dipertahankan hingga tahun 2019 dimana capaian angka putus sekolah untuk usia anak 7-12 berada pada kisaran angka 0,05%. Sedangkan pada tahun 2020 berada pada kisaran angka 0,46, angka ini mengalami kenaikan paling tinggi selama 5 tahun.

b) Angka Putus Sekolah SMP

Seperti angka putus sekolah jenjang Pendidikan SD, angka putus sekolah jenjang Pendidikan SMP memiliki pola yang sama setiap tahunnya yaitu cenderung mampu ditekan jumlah anak-anak yang putus sekolah.

Gambar 2. 66. Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Banjar

Berdasarkan Gambar diatas diketahui bahwa tahun 2016 rata-rata dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah kurang dari 1 anak yang putus sekolah. Capaian kinerja tersebut mampu ditingkatkan dengan menekan angka putus sekolah hingga

tahun 2019 dimana capaian angka putus sekolah untuk usia anak 13-15 berada pada kisaran angka 0,17% (tidak ada anak yang putus sekolah untuk setiap 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah). Namun pada tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 1,72 dan merupakan peningkatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

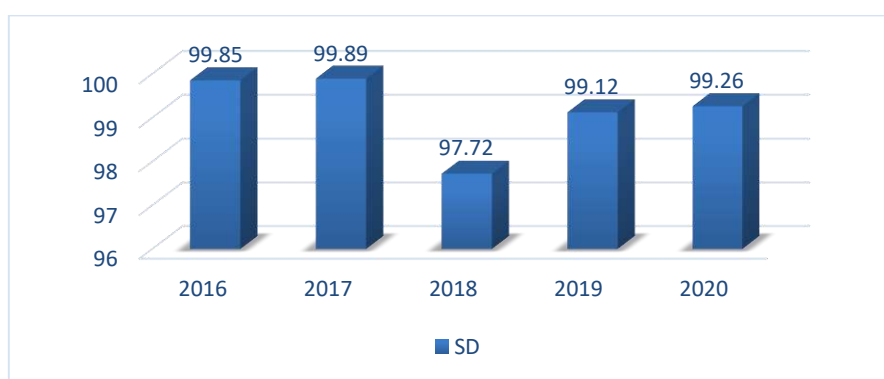
7) Angka Kelulusan

Persentase jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang Pendidikan tertentu yang lulus. Semakin tinggi persentase anak sekolah yang lulus pada masing-masing jenjang menunjukkan semakin baik pula sistem Pendidikan pada jenjang tersebut, begitu pula sebaliknya.

a) Angka Kelulusan SD

Angka kelulusan jenjang Pendidikan SD di Kabupaten Banjar sudah menunjukkan capaian yang baik, dimana setiap tahun (2016-2020) capaian tersebut hampir mencapai 100% kelulusan untuk jenjang Pendidikan SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir 100% anak-anak yang masuk jenjang Pendidikan SD di Kabupaten Banjar mampu menamatkan pendidikannya hingga tuntas/ selesai. Dengan demikian sistem Pendidikan yang telah terbangun di Kabupaten Banjar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama bagi anak-anak yang masuk dalam kategori jenjang Pendidikan SD.

Gambar 2. 67. Angka Kelulusan Sekolah Dasar di Kabupaten Banjar 2016-2020

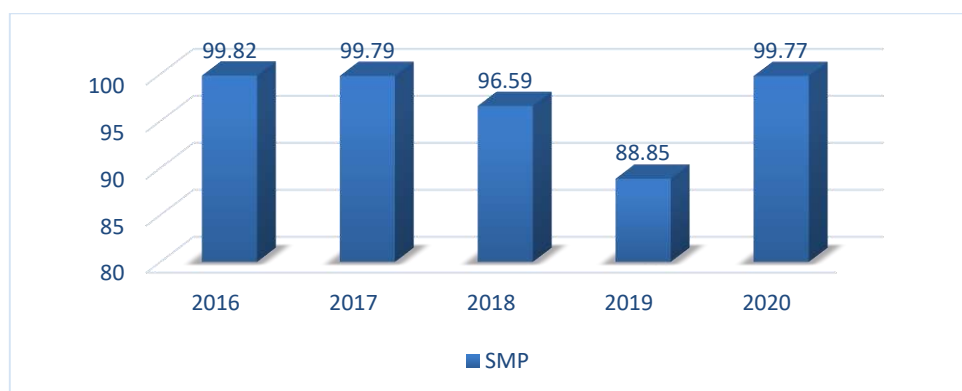


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

b) Angka Kelulusan SMP

Angka kelulusan jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Banjar sudah menunjukkan capaian yang baik, dimana setiap tahun (2016-2020) dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2. 68. Angka Kelulusan Sekolah menengah Pertama di Kabupaten Banjar 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

Tidak jauh berbeda dengan angka kelulusan jenjang Pendidikan SD, capaian kinerja angka kelulusan jenjang Pendidikan SMP juga menunjukkan hasil yang positif meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2019 dimana angka kelulusan SMP berada pada angka 88,85%, namun peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 99,77%. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 angka kelulusan selalu berada pada kisaran angka 96,85 ke atas bahkan tahun 2016 hampir mendekati sempurna.. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem Pendidikan yang telah terbangun di Kabupaten Banjar untuk jenjang Pendidikan SMP dapat berjalan dengan baik.

8) Rasio Guru terhadap Murid

Jumlah guru yang mampu memenuhi jumlah siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar sangatlah penting. Selain untuk menunjang kualitas pendidikan, rasio guru terhadap murid juga sebagai bagian dari adanya sekolah yang mampu

memenuhi jumlah murid di Kabupaten Banjar, maka, perlu pula dukungan akan tenaga pendidik, atau Guru yang terdapat di Kabupaten Banjar. Berikut adalah capaian dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 20. Rasio Murid-Guru Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Rasio Murid-Guru	2016	2017	2018	2019	2020
SD Sederajat	13,9	12,06	12,94	12,63	13,48
SMP Sederajat	10,84	10,59	11,16	11,22	10,14

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2020

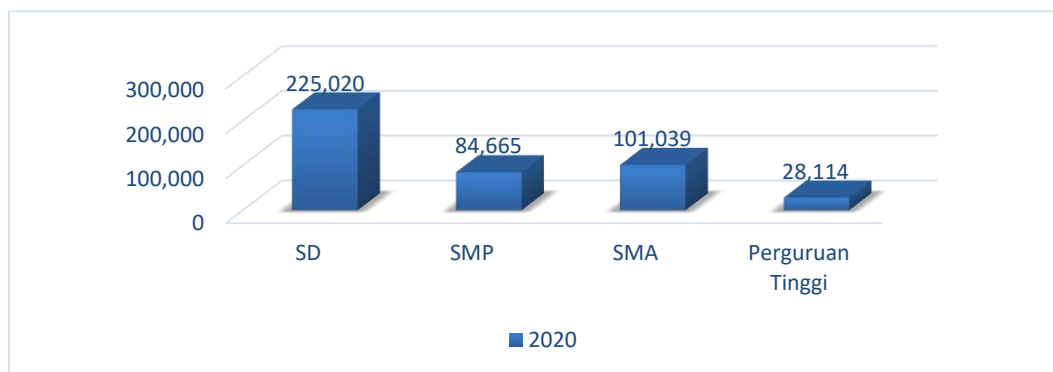
Gambaran untuk rasio-guru selama rentang waktu tahun 2016-2020 pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan trend yang meningkat. Untuk rasio murid-guru SD/MI meskipun selama kurun waktu tersebut berfluktuatif namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020 mencapai 13,48. Untuk rasio murid-guru SMP/MTs dari sebesar 10,84 di tahun 2016 menjadi sebesar 10,14 di tahun 2020.

9) Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan

a) Pendidikan Tertinggi Masyarakat Kabupaten Banjar

Data penduduk Kabupaten Banjar tahun 2020 yang Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2. 69. Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan 2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2020

Berdasarkan data di atas, terdapat 225.020 penduduk dengan lulusan SD, 84.665 penduduk lulusan SMP, 101.039 penduduk lulusan SMA dan terdapat 28.114 penduduk lulusan perguruan tinggi.

b) Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Sertifikasi guru merupakan hal yang penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Semakin banyak guru yang tersertifikasi, maka semakin banyak pula guru yang profesional dan berkualitas. Di kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2020, persentase guru yang bersertifikasi sebesar 47,91% sedangkan persentase tenaga kependidikan guru terlatih sebesar 48,66 % yang artinya masih perlu untuk ditingkatkan (LKjIP Disdik 2021).

Tabel 2. 21. Data Pendidik TK-PAUD di Kab. Banjar per Kecamatan Berdasarkan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK				SERTIFIKAT PENDIDIK	
		SMA	D2	D3	D4/S1	MEMILIKI	TIDAK
1	ALUH ALUH	14	0	1	11	3	23
2	ARANIO		0	0	0	0	0
3	ASTAMBUL	2	0	0	0	2	0
4	BERUNTUNG BARU	4	0	0	6	3	7
5	CINTAPURI DARUSSALAM	4	0	0	4	0	8
6	GAM BUT	12	1	0	34	17	30
7	KARANG INTAN	22	0	0	17	13	26
8	KERTAK HANYAR	16	1	3	41	12	49

NO	NAMA KECAMATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK				SERTIFIKAT PENDIDIK	
		SMA	D2	D3	D4/S1	MEMILIKI	TIDAK
9	MARTAPURA BARAT	9	0	0	2	1	10
10	MARTAPURA KOTA	43	6	0	139	64	124
11	MARTAPURA TIMUR	13	0	0	8	2	19
12	MATARAMAN	14	0	0	23	8	29
13	PARAMASAN	0	0	0	0	0	0
14	PENGARON	4	0	0	6	1	9
15	SAMBUNG MAKMUR	3	0	0	0	0	3
16	SIMPANG EMPAT	8	0	0	7	0	15
17	SUNGAI PINANG	11	0	0	3	0	14
18	SUNGAI TABUK	36	0	0	35	15	56
19	TATAH MAKMUR	2	0	0	3	0	5
20	TELAGA BAUNTUNG	2	0	0	1	0	3
	JUMLAH	219	8	4	340	141	430

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, 2020

Tabel 2. 22. Data Pendidik Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Banjar per Kecamatan Berdasarkan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	SMP	KUALIFIKASI AKADEMIK					SERTIFIKAT PENDIDIK	
			SMA	D1	D2	D3	D4/S1	MEMILIKI	TIDAK
1	ALUH ALUH	0	11	0	8	0	183	62	140
2	ARANIO	0	2	0	1	0	88	37	54
3	ASTAMBUL	1	10	0	11	0	209	137	94
4	BERUNTUNG BARU	1	2	0	3	0	67	44	29
5	CINTAPURI DARUSSALAM	0	1	0	1	0	5	5	2
6	GAMBUT	0	5	0	16	0	175	93	103
7	KARANG INTAN	0	11	2	5	0	219	132	105
8	KERTAK HANYAR	0	3	0	6	0	150	67	92
9	MARTAPURA BARAT	0	17	0	4	0	91	57	55
10	MARTAPURA KOTA	0	23	0	10	0	342	208	167
11	MARTAPURA TIMUR	0	18	2	6	0	125	86	65
12	MATARAMAN	0	7	4	7	0	145	89	74
13	PARAMASAN	0	1	0	0	0	43	30	14
14	PENGARON	2	3	0	6	0	108	54	65
15	SAMBUNG MAKMUR	0	1	0	1	0	56	20	38
16	SIMPANG EMPAT	0	7	0	13	0	224	109	135
17	SUNGAI PINANG	0	5	0	7	0	95	39	68
18	SUNGAI TABUK	0	18	0	12	0	241	137	134
19	TATAH MAKMUR	0	2	0	7	0	69	38	40
20	TELAGA BAUNTUNG	0	1	0	3	0	34	13	25
	JUMLAH	4	148	8	127	0	2669	1457	1499

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. 2020

Tabel 2. 23. Data Pendidik Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Kab. Banjar per Kecamatan Berdasarkan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	PENDIDIK		KUALIFIKASI AKADEMIK				SERTIFIKAT PENDIDIK	
		PNS	BPNS	SMA	D2	D3	D4/S1	MEMILIKI	TIDAK
1	ALUH ALUH	59	30	0	0	0	89	40	49
2	ARANIO	34	10	0	0	0	44	22	22

NO	NAMA KECAMATAN	PENDIDIK		KUALIFIKASI AKADEMIK				SERTIFIKAT PENDIDIK	
		PNS	BPNS	SMA	D2	D3	D4/S1	MEMILIKI	TIDAK
3	ASTAMBUL	49	18	0	0	0	67	27	40
4	BERUNTUNG BARU	12	0	0	0	0	12	12	0
5	CINTAPURI DARUSSALAM	25	17	1	0	0	41	16	26
6	GAMBUT	51	9	0	0	0	60	46	14
7	KARANG INTAN	80	26	0	0	0	106	51	55
8	KERTAK HANYAR	42	5	0	0	0	47	40	7
9	MARTAPURA BARAT	22	1	0	0	0	23	20	3
10	MARTAPURA KOTA	137	26	0	0	0	163	146	17
11	MARTAPURA TIMUR	28	12	0	0	0	40	22	18
12	MATARAMAN	43	18	0	0	0	61	22	39
13	PARAMASAN	9	7	0	0	0	16	4	12
14	PENGARON	22	15	0	0	0	37	13	24
15	SAMBUNG MAKMUR	13	8	1	0	0	20	7	14
16	SIMPANG EMPAT	38	32	0	0	0	70	26	44
17	SUNGAI PINANG	21	11	0	0	0	32	13	19
18	SUNGAI TABUK	51	21	1	0	0	71	39	33
19	TATAH MAKMUR	11	3	0	0	0	14	12	2
20	TELAGA BAUNTUNG	6	3	0	0	0	9	5	4
	JUMLAH	753	272	3	0	0	1022	583	442

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, 2020

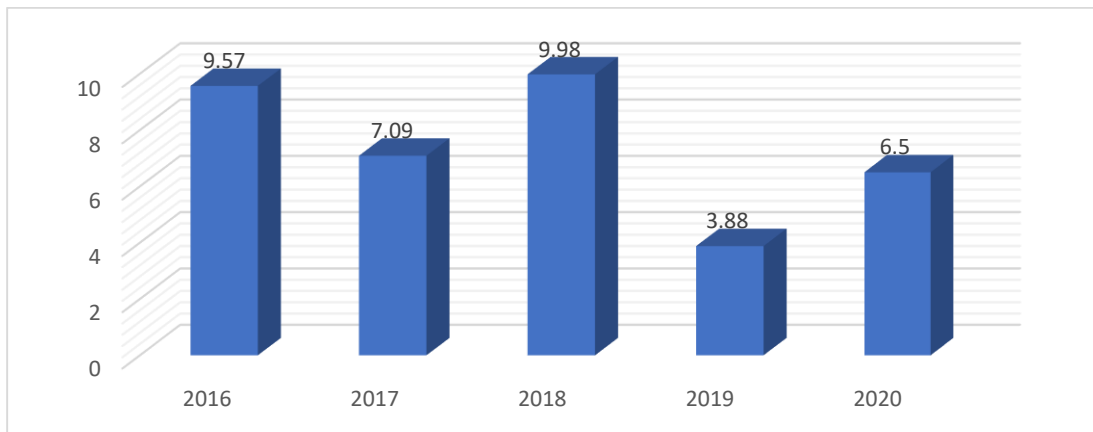
2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Maka, harus ada pembangunan kesehatan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Di sisi lain, adanya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar. Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Banjar.

1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Perkembangan angka kematian bayi Kabupaten Banjar selama periode 2016-2020 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2. 70. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

Dari Gambar diatas, dapat dilihat perkembangan Angka Kematian Bayi di kabupaten Banjar mengalami fluktuasi dari Tahun 2016 sebesar 9,57/1.000 KH turun secara signifikan di tahun 2017 menjadi sebesar 7,09/1.000 KH. Angka ini mengalami kenaikan kembali di tahun 2018 menjadi 9,98/1.000 KH dan terus menurun tajam di tahun 2019 menjadi sebesar 3,88/1.000 KH. AKI mengalami peningkatan sebesar 2,62 poin menjadi 6,5/1.000 KH ditahun 2020. Jika dilihat dari angka absolut maka kasus AKI mengalami kenaikan di tahun 2019 dari 42 kasus menjadi 73 kasus.

Tabel 2. 24. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Bayi 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Perhitungan AKB per 1.000 kh
2016	106	11.074	9,57
2017	78	11.007	7,09
2018	107	10.717	9,98
2019	42	10.812	3,88
2020	73	11.161	6,5

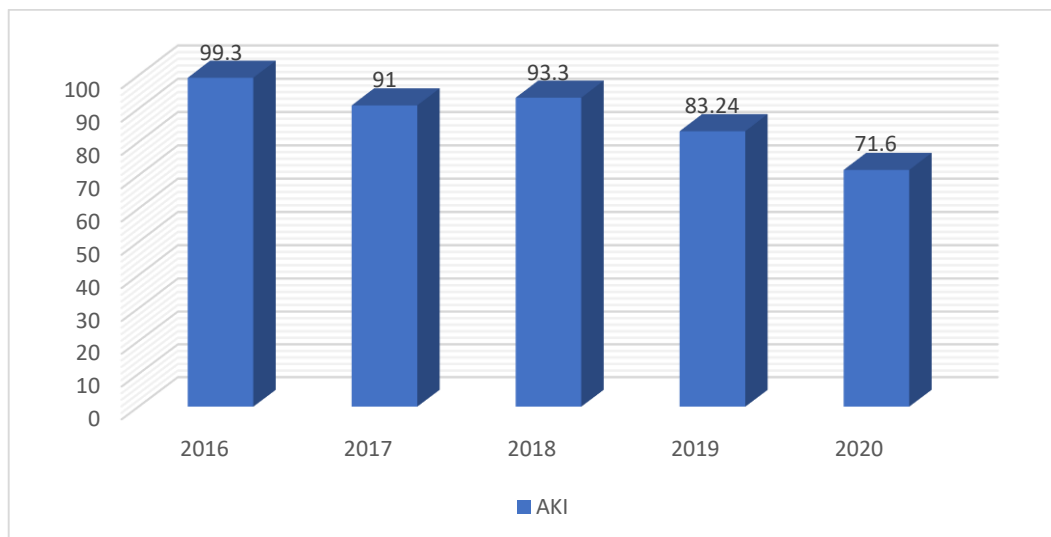
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar,2021

2) Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Manfaat diketahuinya Angka Kematian Ibu untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi

Gambar 2. 71. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kabupaten Banjar 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar,2021

. Di Kabupaten Banjar, Angka Kematian Ibu mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun konstan mengalami penurunan di tahun 2018 ke tahun 2020. Di tahun 2016, angka kematian Ibu sebesar 99,3 per 100.000 kelahiran hidup atau sebesar 11 kasus, di tahun 2017 AKI sebesar 90.85 per 100.000 KH atau sebanyak 10 kasus. Sedangkan di tahun 2018 tetap 10 kasus kematian ibu namun dikarenakan jumlah kelahiran hidup berkurang mengakibatkan pertambahan rasio yaitu menjadi 93,3 per 100.000 KH. Untuk tahun 2019 terjadi penurunan kasus kematian ibu sebesar 9 kasus dengan rasio 83,24 per 100.000 Kh dan untuk kondisi tahun 2020 kembali menurun dengan 8 kasus atau rasio sebesar 71,6 per 100.000 KH.

Angka kematian ibu di Kabupaten Banjar mampu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai intervensi berbagai program dan kegiatan dibidang kesehatan. Tahun 2016 angka kematian ibu mencapai 99,3 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 11 orang. Angka kematian tersebut dapat ditekan menjadi 91 pada tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 10 kematian ibu. Tahun 2018 angka kematian ibu mencapai angka 93,3 dengan jumlah kematian 10 ibu. Pada tahun 2019 angka ini mengalami penurunan diangka 83,24 dengan jumlah kematian 9 Ibu. Tahun 2020 jumlah kematian ibu dapat ditekan menjadi 8 kasus dengan angka kematian ibu berada pada posisi 71,6.

Tabel 2. 25. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Ibu 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Perhitungan AKI Per 100.000 KH
2016	11	11.074	99.3
2017	10	11.007	90.85
2018	10	10.717	93.30
2019	9	10.812	83.24
2020	8	11,161	71,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar,2021

3) Sarana Kesehatan

a. Posyandu

Perkembangan jumlah posyandu di Kabupaten Banjar Tahun 2016 -2020 seperti pada gambar berikut :

Tabel 2. 26. Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	536	543	552	561	561
2.	Jumlah Balita	55.228	56.087	56.907	47.761	41.077

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar,2021

Pada tahun 2020, berdasarkan penilaian strata posyandu, persentase posyandu aktif di Kabupaten Banjar sebesar 31 %. Selain posyandu, upaya kesehatan bersumber masyarakat lainnya adalah Polindes, Poskesdes, Posbindu. Adapun jumlah UKBM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 27. Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat di Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2020

No.	UKBM	Jumlah (Bh)
1.	Desa Siaga Aktif	290
2.	Polindes	70
3.	Poskesdes	193
4.	Posbindu	279

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2021

b. Puskesmas

Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) induk di Kabupaten Banjar sebanyak 24 buah dengan rincian 4 buah puskesmas dengan layanan rawat inap dan 20 buah tanpa layanan rawat inap. Keberadaan puskesmas sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Banjar. Ada beberapa kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas yaitu Kecamatan Sungai Tabuk 3 puskesmas, kecamatan Martapura 2 puskesmas, kecamatan Karang Intan 2 Puskesmas dan Kecamatan Simpang Empat 2 puskesmas. 4 Puskesmas rawat inap yaitu puskesmas aluh-aluh dengan 10 buah tempat tidur, puskesmas Pengaron dengan 10 buah tempat tidur, puskesmas karang intan 2 dengan 5 buah tempat tidur dan puskesmas sungai Tabuk 1 dengan 7 buah tempat tidur.

Tabel 2. 28. Puskesmas serta Fasilitasnya dan Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Banjar, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Puskesmas			Puskesmas Pembantu	Total
		Nama	Dengan tempat Tidur	Tanpa Tempat Tidur		
1.	Aluh Aluh	1. Aluh-Aluh	1	-	2	3
2.	Beruntung Baru	2. Beruntung Baru	-	1	1	2
3.	Gambut	3. Gambut	-	1	3	4
4.	Kertak Hanyar	4. Kertak Hanyar	-	1	4	5
5.	Tatah Makmur	5. Tatah Makmur	-	1	2	3
6.	Sungai Tabuk	6. Sungai Tabuk 1 7. Sungai Tabuk 2 8. Sungai Tabuk 3	1	2	4	7
7.	Martapura	9. Martapura 1 10. Martapura 2		2	5	7
8.	Martapura Timur	11. Martapura Timur	--	1	5	6
9.	Martapura Barat	12. Martapura Barat	-	1	2	3
10.	Astambul	13. Astambul	-	1	5	6
11.	Karang Intan	14. Karang Intan 1 15. Karang Intan 2	1	1	5	7
12.	Aranio	16. Aranio	-	1	2	3
13.	Sungai Pinang	17. Sungai Pinang	-	1	2	3
14.	Paramasan	18. Paramasan	1	-		1
15.	Pengaron	19. Pengaron	1	-	1	2
16.	Sambung Makmur	20. Sambung Makmur	-	1	1	2
17.	Mataraman	21. Mataraman	-	1	6	9
18.	Simpang Empat	22. Simpang Empat 1 23. Simpang Empat 2	-	2	2	4
19.	Telaga Bauntung	24. Telaga Bauntung	-	1	-	1
20.	Cintapuri Darussalam	25. Cintapuri Darussalam			4	4

No.	Kecamatan	Puskesmas			Puskesmas Pembantu	Total
		Nama	Dengan tempat Tidur	Tanpa Tempat Tidur		
	Jumlah		4	20	56	82

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pada setiap kecamatan terdapat puskesmas maupun puskesmas pembantu. Dilihat dari segi kuantitas maka pada Kecamatan Mataraman memiliki puskesmas pembantu terbanyak, yaitu 15 buah puskesmas pembantu.

Pada tahun 2020 jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya adalah puskesmas keliling sebanyak 27 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 70 buah.

c. Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Banjar sebanyak 7 buah rumah sakit dengan rincian 5 rumah sakit umum dan 2 rumah sakit khusus (RS. Jiwa dan RS Ibu Anak), 4 buah rumah sakit terletak di Kecamatan Martapura, 1 buah di kecamatan Gambut, 1 buah di Kecamatan kertak Hanyar dan 1 buah di kecamatan Mataraman.

Tabel 2. 29. Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Banjar

No.	Rumah Sakit	Jumlah	Keterangan
1.	RSJ Sambang Lihum	1	Provinsi
2.	RSUD Ratu Zalecha	1	Pemkab
3.	RS Swasta	5	Swasta

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2021

4) Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi : dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, ahli gizi, perawat, bidan ahli kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi, tenaga teknisi medis. Rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 30. Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2016 dan 2020

No.	Uraian	SPM	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	10	5,51	10,85	19,13	19,2	18,3
2	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	40	14,21	14,17	15,34	19,2	18,5
3	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	12	3,72	4,2	6,03	6,3	5,4
4	Rasio Apoteker per 100.000 penduduk	9	2,84	2,98	4,99	6,5	15,6
5	Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	10	10,48	11,2	10,86	11,90	13,4
6	Rasio perawat per 100.000 penduduk	158	109,22	108,47	100,34	100,34	167,4
7	Rasio bidan per 100.000 penduduk	100	90,22	89,93	86,20	93,5	102,5
8	Rasio ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	13	5,86	6,99	7,41	8,20	10,2
9	Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk	15	7,46	7,34	7,06	7,5	8,7
10	Rasio tenaga teknisi medis per 100.000 penduduk	14	18,65	16,27	17,8	11,10	15,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2021

5) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kasus Balita Gizi Buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan *Z-score* < -3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda- tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmuskwasiorkor).

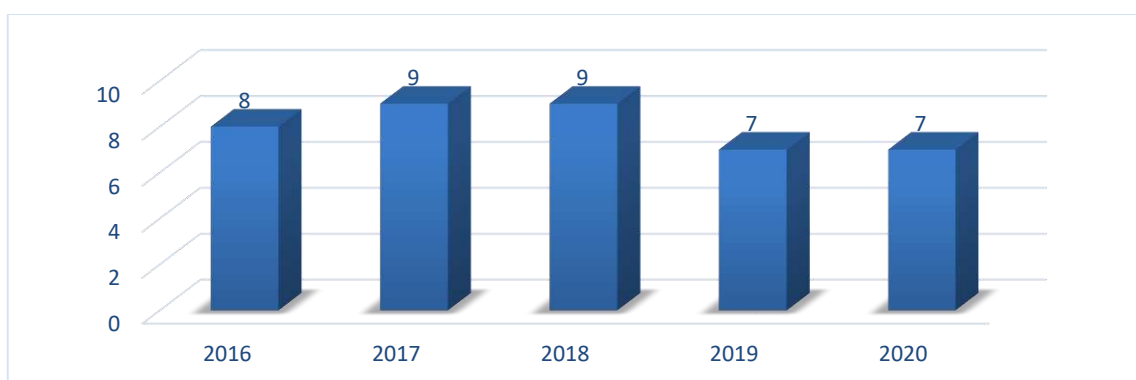
Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan di Kabupaten Banjar tahun 2017 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 9 kasus (tahun 2016 adalah 8 kasus) dan semua mendapatkan perawatan (100%). Kasus gizi buruk terjadi di wilayah kerja Puskesmas Sungai Tabuk II, Sungai Tabuk III, Karang Intan I, Simpang Empat 2, dan Telaga Bauntung masing-masing 1 kasus gizi buruk. Puskesmas Aluh-Aluh dan Martapura Timur masing-masing 2 kasus Gizi Buruk.

Pada tahun 2018, Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan sama dengan jumlah kasus tahun sebelumnya yaitu 9 kasus (tahun 2017 adalah 9 kasus) dan semua mendapatkan perawatan (100%). Kasus gizi buruk terjadi di wilayah kerja Puskesmas Gambut, Sungai Tabuk II, Martapura 2, Karang Intan I, dan Paramasan masing-masing 1 kasus gizi buruk. Puskesmas Sungai Tabuk 1 dan Martapura Timur masing-masing 2 kasus Gizi Buruk.

Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan di Kabupaten Banjar tahun 2020 sama dengan jumlah kasus tahun sebelumnya yaitu 7 kasus (tahun 2019 adalah 7 kasus) dan semua mendapatkan perawatan (100%). Kasus gizi buruk terjadi di wilayah kerja Puskesmas Martapura 2 dan Karang Intan 2 masing-masing 2 kasus, sedangkan Puskesmas Sungai Tabuk 1, Martapura 1, Sungai Tabuk 3, Makmur masing-masing 1 kasus gizi buruk

Jumlah Kasus gizi buruk rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2. 72. Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

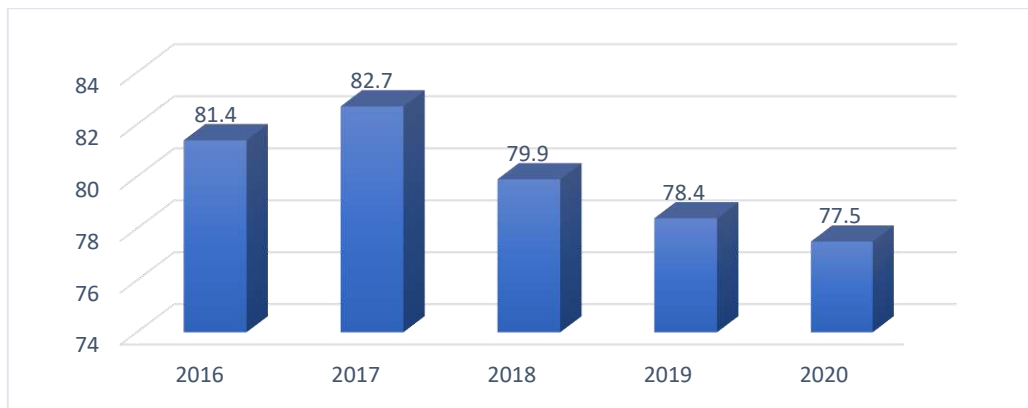


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

6) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan pelayanan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, satu kali pada trimester ke-2 dan dua kali pada trimester ke-3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui cakupan K 4 ini dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, disamping menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA. Cakupan pelayanan ibu hamil K4 Kabupaten Banjar tahun 2017 adalah 82,7%, cakupan ini meningkat dibanding dengan tahun 2016 81,4%. Cakupan pelayanan ibu hamil K4 Kabupaten Banjar tahun 2018 adalah 79,8%. Cakupan pelayanan ibu hamil K4 Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah 77,5%, cakupan ini menurun dibanding dengan tahun 2019 adalah 78,4%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 73. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016-2020

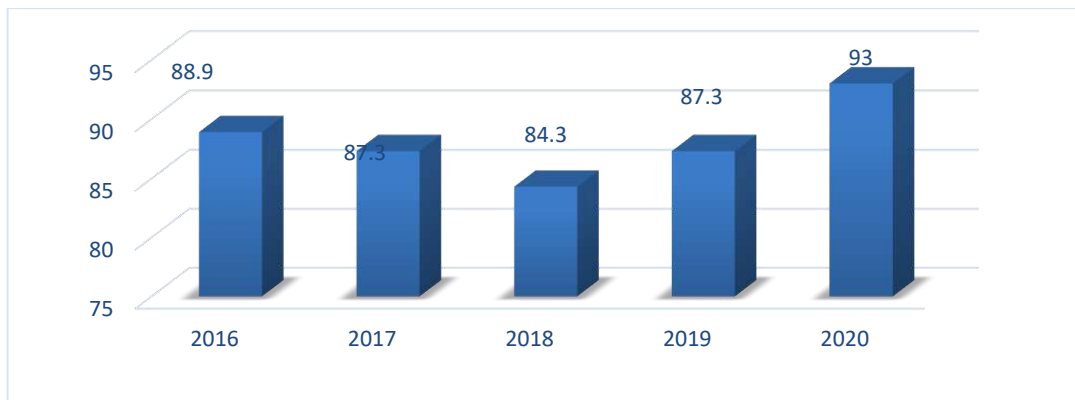


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

7) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Banjar tahun 2017 adalah 87,3%, cakupan ini menurun dibandingkan dengan tahun 2016 dengan cakupan 88,9%. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Banjar tahun 2018 adalah 84,3%. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah 93,%, cakupan ini naik dibandingkan dengan tahun 2019 dengan cakupan 87,3%. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Banjar selama tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 74. Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

8) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Cakupan penanganan komplikasi neonatus adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kasus komplikasi yang ditangani adalah seluruh kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya hidup atau mati. Cakupan ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan neonatal, yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, atau dapat di rujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

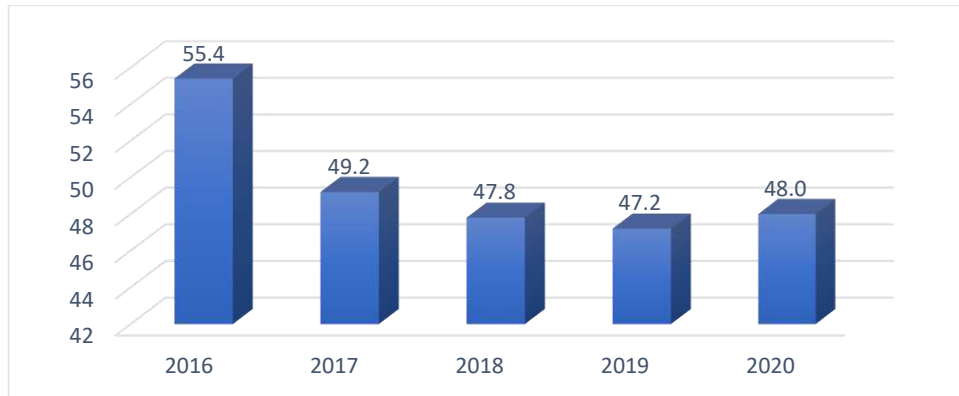
Dalam pelayanan neonatus, sekitar 15% diantara neonatus yang dilayani bidan di Puskesmas tergolong dalam kasus risti/komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pada tahun 2017 cakupan penanganan neonatal komplikasi yang dilaporkan sebesar 812 neonatal (49,2%) dari 1.651 jumlah perkiraan neonatal risti/komplikasi. Dibandingkan dengan tahun 2016 tahun ini mengalami penurunan dimana tahun 2016 cakupan penanganan neonatal komplikasi sebesar 921 neonatal (55,4%) dari 1.661 jumlah perkiraan neonatal risti/komplikasi. Pada tahun 2018 cakupan penanganan neonatal komplikasi yang dilaporkan sebesar 768 neonatal (47,8%) dari 1608 jumlah perkiraan neonatal risti/komplikasi. Bila dibandingkan dengan target dalam SPM sebesar 80% maka ini berarti cakupan penanganan neonatal komplikasi belum memenuhi standar pelayanan minimal. Bidang kesehatan ini perlu

mendapat perhatian karena langkah ini merupakan salah satu strategi untuk menurunkan angka kematian bayi.

Pada tahun 2020 cakupan penanganan neonatal komplikasi yang dilaporkan sebesar 803 neonatal (48,0%) dari 1674 jumlah perkiraan neonatal risti / komplikasi. Dibandingkan dengan tahun 2019 tahun ini mengalami kenaikan dimana tahun 2019 cakupan penanganan neonatal komplikasi sebesar 766 neonatal (47,2%) dari 1.622 jumlah perkiraan neonatal risti/komplikasi.

Gambar 2. 75. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

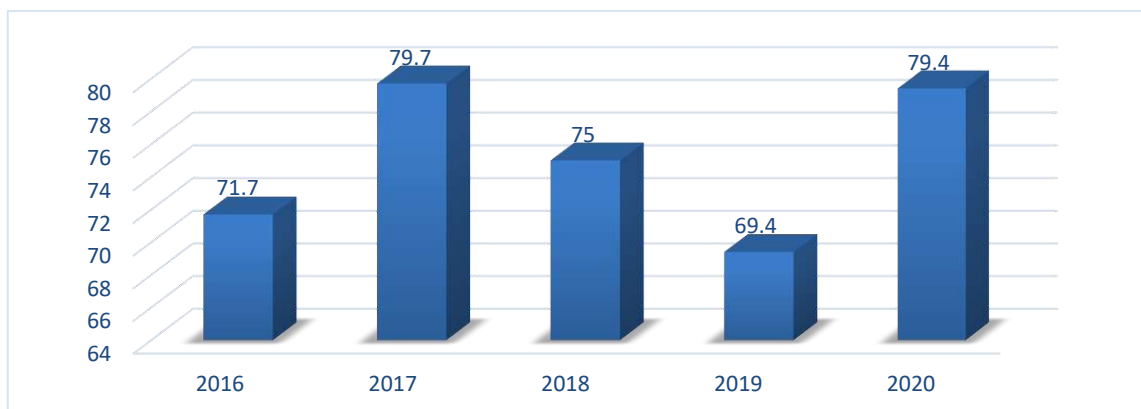
9) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan kesehatan pada anak umur 12-59 bulan sesuai standar meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, dan pemberian Vitamin A 2 kali setahun (Bulan Pebruari dan Agustus). Pemantauan pertumbuhan dilakukan melalui penimbangan Berat Badan, pengukuran Tinggi Badan di Posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit, Bidan praktik swasta serta sarana/fasilitas kesehatan lainnya. Pemantauan perkembangan dapat dilakukan melalui SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) oleh petugas kesehatan. Pemberian Vitamin A dilaksanakan oleh petugas kesehatan di sarana kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan pada balita atau yang berkunjung ke pelayanan kesehatan pada tahun 2017 adalah 79,7% data ini meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 71,7%. Cakupan pelayanan kesehatan pada balita pada tahun 2018 adalah 75%, data ini menurun dari tahun 2017. Cakupan pelayanan kesehatan pada balita atau yang berkunjung ke pelayanan kesehatan pada Tahun 2020 adalah 79,4 % data ini ada peningkatan dibandingkan Tahun 2019 adalah 69,4%.

Cakupan pelayanan kesehatan pada balita lima tahun berturut-turut (2016-2020) terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. 76. Cakupan Pelayanan Anak Balita Di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

10) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Pelayanan kesehatan pada kelompok anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja dilakukan dengan pelaksanaan pemantauan dini terhadap tumbuh kembang dan pemantauan kesehatan anak pra sekolah, pemeriksaan anak sekolah dasar/ sederajat serta pelayanan kesehatan pada remaja baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun peran serta tenaga terlatih lainnya seperti kader kesehatan, guru UKS dan dokter kecil. Dari hasil pengumpulan

data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 cakupan murid kelas 1 SD/ sederajat yang diperiksa sekitar 11.375 siswa (99%) dari 11.490 siswa. pada tahun 2018 cakupan murid kelas 1SD/ sederajat yang diperiksa sekitar 11.628 siswa (96,5%) dari 11.222 siswa cakupan ini menurun bila dibandingkan tahun 2017 . Dari hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 cakupan murid kelas 1 SD / sederajat yang diperiksa sekitar 9.825 siswa (57,1%) dari 17,213 siswa cakupan ini menurun bila dibandingkan tahun 2019 cakupan murid kelas 1 SD / sederajat yang diperiksa sekitar 16.956 siswa (90,4%) dari 18.747 siswa.

Gambar 2. 77. Cakupan pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

11) Cakupan Jaminan Pelayanan Kesehatan

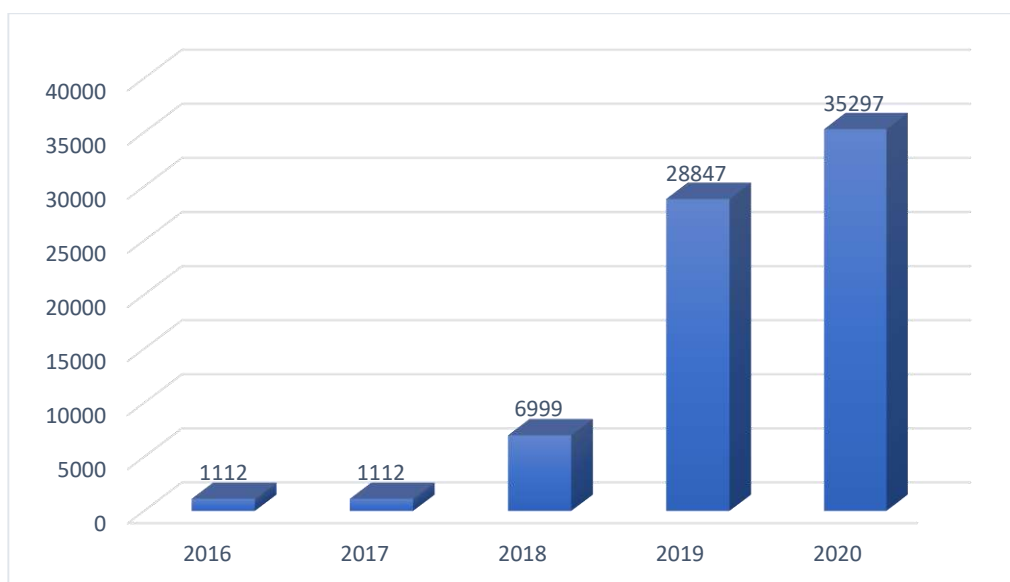
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan memerlukan komponen pembiayaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan terdiri dari pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat.

Pada tahun 2017, sebanyak 209.461 jiwa telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 99.840 jiwa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 1.112 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 48.965 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri 50.958 jiwa , Bukan Pekerja (BP) 7.596 jiwa dan Jamkesda 990 jiwa

Tahun 2018, sebanyak 272.525 jiwa telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 100.191 jiwa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 1.130 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 56.510 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri 69.085 jiwa , Bukan Pekerja (BP) 7.752 jiwa dan Jamkesda 37.857 jiwa.

Tahun 2019 sebanyak 300.510 jiwa telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 125.473 jiwa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 31.134 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 64.614 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri 71.721 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) 7.568 jiwa.

Gambar 2. 78. Perkembangan kepesertaan PBI APBD Kab. Banjar tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banjar

Capaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Banjar berdasarkan update data tanggal 25 Maret 2021 telah mencapai 61,62% (341.570 jiwa) dari perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data Dukcapil semester I tahun 2020 sebanyak 554.281 jiwa. Jadi masih ada sejumlah 212.711 jiwa yang masih belum masuk dalam BPJS kesehatan.

12) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Di Kabupaten Banjar pada tahun 2016, cakupan desa/kelurahan terkena KLB sebanyak 15 desa/kelurahan yang ke semuanya ditangani dalam waktu <24 jam (100%). Desa/kelurahan yang mengalami KLB tersebar di Puskesmas Beruntung Baru (1 Desa/Kel.), Martapura 1 (5 Desa/Kel.), Martapura 2 (1 Desa/Kel.), Martapura Barat, (1 Desa/Kel.), Astambul (1 Desa/Kel.), Karang Intan 2 (2 Desa/Kel.), Sungai Pinang (2 Desa/Kel.), Paramasan (1 Desa/Kel.) dan Sambung Makmur (1 Desa/Kel). Hal ini meningkat dari tahun 2015 dimana dari 68 Desa/Kel yang terkena KLB, yang ditangani < 24 jam hanya 3 Desa/Kel. (4,41%). Sedangkan pada tahun 2017 berdasarkan waktu verifikasi atas alert yang muncul pada aplikasi SKDR online, KLB yang ditangani dalam waktu < 24 jam sebesar 93,02%. Keterlambatan respon terhadap alert terdapat pada Puskesmas Beruntung Baru dan Aranio. Pada tahun 2018 berdasarkan waktu verifikasi atas alert yang muncul pada aplikasi WEB SKDR online, KLB yang ditangani dalam waktu kurang 24 jam adalah 100%.

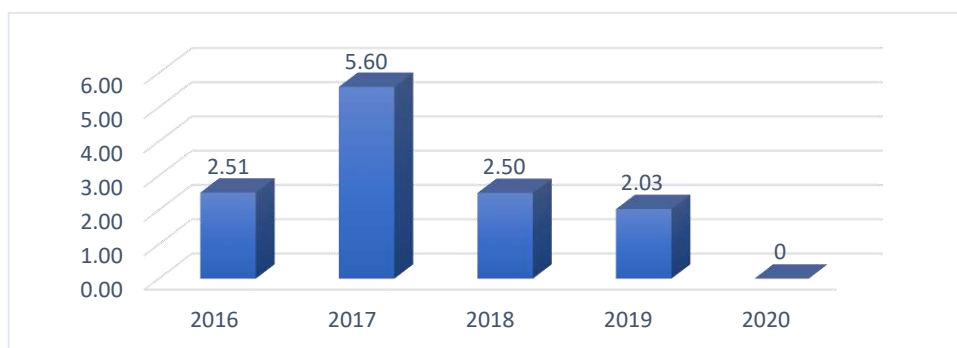
Di Kabupaten Banjar pada Tahun 2020, cakupan desa / kelurahan terkena KLB sebanyak 5 desa / kelurahan . Desa / kelurahan yang mengalami KLB tersebar di Puskesmas Martapura 1 (1 Desa/Kel.), Puskesmas Kertak Hanyar (1 Desa / Kelurahan), Puskesmas Tatah Makmur (1 desa/kelurahan) dan Puskesmas Aluh-Aluh (2 desa/kelurahan). Hal ini terjadinya kenaikan dari tahun 2019 dimana dari 14 Desa/Kel yang terkena KLB, semua Desa / Kelurahan dapat ditangani < 24 jam (100%).

13) Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis / Lumpuh Layuh Akut)

Polio (*Poliomyelitis*) merupakan penyakit menular yang mengakibatkan paralisis atau lumpuh, yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit yang pada umumnya menyerang anak berumur 0-3 tahun ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, sakit pada tungkai dan lengan.

Semenjak Tahun 2016 ditemukan 4 kasus Non Polio AFP. Tahun 2017 ditemukan sebanyak 9 kasus Non Polio AFP. Tahun 2018 ditemukan sebanyak 4 kasus Non Polio AFP dan Tahun 2019 telah ditemukannya 4 kasus Non Polio AFP. Tahun 2020 tidak ditemukan kasus Non Polio AFP.

Gambar 2. 79. Angka Non Polio AFP per 100.000 Penduduk di Kabupaten Banjar Tahun 2016– 2020



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Banjar 2020

14) TB Paru

Penyakit Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena merupakan salah satu penyakit infeksi pembunuh utama. Tuberculosis (TB) adalah penyakit akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis* sistemis sehingga dapat mengenai semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer.

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah *Case Notification Rate (CNR)*, yaitu angka yang menunjukkan jumlah seluruh pasien TB yang ditemukan dan tercatat 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan Pengobatan (SR=*Succes Rate*) yang mengidentifikasi persentase pasien TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap diantara pasien TB paru positif yang tercatat.

CNR Kasus Baru BTA+ di Kabupaten Banjar Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berturut turut *sebagai* berikut :Tahun 2016 sampai dengan 2020 berturut turut adalah tahun 2016 adalah 79,74 per 100.000 penduduk (443 kasus), 2017 adalah 67,7 per 100.000 penduduk (387 kasus), tahun 2018 adalah 73,44 per 100.000 penduduk (426 kasus), tahun 2019 adalah 60,59 per 100.000 penduduk (357 kasus) dan tahun 2020 adalah 50,47 (302 kasus)

CNR seluruh kasus TB Kabupaten Banjar tahun 2016 sampai dengan 2020 berturut turut tahun 2016 adalah 191,81 per 100.000 penduduk (1080 kasus), 2017 adalah 186,15 per 100.000 penduduk (1064 kasus) dan 2018 adalah 225,33 per 100.000 penduduk (1307 kasus), tahun 2019 adalah 291,77 per 100.000 penduduk (1719 kasus) dan tahun 2020 adalah 99,44 per 100.000 penduduk.

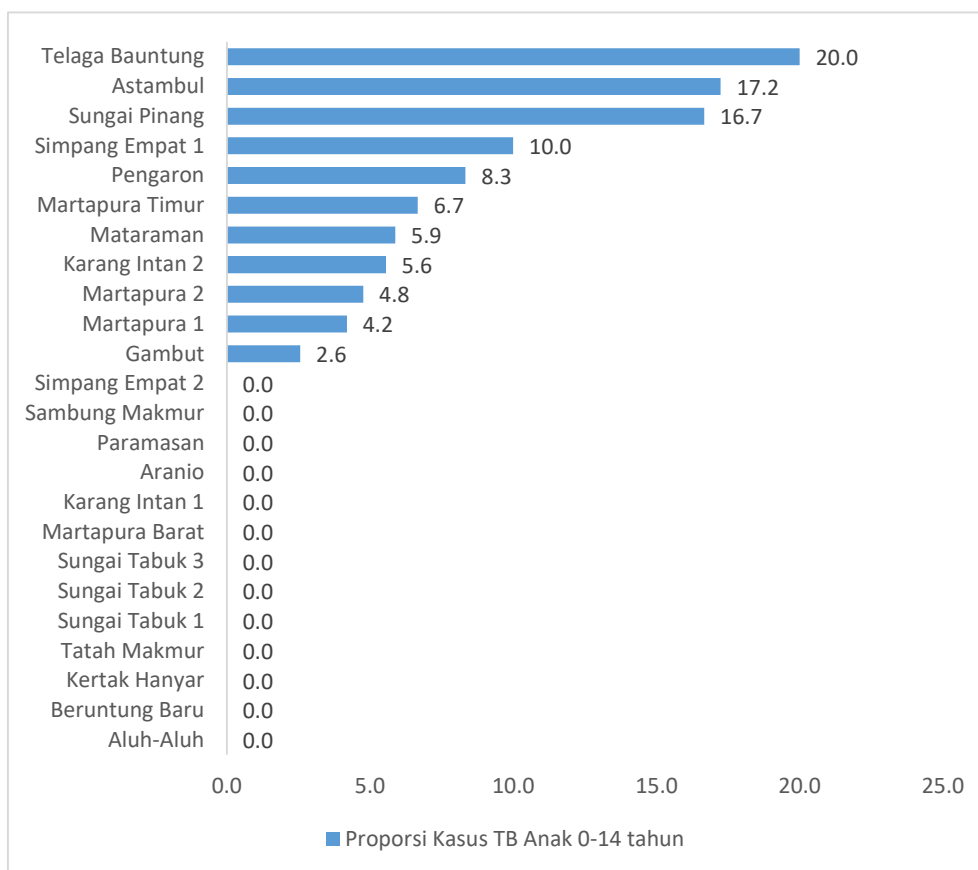
Gambar 2. 80. CNR Kasus Baru BTA+ dan CNR Seluruh Kasus TB Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

Untuk Proporsi Kasus TB Anak Umur 0-14 di Kabupaten Banjar tahun 2016 sebanyak 89 orang (8 %), tahun 2017 sebanyak 119 orang (11%), tahun 2018 sebanyak 69 orang (5 %), tahun 2019 sebanyak 45 orang (8 %) dan tahun 2020 sebanyak 25 orang (4,2%) dengan kasus tertinggi ada di Puskesmas Telaga Bauntung (20,0 %) dan Puskesmas Astambul (17,2 %).

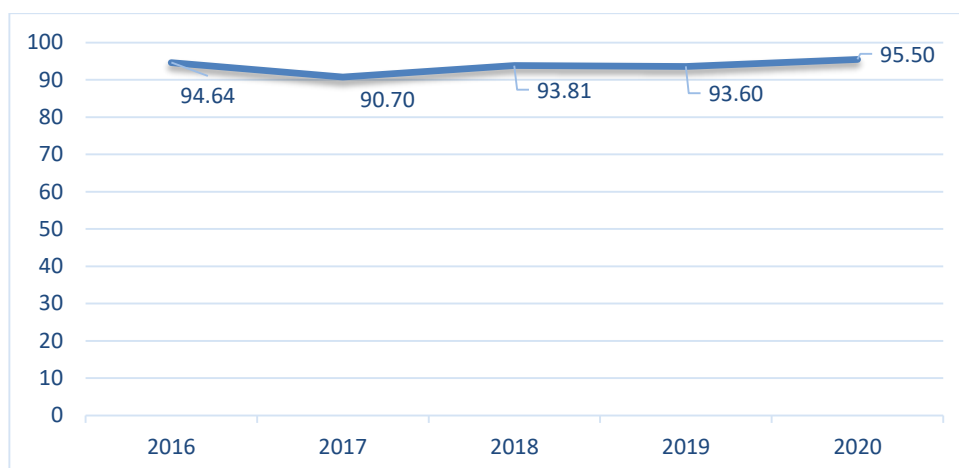
Gambar 2. 81. Proporsi Kasus TB Anak 0-14 Tahun Per Puskesmas di Kabupaten Banjar Tahun 2020



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Banjar

Untuk Succes Rate (SR) dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Berikut ini dari gambar di bawah ini terlihat angka keberhasilan pengobatan penderita TB Paru BTA+ Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020, dimana angka SRnya berturut-turut yakni 94,64 % , 90,7 % , 93,81%, 93,60 % dan tahun 2020 sebanyak 95,5 %.

Gambar 2. 82. Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA (Succes Rate) di Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2020



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Banjar

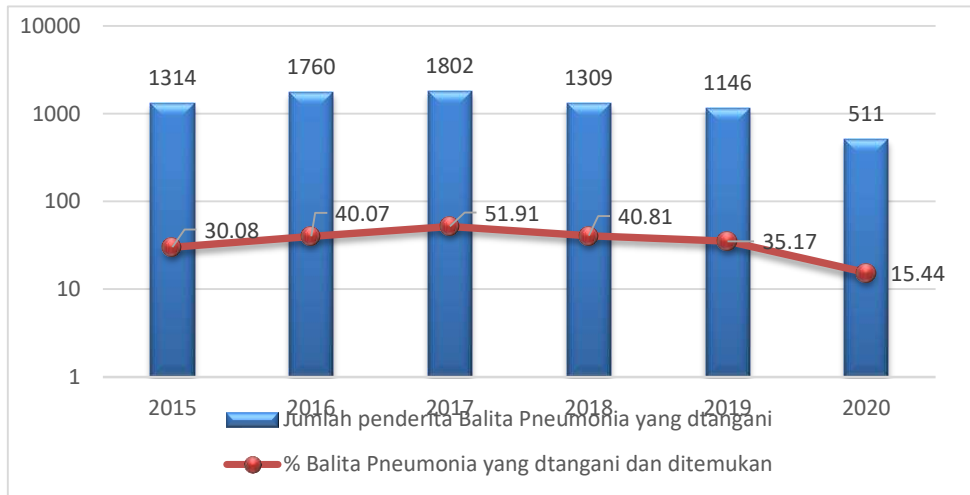
15) Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pneumonia merupakan penyakit utama penyebab kematian bayi dan balita terbesar di Indonesia. Sekitar 80–90% dari kasus kematian Infeksi Saluran Pernafasan Atas disebabkan oleh Pneumonia. Pneumonia adalah radang paru-paru yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Tiga penyebab utama pneumonia adalah bakteri, virus dan fungi. Yang berisiko tinggi menderita infeksi ini adalah anak-anak di bawah 2 tahun, manula dan umumnya terjadi pada balita terutama pada kasus gizi kurang dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat (asap rokok, polusi).

Kasus Pneumonia pada balita yang ditemui dan ditangani di Kabupaten Banjar dari tahun 2015 sebanyak 1314 orang (30,08%), Tahun 2016 sebanyak 1760 orang (40,07%), tahun 2017 sebanyak 1802 orang (58,10%), tahun 2018 sebanyak 1309 orang (40,81%), tahun 2019 sebanyak 1146 orang (35,17%) kasus dan tahun 2020 sebanyak 511 orang (15,44%).

Gambar 2. 83. Jumlah Pneumonia Pada Balita yang Ditemukan dan Ditangani di Kabupaten Banjar Tahun 2015 - 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

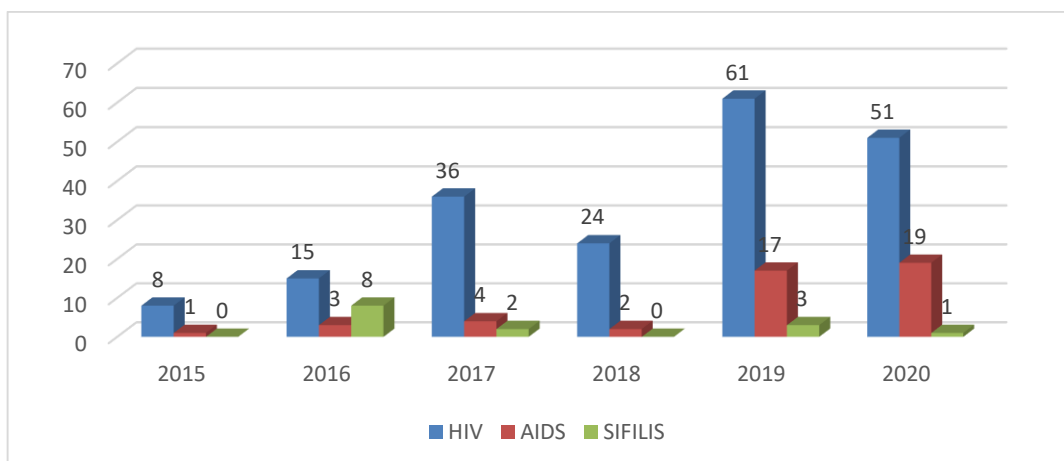


16) Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS)

Di Kabupaten Banjar Kasus HIV/AIDS menunjukkan trend peningkatan setiap tahun. Kasus HIV dari tahun 2015 yaitu 8 kasus, dan di Tahun 2016 terdapat 15 kasus tahun 2017 terdapat 36 kasus tahun 2018 sebanyak 24 kasus, tahun 2019 sebanyak 61 kasus dan kasus 2020 sebanyak 51 kasus . Untuk kasus AIDS di tahun 2015 terdapat 1 kasus AIDS (meninggal 1 orang), dan di Tahun 2016 ada 3 kasus AIDS (meninggal 1 orang), tahun 2017 ada sebanyak 4 kasus AIDS (meninggal 4 orang), tahun 2018 terdapat 2 kasus AIDS (meninggal 1 orang), tahun 2019 ada sebanyak 17 kasus AIDS (meninggal 6 orang), tahun 2020 ada 19 kasus AIDS (meninggal 7 orang) .

Untuk kasus Syphilis pada tahun 2020 ditemukan 1 kasus, tahun 2019 ditemukan 3 kasus, 2018 tidak ada kasus, tahun 2017 ditemukan 2 kasus, Tahun 2016 ditemukan 8 kasus, 2015 tidak ada kasus.

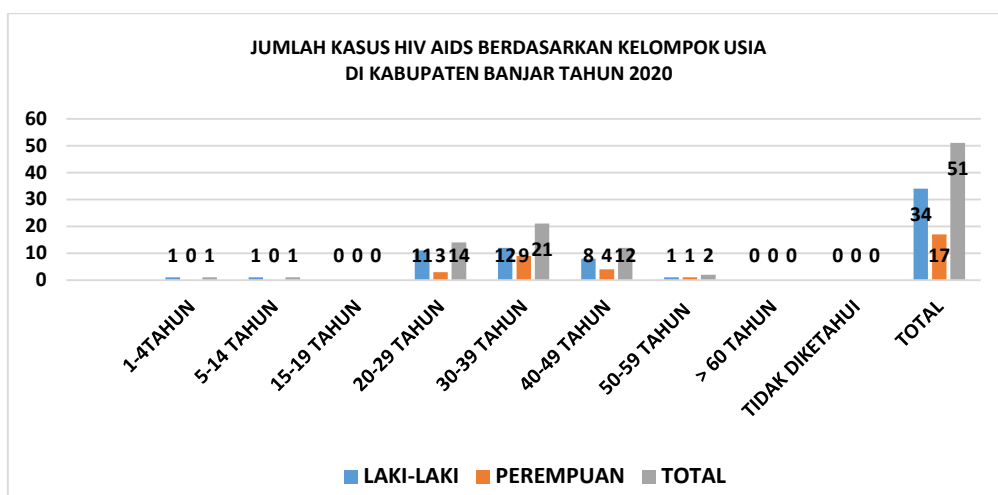
Gambar 2. 84. Kasus HIV, AIDS dan Syphilis di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

Sebaran usia penderita kasus HIV AIDS tahun 2020 terlihat pada Gambar 2. 85 dimana penderita yang terbanyak terdapat pada rentang usia 30-39 tahun, dan yang terendah pada usia 1- 4 tahun dan 5-14 tahun.

Gambar 2. 85. Sebaran Kasus HIV Berdasarkan Golongan Umur di Kabupaten Banjar Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

17) Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) merupakan salah satu penyakit menular yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Sering muncul sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena penyebarannya yang cepat dan berpotensi menimbulkan kematian. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod-Borne virus, genus flavivirus, family flaviviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes spp*, *Aedes aegypti*, dan *Aedes albopictus* merupakan vektor utama penyakit DBD.

Di Kabupaten Banjar pada Tahun 2016 terdapat kasus DBD 552 kasus dengan Incidence Rate (IR) 98,0 per 100.000 penduduk, tahun 2017 terdapat kasus DBD 101 kasus dengan Incidence Rate (IR) 17,7 per 100.000 penduduk, dan pada tahun 2018 terdapat kasus DBD 305 kasus dengan Incidence Rate (IR) 32,6 per 100.000 penduduk, tahun 2019 terdapat kasus DBD 228 kasus dengan Incidence Rate (IR) 38,7 per 100.000 penduduk, tahun 2020 terdapat kasus DBD 126 kasus dengan Incidence Rate (IIR) 21,1 per 100.000.

Sebaran kasus terbanyak terdapat di Puskesmas Martapura 1 (51 kasus), Puskesmas Martapura 2 (17 Kasus), dan Puskesmas Gambut (17 Kasus).

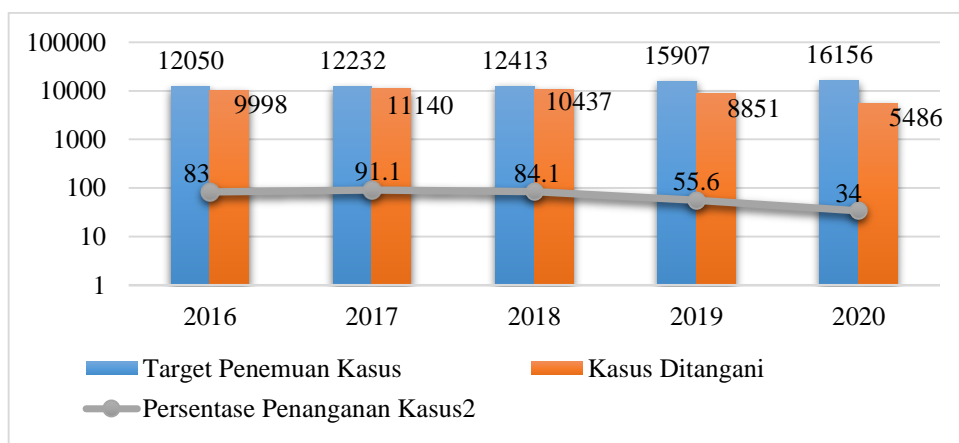
18) Diare

Diare ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan atau buang air besar (BAB) dengan frekuensi yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi.

Berdasarkan laporan penyakit Diare di Kabupaten Banjar pada dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi penurunan kasus diare dari target sebanyak 12.050 kasus yang ditemukan dan ditangani 9.998 kasus (83%), pada tahun 2019 kemudian dari target 15.907 kasus, dengan jumlah yang ditemukan dan ditangani sebanyak 8.851 kasus (55,6%) pada tahun 2020, dengan jumlah yang di temukan dan ditangani sebanyak 5.486 kasus (34%).

Gambar berikut memperlihatkan jumlah kasus diare yang ditemukan dan jumlah kasus diare yang ditangani di Kabupaten Banjar tahun 2016 - 2020.

Gambar 2. 86. Jumlah Kasus Diare Yang Ditemukan dan Jumlah Kasus Diare Yang Ditangani



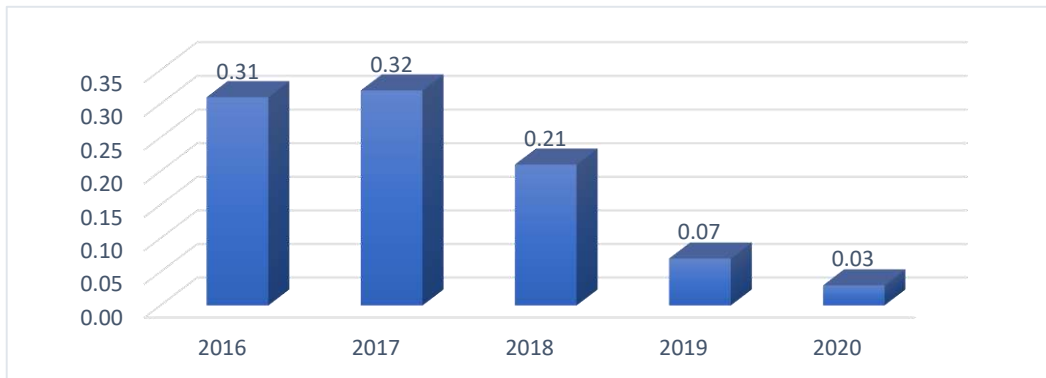
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020

19) Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Malaria disebabkan oleh hewan bersel satu (protozoa) *plasmodium* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles*.

Pada Tahun 2016 yaitu 176 kasus dengan API 0,31 per 1.000 penduduk. Tahun 2017 Jumlah Kasus malaria ada 185 kasus dengan API 0,32 per 1.000 penduduk dan tahun 2018 Jumlah Kasus malaria ada 121 kasus dengan API 0,21 per 1.000 penduduk ,tahun 2019 jumlah kasus malaria ada 36 kasus dengan API 0,07 per 1000 dan pada tahun 2020 terdapat 15 kasus dengan API 0,03 per 1000 penduduk .

Gambar 2. 87. Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1.000 Penduduk di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar 2020

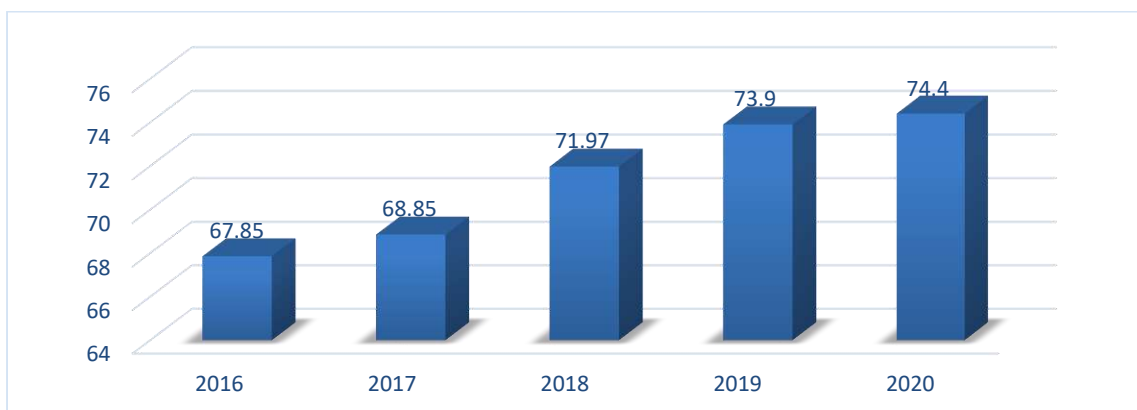
Angka Kematian Malaria (CFR) di Kabupaten Banjar dan Tahun 2016 terdapat 1 kasus meninggal (0,57%). Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 tidak ada yang meninggal .

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator Kinerja berupa Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap. Indikator ini diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap terus mengalami kenaikan. Data terakhir menyebutkan Capaian target yang ditetapkan pada Tahun 2020 adalah 73,74% sedangkan realisasi Dinas PUPR Kabupaten Banjar pada tahun 2020 sebesar 74,40%. Adapun capaian kinerja panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2016 sampai 2020 seperti yang terlihat pada gambar

Gambar 2. 88. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Banjar, 2021

Kondisi jalan di Kabupaten Banjar diuraikan berdasarkan tingkat kewenangan pemerintahan yang terdiri dari Jalan kewenangan Negara, provinsi dan kabupaten. Adapun jenis permukaan jalan berupa aspal, kerikil tanah dan lainnya. Sedangkan kondisi jalan terdiri

dari kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Data statistik kondisi jalan di Kabupaten Banjar dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 seperti yang tersaji pada Tabel 2. 31.

Tabel 2. 31. Statistik Kondisi Jalan Kabupaten Banjar Tahun 2020 (Km)

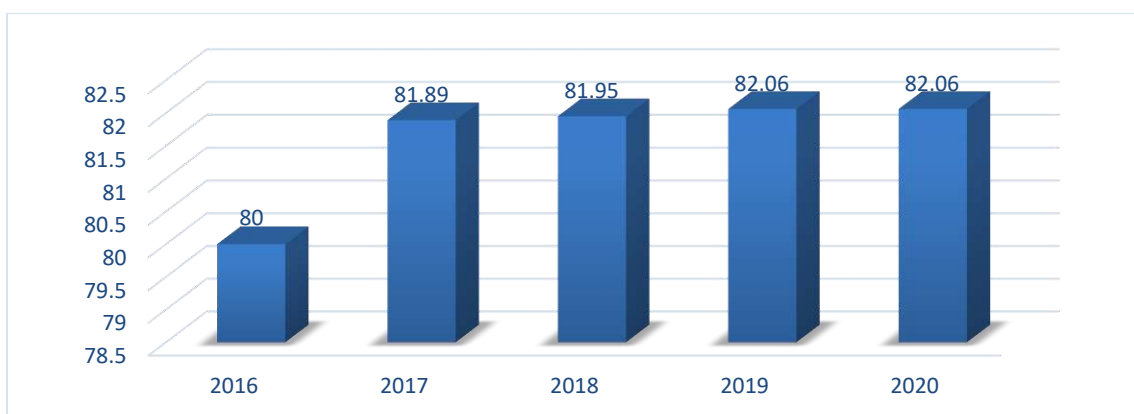
Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kewenangan Pemerintahan				
Negara	69,48	69,48	91,60	91,60
Provinsi	109,52	109,52	127,60	127,60
Kabupaten	781,39	781,39	781,39	781,39
Jenis Permukaan Jalan				
Aspal	673,96	683,86	695,06	637,95
Kerikil	254,6	246,23	272,91	319,61
Tanah	24,50	22,00	22,00	18,30
Lainnya	7,30	8,30	10,63	24,73
Kondisi Jalan				
Baik	494,31	479,90	465,36	447,84
Sedang	218,36	243,28	290,11	269,06
Rusak	165,50	150,53	161,14	167,53
Rusak Berat	82,22	86,88	83,98	116,16

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

2) Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi

Indikator Kinerja berupa Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi, capaian indikator kinerja sektor ini pada tahun 2016 sebesar 80%, tahun 2017 sebesar 81,89 %, dan tahun 2018 sebesar 87,35 % dan tahun 2019 82,06%. Sedangkan realisasi Dinas PUPR Kabupaten Banjar pada tahun 2020 sebesar 82,06%. Berdasarkan data ini luasan pertanian yang terlayani irigasi berdasarkan tren 5 tahunan hampir melampaui target yang telah ditetapkan.

Gambar 2. 89. Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2020

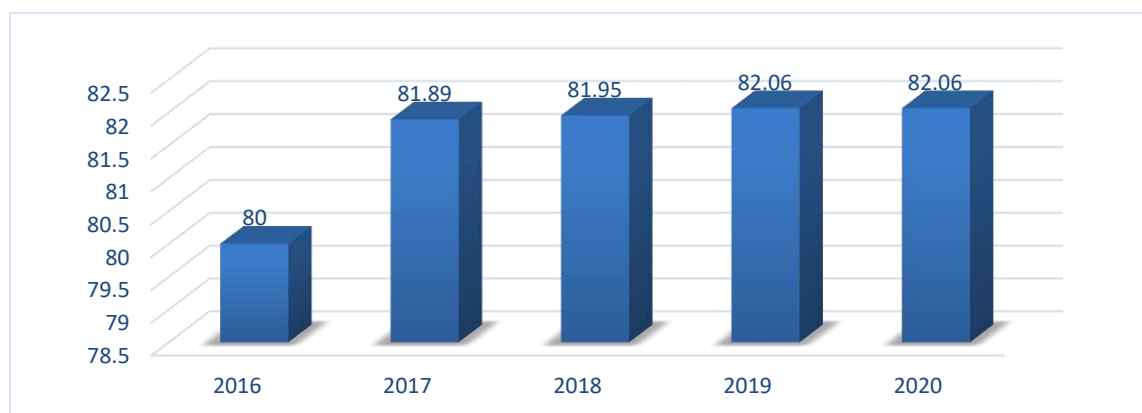


Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Banjar, 2021

3) Konektivitas Wilayah Kabupaten

Indikator Kinerja berupa Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten merupakan persentase dari panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di Wilayah Kabupaten Banjar. Capaian indikator kinerja untuk konektivitas wilayah Kabupaten Banjar pada tahun 2016 sebesar 80%, tahun 2017 sebesar 81,89 %, tahun 2018 sebesar 81,95 %, tahun 2019 sebesar 82,06 %. Target yang ditetapkan pada Tahun 2020 adalah 76,33% sedangkan realisasi Dinas PUPR Kabupaten Banjar pada tahun 2020 sebesar 84,86%. Adapun Target akhir di dalam RPJMD/Renstra sebesar 78,73%. Berdasarkan data ini Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten hampir melampaui target yang telah ditetapkan

Gambar 2. 90. Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Banjar, 2021

Ketersediaan jalan yang menjadi indikator Konektivitas Wilayah di Kabupaten Banjar, juga didukung dengan ketersediaan prasarana penghubung lainnya yaitu berupa ketersediaan jembatan yang menghubungkan ruas-ruas jalan di Wilayah Kabupaten Banjar. Kondisi jembatan di Kabupaten Banjar dikategorikan berdasarkan jenis strukturnya berupa rangka beton, rangka baja dan kayu ulin seperti yang terlihat pada Tabel 2. 32.

Tabel 2. 32. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Kabupaten Banjar Tahun 2020

Kondisi	Rangka Beton	Rangka Baja	Kayu Ulin
Baik	396	117	185
Sedang	-	-	62
Rusak Ringan	-	-	80
Rusak Berat	-	-	6489

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

4) Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Indikator Kinerja berupa Persentase Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum, realisasi Dinas PUPR Kabupaten Banjar pada tahun 2020 sebesar 84,33%. Adapun Target akhir di dalam RPJMD/Renstra sebesar 75,73%

Tabel 2. 33. Perkembangan SPAM cakupan layanan Air Minum Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2020

TAHUN	SPAM Cakupan Layanan Air Minum
2016	57,14%
2017	67,19 %
2018	73,20 %
2019	74,33 %
2020	84,33 %

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Banjar, 2021

5) Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pengelolaan air limbah setempat adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja. SPM tingkat pelayanan adalah persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik, MCK komunal dan sistem pengolahan air limbah terpusat pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota

Tabel 2. 34. Capaian Pelayanan Air Limbah Kabupaten Banjar Tahun 2020

Tahun	Jumlah Penduduk yang memiliki Tanki Septic (Standar PU)*	Jumlah Penduduk yang terlayani MCK Komunal)**	Jumlah Penduduk yang memiliki akses ke sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan/kota***	Total Jumlah penduduk yang terlayani air limbah yang memadai Akhir Tahun Pencapaian SPM Tahun 2019	Nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM
	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)
2014	208.003	15.770	3.820	224.593	38,19
2015	227.708	16.020	7.420	251.148	42,71
2016	228.008	18.318	7.792	254.118	43,21
2017	232.765	19.118	7.952	259.835	44,19
2018	238.130	19.118	7.952	265.200	45,10
2019	243.400	19.118	7.952	270.470	45,99
2020	246.170	19.118	7.952	273.240	49,30

Sumber: Dinas PUPR Kab. Banjar 2020

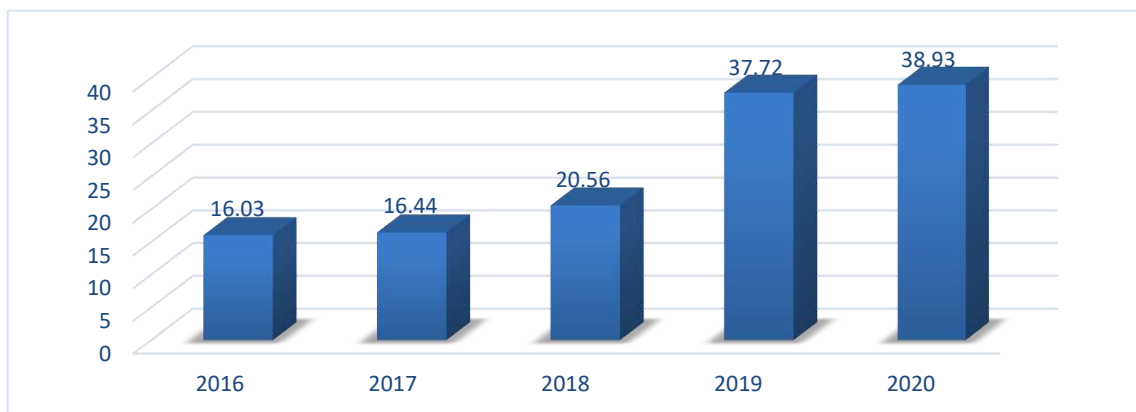
Dari Tabel di atas, untuk pencapaian pelayanan sektor air limbah di Kabupaten Banjar diantaranya yaitu Jumlah penduduk yang memiliki Tangki Septik (Standar PU) sebanyak 246.170 jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang terlayani MCK Komunal sebanyak 19.118 Jiwa, angka ini konstan dari dua tahun sebelumnya dikarenakan pencapaian output target DAK pada angka maksimal. Jumlah penduduk yang memiliki akses ke sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan/kota sebanyak 7.952 Jiwa. Total jumlah penduduk yang terlayani air limbah yang memadai Akhir Tahun Pencapaian SPM tahun 2020 sebanyak 273.240 Jiwa dari proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 BPS. Nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM sebesar 49,30%.

Indikator Kinerja berupa Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase didapatkan dari penanganan luas daerah genangan dengan jumlah seluruh luas daerah rawan genangan yang ada di Wilayah Perkotaan di Kabupaten Banjar. Capaian indikator kinerja untuk Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase pada tahun 2016 sebesar 16,03 %, pada tahun 2017 sebesar 16,44 %, pada tahun 2018 sebesar 20,56 %, pada tahun 2019 sebesar 37,72 %. Target yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 37,72%, realisasi Dinas PUPR Kabupaten Banjar pada tahun 2020 sebesar 38,93%. Adapun Target akhir di dalam RPJMD/Renstra sebesar 19,38%. Berdasarkan data ini Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase masih dibawah target nasional.

6) Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 pada Tahun 2019 dilakukan revisi periode 5 (lima) tahunan. Ada beberapa perubahan substansi didalamnya, namun revisi RTRW Kabupaten Banjar masih belum dilegalisasi. Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya ini didapatkan dari jumlah luas lahan yang sesuai peruntukannya dibandingkan dengan jumlah luas lahan yang ada di Kabupaten Banjar. Capaian indikator kinerja untuk kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya pada tahun 2016 sebesar 91,91 %, pada tahun 2017 sebesar 92,11 %, pada tahun 2018 sebesar 92,12 %, pada tahun 2019 sebesar 92,13 %. Pada Tahun 2020 Realisasi Dinas PUPR Kabupaten Banjar sebesar 92,14%. Adapun Target akhir di dalam RPJMD/Renstra sebesar 75,18%. Berdasarkan data ini Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya di Tahun 2020 berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Gambar 2. 91, Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Tahun 2016-2020

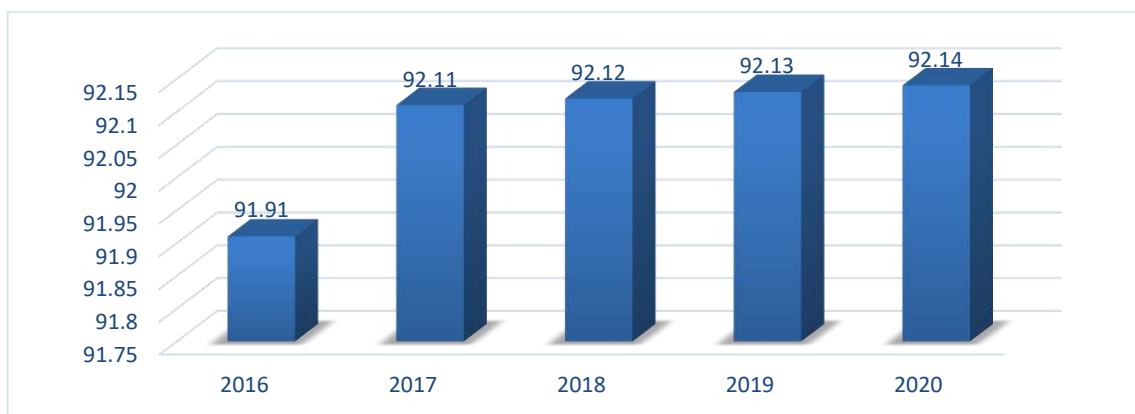


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Banjar, 2021

7) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 pada Tahun 2019 dilakukan revisi periode 5 (lima) tahunan. Ada beberapa perubahan substansi didalamnya, namun revisi RTRW Kabupaten Banjar masih belum dilegalisasi. Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya ini didapatkan dari jumlah luas lahan yang sesuai peruntukannya dibandingkan dengan jumlah luas lahan yang ada di Kabupaten Banjar. Capaian indikator kinerja untuk kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya pada tahun 2016 sebesar 91,91 %, pada tahun 2017 sebesar 92,11 %, pada tahun 2018 sebesar 92,12 %, pada tahun 2019 sebesar 92,13 %. Pada Tahun 2020 Realisasi Dinas PUPR Kabupaten Banjar sebesar 92,14%. Adapun Target akhir di dalam RPJMD/Renstra sebesar 75,18%. Berdasarkan data ini Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya di Tahun 2020 berjalan sesuai target yang ditetapkan

Gambar 2. 92. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Banjar, 2021

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat

Kondisi Penyelenggaraan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Banjar pada bagian ini difokuskan pada substansi Kawasan Permukiman dan Persentase Rumah Layak Huni.

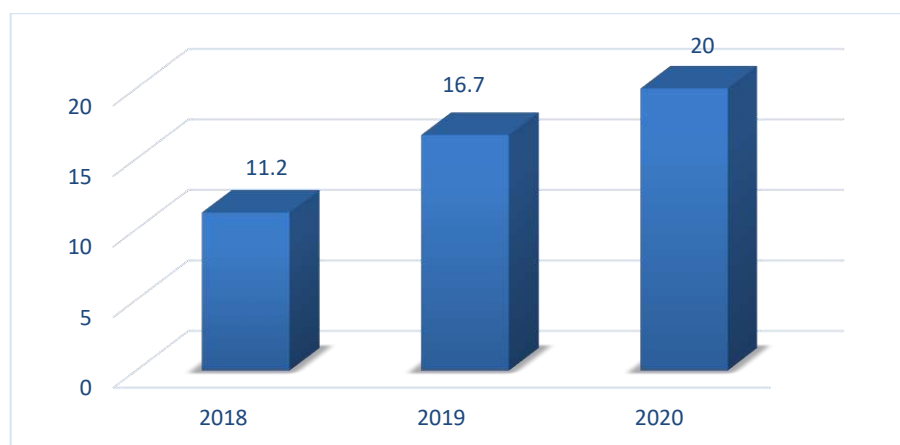
1) Kawasan Permukiman Kabupaten Banjar

Luas kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan Kabupaten Banjar berdasarkan SK Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Banjar Tahun 2020 adalah sebesar 343,98 Ha yang berada di 7 Kecamatan dan 36 Desa/Kelurahan. Dengan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (>15 Ha) yaitu seluas 117,33 ha atau 34,11%

dan Kewenangan Pemerintah Provinsi (10-15 Ha) yaitu seluas 107,11 Ha atau 31,14%. Adapun yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar (<10 Ha) yaitu seluas 119,54 Ha atau 34,75% dari luas total Kawasan Kumuh Kabupaten Banjar sesuai dengan SK Kumuh yang telah direvisi pada tahun 2020.

Berdasarkan SK Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Banjar Tahun 2020 luas kawasan kumuh Kabupaten Banjar yang tertangani sesuai kewenangan Kabupaten pada tahun 2020 yaitu seluas 20% sedangkan kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai kewenangan kabupaten seluas 80%. Adapun untuk penanganan kumuh kawasan perkotaan di Kabupaten Banjar pada tahun 2018 dan 2019 masih menggunakan SK Kumuh yang disahkan pada Tahun 2013.

Gambar 2. 93. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Banjar Tahun 2018-2020

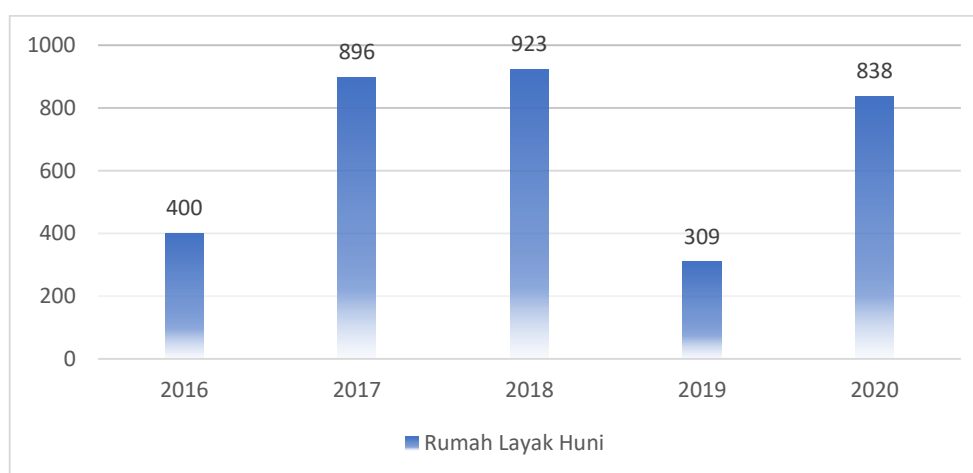


Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, 2021

2) Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Adapun kriteria rumah layak huni meliputi: ketahanan bangunan, kecukupan luasan bangunan, akses sanitasi dan akses air minum.

Gambar 2. 94. Jumlah Rumah Layak Huni yang di Intervensi pada Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, 2021

Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Banjar yang telah diintervensi melalui berbagai program dan pendanaan, diantaranya yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan yang bersumber dari APBN, sedangkan untuk sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Banjar sendiri yaitu Program Rumah Barokah dan Rehabilitasi Rumah. Adapun gambaran penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi menjadi Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut. Pada Tahun 2016 sebanyak 400 unit RTLH tertangani melalui Program BSPS. Pada Tahun 2017 sebanyak 896 unit RTLH tertangani melalui Program BSPS dan DAK Perumahan. Pada Tahun 2018 sebanyak 923 unit RTLH tertangani melalui Program BSPS dan Rumah Barokah. Pada Tahun 2019 sebanyak 309 unit RTLH tertangani melalui

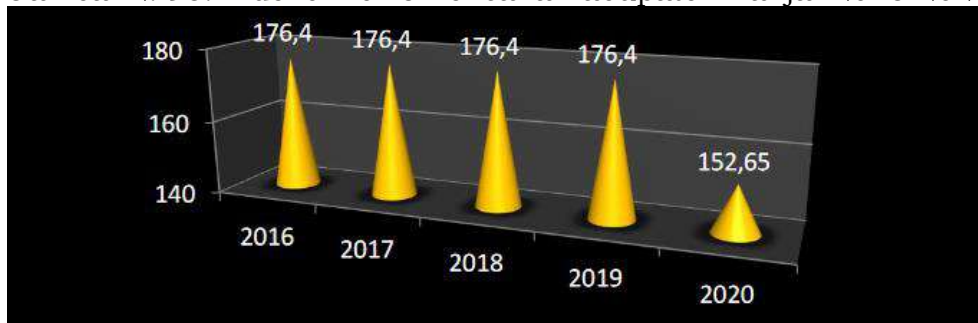
Program BSPS, DAK Perumahan dan Rumah Barokah. Pada Tahun 2020 sebanyak 838 unit RTLH tertangani melalui Program BSPS, DAK Perumahan, Rumah Barokah, dan Rehab rumah

2.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1) Persentase Bencana yang Ditanggulangi

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. IRB dalam hal ini akan menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. IRB di Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2016-2019 menurut informasi yang diperoleh dari LKJIP Kabupaten Banjar selalu berada pada posisi 176,40. Artinya bahwa tingkat ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas Kabupaten Banjar dalam menghadapi bencana memiliki nilai yang sama selama 4 tahun. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yakni pada tahun 2020 indeks risiko bencana berada pada angka 152,65 yang berarti terdapat penurunan 21,95 apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Gambar 2. 95. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjar 2016-2020



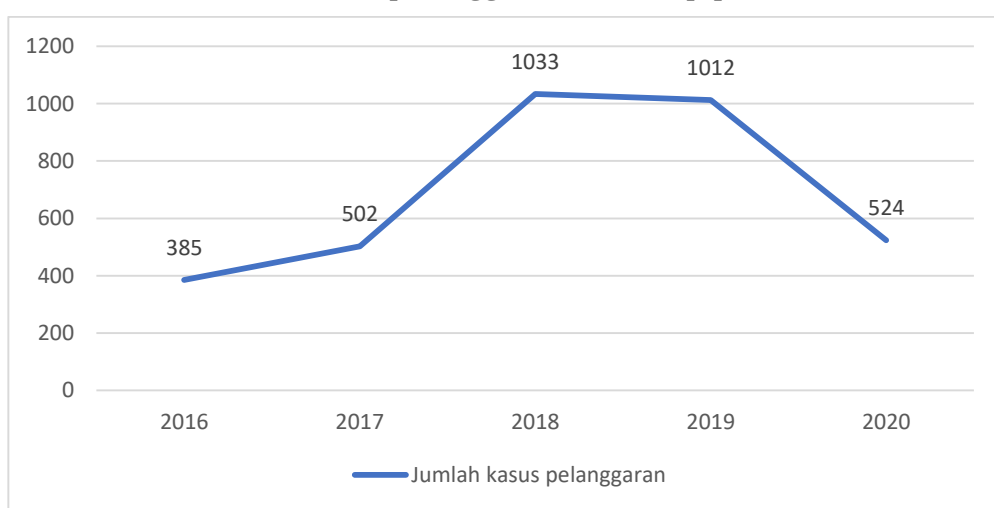
Sumber: LKjIP Kab. Banjar Kabupaten Banjar, 2021

Keberhasilan Pemerintah dalam menangani bencana adalah bagaimana Pemerintah mampu mengantisipasi saat sebelum terjadi bencana, mampu mengatasi/ menanggulangi saat terjadi bencana dan mampu merevitalisasi berbagai bidang pasca terjadi bencana. Kemampuan Pemerintah dalam menanggulangi bencana merupakan hal yang penting mengingat semakin cepat dan tepat proses penanggulangan bencana maka semakin minim jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

2) Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Berikut adalah gambar diagram penurunan kasus ketenteraman dan ketertiban yang terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Gambar 2. 96. Trend pelanggaran terhadap produk hukum daerah



Sumber : Satpol PP Kab. Banjar

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2020 mengalami penurunan angka kasus pelanggaran dibandingkan tahun 2019 sebanyak 468 kasus pelanggaran, walaupun mengalami penurunan dari tahun 2019 tapi masih tinggi kalau dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Dari angka kasus pelanggaran yang ditangani Satpol PP sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 jenis kasus pelanggarannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. 35. Trend Jenis Pelanggaran

No.	Jenis Kasus	2016	2017	2018	2019	2020				Total	Naik/ Turun
						T1	T2	T3	T4		
1	Kebersihan	5	2	0	27	1	4	4	10	19	Turun
2	Asusila	11	4	25	54	0	1	4	6	11	Turun
3	Anjal	9	3	13	72	0	0	4	10	14	Turun
4	Penyalahgunaan Obat atau Zat Adiktif	0	0	45	75	3	9	10	23	45	Turun
5	PKL	76	120	45	166	12	9	62	68	151	Turun
6	Gepeng	12	16	24	26	1	0	9	6	16	Turun
7	Jalur Hijau	135	132	101	151	2	3	68	58	131	Turun
8	Event Masyarakat/ Pemerintah	23	19	5	0	1	0	1	1	3	Naik
9	Kegiatan Mengganggu Ketertiban Umum	0	0	36	86	1	0	14	13	28	Turun
10	Kelestarian Sumber Daya Ikan	0	0	2	13	0	0	0	0	0	Turun
11	Aksi Massa/ Demo	3	1	0	1	0	0	0	2	2	Naik
12	Kearifan Lokal	0	0	0	49	0	0	9	0	9	Turun
13	Lingkungan	0	0	0	40	2	1	8	5	16	Turun
14	Jam Sekolah	0	0	0	20	0	0	6	7	13	Turun
15	Perizinan dan Tata Ruang	0	0	0	0	4	12	3	0	19	Naik
16	Peredaran Miras Ilegal	0	0	0	1	0	0	3	0	3	Naik
17	Minuman Oplosan	0	0	0	0	2	3	13	11	29	Naik
18	KTP	0	0	0	0	0	0	6	9	15	Naik
19	Kawasan Bebas Rokok	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Turun
Jumlah		274	297	296	803	29	42	224	229	524	

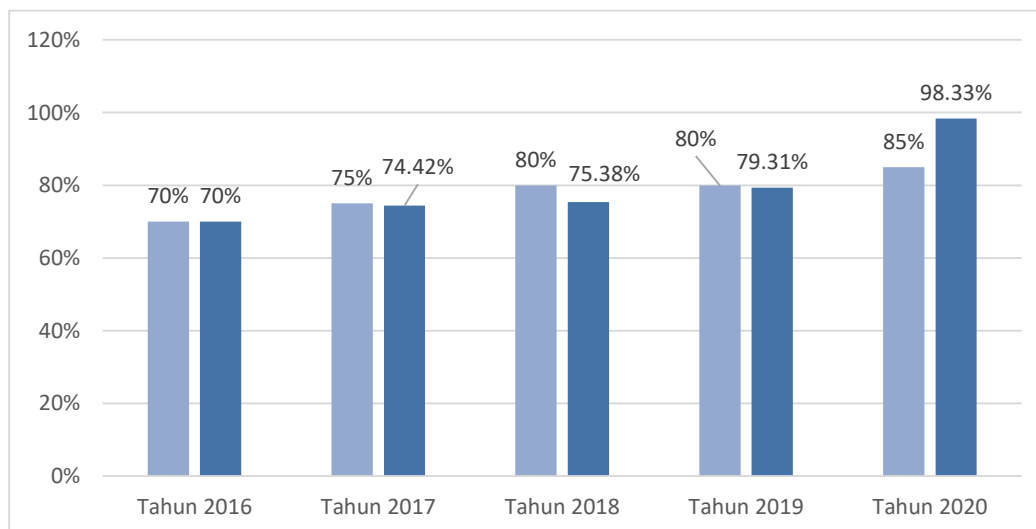
Sumber Data : Satpol PP Kabupaten Banjar

Dari tabel trend jenis pelanggaran diatas jenis pelanggaran yang paling banyak didapati adalah masih didominasi oleh PKL dan penyalahgunaan badan jalan atau jalur hijau dengan jumlah pelanggaran terkait PKL sebanyak 151 pelanggar dan 131 pelanggaran untuk jalur hijau..

3) Indikator persentase kejadian kebakaran di wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang tertangani .

Untuk tahun 2020 targetnya adalah sebesar 85%. Pencapaian indikator kinerja untuk kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 97. Persentase kejadian kebakaran di wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang tertangani dibandingkan dengan tahun sebelumnya



Sumber data : Satpol PP Kab Banjar, 2021

Dari gambar diagram di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 penanganan kebakaran di wilayah manajemen kebakaran hampir seluruhnya dapat tertangani. Adapun kendala yang dihadapi untuk kejadian kebakaran yang tidak tertangani dikarenakan lokasi kebakaran susah dijangkau melalui angkutan darat dan hanya bisa ditempuh melalui jalur air ditambah di wilayah kejadian bencana kebakaran tidak memiliki unit BPK swasta untuk melakukan tindakan pemadaman.

4) Pelanggaran Perda Bernuansa Kearifan Lokal

Kabupaten Banjar sebagai daerah religius yang mendapat julukan Serambi Mekkah, sangat menjunjung nilai-nilai agama. Salah satu upaya nyata adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah bernuansa kearifan lokal yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Membuka Restoran, Warung, Rombongan dan Yang Sejenis Serta Makan Minum Dan Atau Merokok Di Tempat Umum Pada Bulan Ramadhan. Peraturan ini dikeluarkan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan ibadah bulan puasa di Kabupaten Banjar yang penduduknya mayoritas muslim.

Jumlah pelanggaran Perda bernuansa kearifan lokal pada tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

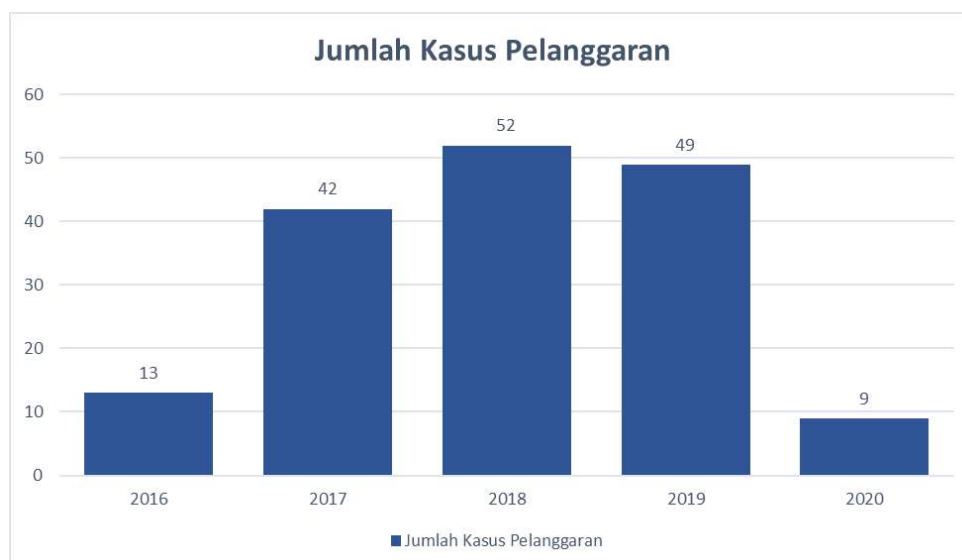
Tabel 2. 36. Jumlah Kasus pelanggaran Perda bernuansa kearifan lokal Tahun 2016-2020

Jenis Kasus Pelanggaran	2016	2017	2018	2019	2020
Membuka usaha di luar waktu	4 kasus	18 kasus	40 kasus	33 kasus	9 kasus
Melakukan aktivitas makan minum dan merokok di tempat umum	9 kasus	24 kasus	12 kasus	16 kasus	--
Jumlah Kasus Pelanggaran	13 kasus	42 kasus	52 kasus	49 kasus	9 kasus

Sumber : Satpol PP Kabupaten Banjar, data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi trend penurunan kasus pelanggaran Perda bernuansa kearifan lokal setiap tahunnya. Untuk tahun 2019 sebanyak 49 kasus menjadi 9 kasus di tahun 2020. Penurunan kasus yang cukup signifikan ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial akibat pandemik covid 19.

Gambar 2. 98. Jumlah Kasus Pelanggaran Perda Bernuansa Kearifan Lokal



Sumber Data : Satpol PP Kabupaten Banjar, data diolah kembali

2.3.1.6. Sosial

1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Ada 26 jenis PPKS yaitu Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia Telantar, Penyandang Distabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA,

Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Komunitas Adat Terpencil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penyebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diganti menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Banjar pada tahun 2016 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. 37. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banjar Tahun 2016 2020

No.	PPKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	44	44	54	22	3597
2	Anak Terlantar	494	465	529	183	32707
3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	4	3	24	1	NA
4	Anak Jalanan	13	13	47	13	NA
5	Anak Dengan Kedisabilitas	288	277	309	220	406
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5	5	NA	7	NA
7	Lanjut Usia Terlantar	3145	3145	3281	3154	19272
8	Penyandang Disabilitas	1397	2207	1704	1571	3462
9	Tuna Susila	0	1	NA	NA	NA
10	Gelandangan	70	70	70	75	77
11	Pengemis	8	4	8	5	20
12	Pemulung	23	23	NA	26	24
13	Kelompok Minoritas	0	0	NA	NA	NA
14	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	74	73	75	82	81
15	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	NA	NA	NA
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA	32	32	32	53	44
17	Korban Trafficking	0	0	NA	NA	NA
18	Korban Tindak Kekerasan	6	6	NA	NA	NA
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	NA	NA	NA
20	Korban Bencana Alam	74	86	20	124	93
21	Korban Bencana Sosial	12	12	33	129	320
22	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2812	2812	1691	25	56
23	Fakir Miskin (FM)	14613	15517	42394	40733	25
24	Keluarga Bermasalah Ekonomi	578	578	746	NA	NA
25	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	2777	3544	1432	195	8

No.	PPKS	2016	2017	2018	2019	2020
26	Komunikasi Adat Terpencil (KAT)	336	45	4	4	NA
JUMLAH		26805	25181	52453	46622	60192

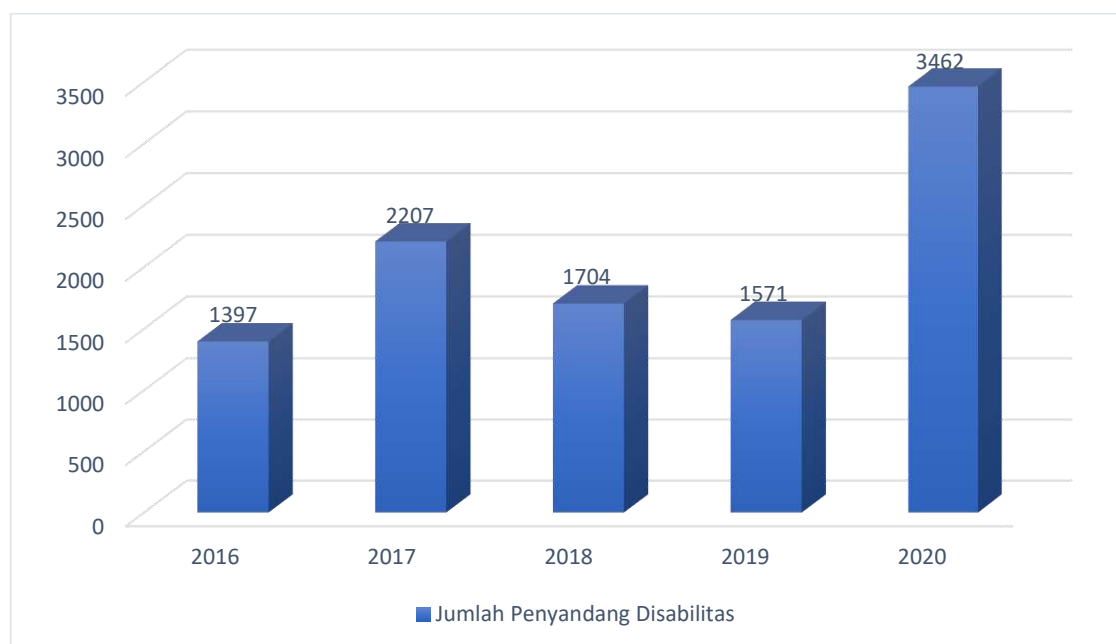
Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 207-2021, Data diolah

Dari tabel di atas, dapat diketahui 4 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari 26 jenis yang memiliki jumlah dominan adalah lanjut usia terlantar, fakir miskin, penyandang disabilitas dan anak terlantar.

2) Penyandang Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banjar pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.397 orang. Tahun 2017 meningkat menjadi 2.207 orang. Tahun 2018 menurun menjadi 1.704 orang dan pada tahun 2019 juga menurun menjadi 1.571 orang dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 3.462 orang.

Gambar 2. 99. Jumlah Penyandang Distabilitas di Kabupaten Banjar Tahun 2016- 2020



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

1) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Banjar, pemerintah daerah berupaya menciptakan hubungan industrial yang baik atau kondusif. Sengketa industrial merupakan sengketa antar pekerja dengan pemberi kerja baik berupa pemutusan hubungan kerja, perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak dan kewajiban. Untuk mengukur keberhasilan kinerja diatas pemerintah daerah kabupaten banjar menetapkan penurunan sengketa industrial sebagai parameternya. Pada tahun 2016, sengketa industrial yang terjadi sebanyak 11 kasus, tahun berikutnya terjadi penurunan kasus sengketa industrial menjadi 9, namun pada tahun 2018 kembali terjadi kenaikan sengketa industrial menjadi 12 kasus. Tahun 2019 terjadi sengketa industrial sebanyak 7 (tujuh) kasus, Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, telah terjadi penurunan yang signifikan di Tahun 2019. Hal tersebut merupakan hasil daripada beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan serta fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, pada tahun 2020, kembali terjadi peningkatan kasus sengketa industrial menjadi 21 kasus, Tingginya jumlah kasus sengketa Industrial yang terjadi pada tahun 2020 adalah merupakan dari dampak pandemi yang terjadi di awal tahun 2020, yang menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.

2) Penempatan Tenaga Kerja

Dalam rangka menurunkan angka pengangguran, Kabupaten Banjar menetapkan kinerja untuk meningkatkan kesempatan kerja/lapangan kerja, kinerja diukur dengan persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan. Dalam kurun waktu 2018 – 2020 terjadi fluktuasi persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Pada Tahun 2018 terdaftar 2.928 orang pencari kerja dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 212 orang, pada tahun berikutnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan meningkat sebanyak 411 orang dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1792 orang, sementara pada Tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengalami penurunan jumlah, yaitu sebanyak 195 orang dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.108 orang, hal tersebut tak lepas dari dampak pandemi covid 19 di sepanjang Tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Tahun 2018-2020.

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pencari Kerja	2928	1792	1108
2	Tenaga Kerja yang ditempatkan	212	411	195
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	7,24%	22,94%	17,60%

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, 2021

Penyebab diluar pandemi adalah dikarenakan masih rendahnya kualitas tenaga kerja, dan ketidaksesuaian kebutuhan antara tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri serta laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, yang cenderung terus meningkat namun pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai dengan kondisi tersebut. Sementara daerah sudah melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja dimaksud, adapun beberapa upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan melalui Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja serta pelatihan keterampilan tenaga kerja.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas luasnya, terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain:

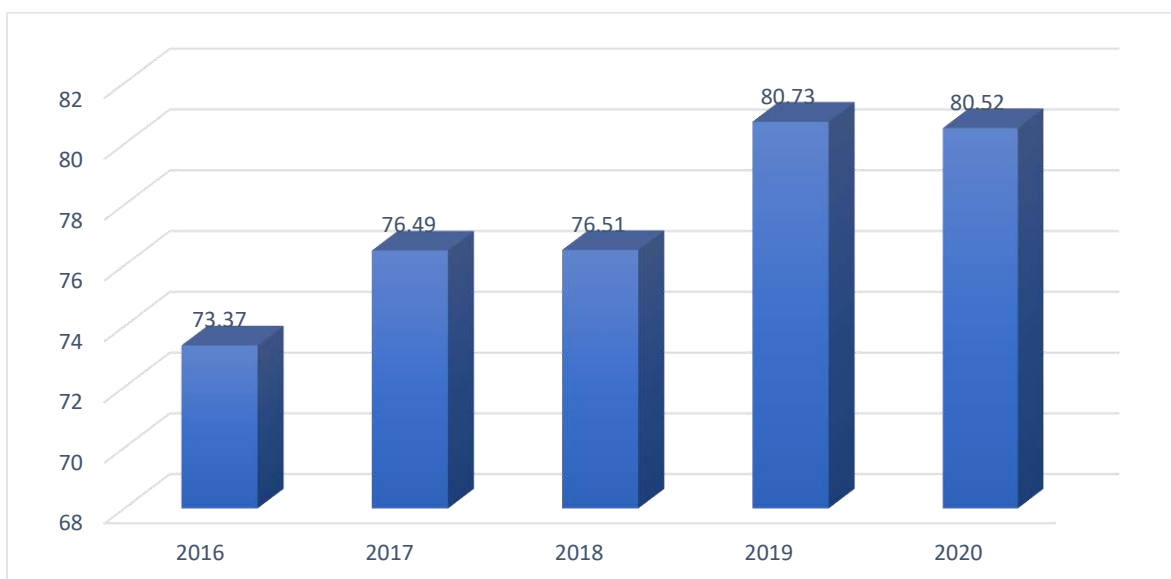
1) Indeks Pembangunan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Pandangan masyarakat telah banyak mengalami pergeseran ke arah kemajuan seiring dengan perkembangan iklim sosial budaya yang semakin kondusif. Saat ini semakin banyak perempuan yang ikut dalam menentukan arah dan gerak pembangunan bangsa. Perempuan telah banyak berpartisipasi dalam sektor publik, baik bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, atau di ranah politik

Perkembangan IDG Kabupaten Banjar pada tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan kondisi yang stabil meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 73,37 menjadi 76,49 di tahun 2017. Untuk tahun 2018 meningkat tipis diangka 76,51 atau naik sebesar 0,02 poin sementara untuk tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 80,73, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 80,52.

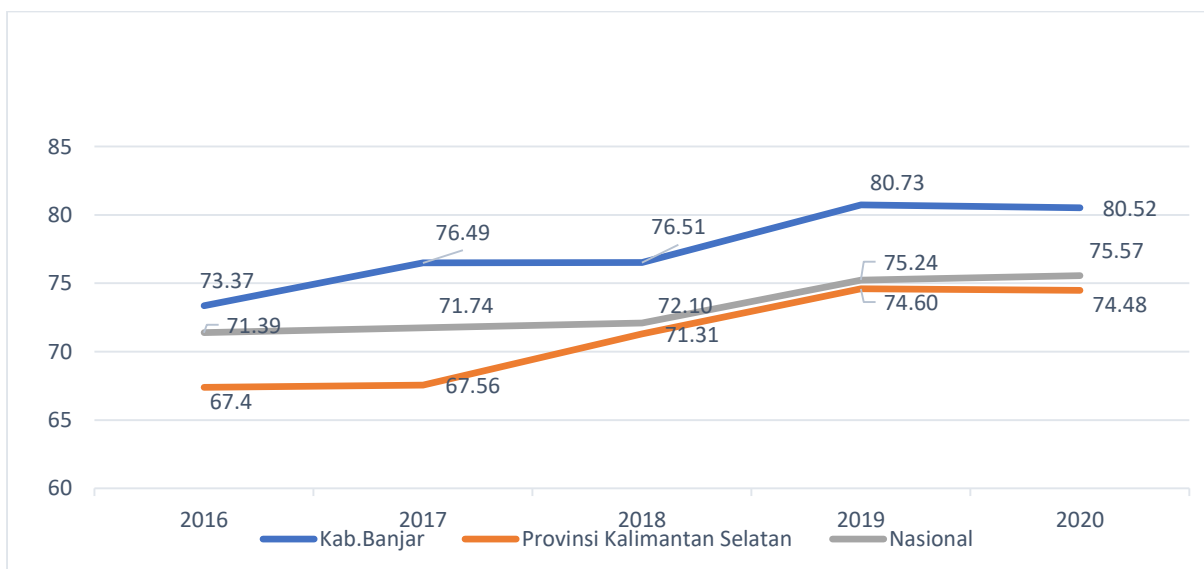
Gambar 2. 100. Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Tahun 2020 Angka IDG Kabupaten Banjar berada diatas angka IDG Nasional sebesar 75,57 dan IDG Provinsi Kalsel yang berada di angka 74,48. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini

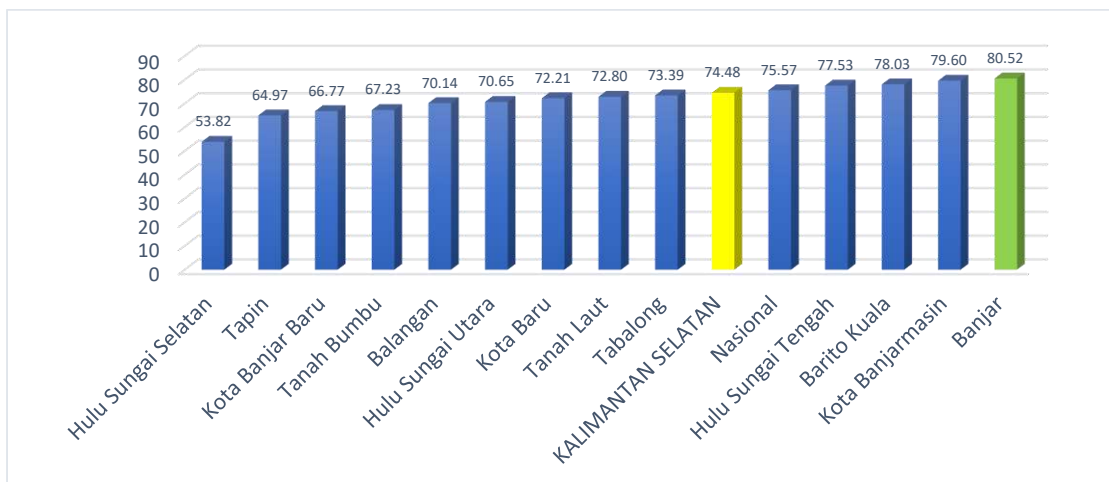
Gambar 2. 101. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Kalsel, BPS RI, 2021

Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selata, IDG Kabupaten Banjar menempati posisi pertama. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2. 102. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kota Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020



Sumber : BPS RI, 2020

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; Perempuan sebagai tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, keterlibatan perempuan di parlemen mengalami nilai yang meningkat, yaitu dari sebesar 24,44% di tahun 2017 meningkat signifikan menjadi sebesar 31,11% tahun 2020.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2017 sebesar 49,57% menurun tajam ditahun 2018 menjadi 45,49 dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 54,83.

Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja, kondisi tiap tahunnya mengalami peningkatan dari 32,22% di tahun 2017 menjadi 33,56% pada tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2016 tidak dilaksanakan pengukuran oleh BPS RI. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 39. Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	-	24,44	24,44	31,11	31,11
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional(%)	-	49,57	45,49	47,21	54,83
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja(%)	-	33,22	33,27	33,29	33,56

Sumber : BPS RI, 2020

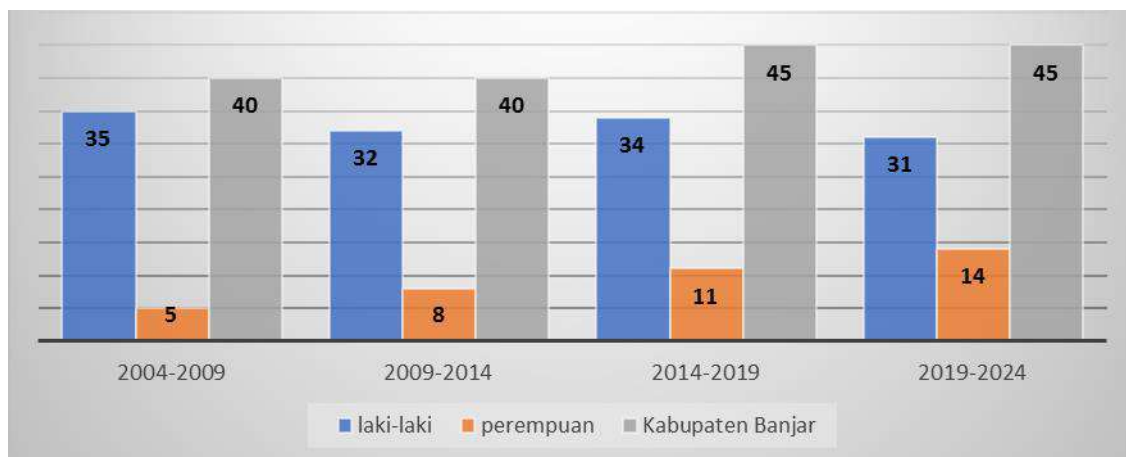
2) Keterwakilan Perempuan di Lembaga legislatif

Keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif di Kabupaten Banjar dalam 3 periode masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Peraturan Perundangan-undangan, yaitu keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Hingga Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Banjar hanya mencapai angka 28,71 %, dari nominal 7 partai politik, hanya ada 4 partai politik yang melibatkan perempuan sebagai wakilnya. 42,86% partai politik yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. (Profil dan Analisis Gender Kabupaten Banjar Tahun 2017).

Untuk periode 2004-2009 perempuan di legislatif hanya 5 orang atau 12,5% dari seluruh anggota legislatif yang ada. Untuk periode 2009-2014 perempuan di legislatif berjumlah 8 orang atau 20%. Pada periode 2014-2019 keterwakilan perempuan hanya mencapai 22,22% (11 orang). Pada periode 2019-2024, keterwakilan perempuan di legislatif menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana keanggotaan perempuan meningkat dari

3 periode sebelumnya yaitu berjumlah 14 orang atau sebesar 31%. Dari 12 partai di DPRD, 9 partai melibatkan perempuan sebagai wakilnya.

Gambar 2. 103. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Banjar Menurut Periode dan Jenis Kelamin



Sumber :BPS Kabupaten Banjar, 2020

3) Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif

Perempuan juga dapat berperan di Lembaga eksekutif seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat.

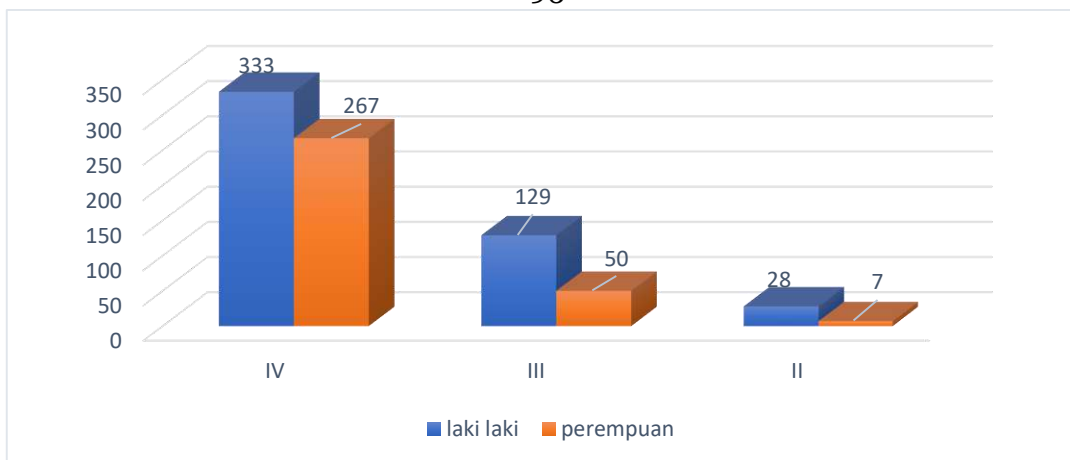
Tabel 2. 40. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2020

Dinas/Instansi Pemerintah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat daerah	72	44	116
Sekretariat DPRD Kab. Banjar	18	17	35
Dinas-Dinas Daerah	355	433	788
Lembaga Teknis Daerah	465	409	874
Pemerintah Kecamatan	219	43	262
Pemerintah Kelurahan	48	58	106
UPT pendidikan/cabang Dinas Pendidikan	50	59	109
UPT Dinas Kesehatan	283	488	771
Puskesmas Desa/Pembantu	916	1494	2410
Pendidikan TK/SD/MI	203	596	799
SMP/SLTP/MTs		16	16
Perbantuan Daerah	1	1	2
Unit kerja lain			
Jumlah	2630	3658	6288

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Dilihat dari Tabel di atas, secara umum pegawai perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini memberikan gambaran bahwa di kabupaten Banjar dalam hal penerimaan dan penempatan pegawai, perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan kariernya.

Gambar 2. 104. Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Dilihat dari Gambar di atas, jumlah perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV masih relatif kecil daripada laki-laki, hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan potensi dan kemampuan masing-masing individu.

4) Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau di dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Gambar 2. 105. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani UPPA Polres Banjar



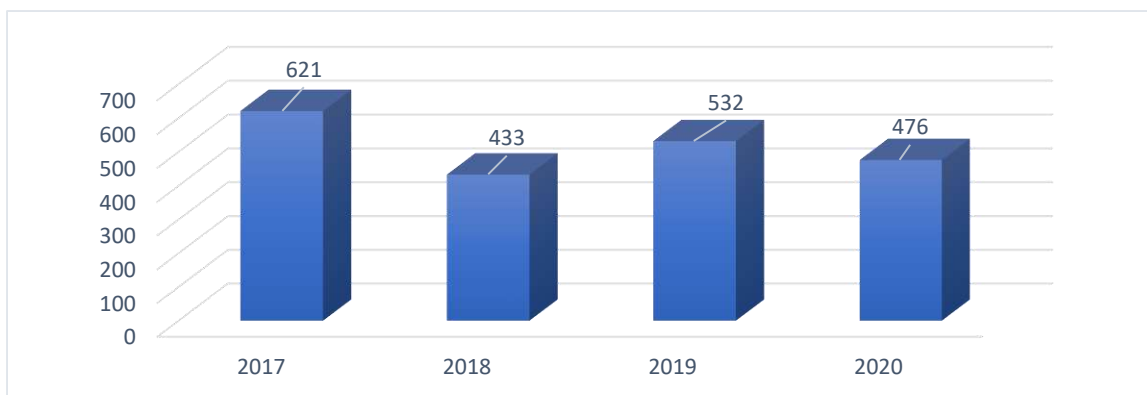
Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2020

Data di atas berdasarkan data yang ada di Polres Banjar berdasarkan laporan korban kekerasan. Sebenarnya banyak kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkungan publik, tetapi dari sekian banyak peristiwa tersebut, yang dilaporkan kepada pihak terkait masih sangat kecil

Kasus kekerasan terhadap anak mengalami fluktuasi setiap tahunnya, terjadi penurunan kasus di tahun 2018 menjadi sebesar 433 kasus dari semula di tahun 2016 sebesar 621 kasus. Namun di tahun 2019 terjadi kenaikan kasus kekerasan terhadap anak sebesar 532 kasus dan kondisi ini kembali menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 476 kasus.

Gambar 2. 106. Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditangani di Kabupaten Banjar Tahun 2017-2020

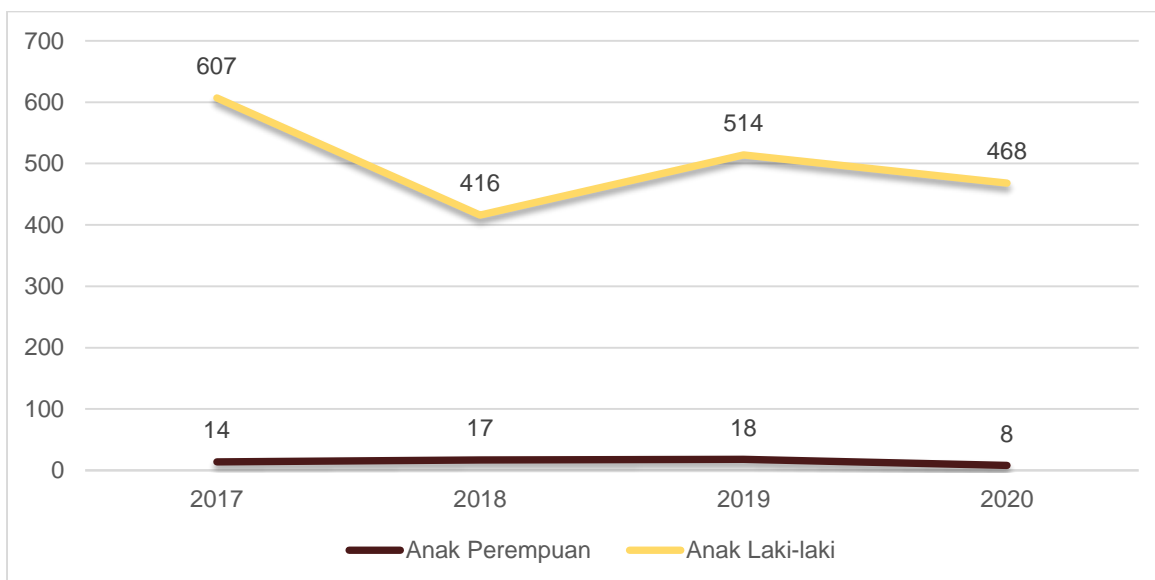
Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Banjar, 2021



Sementara jika dilihat secara lebih detail maka jumlah kasus kekerasan terhadap anak laki-laki lebih tinggi daripada kasus kekerasan terhadap anak perempuan, di tahun 2017 terjadi kasus sebesar 607 kasus, di tahun 2018 sebesar 416 kasus, dan di tahun 2019 sebesar 514 kasus, sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak laki-laki menjadi sebesar 468 kasus.

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan di tahun 2017 sebesar 14 kasus, tahun 2018 sebesar 17 kasus. Kondisi ini naik tipis di tahun 2019 menjadi 18 kasus dan turun signifikan di tahun 2020 menjadi 8 kasus

Gambar 2. 107. Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditangani Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2017-2020

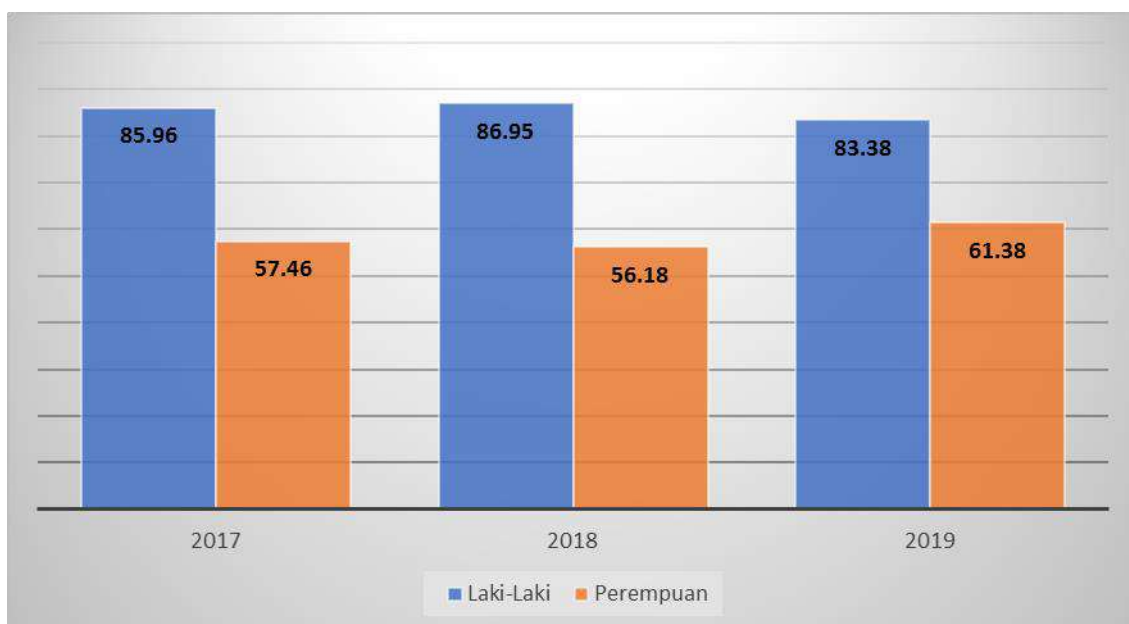


Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Banjar, 2021

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja, serta menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 108. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2020

6) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

Rasio jenis kelamin APM merupakan salah satu indikator untuk melihat kesetaraan gender di bidang Pendidikan. Rasio ini merupakan persentase dengan membandingkan APM Perempuan dibandingkan dengan APM Laki-laki. Rasio jenis kelamin yang ideal adalah apabila sama dengan 100 artinya telah terjadi kesetaraan gender di bidang Pendidikan.

Tabel 2. 41 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Rasio APM Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2019

Uraian			Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio P/L
Angka Partisipasi Murni	SD/MI	100	96,76	98,38	97	
Angka Partisipasi Murni	SMP/MTs	72,48	67,74	70,11	94	
Angka Partisipasi Murni	SMA/MA	43,35	49,20	46,28	114	

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2020

Dari Tabel di atas dapat dilihat rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banjar cukup fluktuatif. APM SD/MI hampir mendekati 100 yaitu sebesar 99, SMP/MTs 95 dan SMA/MA 103. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan yang tepat waktu di kabupaten Banjar pada dasarnya tidak mengindikasikan ketidakadilan, semua jenjang pendidikan berpeluang cukup besar untuk memperoleh Pendidikan.

2.3.2.3. Pangan

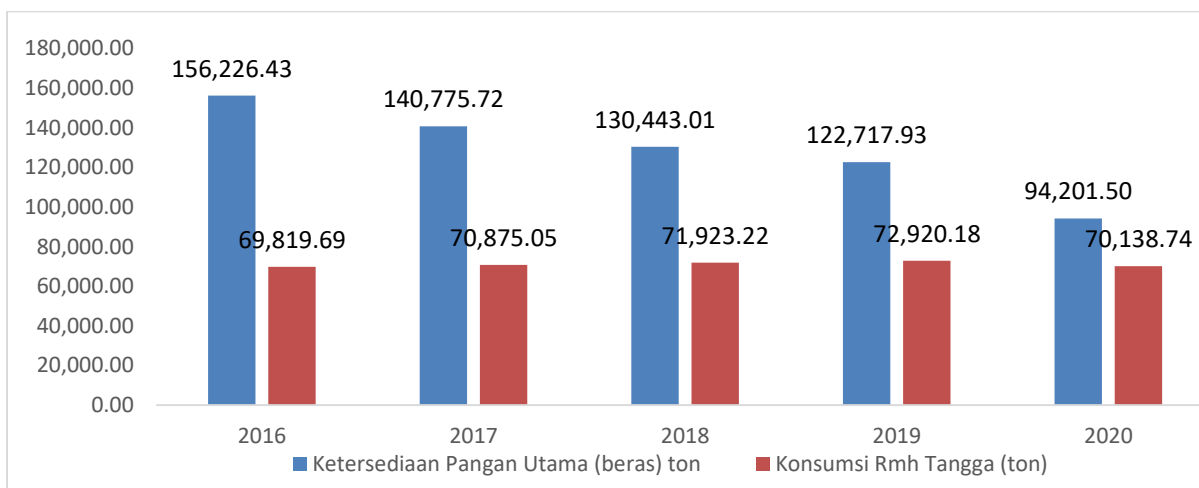
1) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarmasin memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah daerah. IKP ini disusun dari tiga dimensi / pilar, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar yaitu 69,09 mengalami penurunan sebesar 0,8 dari tahun 2019 yaitu 69,15. Akan tetapi, nilai ini masih lebih tinggi dari Indeks Ketahanan Pangan Nasional yaitu 59,5%. Untuk tahun 2019 – 2020 Kabupaten Banjar berada Kelompok IKP 5 yaitu kabupaten yang memiliki ketahanan pangan baik.

2) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan pangan pokok perlu diupayakan ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya, disamping produktivitas tanaman di tingkat petani yang relatif stagnan, juga disebabkan karena terbatasnya kapasitas produksi, penurunan kapasitas kelembagaan petani, serta penurunan kualitas penyuluhan. Hal ini merupakan tantangan pembangunan ketahanan pangan ke depan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 109. Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Ton Kab. Banjar Tahun 2016-2020



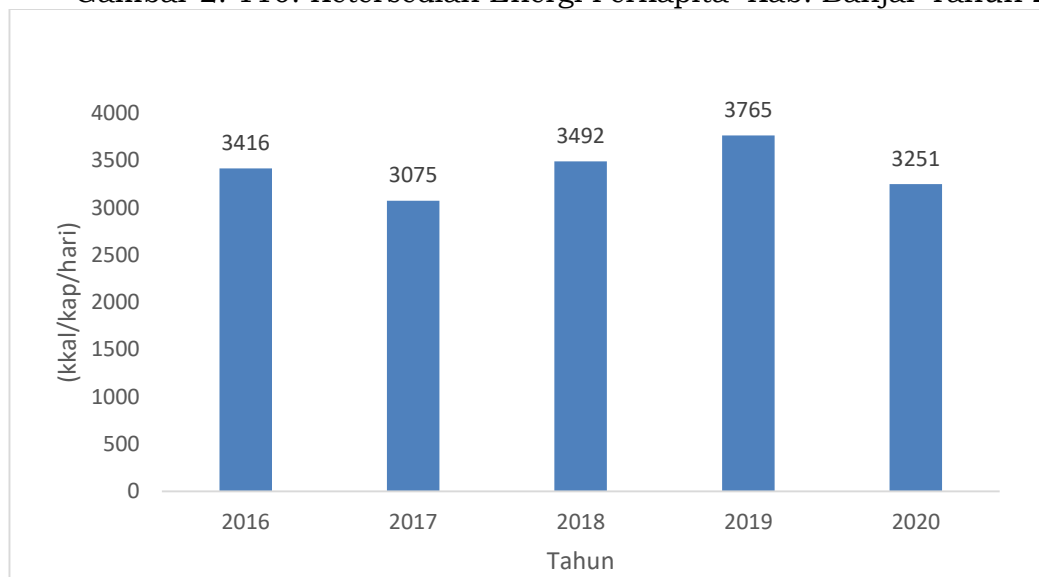
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar, 2021

Dilihat dari Gambar 2. 109 Ketersediaan Pangan Utama (beras) ton Kab. Banjar 2016-2020 dapat diketahui Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2020 surplus tapi dengan rasio kecil 1,34 atau hanya memiliki kelebihan ketersediaan sebesar 24.062,76 ton. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan Kabupaten Banjar akan defisit ketersediaan pangan utama (beras).

3) Ketersediaan energi dan protein perkapita

Semua makhluk hidup memerlukan energi/ tenaga untuk tumbuh, bergerak dan berfikir sesuai golongan umur, berat badan dan aktifitas untuk mempertahankan kehidupan. Energi/ tenaga yang diperlukan, diperoleh dari konsumsi makanan yang mengandung zat gizi, karbohidrat, protein dan lemak. Data kecukupan energi dan zat-zat gizi akan digunakan ketika akan menyusun menu seimbang bagi individu dan kelompok umur dalam keadaan sehat. Angka Kecukupan gizil (AKG) adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh dan kondisi fisiologis khusus untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka Kecukupan Energi (AKE) berguna untuk mengetahui kecukupan energi dan zat-zat gizi individu maupun kelompok. Data ketersediaan energi dan protein perkapita Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

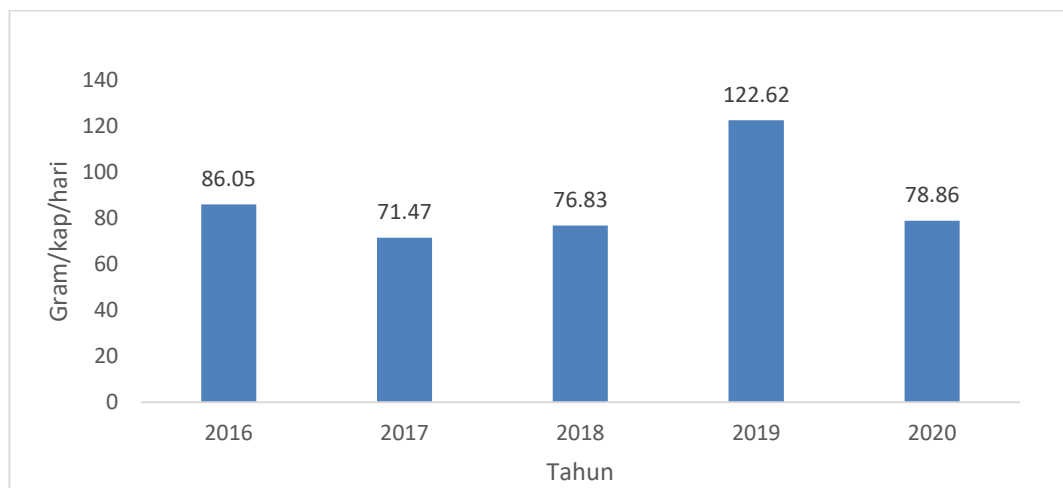
Gambar 2. 110. Ketersediaan Energi Perkapita Kab. Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar, 2021

Dari Gambar 2. 110 dapat dilihat ketersediaan energi di Kabupaten Banjar terus mengalami fluktuasi tetap posisinya masih di atas angka target energi perhari yang dibutuhkan yaitu 2.400 Kkal/kap/hari nya.

Gambar 2. 111. Ketersediaan Protein Perkapita Kab. Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar, 2021

Begitupula dengan ketersediaan protein di Kabupaten Banjar juga terus mengalami fluktuasi tetap posisinya masih di atas angka target protein perhari yang dibutuhkan yaitu 63 gram/kap/hari nya.

4) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Pengawasan keamanan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Sedangkan pengawasan persyaratan keamanan pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan.

Gambaran keamanan pangan Kab. Banjar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 42 Skor Keamanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Keamanan Pangan	%	0%	70,0%	72,3%	99,9%	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar, 2021

Skor keamanan pangan di atas diperoleh dengan perhitungan jumlah sampel yang tidak terkontaminasi dibagi dengan jumlah sampel secara keseluruhan dikali 100% . sehingga dari pengambilam sampel didapatkan bahwa skor kemanan pangan Kab. Banjar dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 bisa dinyatakan aman. Hal ini akan terus dijaga dengan terus melakukan pengawasan dan pembinaan.

2.3.2.4. Pertanian

Penyelesaian kasus tanah negara atau yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2018 telah diselesaikan sebanyak 2 kasus, pada tahun 2019 telah diselesaikan sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2020 Sebanyak 1 kasus penanganan Konflik yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

1) Tersusunnya RPPLH Kabupaten

RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya

perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang & Menengah (RPJP/M) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi. Kabupaten Banjar pada Tahun 2018 melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan inventarisasi data daya dukung dan daya tampung sebagai bahan penyusunan Dokumen RPPLH, sedangkan untuk penyusunan Dokumen RPPLH dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan proses legislasi perda RPPLH dilaksanakan pada tahun 2020.

Tahapan ideal dalam penyusunan perencanaan lingkungan hidup dimulai dari penyusunan RPPLH, KLHS, RPJMD, sampai pada kebijakan/program. Di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk dokumen RPPLH baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu yang telah melakukan penyusunan.

2) Dokumen KLHS

Pada penyusunan KLHS ini yang menjadi leading sektor adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Banjar sebagai koordinator. KLHS RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 disusun pada tahun 2020 sebagai acuan/rambu dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB ke dalam dokumen RPJMD.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs/TPB disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

3) Indeks Kualitas Air

Sungai utama yang terdapat di Kabupaten Banjar adalah Sungai Martapura (sepanjang 70 Km) yang merupakan penyatuan dua sungai lainnya yakni sungai Riam Kiwa (sepanjang 60 Km) yang hulunya berada di daerah pegunungan Meratus dan Sungai Riam Kanan (sepanjang 60 Km) yang berhulukan di Waduk Pangeran Muhammad Noor yang mengalir wilayah Kabupaten Banjar yang berakhir di Sungai Barito.

Wilayah Kabupaten Banjar dilintasi oleh tiga aliran sungai yaitu Sub-sub DAS Riam Kiwa, DAS Riam Kanan yang menyatu di hilirnya dengan DAS Martapura. Berdasarkan arah arus air mengalirnya, Sungai Riam Kiwa mengalir dari arah utara menuju ke selatan dan Sungai Riam Kanan dari arah timur ke barat pada titik pertemuan (30 22' 57", 01 LS dan 140 53' 26 " , 36 BT) membentuk sungai Martapura yang mengalir mengarah ke barat daya. Ketiga sungai ini mengalir mengarah ke barat daya. Ketiga sungai ini mengalir dengan pola Dentritik

4) Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Parameter DO (Dissolved Oxygen)

Parameter Dissolved oxygen (DO) atau oksigen terlarut adalah banyaknya oksigen yang terkandung dalam air. Air yang memiliki DO tinggi menunjukkan tingkat pencemaran yang rendah, dan sebaliknya air yang memiliki DO rendah menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi. Bila mikro organisme anaerob yang tumbuh, maka air tersebut sering kali menimbulkan bau yang tidak sedap. Organisme akuatik akan mati pada kandungan oksigen yang rendah. Oksigen dalam air yang terukur sebagai DO diperlukan untuk proses degradasi bahan organik di air. Nilai standar Baku Mutu DO berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Sungai Martapura, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, dan Sungai Barito.

Tabel 2. 43. Nilai Standar Baku Mutu DO tahun 2020

Lokasi Pengambilan Sampel		Tahap	DO
			(mag/L) Baku Mutu min 4
DAS Riam Kanan	Aranio	Tahap I	6
		Tahap II	6,84
		Tahap III	6,41
		Tahap IV	6,9
	Karang Intan	Tahap I	7,1
		Tahap II	6,63
		Tahap III	6,89
		Tahap IV	8,3
	Sungai Kembang	Tahap I	9,4
		Tahap II	9,4
		Tahap III	7,05
		Tahap IV	7,9
	Sungai Asam	Tahap I	6,9
		Tahap II	6,9
		Tahap III	6,95
		Tahap IV	7,6
DAS Riam Kiwa	Mangkalawat	Tahap I	6,9
		Tahap II	6,9
		Tahap III	8,1
		Tahap IV	7
	Lawiran	Tahap I	7,4
		Tahap II	7,4
		Tahap III	8,2
		Tahap IV	5,4
	Benteng	Tahap I	7,8
		Tahap II	7,8
		Tahap III	7,85
		Tahap IV	5,7
DAS Sungai Martapura	Pingaran Ulu	Tahap I	6,3
		Tahap II	6,3
		Tahap III	7,65
		Tahap IV	6,1
	Pekauman Ulu	Tahap I	6,2
		Tahap II	6,94
		Tahap III	6,15
		Tahap IV	5
	Sungai Tengah	Rangas Tahap I	6,1
		Tahap II	6,43
		Tahap III	6,25
		Tahap IV	5,3
	Batang Ilir	Tahap I	6,1
		Tahap II	6,63
		Tahap III	6,8
		Tahap IV	5,1
Pinang Lama	Tahap I	5,2	
	Tahap II	5,2	
	Tahap III	6,45	
	Tahap IV	5,8	
Tanipah	Tahap I	7,6	

Lokasi Pengambilan Sampel	Tahap	DO	
		(mag/L) Baku Mutu min 4	
DAS Sungai Barito	Tahap II	6,33	
	Tahap III	6,95	
	Tahap IV	6,5	
	Bakambat	Tahap I	7,9
		Tahap II	6,84
		Tahap III	7,55
		Tahap IV	6,8
	Sungai Musang	Tahap I	7,6
		Tahap II	6,73
		Tahap III	7,6
		Tahap IV	5,7

Sumber : Dinas LH Kabupaten Banjar, 2021

Berdasarkan Tabel 2.42 di atas diketahui bahwa nilai DO standar baku mutu min. 4 sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007.

5) Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Parameter BOD

Parameter *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) atau kebutuhan oksigen biokimiawi adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik pada kondisi aerobik. Kebutuhan oksigen berkimiawi ini berbanding terbalik dengan keberadaan oksigen terlarut. Bila nilai BOD tinggi berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air banyak, sehingga sisa oksigen yang berada dalam air sedikit, sebaliknya bila nilai BOD rendah berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air sedikit, sehingga sisa oksigen dalam air banyak.

Nilai standar Baku Mutu BOD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Sungai Martapura, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, dan Sungai Barito.

Tabel 2. 44. Nilai Standar Baku Mutu BOD Tahun 2020

Lokasi Pengambilan Sampel	Tahap	BOD	
		(mag/L) Baku Mutu maks 3	
DAS Riam Kanan	Aranio	Tahap I	5,7
		Tahap II	8,4
		Tahap III	5,25
		Tahap IV	3,8
	Karang Intan	Tahap I	31,3
		Tahap II	7,11
		Tahap III	5,1
		Tahap IV	10,8
	Sungai Kembang	Tahap I	0,5
		Tahap II	0,5
		Tahap III	3,3
		Tahap IV	0,93
	Sungai Asam	Tahap I	8,6
		Tahap II	8,6
		Tahap III	6,6
		Tahap IV	0,93
DAS Riam Kiwa	Mangkalawat	Tahap I	1,5
		Tahap II	1,5
		Tahap III	0,54
		Tahap IV	0,3

Lokasi Pengambilan Sampel	Tahap	BOD		
		(mag/L)	Baku Mutu maks 3	
Lawiran	Tahap I	5,7		
	Tahap II	5,7		
	Tahap III	0,54		
	Tahap IV	1,3		
	Benteng	Tahap I	4,1	
		Tahap II	4,1	
		Tahap III	0,54	
		Tahap IV	0,93	
DAS Sungai Martapura	Pingaran Ulu	Tahap I	14,3	
		Tahap II	14,3	
		Tahap III	0,54	
		Tahap IV	0,93	
	Pekauman Ulu	Tahap I	3,7	
		Tahap II	7,88	
		Tahap III	2,1	
		Tahap IV	29,1	
	Sungai Rangas Tengah	Tahap I	0,9	
		Tahap II	8,2	
		Tahap III	4,2	
		Tahap IV	0,28	
	Batang Ilir	Tahap I	5,6	
		Tahap II	7,48	
		Tahap III	3,72	
		Tahap IV	7,8	
Pinang Lama	Tahap I	2,6		
	Tahap II	2,6		
	Tahap III	6,24		
	Tahap IV	0,93		
DAS Sungai Barito	Tanipah	Tahap I	7,2	
		Tahap II	11,59	
		Tahap III	7,2	
		Tahap IV	3	
	Bakambat	Tahap I	3,8	
		Tahap II	13,39	
		Tahap III	4,53	
		Tahap IV	5,2	
	Sungai Musang	Tahap I	6,2	
		Tahap II	9,9	
		Tahap III	5,1	
		Tahap IV	0,3	

Sumber : Dinas LH Kabupaten Banjar, 2021

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai BOD kualitas tidak ada yang memenuhi standar baku 2 sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2007.

6) Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Parameter COD

Parameter Chemical oxygen demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah pengukuran jumlah senyawa organik dalam air yang setara dengan kebutuhan jumlah oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Nilai standar Baku Mutu COD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Sungai Martapura, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, dan Sungai Barito dengan total 12 sampel yang tersebar yakni : Desa Pingaran ulu, Rangas

Hambuku, Pinang Lama, Karang Intan, Awang Bangkal Barat, Aranio, Benteng, Lawiran, Mangka Lawat, Musang, Tanipah, dan Bekambat.

Tabel 2. 45. Nilai Standar Baku Mutu COD

Lokasi Pengambilan Sampel	Tahap	COD (mag/L) Baku Mutu maks 25	
DAS Riam Kanan	Aranio	Tahap I	189,3
		Tahap II	21,43
		Tahap III	11,57
		Tahap IV	4,573
	Karang Intan	Tahap I	144,9
		Tahap II	18,12
		Tahap III	10,87
		Tahap IV	11,301
	Sungai Kembang	Tahap I	29,6
		Tahap II	29,6
		Tahap III	14,8
		Tahap IV	9,568
	Sungai Asam	Tahap I	85,8
		Tahap II	85,8
		Tahap III	19,5
		Tahap IV	7,71
DAS Riam Kiwa	Mangkalawat	Tahap I	32,5
		Tahap II	32,5
		Tahap III	10,58
		Tahap IV	21,7
	Lawiran	Tahap I	142
		Tahap II	142
		Tahap III	11,76
		Tahap IV	16,3
	Benteng	Tahap I	20,7
		Tahap II	20,7
		Tahap III	9,66
		Tahap IV	8,988
DAS Sungai Martapura	Pingaran Ulu	Tahap I	204,1
		Tahap II	204,1
		Tahap III	12,77
		Tahap IV	19
	Pekauman Ulu	Tahap I	46
		Tahap II	20,1
		Tahap III	11,66
		Tahap IV	11,621
	Sungai Tengah Rangas	Tahap I	83,5
		Tahap II	20,92
		Tahap III	13,56
		Tahap IV	13,1
	Batang Ilir	Tahap I	120,9
		Tahap II	19,07
		Tahap III	10,98
		Tahap IV	46,8
Pinang Lama	Tahap I	23	
	Tahap II	23	
	Tahap III	13,31	

Lokasi Pengambilan Sampel	Tahap	COD	
		(mag/L) Baku Mutu maks 25	
DAS Sungai Barito	Tanipah	Tahap IV	3,9
		Tahap I	65,1
		Tahap II	26,37
		Tahap III	24,78
	Bakambat	Tahap IV	28,1
		Tahap I	32,5
		Tahap II	31,61
		Tahap III	30,99
	Sungai Musang	Tahap IV	43,7
		Tahap I	65,1
		Tahap II	28,5
		Tahap III	11,47
	Tahap IV	24,042	

Sumber : Dinas LH Kab. Banjar, 2021

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa nilai COD standar baku mutu maks. 25 sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 dan ada beberapa yang tidak memenuhi standar baku mutu.

7) Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Parameter TSS

TSS adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air sungai, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung. Bahan-bahan tersuspensi dan terlarut pada perairan alami tidak bersifat toksik, tetapi jika berlebihan dapat meningkatkan nilai kekeruhan sehingga mempengaruhi fotosintesis di perairan. Dari Gambar dapat diketahui bahwa kandungan TSS di beberapa sungai Kabupaten Banjar melebihi baku mutu yang disyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa air sungai di beberapa titik pantau tersebut cenderung keruh. Nilai standar Baku Mutu TSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Sungai Martapura, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, dan Sungai Barito.

Tabel 2. 46. Nilai Standar Baku Mutu TSS

Lokasi pengambilan sampel	Pengambilan Tahap	TSS	
		(mag/L) Baku Mutu maks 50	
DAS Riam Kanan	Aranio	Tahap I	7
		Tahap II	5
		Tahap III	5
		Tahap IV	7
	Karang Intan	Tahap I	7
		Tahap II	4
		Tahap III	9
		Tahap IV	7
	Sungai Kembang	Tahap I	7
		Tahap II	7
		Tahap III	6
		Tahap IV	7
	Sungai Asam	Tahap I	7
		Tahap II	7
		Tahap III	11
		Tahap IV	7
DAS Riam Kiwa	Mangkalawat	Tahap I	99
		Tahap II	99

Lokasi sampel	Pengambilan	Tahap	TSS	
			(mag/L)	
			Baku Mutu maks 50	
		Tahap III	31	
		Tahap IV	43	
		Lawiran	Tahap I	91
			Tahap II	91
	Benteng	Tahap III	51	
		Tahap IV	44	
		Tahap I	104	
		Tahap II	104	
	DAS Sungai Martapura	Pingaran Ulu	Tahap I	53
			Tahap II	53
			Tahap III	46
			Tahap IV	48
Pekauman Ulu		Tahap I	34	
		Tahap II	79	
		Tahap III	19	
		Tahap IV	43	
Sungai Rangas Tengah		Tahap I	33	
		Tahap II	76	
		Tahap III	26	
		Tahap IV	34	
Batang Ilir		Tahap I	20	
		Tahap II	61	
		Tahap III	4	
		Tahap IV	39	
Pinang Lama		Tahap I	14	
		Tahap II	14	
		Tahap III	6	
		Tahap IV	32	
DAS Sungai Barito	Tanipah	Tahap I	39	
		Tahap II	19	
		Tahap III	76	
		Tahap IV	75	
	Bakambat	Tahap I	60	
		Tahap II	19	
		Tahap III	80	
		Tahap IV	72	
	Sungai Musang	Tahap I	74	
		Tahap II	21	
		Tahap III	74	
		Tahap IV	61	

Sumber : Dinas LH Kab. Banjar, 2021

Berdasarkan Tabel di atas , diketahui bahwa nilai TSS standar baku 50 sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2007 dan ada beberapa yang tidak memenuhi standar baku mutu.

8) Indeks Udara

Pemantauan kualitas udara ambien merupakan bagian penting dalam pengelolaan kualitas udara. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Sebagai ukuran untuk menilai pencemaran udara, maka digunakanlah Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Tabel 2. 47. Hasil Perhitungan IKU Kabupaten Banjar 2020

Rata-Rata Polutan ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		Ieu	IKU
SO ₂	NO ₂		
12,58	11,92	0,46	79,80

Sumber : Dinas LH Kab. Banjar

Dengan standar baku mutu kualitas udara berdasarkan EU directives untuk Polutan NO₂ batas maksimumnya adalah 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan SO₂ batas maksimumnya adalah 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

9) Sampah Tertangani

Sarana penampungan sampah di Kabupaten Banjar sangat bervariasi di setiap kecamatan antara lain menggunakan tong/bak sampah, gerobak sampah dan truk pengangkut sampah. Ada juga yang ditimbun atau langsung dibakar pada lokasi penghasil sampah. Tidak semua kecamatan dapat memperoleh fasilitas bak sampah, sehingga perlu pengolahan sampah ditingkat rumah tangga untuk mengurangi volume sampah. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah adalah dengan pelaksanaan program 3R, yaitu Reduce (pengurangan), Reuse (pemanfaatan kembali) dan Recycle (daur ulang) pada pengelolaan sampah sejak tingkat rumah tangga. Tingkat timbulan sampah di Kabupaten Banjar dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk. Angka produksi sampah di Kabupaten Banjar setiap tahun meningkat dan merupakan akumulasi dari seluruh aktivitas penduduk dari berbagai sektor. Jenis sampah yang dihasilkan terdiri dari sampah jenis organik, plastik, kayu, kertas, kain, karet, logam, kaca, dan lainnya. Besaran sampah yang dihasilkan tiap kecamatan di Kabupaten Banjar lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut::

Tabel 2. 48. Timbulan Sampah Kabupaten Banjar 2020

Kecamatan	Timbulan Sampah (Ton/Hari)
Aluh-Aluh	17,73
Aranio	5,61
Astambul	21,58
Beruntung Baru	8,91
Cintapuri Darusalam	6,65
Gambut	27,97
Karang Intan	21,82
Kertak Hanyar	28,43
Martapura	75,72
Martapura Barat	11,47
Martapura Timur	18,36
Mataraman	15,37
Paramasan	2,35
Pengaron	10,35
Sambung Makmur	7,40
Simpang empat	14,33
Sungai Pinang	8,71
Sungai Tabuk	40,56
Tatah Makmur	7,84
Telaga Bauntung	2,08
Total	353,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2021

dapat dilihat bahwa timbulan sampah terbesar berada pada Kecamatan Martapura yaitu sebesar 75,72 ton/hari, diikuti oleh Kecamatan Sungai Tabuk sebesar 40,56 ton/hari. Sementara itu, timbulan sampah terkecil berada pada Kecamatan Telaga Bauntung yaitu sebesar 2,08 ton/hari, diikuti oleh Kecamatan Paramasan sebesar 2,35 ton/hari.

Dalam upaya penanganan sampah, DLH Kabupaten Banjar telah menyediakan beberapa TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang saat ini tersebar di Kecamatan Martapura. TPS Eksisting di Kabupaten Banjar saat ini berjumlah 41 unit. Selain itu, Kabupaten Banjar juga memiliki fasilitas TPS 3R yang saat ini berjumlah 11 unit dan tersebar di Kecamatan Martapura, Gambut, dan Sungai Tabuk. Sampah-sampah yang terkumpul di TPS dan sampah residu TPS 3R tersebut kemudian diangkut ke TPA, dimana TPA yang digunakan oleh wilayah Kabupaten Banjar saat ini adalah TPA Cahaya Kencana. Kabupaten Banjar sudah juga sudah memiliki 90 buah bank sampah, termasuk bank sampah yang ada disekolah.

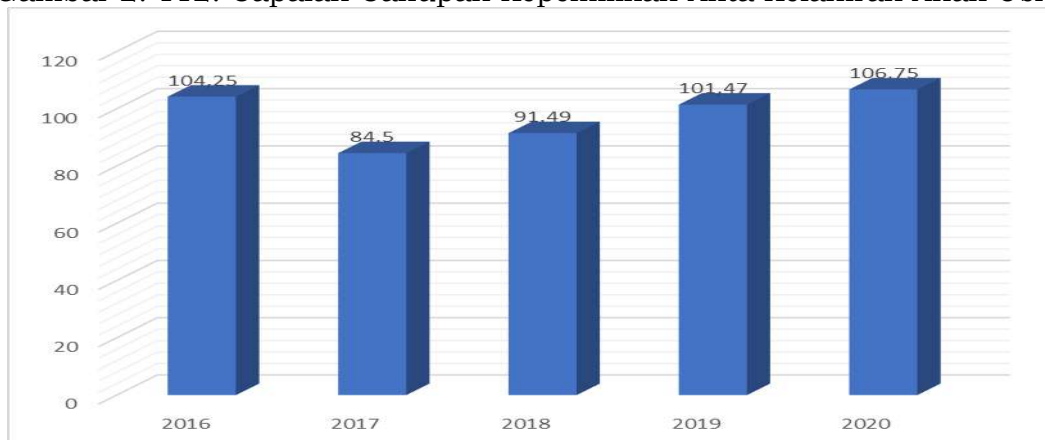
Pemerintah Kabupaten Banjar telah berkomitmen untuk mereduksi jumlah timbulan sampah hal ini terlihat dari pembuatan TPS – TPS sementara dan 90 buah bank sampah, serta adanya regulasi untuk perizinan pengolahan limbah B3 bagi perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Banjar. Hingga Tahun 2020 Sebanyak 44 Perusahaan yang mendapatkan izin untuk mengelola limbah B3.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 Th

Besaran cakupan untuk kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Banjar mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar diagram batang di bawah ini.

Gambar 2. 112. Capaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 -18 tahun



Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar Tahun 2020 , Data diolah kembali

Gambar di atas menunjukkan bahwa besaran angka untuk cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 hingga 18 tahun fluktuatif . Pada tahun 2016 capaian cakupan kepemilikan kelahiran anak usia 0 -18 tahun adalah sebesar 104,25 % . Di tahun 2017 cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 hingga 18 tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 84,5%. Kemudian pada tahun 2018, besaran cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 hingga 18 tahun tersebut mengalami kenaikan menjadi 91,49%. Selanjutnya di tahun 2019, besaran cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 hingga 18 tahun mengalami kenaikan kembali menjadi 101,47%. Tahun 2020, capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 hingga 18 tahun Kembali naik menjadi 106,75%.

Salah satu faktor pendorong kenaikan capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun, adalah karena gencarnya pelayanan pembuatan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melalui pelayanan keliling Jemput Bola (Jempol) ke Desa/Kelurahan sesuai permintaan untuk kemudian dilakukan penjadwalan.

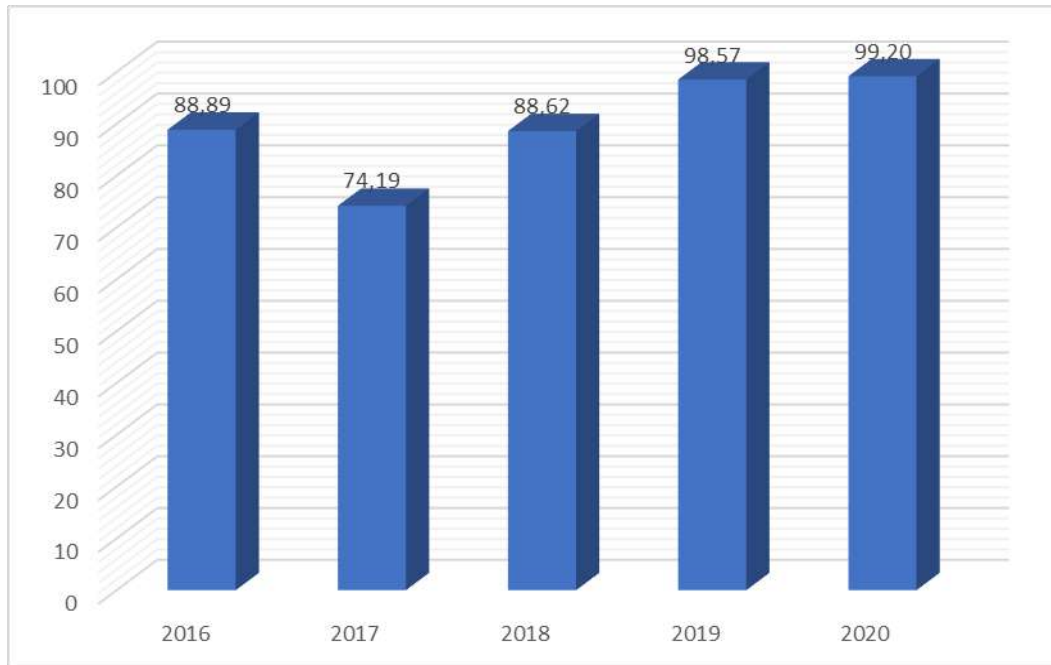
Pada masa Pandemi Covid-19 seperti keadaan saat ini pun, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk pembuatan akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya tetap dilaksanakan melalui media sebagai berikut :

- via whatsapp pelayanan akta pencatatan sipil dengan nomor 08115184103
- via whatsapp pelayanan perbaikan akta dengan nomor 08115184104
- aplikasi STAR Banjar
- melalui website <https://banjar.dukcapil.online/>

2) Cakupan Kepemilikan KTP-el

Data terkait Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Banjar kurun waktu 2016 -2020, tersaji pada gambar diagram di bawah ini .

Gambar 2. 113. Capaian Cakupan Kepemilikan KTP-el



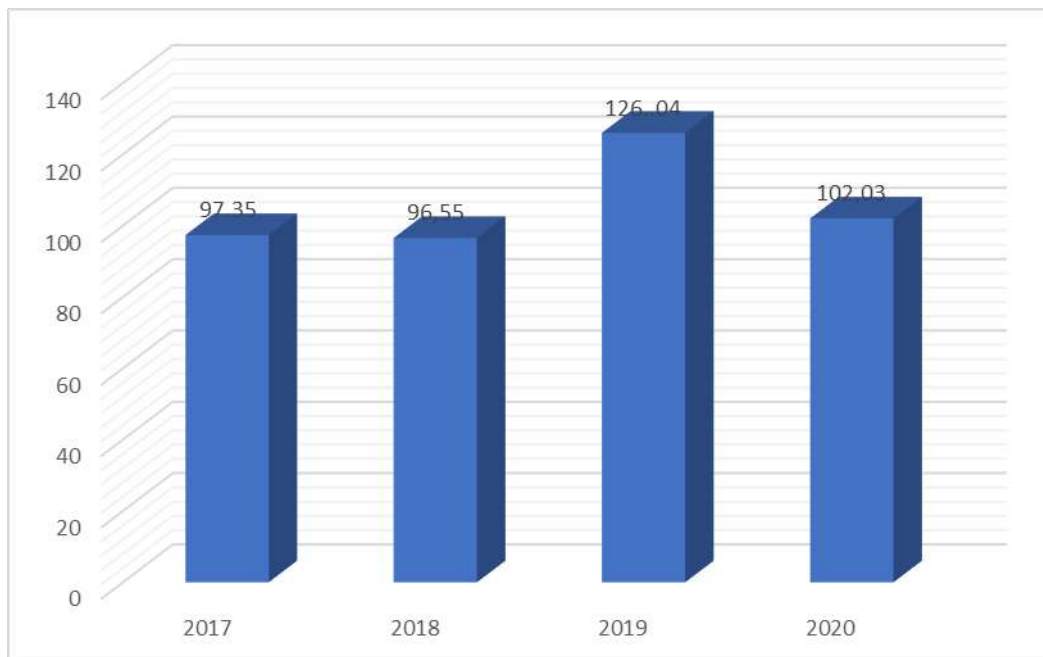
Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, 2020 , Data diolah kembali

Gambar di atas menunjukkan bahwa mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 data cakupan kepemilikan KTP-el fluktuatif. Pada tahun 2016, besaran persentase untuk kepemilikan KTP-el sebesar 88,89%, tetapi pada tahun 2017 turun menjadi 74,19%. Selanjutnya di tahun 2018 terjadi peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el menjadi sebesar 88,62% dan selanjutnya Kembali mengalami peningkatan ditahun 2019 menjadi 98,57%. Tahun 2020 capaian cakupan kepemilikan KTP-el kembali meningkat menjadi 99,20%. Peningkatan cakupan kepemilikan ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan terkait kepemilikan dokumen kependudukan salah satunya dengan sistem pelayanan jemput bola ke Kecamatan-Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar.

3) Cakupan Kepemilikan KK

Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tahun 2017 hingga tahun 2020, tersaji pada gambar diagram batang berikut ini .

Gambar 2. 114. Capaian Cakupan Kepemilikan KK Tahun 2017 s/d 2020



Sumber: DisDukcapil, 2021, Diolah kembali

Gambar di atas menunjukkan bahwa besaran cakupan kepemilikan KK fluktuatif mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Tahun 2017 cakupan kepemilikan KK adalah sebesar 97,35 %, selanjutnya pada tahun 2018 besaran capaian cakupan kepemilikan KK mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 96,55% . Untuk tahun 2019, besaran capaian kepemilikan KK tersebut mengalami kenaikan kembali 126,04 %. Kemudian pada tahun 2020, angka tersebut kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 102,03%.

4) Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Banjar pada tahun 2019, adalah sebesar 57,80%. Untuk tahun 2020, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 86,56%

Untuk terus melakukan percepatan penerbitan KIA di Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan Instruksi Bupati Banjar Nomor 471/769/DUKCAPIL tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA di Kabupaten Banjar, yang berisi perintah kepada :

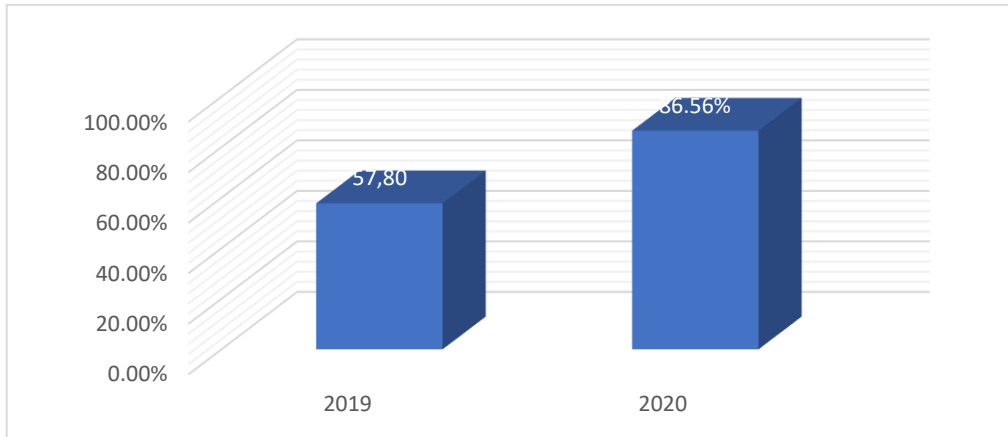
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk melakukan peningkatan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran dan KIA.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Banjar untuk mensyaratkan Akta Kelahiran kepada calon anak didik baik itu tingkat PAUD, SD dan SLTP serta mewajibkan kepada seluruh peserta didik untuk memiliki KIA.

Dengan diterbitkannya Instruksi Bupati di atas, diharapkan ada sinergitas dari SKPD terkait untuk mencapai target penerbitan KIA di Kabupaten Banjar.

Percepatan penerbitan KIA juga didukung oleh pemerintah pusat melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang digelontorkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Banjar untuk pengadaan blangko KIA sebanyak 25.000 keping sesuai dengan anggaran pada tahun 2020.

Berikut adalah gambar diagram yang menyajikan data cakupan kepemilikan KIA dalam kurun waktu 2 tahun.

Gambar 2. 115. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2019 s/d 2020



Sumber data : DisDukCapil Kab Banjar Tahun 2021, data diolah kembali

Data yang disajikan disini dimulai dari data 2019, karena untuk Kabupaten Banjar penerbitan KIA baru dimulai dari tahun 2019.

2.3.2.7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

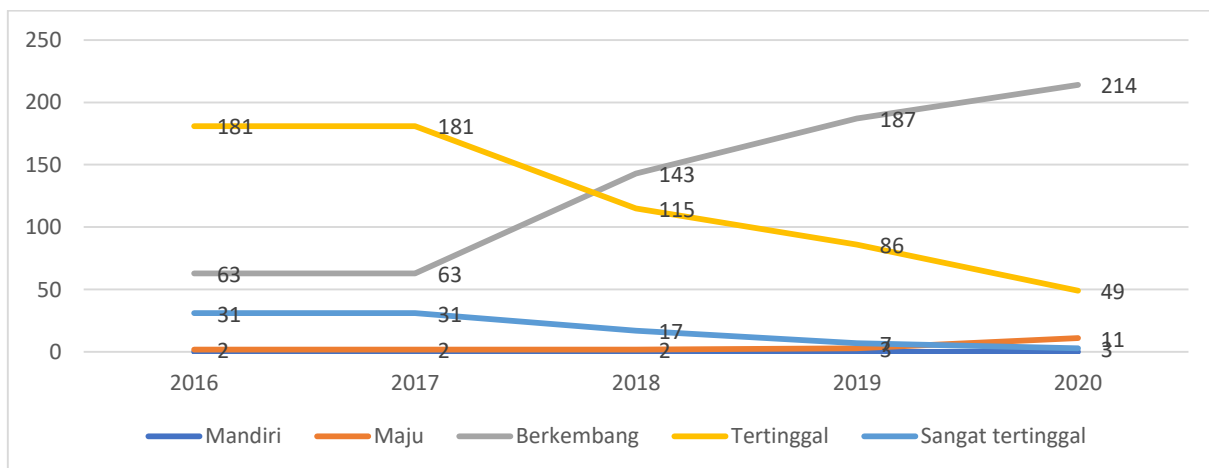
1) Status Perkembangan Desa

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi dengan 3 Dimensi yaitu : sosial (IKS), ekonomi (IKE) dan ekologi (IKL).

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa, Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Gambar 2. 116. Status Perkembangan Desa Kab. Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banjar, 2020

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau imigrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Beberapa indikator untuk menggambarkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain sebagai berikut :

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkontrolnya jumlah, laju pertumbuhan dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar.

Laju pertumbuhan penduduk selama 5 tahun (tahun 2016 -2020), menunjukkan tren menurun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

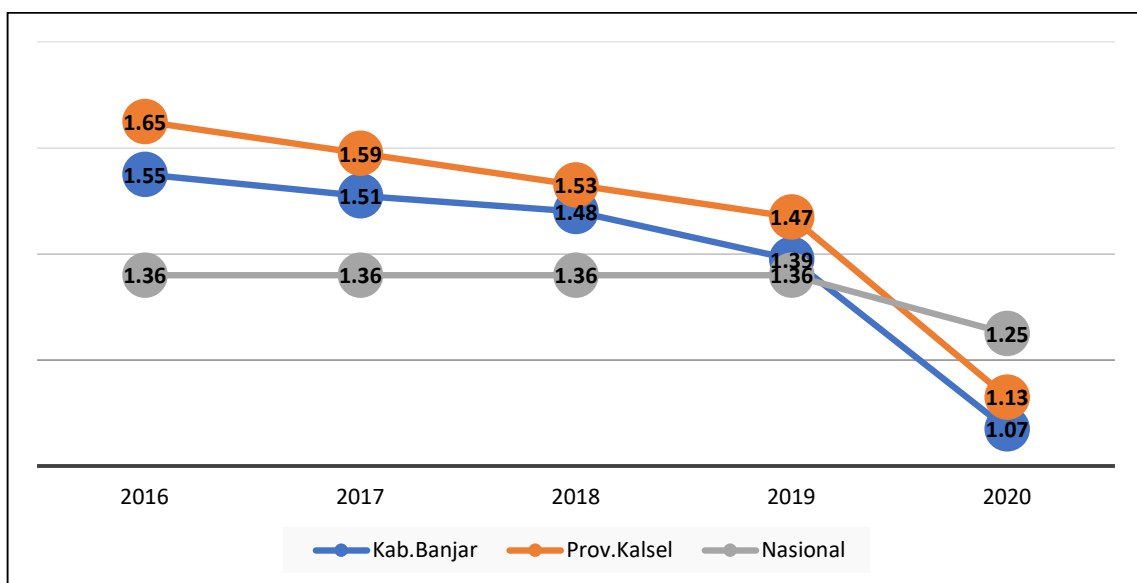
Gambar 2. 117. Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, data diolah

Perbandingan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar selama periode 5 tahun (2016-2020) berada di bawah provinsi Kalimantan Selatan dan berada di atas Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 118. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2016 -2020



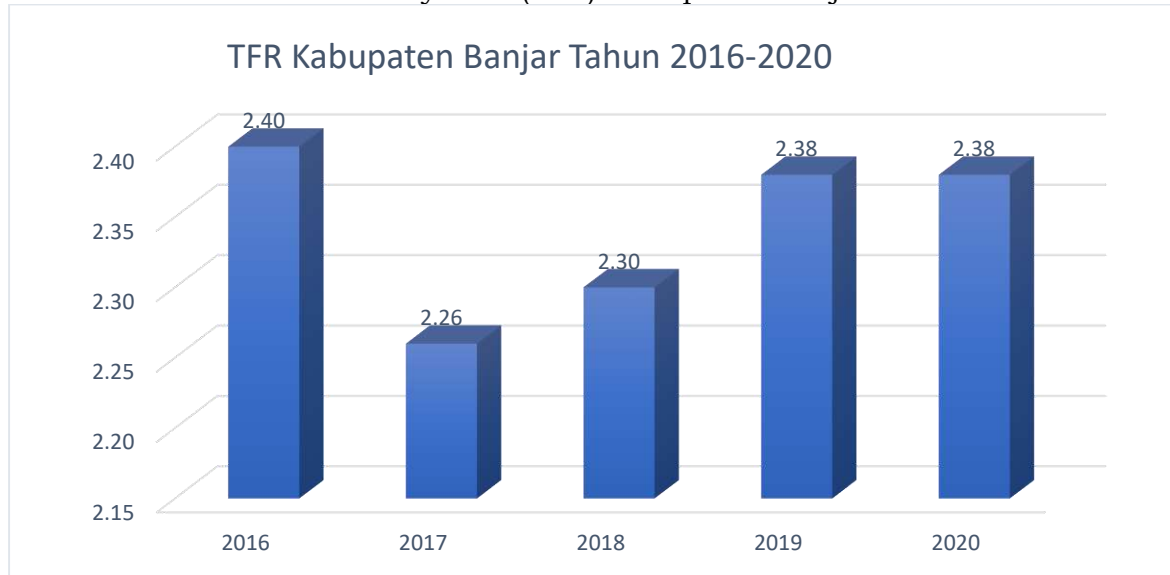
Sumber : BPS Provinsi Kalsel, Data diolah

2) Total Fertility Rate (TFR)

TFR sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Perkembangan TFR di kabupaten Banjar selama 5 tahun (2016-2017) cenderung meningkat, dimana tahun 2017 TFR sebesar 2,27 , naik pada tahun 2018 mencapai 2,30 serta tahun 2019 dan 2020 sebesar 2,38.

Gambar 2. 119. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Banjar Tahun 2017-2020



3) Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Program Kampung KB menjadi ikon Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung. Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. BKKBN menargetkan membangun sekitar 21.000 kampung KB di seluruh Indonesia sampai pada akhir tahun 2018. Jumlah tersebut telah mencakup target 1.000 desa di 100 Kabupaten dan Kota pada tahun 2018 dan 600 desa di 60 Kabupaten dan kota pada tahun 2019.

Perkembangan kampung KB di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2020 sejumlah 40 desa dari 20 kecamatan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang berlaku seperti desa tertinggal, stunting yang tinggi dll.

Tabel 2. 49. Desa Kampung KB di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2020

Kecamatan	Desa Kampung KB	
Aluh Aluh	Simpang Warga Dalam	Handil Baru
Beruntung Baru	Selat Makmur	Haur Kuning
Gambut	Guntung Papuyu	Keladan Baru
Kertak Hanyar	Belayung Baru	Simpang Empat
Tatah Makmur	Tatah Bangkal	Tatah Layap Baru
Sungai Tabuk	Pembantanan	Penjambuan
Martapura	Sungai Sipai	Pesayangan Selatan
Martapura Timur	Sungai Kitano	Tambak Anyar Ulu
Martapura Barat	Keliling Benteng Ulu	Antasan Sutun
Astambul	Tambak Danau	Munggu Raya
Karang Intan	Jingah Habang Ulu	Pandak Daun
Aranio	Artain	Bunglai
Sungai Pinang	Rantau Nangka	Sungai Pinang
Paramasan	Paramasan Bawah	Angkipih
Pengaron	Lumpangi	Lobang Baru
Sambung Makmur	Sungai Lurus	Baliangin
Mataraman	Bawahan Seberang	Simpang 3
Simpang Empat	Tanah Intan	Cabi
Telaga Bauntung	Telaga Baru	Rampah

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Banjar, 2020

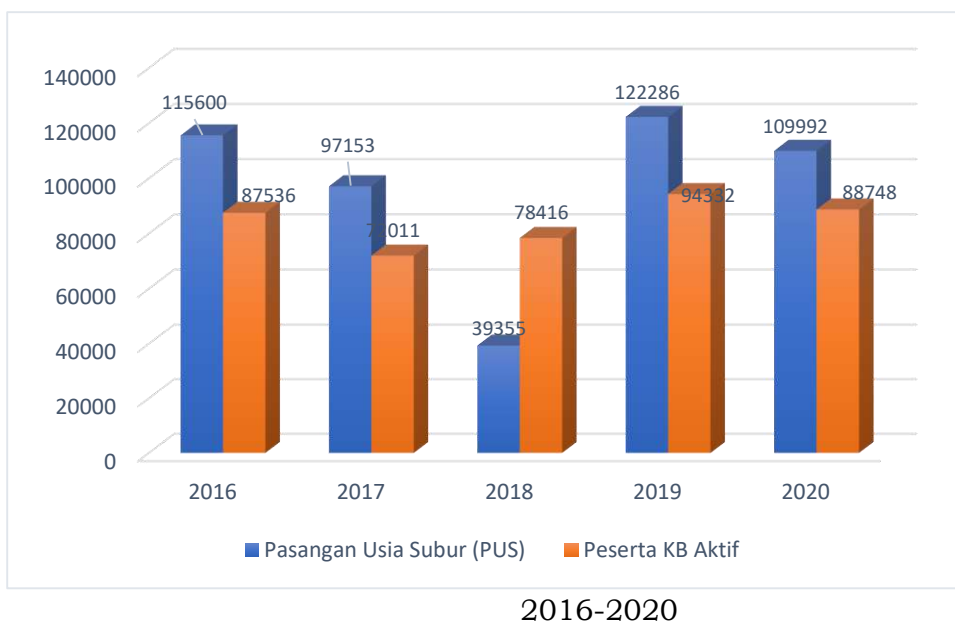
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang terlibat untuk mendukung keberhasilan kampung KB adalah : 1) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 3) Dinas Kesehatan, 4) Dinas Ketahanan Pangan, 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 6) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 8) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 9) Dinas Pendidikan, 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 20 Kecamatan serta didukung oleh PKK Kabupaten sampai dengan PKK desa, Kemenag Kabupaten Banjar dan TNI.

4) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Aktif

Pasangan usia subur (PUS) berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Dalam menjalani kehidupan keluarga, PUS sangat mudah dalam memperoleh keturunan di karenakan keadaan kedua pasangan tersebut normal, hal ini yang menjadi masalah bagi PUS yaitu perlunya pengaturan fertilisasi (kesuburan), perawatan kehamilan dan persalinan aman. Dalam penyelesaian masalah tersebut di perlukan tindakan dari tenaga kesehatan dalam penyampaian penggunaan alat kontrasepsi rasional untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan dari pasangan tersebut.

Promosi kesehatan yang sangat penting bagi PUS adalah program KB untuk menekan angka kelahiran. Macam-macam alat kontrasepsi yang bisa digunakan : IUD, pil, kondom, suntikan, MOP, MOW.

Gambar 2. 120. Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB aktif di Kabupaten Banjar Tahun



Sumber : BPS Kabupaten Banjar ,2021

5) Angka Pernikahan Anak

Pernikahan anak di Kabupaten Banjar masih cukup tinggi. Jika dilakukan sanding data antara jumlah penduduk Kabupaten Banjar berdasar kelompok usia 15-18 tahun (Buku Agregat Kependudukan Semester 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Data Pernikahan yang tercatat di KUA untuk usia di bawah 19 tahun, maka didapat data masih ada kasus pernikahan anak yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,78% yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar. Untuk Kecamatan Paramasan dan Cintapuri Darussalam pada tabel masih nol dikarenakan tidak ada data/laporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 50. Kasus Pernikahan di bawah Usia 19 Tahun yang tercatat di KUA

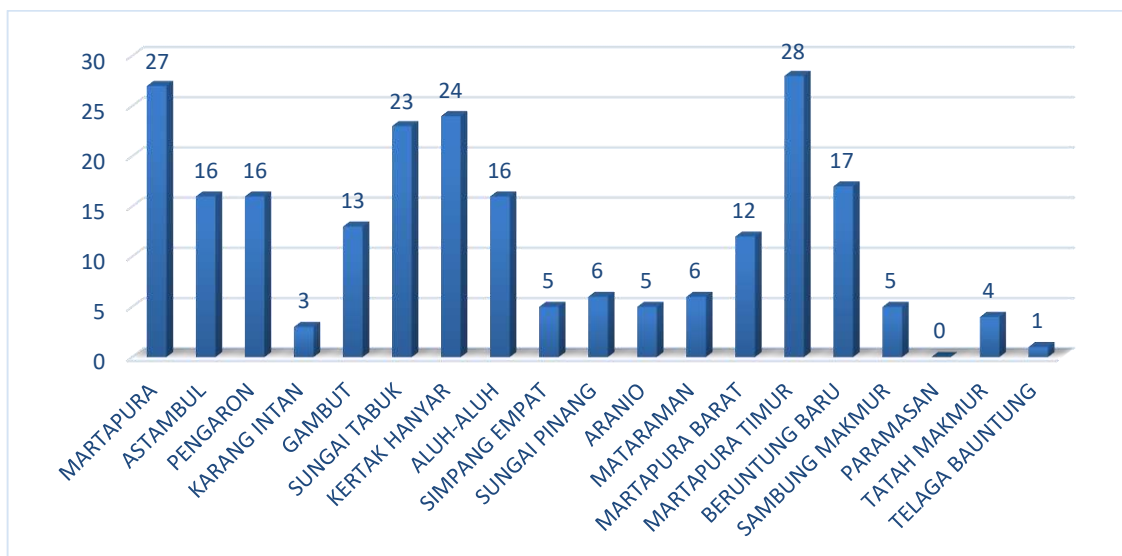
Kecamatan	Jumlah penduduk 15-18 tahun	Pernikahan di bawah 19 tahun	Persentase
Martapura	5.970	27	0,45
Astambul	1.954	16	0,82
Pengaron	901	16	1,78
Karang intan	1.842	3	0,16

Gambut	2.090	13	0,62
Sungai Tabuk	3.260	23	0,71
Kertak Hanyar	2.032	24	1,18
Aluh-Aluh	1.692	16	0,95
Simpang Empat	1.184	5	0,42
Sungai Pinang	816	6	0,74
Aranio	487	5	1,03
Mataraman	1.316	6	0,46
Martapura Barat	931	12	1,29
Martapura Timur	1.535	28	1,82
Beruntung Baru	830	17	2,05
Sambung Makmur	626	5	0,80
Paramasan	233	0	0,00
Tatah Makmur	640	4	0,63
Telaga Bauntung	233	1	0,43
Cintapuri Darussalam	593	0	0,00
JUMLAH	29.165	227	0,78

Sumber : Disdukcapil,2020, Kemenag Kabupaten Banjar, 2021

Jika dilihat secara detail, maka persentase pernikahan dini terbesar ada di Kecamatan Beruntung Baru sebesar 2,05% disusul kecamatan Martapura Timur sebesar 1,82%.

Gambar 2. 121. Angka Pernikahan di bawah 19 Tahun di Kabupaten Banjar Tahun 2020



Sumber: Kemenag Kabupaten Banjar, 2020

2.3.2.9. Perhubungan

1) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir bertujuan untuk menilai tingkat kelayakan pakai demi memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna. Pemerintah Kabupaten Banjar memberlakukan uji kir bagi angkutan umum yang beroperasi di wilayahnya administrasi Kabupaten Banjar

Gambar 2. 122. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020



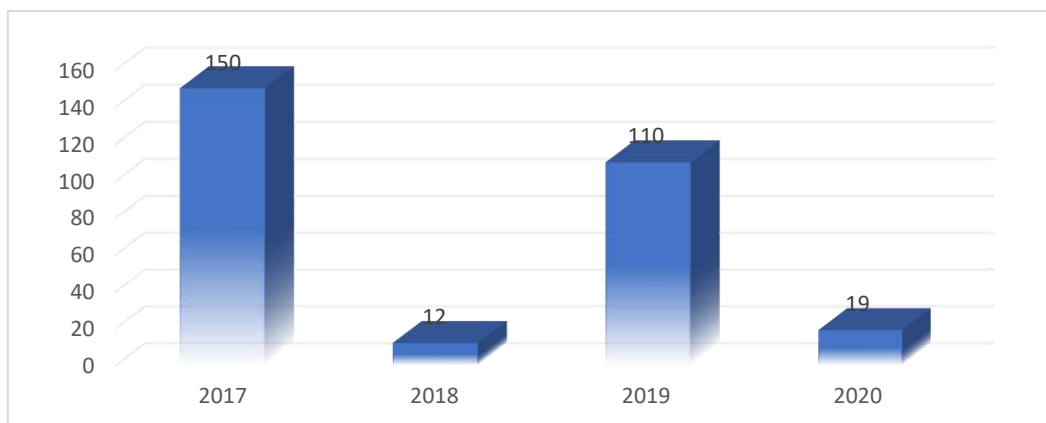
Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Gambar di atas menunjukkan jumlah uji kir angkutan umum mulai pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yang mengalami kondisi naik-turun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 5.372 uji kir pada angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2017 hingga menjadi 5.036 uji kir angkutan umum. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018, terjadi peningkatan yang cukup banyak pada jumlah uji kir angkutan umum hingga berjumlah 6.372. Selanjutnya jumlah tersebut juga mengalami sedikit penurunan kembali di tahun 2019 menjadi 6.120. Tahun 2020, uji kir pada angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebanyak 3894, angka ini merupakan yang terkecil selama 5 tahun terakhir. Capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan imbas dari kondisi pandemi covid-19 dengan kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Banjar yang turut berpengaruh terhadap penurunan pelaksanaan uji kir unit angkutan umum

2) Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu menjadi salah satu urusan bidang perhubungan, di Kabupaten Banjar. Dalam setiap tahun, terdapat pergantian atau pembaharuan untuk rambu-rambu yang terpasang di sepanjang jalan di Wilayah administrasi Kabupaten Banjar. Hal ini akan berbeda jumlah pemasangannya di setiap tahun dengan melihat kondisi dan keadaan serta kesesuaian antara rambu-rambu dengan kondisi jalan di tahun tersebut.

Gambar 2. 123. Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016 s/d 2019



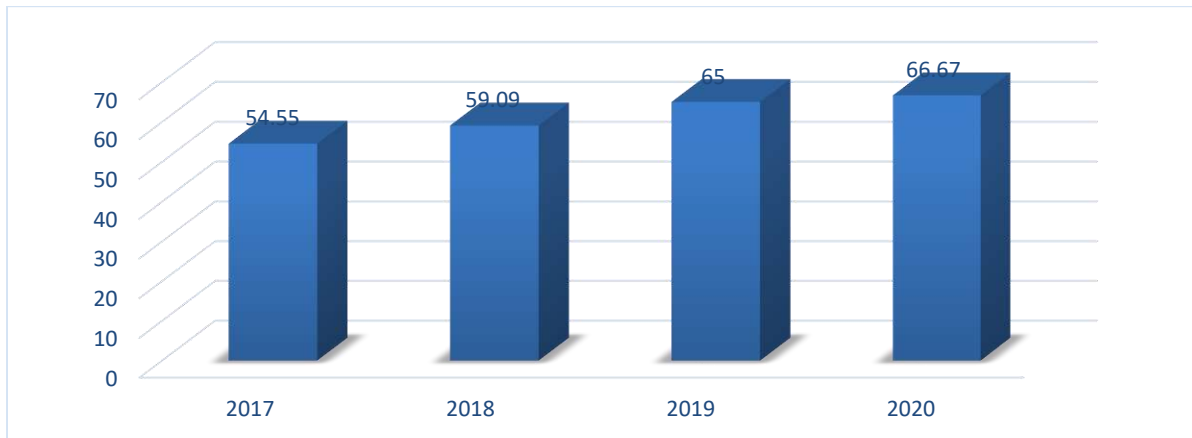
Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Gambar di atas menunjukkan perbedaan jumlah pemasangan rambu-rambu dalam setiap tahunnya, mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Jumlah pemasangan terbanyak dilaksanakan pada tahun 2016 dengan jumlah 220. Kemudian tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 150 pemasangan rambu-rambu. Jumlah tersebut kembali mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2018 dengan jumlah 12 pemasangan rambu-rambu. Akan tetapi di tahun 2019, jumlah pemasangan rambu-rambu mengalami peningkatan kembali menjadi 110. Hal ini mengartikan jika dalam setiap tahun, tidak selalu dilakukan pemasangan rambu-rambu, karena menyesuaikan dengan kondisi, keadaan dan juga kesesuaian antara rambu dengan jalan yang ada

3) Ketersediaan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik

Ketersediaan prasarana perhubungan yang memiliki kondisi baik dan layak merupakan suatu hal yang menjadi salah satu perhatian urusan dalam bidang perhubungan. Kabupaten Banjar berupaya untuk menyediakan berbagai prasarana perhubungan yang memiliki kondisi baik dan layak semaksimal mungkin. Capaian indikator kinerja untuk ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 54,55 %, pada tahun 2018 sebesar 59,09 %, pada tahun 2019 sebesar 65 %. Pada Tahun 2020, terjadi peningkatan ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dengan persentase sebesar 66,67%. Angka tersebut telah melebihi atau berada di atas persentase 50% dan telah menunjukkan besaran persentase yang cukup

Gambar 2. 124. Persentase Ketersediaan Prasarana Perhubungan yang Memiliki Kondisi Baik 2017 - 2020

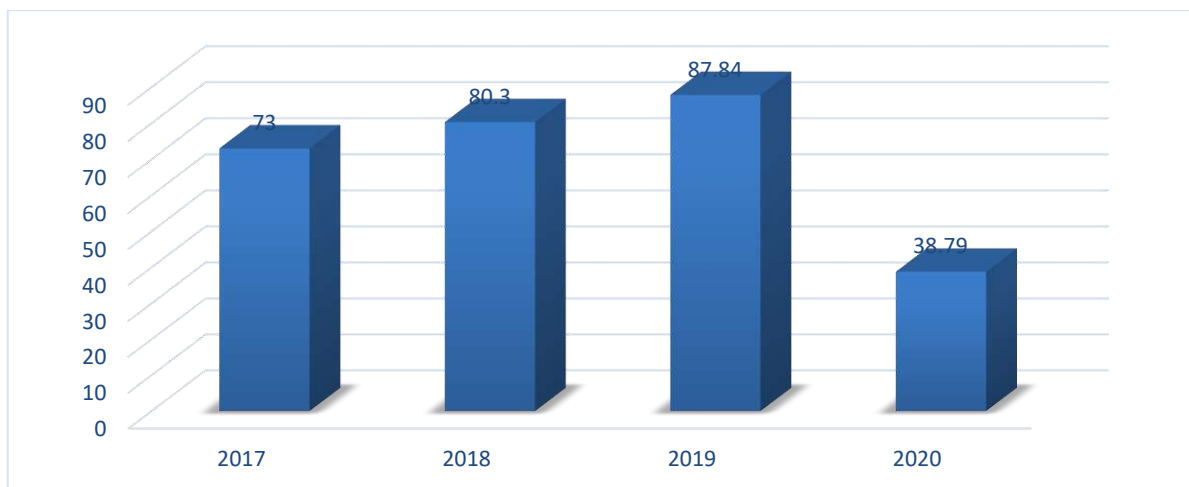


Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Banjar, 2021

4) Angkutan Umum yang Masuk Terminal

Pada kondisi saat ini, angkutan umum dapat membantu mengurangi tingkat kemacetan yang diakibatkan semakin banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan oleh masyarakat. Jalur operasional angkutan umum dapat berbeda-beda sesuai dengan daerah yang dilalui. Kabupaten Banjar termasuk salah satu daerah yang memiliki angkutan umum yang masih beroperasi keluar masuk terminal hingga saat ini. Capaian indikator kinerja untuk persentase angkutan umum yang masuk terminal pada tahun 2017 sebesar 73 %, pada tahun 2018 sebesar 80,30 %, pada tahun 2019 sebesar 87,84 %. Pada Tahun 2020 besaran persentase angkutan umum yang masuk ke terminal adalah sebesar 38,79%. Penurunan capaian angka tersebut tergolong cukup tinggi dengan persentase penurunan sebanyak 49,05% yang diakibatkan sejumlah kebijakan pengendalian Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada sektor transportasi umum di Kabupaten Banjar. Hal ini mengindikasikan jika angkutan umum yang masuk ke terminal mengalami penurunan hingga 50% di daerah Kabupaten Banjar dan wilayah sekitarnya.

Gambar 2. 125. Persentase Angkutan Umum yang Masuk Terminal Tahun 2017 - 2020

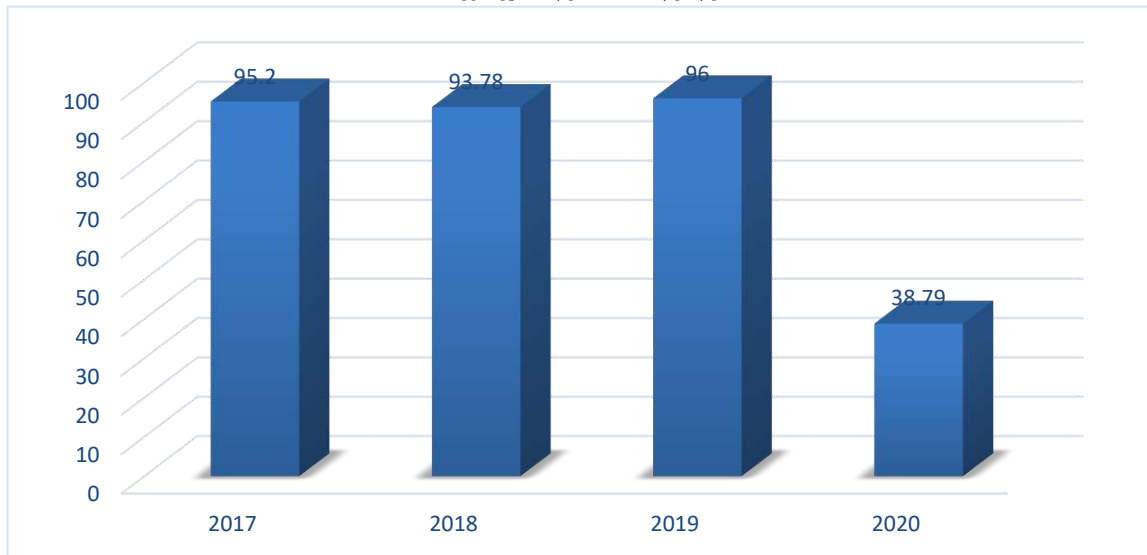


Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Banjar, 2021

5) Ketersediaan Rambu yang Layak

Kabupaten Banjar menyediakan berbagai rambu lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhatikan kelayakan rambu yang tersedia. Capaian indikator kinerja untuk ketersediaan rambu yang layak pada tahun 2017 sebesar 95,20 %, pada tahun 2018 sebesar 93,78 %, pada tahun 2019 sebesar 96,84 %. Pada Tahun 2020 besaran persentase untuk ketersediaan rambu yang layak adalah sebesar 92,4%. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,6%. Sektor perhubungan Kabupaten Banjar berupaya memenuhi ketersediaan rambu-rambu sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhatikan tingkat kelayakan rambu yang disediakan.

Gambar 2. 126. Persentase Ketersediaan Rambu yang Layak Tahun 2017 – 2020

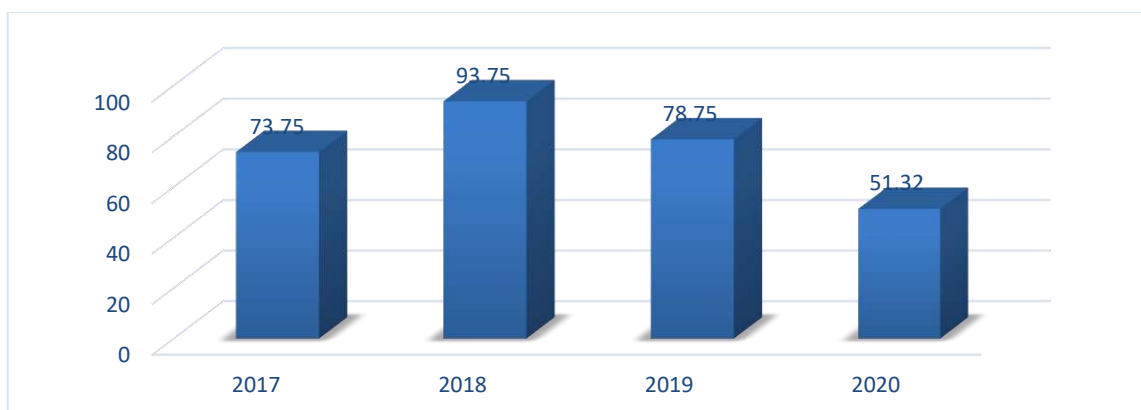


Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Banjar, 2021

6) Angkutan Umum yang Beroperasi

Kecenderungan naiknya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan, kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Banjar. Capaian indikator kinerja untuk angkutan umum yang beroperasi pada tahun 2017 sebesar 73,75 %, pada tahun 2018 sebesar 93,75 %, pada tahun 2019 sebesar 78,75 %. Kemudian Tahun 2020, angka persentase angkutan umum yang beroperasi sebesar 51,32%, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 27,43%. Walaupun mengalami penurunan capaian besaran tersebut telah melebihi angka persentase 50% dan dapat dikatakan persentase yang baik. Saat ini terjadi penurunan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas.

Gambar 2. 127. Persentase Angkutan Umum yang Beroperasi Tahun 2017 – 2020



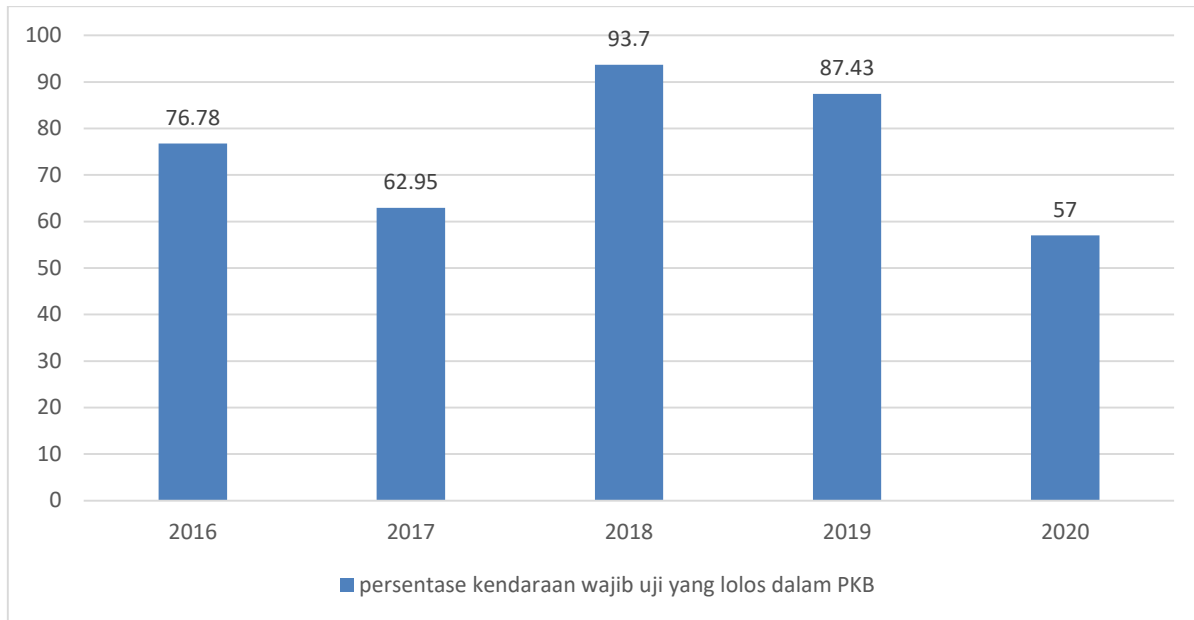
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Banjar, 2021

7) Kendaraan Wajib Uji yang Lolos Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) idealnya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari setiap kendaraan. Setiap tahunnya,

persentase kendaraan wajib uji yang lolos dalam PKB akan mengalami perubahan tergantung dari kendaraan bermotor yang melakukan PKB. Selama kurun waktu mulai tahun 2016 - 2020, besaran persentase kendaraan wajib uji yang lolos dalam PKB di Kabupaten Banjar mengalami kondisi naik-turun.

Gambar 2. 128. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lolos PKB



Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Gambar di atas menunjukkan perubahan besaran persentase kendaraan wajib uji yang lolos dari PKB mulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Dapat diketahui pada tahun 2016, besaran persentase kendaraan wajib uji yang lolos dari PKB adalah sebesar 76,78%. Tahun 2017, besaran persentase kendaraan wajib uji yang lolos dari PKB adalah sebesar 62,95%. Angka tersebut mengalami penambahan di tahun 2018 hingga menjadi 93,7%. Namun di tahun 2019, besaran persentase kendaraan wajib uji yang lolos dari PKB mengalami penurunan menjadi 87,43% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan pada angka 57%. Capaian tersebut menunjukkan jika besaran persentase kendaraan wajib uji yang lolos dari PKB dalam setiap tahun mengalami perubahan yang tidak menentu. Penyebab penurunan persentase kendaraan wajib uji yang lolos dalam PKB sebagian besar diakibatkan oleh kondisi pandemi Covid-19 di Tahun 2020 yang mempengaruhi berbagai sektor pembangunan.

Untuk Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pelayanan Terpadu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memiliki Target dan Capaian dalam bentuk retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 51. Target dan Capaian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Persentase	Keterangan
2016	495.750.000	393.372.316	79,35	
2017	432.709.548	406.000.343	93,83	
2018	413.624.548	409.758.641	99,07	
2019	435.460.000	438.930.762	100,80	
2020	495.860.000	298.626.000	60.22	Pandemi / PSBB
2021	550.000.000	347.013.000	63,09	Per 21 Juni 2021

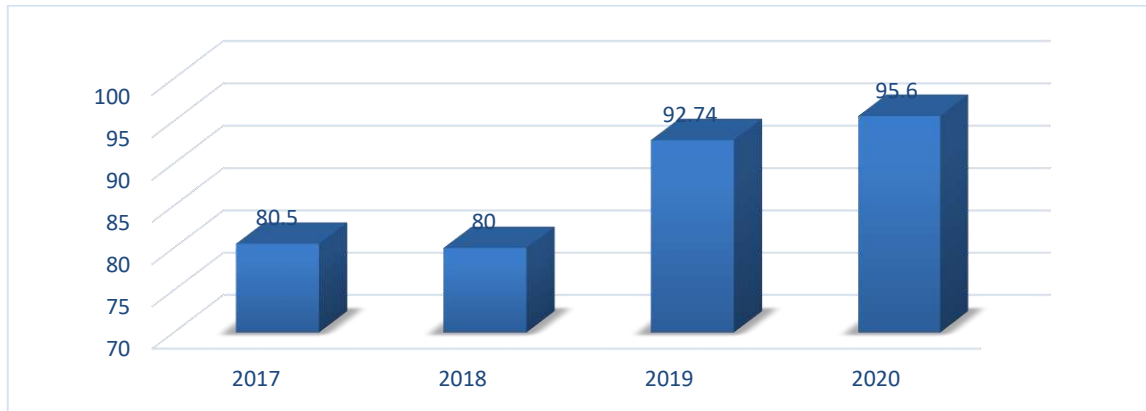
Sumber: UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kab. Banjar, 2021

Berdasarkan tabel Target dan Capaian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid – 19 yang memunculkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal ini mempengaruhi berbagai sektor pembangunan salah satunya berdampak terhadap capaian retribusi pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Namun pada Tahun 2021, persentase capaian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 63,09 % per 21 Juni 2021. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang berada di UPT PKB Dinas Perhubungan, sehingga dengan meningkatnya sarana dan prasarana di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tentunya akan berbanding lurus dengan peningkatan PAD Kabupaten Banjar dari sektor pengujian kendaraan bermotor.

8) Ketaatan Berlalu Lintas

Tingkat ketaatan dalam berlalu lintas setiap tahun akan mengalami perubahan dengan melihat kondisi di jalan raya pada umumnya. Capaian indikator kinerja untuk ketaatan berlalu lintas pada tahun 2017 sebesar 80,5 %, pada tahun 2018 sebesar 80 %, pada tahun 2019 sebesar 92,74 %. Sedangkan pada Tahun 2020, persentase ketaatan berlalu lintas mengalami kenaikan pada angka 95,6%. Capaian ini menunjukkan meningkatnya ketaatan masyarakat di Kabupaten Banjar dalam berlalu lintas secara baik dan benar.

Gambar 2. 129. Persentase Angkutan Umum yang Beroperasi Tahun 2017 – 2020



Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Banjar, 2021

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Beberapa indikator untuk menggambarkan kondisi komunikasi dan informatika di Kabupaten Banjar antara lain :

1) Cakupan layanan telekomunikasi (Internet dan Telepon)

Cakupan layanan telekomunikasi ini berkaitan dengan cakupan layanan internet dan telepon seluler, dihitung berdasarkan cakupan jangkauan internet atau Telepon seluler pada desa-desa yang ada di Kabupaten Banjar. Dari 290 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar, berdasarkan laporan dari Kantor Kecamatan sebagian besar sudah terjangkau oleh layanan telekomunikasi dengan kekuatan penerimaan sinyal yang bervariasi. Pada tahun 2020 cakupan mencapai 87,93% (255 desa/kelurahan). Masih terdapat 35 Desa yang Blankspot (tidak memiliki sinyal).

2) Indeks Keterbukaan publik

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;
2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;
3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.

Tabel 2. 52. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kualifikasi	Nilai
1.	Informatif	97-100
2.	Menuju Informatif	80-96
3.	Cukup Informatif	60-79
4.	Kurang Informatif	40-59
5.	Tidak Informatif	<39

Sumber : Kemenpan RB

Indeks Keterbukaan publik memiliki target nilai skor sebesar **80**, diakhir tahun 2020 dapat terealisasi dengan skor **75** ini berarti Keterbukaan Informasi Publik DKISP berada di posisi **Cukup Informatif**, dari angka realisasi tersebut sehingga diperoleh capaian untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar **93.75 %**, ini berarti termasuk dalam kriteria capaian kinerja **Cukup Berhasil**. Adapun target periode akhir Renstra (2021) sebesar **90** sehingga realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2020 telah menyumbang sebesar **83.33%** untuk capaian periode akhir Renstra 2021.

Tabel 2. 53. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

INDIKATOR	BOBOT	NILAI
Pengembangan website dan Mengumumkan Informasi Publik	25%	18.75
Menyediakan Informasi Publik	20%	15
Pelayanan Informasi Publik	25%	18.75
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik	30%	22.5
Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75

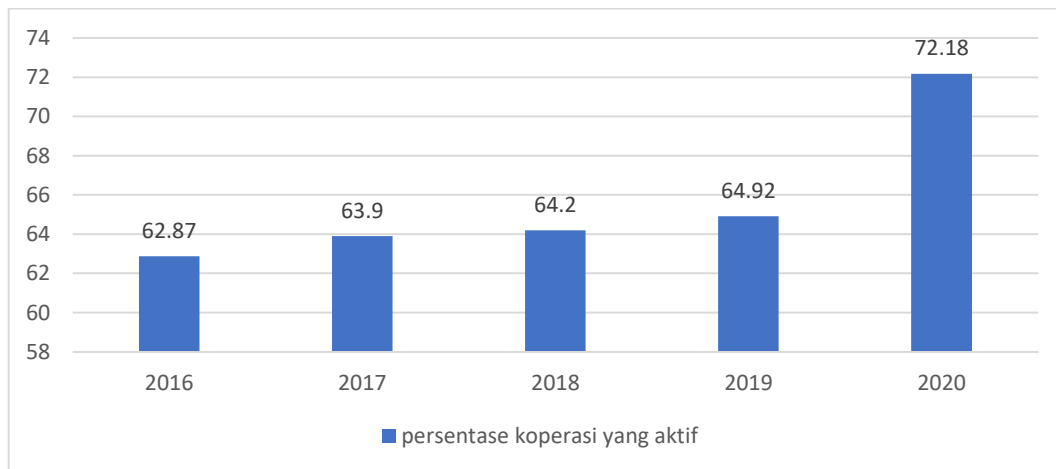
Sumber Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2021

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Di Kabupaten Banjar, jumlah koperasi yang aktif dalam setiap tahun mengalami kenaikan secara terus menerus.

Gambar 2. 130. Persentase Koperasi yang Aktif Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020



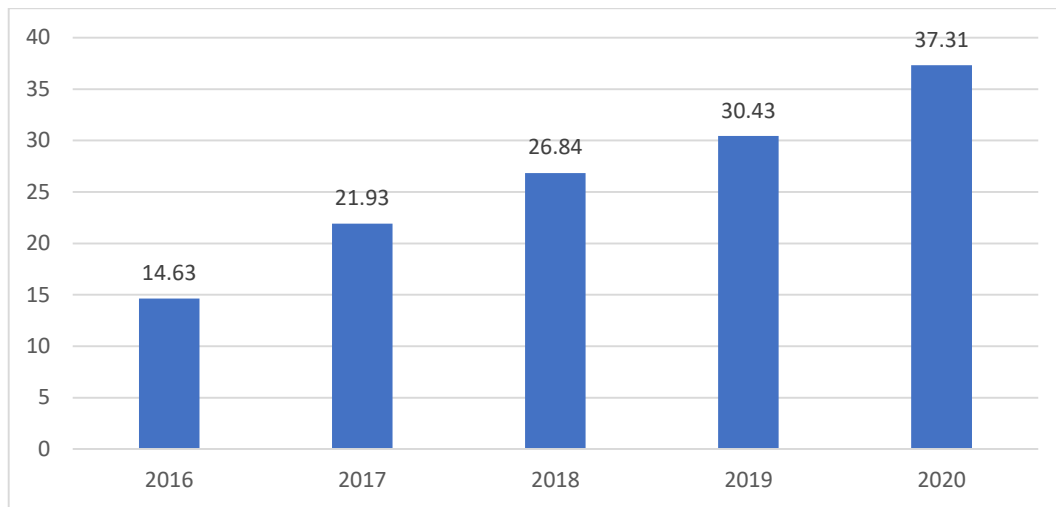
Sumber: DinKop & UM Kab Banjar 2020

Gambar di atas menunjukkan kenaikan pada persentase koperasi yang aktif pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Dapat diketahui pada tahun 2016 persentase koperasi yang aktif sebesar 62,87%. Selanjutnya di tahun 2017, persentase koperasi aktif juga menambah menjadi sebesar 63,9%. Angka tersebut mengalami peningkatan kembali di tahun 2018 yang bertambah menjadi 64,2% dan menjadi 64,92% di tahun 2019. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Banjar terus mengalami penambahan sedikit demi sedikit.

2) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Memiliki IUMK

IUMK atau Izin Usaha Mikro dan Kecil merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Usaha mikro yang dijalankan seseorang terkadang belum memiliki IUMK sesuai ketentuan, dan hal ini menyebabkan angka persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUMK mengalami perubahan tidak menentu setiap tahunnya seperti yang terjadi di Kabupaten Banjar.

Gambar 2. 131. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Memiliki IUMK



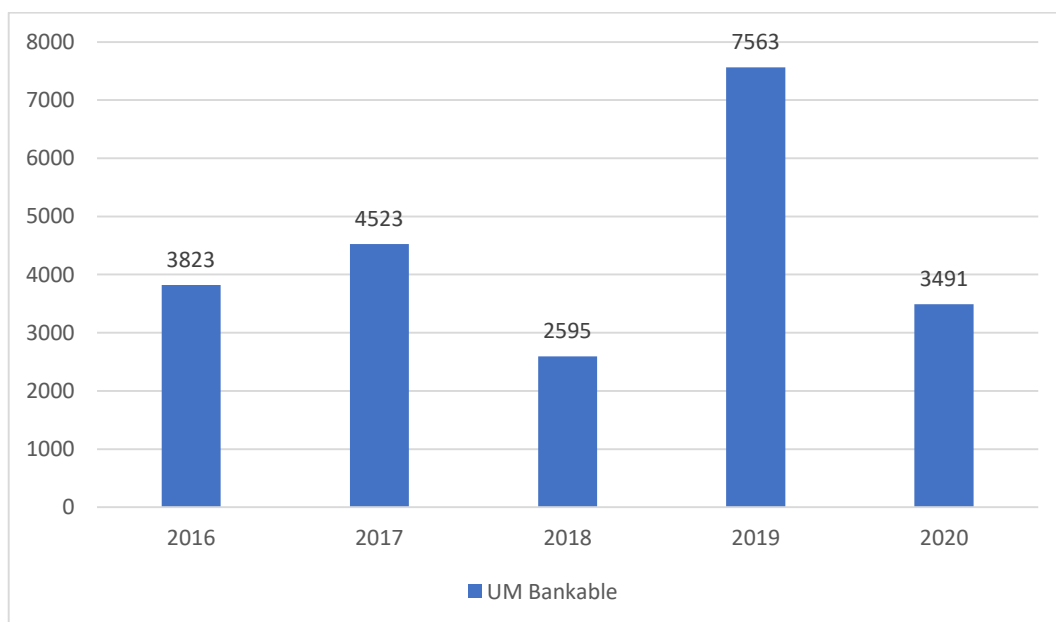
Sumber: DinKop & UM Kab Banjar 2021

Gambar di atas mengartikan bahwa terdapat peningkatan persentase untuk pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUMK dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dapat diketahui bahwa di tahun 2016, besaran persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUMK adalah sebesar 14,63%. Kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 21,93% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya angka persentase tersebut juga mengalami peningkatan kembali menjadi 26,84% di tahun 2018, dan bertambah menjadi 30,43% di tahun 2019. Tahun 2020, besaran persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUMK adalah sebesar 37,31%. Angka tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan dalam pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUMK dari tahun ke tahun.

3) UM bankable

UM *bankable* adalah usaha mikro yang telah mendapatkan pinjaman atau bantuan dari lembaga perbankan. Di Kabupaten Banjar, usaha mikro yang telah mendapatkan bantuan dari lembaga perbankan dalam setiap tahun mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

Gambar 2. 132. UM bankable Tahun 2016 s/d 2019



Sumber: DinKop & UM Kab Banjar 2020

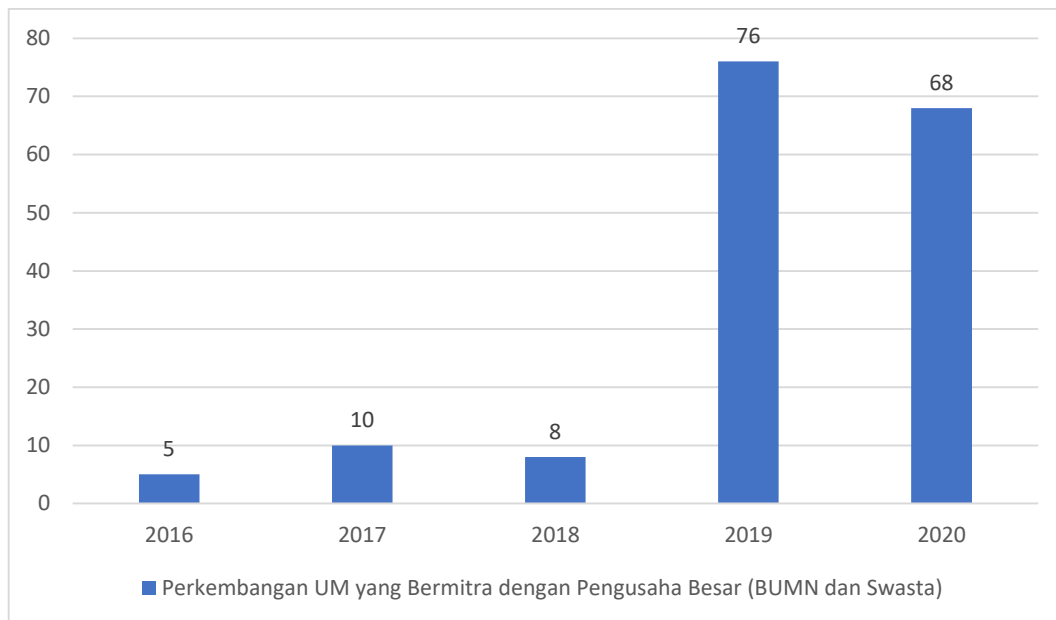
Gambar di atas menunjukkan jumlah usaha mikro yang bankable dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dapat diketahui jika jumlah usaha mikro yang bankable pada tahun 2016 adalah sebanyak 3.823. Kemudian pada tahun 2017, jumlah usaha mikro yang bankable meningkat kembali menjadi 4.523. Akan tetapi di tahun 2018, jumlah usaha mikro yang

bankable tersebut turun menjadi 2.595 dan meningkat sangat drastis kembali di tahun 2019 menjadi 7.563. Tahun 2020, berada di angka 3491. Hal ini menunjukkan adanya penurunan para usaha mikro yang mendapatkan bantuan dari lembaga perbankan.

4) Perkembangan UM yang Bermitra dengan Pengusaha Besar (BUMN dan Swasta)

Usaha mikro dapat menjalin mitra dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pengusaha besar seperti BUMN maupun pihak swasta. Di Kabupaten Banjar, jumlah usaha mikro yang melakukan mitra dengan pengusaha besar dalam setiap tahun berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pada masa tersebut. Seperti halnya pada tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah usaha mikro yang bermitra dengan pengusaha besar mengalami kenaikan dan juga penurunan.

Gambar 2. 133. Perkembangan UM yang Bermitra dengan Pengusaha Besar (BUMN dan Swasta) Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: BPS 2021

Berdasarkan Gambar di atas dapat diketahui bahwa, tahun 2016 jumlah usaha mikro yang bermitra dengan pengusaha besar sebanyak 5 usaha mikro. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 10 di tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 8 usaha mikro saja. Peningkatan drastis terjadi di tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 76 usaha mikro yang bermitra dengan pengusaha besar. Tahun 2020 mengalami penurunan di angka 68.

2.3.2.12. Penanaman Modal

1) Nilai Investasi

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu jalan keluar yang dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Banjar juga termasuk salah satu daerah yang memperoleh nilai investasi yang tidak sedikit. Setiap tahun nilai investasi akan berubah tergantung dari jumlah para investor yang menanamkan modal. Seperti halnya di tahun 2019, peningkatan realisasi nilai investasi Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp. 1,024,139,054,828, pada tahun berikutnya nilai investasi Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 1.414.823.443.382,-. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan investasi pada tahun 2020 sebesar 38%. Peningkatan nilai investasi Tahun 2020 ditandai dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar yang memberikan banyak kemudahan terkait perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Banjar.

2) Pertumbuhan Investor

Investor merupakan seseorang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal. Jumlah investor dapat mempengaruhi jumlah investasi yang didapatkan dan juga besarnya. Pertumbuhan investor masuk dalam urusan bidang penanaman modal dalam urusan pemerintah. Pada tahun 2016, pertumbuhan investor sebanyak 27 investor, kemudian di

tahun 2017 investor baru yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banjar sebesar 33 investor, namun pada tahun 2018, terjadi pengurangan investor baru di Kabupaten Banjar menjadi 30 investor. Pada tahun 2019 di Kabupaten Banjar, pertumbuhan investor terjadi sebanyak 37 investor, sementara pada tahun 2020 investor baru yang tumbuh sebanyak 30 investor, Jumlah tersebut tergolong cukup untuk lingkup daerah dan dapat membantu kondisi ekonomi. Capaian tersebut masih berada di bawah angka 50, akan tetapi sudah melebihi angka 10. Pertumbuhan investor perlu diperhatikan dan juga ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya untuk mengetahui penyebab naik atau turunnya pertumbuhan investor di Kabupaten Banjar.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan olahraga. Beberapa indikator untuk menggambarkan kondisi kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banjar, antara lain:

2.4.13.1 Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan

Persentase Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan yaitu pemuda dengan usia 16 – 30 Tahun dan pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan kepemimpinan yaitu pelatihan dan kegiatan sejenisnya yang berorientasi pada pembentukan karakter pemuda. Pada tahun 2018 persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan adalah 0.7 % dan pada tahun 2020 sebesar 0,29%.

Tabel 2. 54. Jumlah pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Banjar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah pemuda yang berwirausaha
1.	Aluh Aluh	36
2.	Beruntung Baru	10
3.	Gambut	
4.	Kertak Hanyar	
5.	Tatah Makmur	1
6.	Sungai Tabuk	11
7.	Martapura	298
8.	Martapura Timur	
9.	Martapura Barat	2
10.	Astambul	3
11.	Karang Intan	
12.	Aranio	1
13.	Sungai Pinang	
14.	Paramasan	
15.	Pengaron	
16.	Sambung Makmur	
17.	Mataraman	40
18.	Simpang Empat	1
19.	Telaga Bauntung	
20.	Cinta Puri	
	Total	403

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banjar, 2021

2.4.13.2 Organisasi Kepemudaan

Organisasi sebagai tempat pemuda berserikat dan berkumpul sudah terbentuk di Kabupaten Banjar, sampai dengan tahun 2020 terdapat 34 organisasi pemuda, selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

8	Sepak Bola	-	-	-	-	-	1	-	1
	Total	5	5	9	19	5	6	9	19

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banjar ,2019

Dalam kegiatan POPDA Tahun 2020 cabang yang diikuti oleh atlet Kab. Banjar sebanyak 8 cabang dengan perolehan medali sebagai berikut:

Tabel 2. 57. Perolehan Medali pada POPDA Tahun 2020

No.	Nama Cabang	Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
1	Pencak Silat	2	3	5
2	Sepak Bola	-	1	-
3	Bola Basket	-	-	1
4	Tenis Meja	-	-	2
5	Bola Volly	-	-	-
6	Takraw	-	-	-
7	Bulu Tangkis	-	-	1
	Jumlah	2	4	9

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banjar ,2019

Dari perolehan medali tersebut menempatkan posisi Kabupaten Banjar pada tahun 2018 berada pada Peringkat Ke- 2 (Dua) dan posisi ke-tiga pada tahun 2019 dari 13 Kabupaten Kota yang mengikuti. POPDA Spesial Olympic Indonesia (SOIna) Tingkat Provinsi di Banjarbaru sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 58 Perolehan medali pada POPDA Spesial Olympic Indonesia (SOIna) Tahun 2018-2019

No.	Cabang Olahraga	2018				2019			
		Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
1	Bola Volly	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bola Tangan	1	-	-	1	1	-	-	1
3	S Bola Putri	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Bola Basket	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bocce	-	-	-	-	-	1	-	1
	Total	1	-	-	1	1	1	1	3

Sumber : Dispora Kabupaten Banjar Tahun 2018 -2019

Dari perolehan medali tersebut menempatkan posisi Kabupaten Banjar pada tahun 2018 berada pada Peringkat Ke- 3 (tiga) dan posisi ke-4(empat) pada tahun 2019 dari 13 Kabupaten Kota yang mengikuti Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) dengan perolehan medali sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Perolehan Medali Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

No.	Cabang Olahraga	2018				2019			
		Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
1	Atletik	4	7	-	11	3	5	7	15
2	Catur	1	1	-	2	2	1	1	4
3	Badminton	5	3	-	8	1	2	2	5
4	Tenis Meja	3	3	3	9	2	7	4	13
5	Renang	1	-	-	-	1	3	2	6
	Total	14	14	3	31	9	18	14	41

Sumber : Dispora Kabupaten Banjar Tahun 2018

2.3.2.14. Statistik

Untuk menggambarkan urusan statistik diukur dari indikator: 1) Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, 2) Buku Kabupaten Dalam Angka , 3) Buku PDRB. Dari ketiga indikator tersebut semuanya terpenuhi/ada. Penyusunan Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB dilaksanakan dengan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Buku-buku ini sangat berguna dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terutama sebagai bahan data/informasi analisis pembangunan.

2.3.2.15. Kebudayaan

Urusan kebudayaan antara lain digambarkan dengan sasaran budaya yang terkelola dengan baik, budaya yang dilestarikan merupakan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir. Budaya yang dilestarikan hingga tahun 2020 adalah sebanyak 29 unsur budaya, jumlah tersebut mencapai angka 70% bila membandingkan jumlah keseluruhan budaya yang telah diinventarisir. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. 60. Daftar Budaya Benda di Kabupaten Banjar

No.	Nama Benda/Objek Cagar Budaya		Lokasi	Jenis	Dilestarikan
1	Rumah Banjar tinggi	Adat bubungan	Desa Teluk Selong, Martapura Timur	Bangunan Budaya	Cagar 1
2	Rumah Banjar Baliku	Adat Gajah	Desa Teluk Ulu, Martapura Barat	Bangunan Budaya	Cagar 2
3	Monumen Divisi IV Kalimantan	ALRI Hankam	Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk	Bangunan Budaya	Cagar 3
4	Makam Abdul Abulung	Syeh Hamid	Desa Sei Batang, Kec. Martapura Barat	Bangunan Budaya	Cagar 4
5	Mesjid Abdul Abulung	Jami Syeh Hamid	Desa Sei Batang, Kec. Martapura Barat	Bangunan Budaya	Cagar 5
6	Makam Adam Watsiqbillah	Sultan Al	Kelurahan Jawa, Kec. Martapura Kota	Bangunan Budaya	Cagar 6
7	Makam Tahlilullah	Sultan	Kelurahan Keraton, Kec. Martapura Kota	Bangunan Budaya	Cagar 7
8	Makam Sulaiman Rahmatullah gelar Penambahan Datu Pahat	Sultan	Desa Lihung, Kec. Karang Intan	Bangunan Budaya	Cagar 8
9	Makam Empat Kindu Mu'i	Menteri Keramat	Desa Sungai Tabuk, Kec. Sungai Tabuk	Bangunan Budaya	Cagar 9
10	Makam Abdurrahman Sultan Abdurrahman	Pangeran Muda	Desa Pasayangan, Kec. Martapura Kota	Bangunan Budaya	Cagar 10
11	Makam Abdul Bugis/ Patimah	Syeh Wahab Datu	Desa Tungkaran, Kec. Martapura Timur	Bangunan Budaya	Cagar 11

No.	Nama Benda/Objek Cagar Budaya	Lokasi	Jenis	Dilestarikan
12	Sultan Mustain Billah (Raja Banjar 4) bin Sultan Hidayatullah	Desa Sei Kitano, Kec. Martapura Timur	Bangunan Budaya	Cagar 12
13	Makam Sultan Inayatullah Pangeran	Desa Dalam Pagar, Kec. Martapura Timur	Bangunan Budaya	Cagar 13
14	Makam Pangeran Hidayatullah	Desa Jonggol, Kec. Cianjur	Bangunan Budaya	Cagar 14
16	Mesjid Jami Al Mokodam	Kecamatan Sungai Tabuk	Bangunan Budaya	Cagar
17	Mesjid Jami Al Karomah	Martapura Kota	bangunan bersejarah	
18	Benteng Nassau	Orange Kecamatan Pengaron	Bangunan Budaya	Cagar 15
19	Meriam depan Disbudpar, Martapura dan Mahligai Sultan Adam	Martapura	benda cagar budaya	
20	Makam Pelampaian	Datu Kecamatan Astambul	Bangunan Budaya	Cagar
21	Makam KH. Anang Syahrani Arif	Desa Kampung Melayu Kecamatan Martapura Timur	Bangunan bersejarah	16
22	Makam H.Abdullah Syeh Said Achdan Yang Bergelar Datu Kalangkala	Desa Tungkaran, Kec. Martapura Kota	Bangunan Bersejarah	17
23	Makam Syeh Aminullah Dikenal dengan Sebutan Datu Bagul	Desa Tungkaran, Kec. Martapura Kota	Bangunan Bersejarah	18
24	Makam Abdul Qadir	Syah Desa Salak, Mataraman	Danau Kec.	Bangunan Bersejarah 19
25	Makam Pangeran Muhammad Noor Bumi Kencana Bin Pangeran Anum Kencan	Datu Bumi Desa Bakula, Sungai Pinang	Rantau Kec.	Bangunan Bersejarah 20
26	Makam Umar/Datu Bajanggungut	Syah Desa Tungkaran, Kec. Martapura Timur	Bangunan Bersejarah	21
27	Makam Ma'ad Ali/Datu Panjang	Datu bin Rambut Desa Tangkas, Kec. Martapura Barat	Bangunan Bersejarah	22

No.	Nama Benda/Objek Cagar Budaya	Lokasi	Jenis	Dilestarikan
28	Makam Datu Mar'i	Desa Tungkaran, Kec. Martapura Timur	Bangunan Bersejarah	23
29	Makam H.Pangeran Arga Kusuma	Desa Bincau, Kec. Martapura Kota	Bangunan Bersejarah	24
30	Makan Pangeran Muhammad Tambak Anyar Bin Sultan Adam Al Wasiqubillah	Desa Tambak Ulu Kecamatan Martapura Timur	Bangunan Bersejarah	25
31	Makam Pangeran Muhammad Tambak Anyar Bin Sultan Adam Al Wasiqubillah	Desa Tambak Ulu Kecamatan Martapura Timur	Bangunan Bersejarah	26

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 2. 61. Daftar Unsur Budaya Tak Benda

No.	Unsur Budaya Tak Benda	Dilestarikan
1	Manuskrip	
2	Tradisi lisan (bakisah, bapantun, madihin, dll)	Dilestarikan
3	Adat Istiadat	
4	Ritus	
5	Pengetahuan tradisional	
6	Teknologi tradisional	
7	Seni (musik panting, rudat, tari tradisional banjar, dll)	Dilestarikan
8	Bahasa (bakisah bahasa banjar, dll)	Dilestarikan
9	Permainan Tradisional	
10	Olahraga Tradisional	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Adapun even-even kesenian dan festival budaya yang difasilitasi adalah festival karya tari daerah tingkat provinsi kalimantan selatan, seleksi/pengiriman gita bahana, kegiatan festival bedug, kegiatan pasar wadai ramadhan, kegiatan even budaya tahunan kegiatan festival rudat, kegiatan festival rebana, festival bakisah bahasa banjar, festival bapantun bertempat, festival maulid habsyi, festival sinoman hadrah lomba kue tradisional, kegiatan hari besar Islam, kegiatan banjar bershalawat, kegiatan even Muharram, kegiatan festival jukung tanglong.

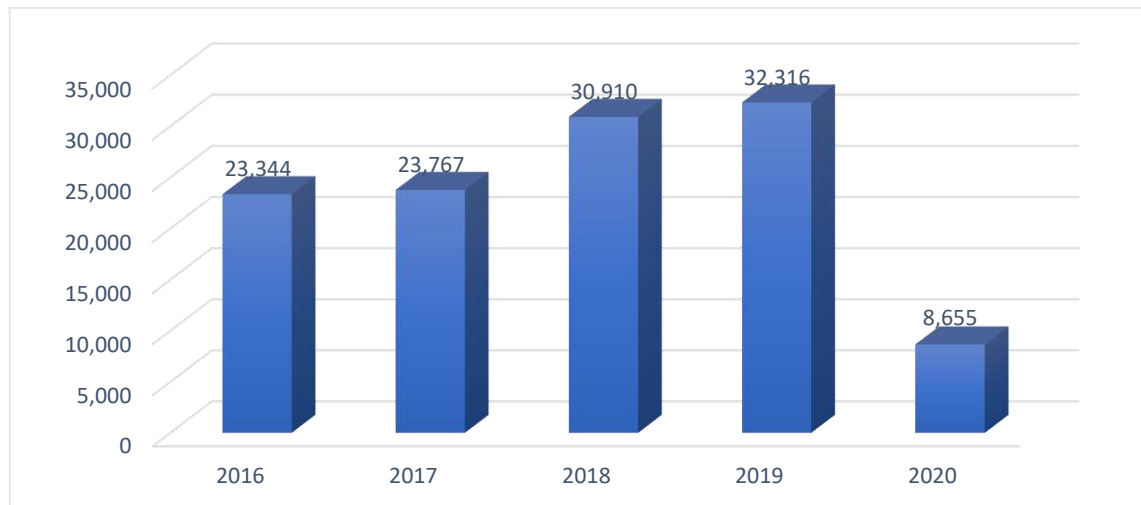
2.3.2.16. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan Pendidikan. Indikator sebagai gambaran urusan perpustakaan antara lain sebagai berikut:

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jika dilihat secara umum kunjungan perpustakaan di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan, dari 23.344 di tahun 2016 menjadi 23.767 orang di tahun 2017 dan terus meningkat menjadi 32.316 orang di tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan perpustakaan akibat pandemi Covid 19 yang membatasi aktivitas kegiatan untuk menghindari penularan covid 19, tidak terkecuali untuk pengunjung perpustakaan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

Gambar 2. 134. Jumlah Pengunjung perpustakaan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Banjar, 2021

Tabel 2. 62. Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Desa/kelurahan Yang Sudah Di Bina Dari Tahun 2017 - 2020

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, 2021

NO	TAHUN PEMBINAAN	NAMA PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	JUMLAH
1	2017	Perpustakaan SMP	46 Sekolah
		Perpustakaan Desa/Kelurahan	44 buah
2	2018	Perpustakaan SD	53 Sekolah
		Perpustakaan SMP	3 Sekolah
		Perpustakaan MTs	1 Sekolah
		Perpustakaan Desa/Kelurahan	9 buah
3	2019	Perpustakaan SD/MI	30 Sekolah
		Perpustakaan SMP/MTs	1 Sekolah
		Perpustakaan Desa/Kelurahan	23 buah
4	2020	Perpustakaan SD/MI	56 Sekolah
		Perpustakaan SMP/MTs	0 Sekolah
		Perpustakaan Desa/Kelurahan	12 buah

Gambar 2. 135. Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Sudah Di Kunjungi Dan Layani Perpustakaan Keliling Dari Tahun 2017 - 2020

TAHUN KUNJUNGAN	NAMA PERPUSTAKAAN YANG SUDAH DI KUNJUNGI DAN DI LAYANI	JUMLAH
2017	Perpustakaan Sekolah dan Desa	73 kunjungan
2018	Perpustakaan Sekolah dan Desa	92 kunjungan
2019	Perpustakaan Sekolah dan Desa	100 kunjungan
2020	Perpustakaan Sekolah dan Desa	34 kunjungan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, 2021

2) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Buku/koleksi di perpustakaan umum daerah Kabupaten Banjar terdiri dari klasifikasi buku dari buku-buku umum, sosial dan budaya, ekonomi dan teknologi, buku keagamaan serta buku lainnya.

Jumlah koleksi buku pada tahun 2016 sebanyak 12.620 judul/18.664 eksemplar . Tahun 2017 berjumlah 13.992 judul/20.870 eksemplar . Tahun 2018 sebanyak 15.962 judul / 22.863 eksemplar dan jika digabung secara keseluruhan dengan jumlah koleksi tabloid, majalah, koran sampai dengan Desember 2018 sebanyak 47.528 eks. Pada tahun 2019 sebanyak 18.082 judul/25.353 eksemplar dan pada tahun 2020 sebanyak 26.234 eksemplar.

3) Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi (Perpuseru)

Sejak Tahun 2017 kegiatan pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi sudah didukung dengan alokasi dana APBD sehingga dapat lebih meningkatkan kegiatan dalam pengembangan perpustakaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga lebih bervariasi dengan adanya kerja sama dengan mitra dan atau library supporter yang mendukung kegiatan perpustakaan, diantaranya :

- Kerja sama/bermitra dengan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) melalui program Perpuseru,
- Kerja sama dengan Polres Banjar melalui Program Kabinaktar Binmas Polres Banjar
- Kerja sama dengan beberapa SKPD terkait yang mendukung program peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, dan pula sebaliknya program dan kegiatan perpustakaan yang dapat mendukung program SKPD lain dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan dalam pencapaian misi kedua.

Sebagai realisasi dari pengembangan kegiatan tersebut sudah ada Perpustakaan Desa/Kelurahan yang bereplikasi kegiatan Perpustakaan Daerah yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 63. Data Taman Bacaan Mandiri di Kabupaten Banjar

NO	NAMA TBM	ALAMAT TBM	KECAMATAN	TAHUN BERDIRI	JUMLAH KOLEKSI BUKU	KET.
1	Wahana Ilmu	PAUD Sabilal Muhtadin Desa Dalam Pagar Ulu	Martapura Timur	2007	150 eks	Aktif
2	Tunas Mulia	Komp.H.Muhammad Rt.15 No.29	Kertak Hanyar	2009	150 eks	Aktif
3	Ceria	Jl.Hasan Yamin Desa Penyambaran	Karang Intan	2012	417 eks	Aktif
4	Bunga	Jl.Pelurusn Bawah Rt.01	Pengaron		500 eks	Aktif
5	Alamanda	Desa Sungai Pinang Baru Rt.01 Rw. 01	Sungai Pinang	2000	100 eks	Tidak Aktif
6	Al Firdaus	Jl.A.Yani Km. 77 Desa Sungkai	Simpang Empat	2010	500 eks	Aktif
7	Cerdas Pelangi	Desa Paramasan	Paramasan	2019	100 eks	Aktif
8	Taman Wisata Baca	Koramil 1006-01 Sungai Pinang	Sungai Pinang	2020	503 eks	Aktif
9	Dambaan Ibu	Desa Pembantanan	Sungai Tabuk	-	200 eks	Aktif

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, 2021

2.3.2.17. Kearsipan

1) Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah oleh tim pendataan dan penataan kearsipan untuk mengelola arsip secara baku selama 5 tahun terakhir (2016-2020) sebagai berikut : tahun 2016 sebanyak 12 unit , tahun 2017 sebanyak 13 unit, tahun 2018 sebanyak 15 Unit , tahun 2019 dilaksanakan terhadap 16 Unit Kearsipan serta tahun 2020 sebanyak 14 unit . Secara detail unit kearsipan yang ditata sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 64. Daftar SKPD yang arsipnya didata dan ditata tahun 2016

No	Instansi	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
1	Disperkim (3)	1621	1661	76
2	Bag. Ekonomi (2)	282	358	18
3	Distamben (2)	191	207	31
4	Diskanlut (3)	495	674	59
5	Disdik (2)	1066	1317	145
6	Dispenda (3)	244	258	71
7	Bag. Kesra (2)	232	456	84
8	Bag. Humas (1)	95	110	30
9	Inspektorat (2)	2486	7175	134
10	BMSDA (2)	459	664	30
11	Set. Korpri (1)	59	59	12
12	BPBD (1)	453	461	21
Total		7683	13400	711

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2016

Tabel 2. 65. Daftar SKPD yang arsipnya didata dan ditata tahun 2017

No	Instansi	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
1	Badan Pendapatan Daerah (3)	268	352	46
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2)	336	533	29
3	Dinas Pendidikan	1126	1221	39
4	Inspektorat(3)	626	746	31
5	Bagian Infrastruktur dan ULP (1)	991	1619	96
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	287	534	26
7	Bapelitbang	225	271	42
8	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	277	278	8
9	Bagian Infrastruktur dan ULP (2)	834	950	39
10	Kecamatan Martapura Kota	219	227	9
11	Inspektorat (4)	671	800	55
12	Bagian Organisasi Setda (2)	621	925	59
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85	89	18
Total		6566	8545	497

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

Tabel 2. 66. Daftar SKPD yang arsipnya sudah didata dan ditata tahun 2018

No.	Unit Kearsipan	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
1	Bagian Organisasi Setda (03)	578	738	42
2	Bagian tata pemerintahan	56	77	16
3	Kecamatan karang intan	24	26	9
4	Kecamatan gambut	252	287	31
5	Martapura timur	165	358	15
6	Dinas peternakan dan perkebunan	60	64	29

No.	Unit Kearsipan	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
7	Bagian Ekonomi Setda	312	363	27
8	Dpk Bid. Kearsipan	99	154	3
	Dpk Bid. Sekretariat	110	111	11
	Dpk Bid. Perpustakaan	24	26	3
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	69	71	3
10	Dinas Pertanahan	22	22	7
11	Dinas Lingkungan Hidup	452	514	38
12	Dinas tanaman pangan dan hortikultura	151	185	64
13	Kecamatan Astambul	399	430	16
14	Badan pendapatan daerah (05)	38	38	16
15	Dukcapil (02)	945	13286	76
	Total	3.756	16.750	406

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2018

Tabel 2. 67. Daftar SKPD yang arsipnya sudah didata dan ditata tahun 2019

No.	Unit Kearsipan	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
1	Bappeluh	76	97	38
2	Kec. Sungai Pinang	31	31	2
3	Dukcapil	725	12811	89
4	Bag. Layanan Pengadaan dan infrastruktur	873	1258	65
5	BKDPSDM	295	295	14
6	Dinas Sosial	58	75	27
7	DISBUDPAR (Bid. Keuangan)	83	83	30
	DISBUDPAR (Bid. Kebudayaan)	27	28	10
8	Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut	119	164	4
9	Dinas Perikanan	194	250	38
10	RSUD Ratu Zalecha	191	191	5
11	Desa Bincau Kec. Martapura	58	69	8
12	Desa Bincau Muara Kec. Martapura	69	69	2
13	Desa Tunggul Irang Ilir Kec. Martapura	85	87	2
14	Desa tunggul Irang Kec. Martapura	170	232	7
15	Desa Tatah Layap Kec. Tatah Makmur	87	442	4
16	Desa Tunggul Irang Hulu Kec. Martapura	141	150	3
	Total	3.276	16.332	343

Sumber : LKPJ Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2019

Tabel 2. 68. Daftar SKPD yang arsipnya sudah didata dan ditata tahun 2020

No.	Unit Kearsipan	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks	
1	Desa Pemangkih Tengah Kec. Tatah Makmur	111	268	4	
2	Kelurahan Sekumpul Kec. Martapura	42	42	5	
3	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	- Umpeg	223	229	7
		- Perencanaan	108	114	5
		- Statistik	61	67	2
		- Persandian	53	59	1
		Bidang E-Government	173	760	5
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	108	229	5
4	Kecamatan Martapura	159	256	3	
5	SDN Gambut 2 Kecamatan Gambut	70	278	6	
6	Dinas Pendidikan	- Perencanaan	199	300	25
		- Umpeg	189	195	7
		- Bina PTK SMP	269	3892	17
		- Bina PTK SD	357	3209	25
7	Kecamatan Kertak Hanyar	- Umpeg	14	596	2
		- Pemerintahan	38	220	1
		- Kesejahteraan Sosial	7	270	1
		- Pemberdayaan Masyarakat	8	19	1
		- Perencanaan & Keuangan	17	17	2
		- Trantib	11	12	1
8	Dinas Kesehatan	501	6391	46	
9	Desa Simpang Empat Kec Simpang Empat	189	2510	5	
10	SDN Manarap Tengah 2 Kecamatan Kertak Hanyar	222	437	11	
11	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	100	191	4	
12	Dinas Pendidikan	55	83	2	
13	Bagian Hukum Setda Banjar	34	49	1	

No.	Unit Kearsipan	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49	101	1
TOTAL		3367	20794	195

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2) Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Dalam rangka peningkatan SDM pengelolaan kearsipan di Kabupaten Banjar, Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Kearsipan. Pada tahun 2017 dengan peserta dari desa/kelurahan sebanyak 43 orang (target 50 orang), pada tahun 2018 dengan peserta sebanyak 71 orang (target 75 orang) dan pada tahun 2019 peserta sebanyak 75 orang (target 75 orang).

2.3.3 Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kabupaten Banjar semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banjar sebanyak 5.192.060 orang, jumlah ini terus meningkat di tahun 2017 menjadi 6.385.142 wisatawan. Pada tahun 2018, angka pengunjung wisata Kabupaten Banjar mengalami kenaikan menjadi 7.173.826 orang. Puncaknya pada Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 9.116.576 orang. Kunjungan wisata di Kabupaten Banjar terbesar berupa wisata religi yaitu Makam Guru Sekumpul, Datuk Kalampayan, kemudian di susul dengan wisata buatan dan wisata alam. Target jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Banjar dalam 4 kurun waktu 2016-2019 selalu dengan capaian 100 persen.

Pandemi yang terjadi di awal Tahun 2020 memberi dampak besar terhadap seluruh sektor, tak terkecuali sektor pariwisata dimana jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Banjar pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar menjadi 3.701.428 orang.

Tabel 2. 69. Angka Pengunjung Wisata

No.	Objek Destinasi Tujuan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	
		2019	2020
1	CBS dan Mesjid Al-Karomah	1.722.756	1.108.751
2	Wisata Religi – Makam Datu Kalampayan	960.181	280.602
3	Pulau Pinus I, Pulau Pinus II dan Riam Kanan	84.274	55.325
4	Wisata Kuliner Bincau	144.682	109.385
5	Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam	75.148	39.174
6	Pasar Terapung Lok Baintan	67.079	27.482
7	Obyek Wisata Alam Sungai Kembang	29.525	21.481
8	Wisata Religi – Makam guru Sekumpul Martapura	5.864.464	1.977.839
9	Obyek Wisata Water Boom Pesona Modern	56.591	30.610
10	Rumah Adat Banjar di Telok Selong	3.546	1.731
11	Benteng Oranje Nassau di Pengaron	5.538	3.562
12	Wisata Danau Tamiyang	41.098	30.041
13	Matang Kaladan	60.508	15.397
14	Penggosokan Intan	1.186	48
Jumlah		9.116.576	3.701.428

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

2.3.3.2. Pertanian

Seperti yang sudah di uraikan pada sub. Bagian potensi pengembangan wilayah yang di tinjau dari persentase penduduk berdasarkan sektor pekerjaan yang diminati, kondisi geografis dan PDRB Kabupaten Banjar sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi kontribusi utama laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha (Persen) Kabupaten Banjar tahun 2016-2020.

Tabel 2. 70. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.18	-0.95	2.87	4.60	-4.14

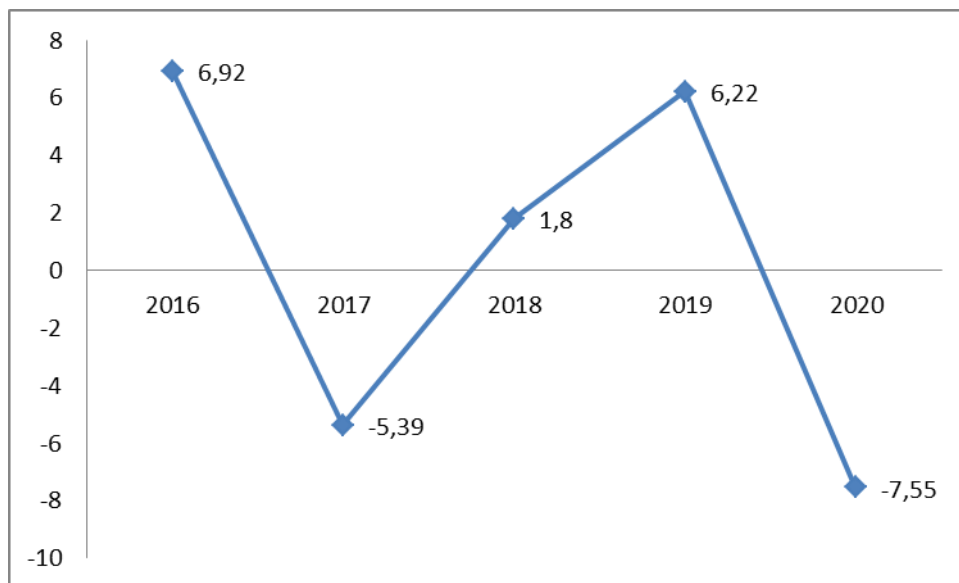
Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Pertumbuhan ekonomi dari kontribusi pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian pada tahun 2020 mengalami keadaan bertumbuh negative yaitu -4.14 hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi di dunia khususnya kabupaten Banjar. Dan sub. sektor yang paling berkontribusi dengan keadaan ini adalah sub. sektor tanaman pangan dimana pertumbuhannya yaitu -7.55 dan yang masih bertumbuh positif yaitu Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya 2.09 dan peternakan 0.5.

1) Pertumbuhan Sub. Sektor Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan sektor penting dalam bidang pertanian karena kelompok tanaman ini yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia. Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman pangan, dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB Sub sektor tanaman pangan dari tahun ke tahun begitu fluktuatif. Lebih jelas, pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 2. 136. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021, diolah kembali

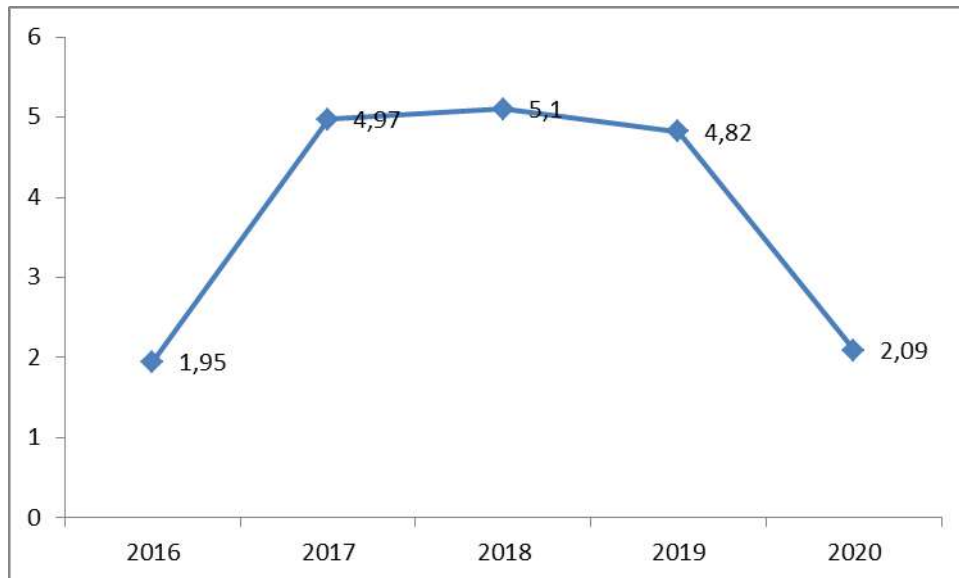
Pada tahun 2016, pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan sebesar 6,92%, pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan menjadi -5,39%. Tahun 2018 pertumbuhan sub sektor tanaman pangan mengalami kenaikan 1,8% dari tahun sebelumnya dan meningkat tajam pada tahun 2019 sebesar 6,22%. Akan tetapi, pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi -7,55% sebagai akibat dari dampak pandemi Covid 19

2) Pertumbuhan Sub. Sektor Tanaman Hortikultura Unggulan

Produksi tanaman hortikultura dapat tercapai dengan keadaan dimana adanya faktor penunjang kelompok tani yang mandiri, meningkatnya produktivitas komoditas strategis tanaman hortikultura unggulan (jeruk, pisang, durian dan cabe), lahan yang mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana pertanian, dan serangan OPT tanaman hortikultura unggulan

(jeruk, pisang, durian dan cabe) yang tertangani. Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman hortikultura, dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB Sub sektor tanaman hortikultura dari tahun ke tahun begitu fluktuatif. Pada tahun 2016, pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman hortikultura sebesar 1,95%, pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang signifikan menjadi 4,97%. Tahun 2018 pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura mengalami kenaikan 5,1% dari tahun sebelumnya dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 4,82%. Akan tetapi, pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman hortikultura hanya mengalami kenaikan sebesar 2,09 %. Lebih jelas, pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman hortikultura tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 2. 137. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura

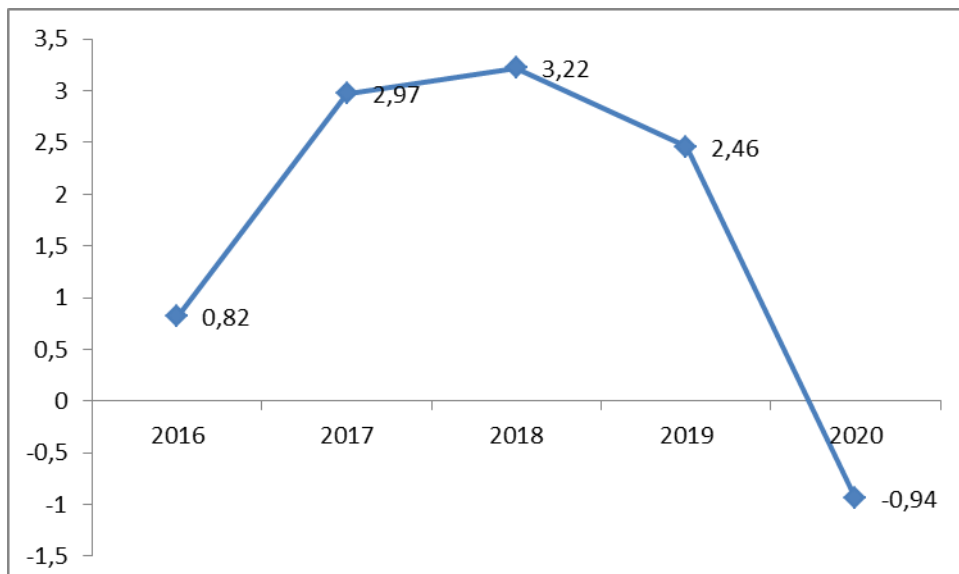


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021, diolah kembali

3) Pertumbuhan Sub. Sektor Perkebunan

Sektor tanaman perkebunan yang diprioritaskan dibudidayakan di Kabupaten Banjar adalah karet dan kopi. Dimana tanaman perkebunan ini bernilai ekonomis tinggi karena menjadi kebutuhan industri-industri besar. Selain itu, lahan budidaya tanaman-tanaman juga tergolong luas dan dapat dilakukan dalam jangka waktu Panjang. Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman perkebunan, dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB Sub sektor perkebunan dari tahun ke tahun begitu fluktuatif. Pada tahun 2016, pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan sebesar 0,82%, pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 2,97%. Tahun 2018 pertumbuhan sub sektor perkebunan mengalami kenaikan 3,22% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 hanya meningkat sebesar 2,46%. Akan tetapi, pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan mengalami penurunan sebesar -0,94 %. Lebih jelas, pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 2. 138. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan

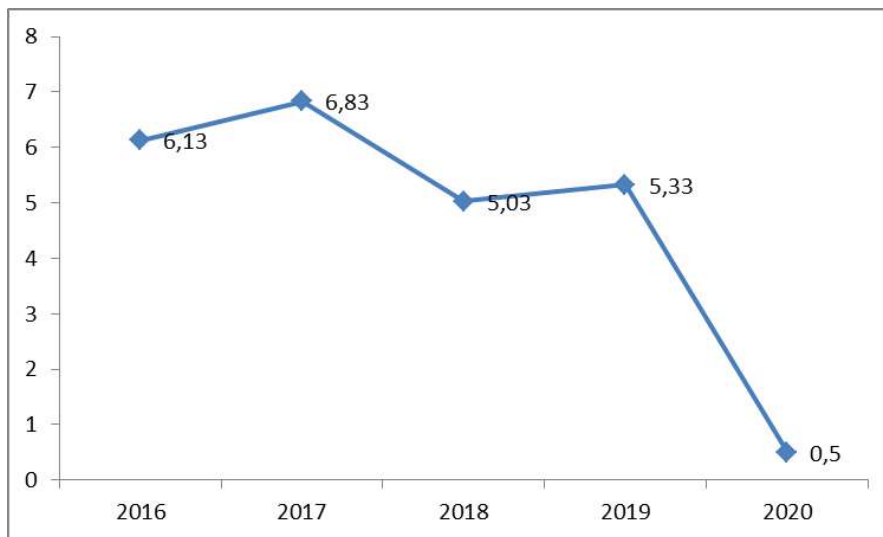


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021, diolah kembali

4) Pertumbuhan Sub. Sektor Peternakan

Sub sektor Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Sub sektor ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Banjar adalah Ternak besar (sapi) dan ternak unggas (ayam petelur dan ayam Pedaging). Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman perkebunan, dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB Sub sektor peternakan dari tahun ke tahun begitu fluktuatif. Pada tahun 2016, pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan sebesar 6,13 %, pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 6,83%. Tahun 2018 pertumbuhan sub sektor peternakan mengalami kenaikan 5,03% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 5,33%. Akan tetapi, pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan hanya sebesar 0,5 %. Lebih jelas, pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 2. 139. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan

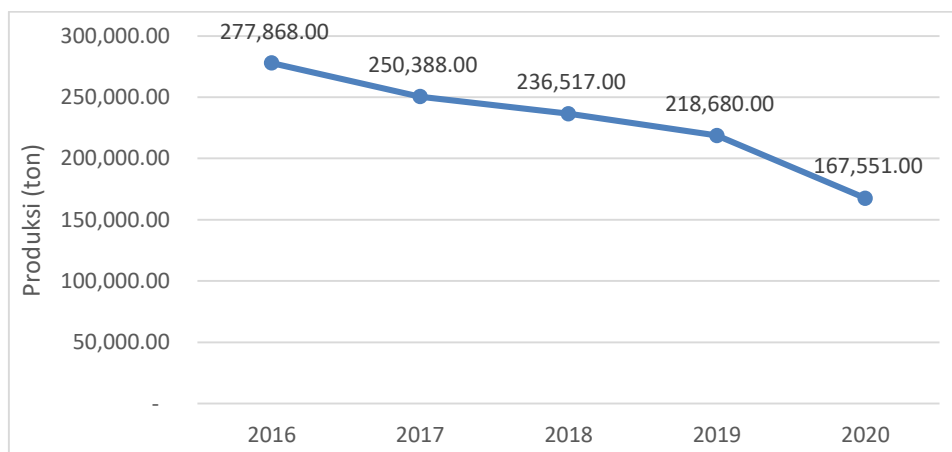


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021, diolah kembali

5) Kontribusi Produksi kelompok Petani terhadap PDRB

Tanaman pangan yang di produksi petani pada dasarnya merupakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia dan mampu menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Tanaman pangan yang dominan di produksi di Kabupaten Banjar yaitu padi. Besar kecilnya produksi padi sawah tergantung pada faktor-faktor produksi yang digunakan, antara lain luas lahan, pupuk, tenaga kerja, benih dan pestisida. Produksi pangan utama (padi) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 140. Produksi Padi Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



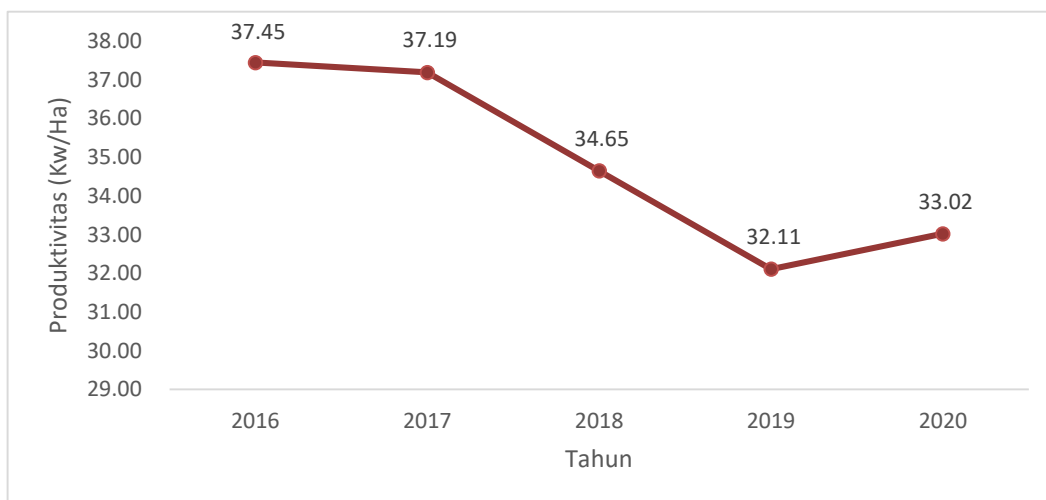
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

Dari gambar di atas dalam kurun waktu 5 tahun produksi padi (ton) di Kabupaten Banjar terus mengalami penurunan karena iklim yang kurang menentu saat ini sehingga menyebabkan waktu tanam yang tidak bisa dipastikan. Yang terbesar terjadi pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 terjadi yaitu mengalami penurunan sebesar 51.129,00 ton dibandingkan produksi padi tahun 2019. Dan dikhawatirkan akan bertambah parah dengan terjadinya bencana alam banjir di Kabupaten Banjar pada awal tahun 2021, hal ini menyebabkan kemunduran waktu tanam padi. Penurunan produksi padi ini juga mempengaruhi kontribusi terhadap PDRB dimana terjadi hal yang berbanding lurus saat produksi pangan padi menurun maka otomatis kontribusi pangan (padi) terhadap PDRB juga akan mengalami penurunan kontribusi Sub. Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB.

6) Produktivitas Padi

Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Kebutuhan akan pangan (padi) ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Namun dilain pihak, upaya peningkatan produksi padi saat ini terganjal oleh banyak kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen dan penyimpangan iklim yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Data produktivitas padi dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 141. Produktivitas Padi Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat angka produktivitas 4 tahun kebelakang mengalami terus penurunan di karenakan alih fungsi lahan dan kurang optimalnya optimalisasi lahan yang terjadi di Kabupaten Banjar . Tapi pada tahun 2020 angka produktivitas sebesar 33,02 Kw/Ha mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 0.91 Kw/Ha. Hal ini disebabkan oleh sudah adanya para petani yang mau menerapkan metode 2 kali dalam setahun. Dimana varietas yang ditanam yaitu lokal 1 kali masa tanam 6 bulan dan unggul 1 kali masa tanam 3 bulan. Tapi metode ini masih banyak terkendala karena para petani di Kabupaten Banjar masih banyak memilih varietas lokal. Sedangkan produktivitas padi adalah total produksi dibagi luas panen.

2.3.3.3. Perdagangan

Kinerja Perekonomian di Kabupaten Banjar dari sisi pengeluaran pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah perilaku pasar domestik yang tercermin dari komponen yang ada pada pengeluaran akhir. Peran pasar domestik merupakan kekuatan daya dorong domestik terhadap perkembangan ekonomi regional, sementara faktor eksternal adalah perubahan teknologi struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Peran domestik Kabupaten Banjar cukup bagus dalam mendorong kinerja ekonomi regional, meski demikian ketergantungan terhadap Supply barang dan jasa dari luar daerah cukup besar, akibatnya ketergantungan terhadap daerah lain cukup tinggi. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menjual barang dan jasa dari Kabupaten Banjar ke luar daerah, maka akan berpengaruh tidak baik terhadap perekonomian Kabupaten Banjar. Sebagai gambaran perbandingan antara ekspor dan impor barang jasa di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 71. Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Barang Jasa	7.121.955	8.367.303	10.606.719	10.428.723	9.707.047
2	Impor Barang Jasa	8.804.514	10.079.417	12.764.197	12.903.214	12.355.639
3	Ekspor Bersih Perdagangan	(1.682.559)	(1.712.114)	(2.157.478)	(2.474.491)	(2.648.592)

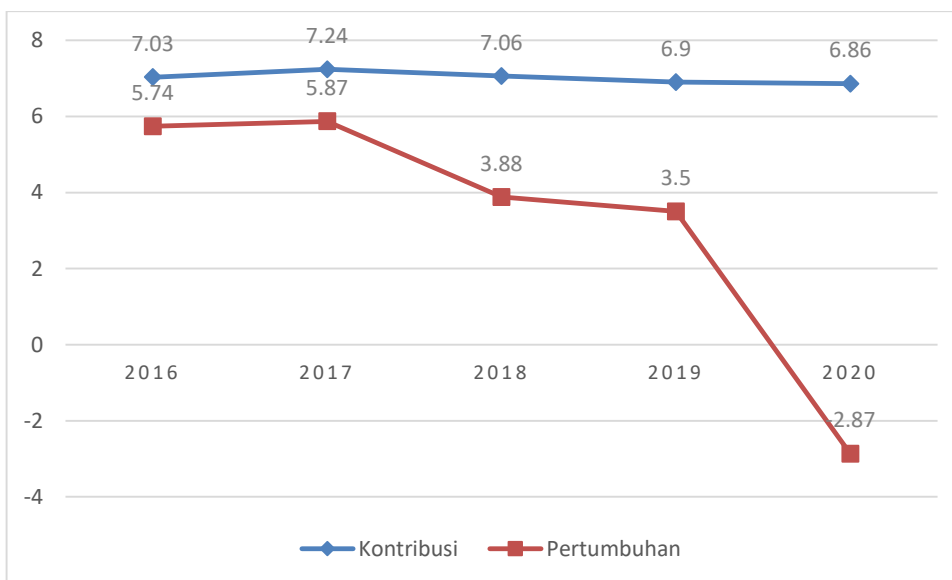
Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

2.3.3.4. Perindustrian

Pelayanan umum urusan Industri pengolahan kinerjanya dapat diketahui dari Kategori Industri Pengolahan pada PDRB, kategori ini pada tahun 2020 memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 1,13 triliun atau sebesar 6,86 persen. Kontribusi ini selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 kategori ini menyumbang 7,03 persen dari PDRB Kabupaten Banjar namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kontribusi menjadi 6,86 persen. Penurunan yang terjadi disebabkan adanya penurunan nilai produksi akibat dampak covid 19 yaitu banyak usaha industri kecil dan mikro yang terpaksa harus gulung tikar atau sementara tutup dan merumahkan tenaga kerjanya. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan dana insentif tambahan untuk membantu pelaku usaha industri mikro, namun besarnya pukulan ekonomi akibat dampak pandemi covid 19 tidak bisa dihindarkan.

Hal ini terlihat dari gambar berikut dari sisi pertumbuhannya, pada tahun 2020 pertumbuhan kategori industri pengolahan tumbuh negatif sebesar -2,87 persen, dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,5 persen

Gambar 2. 142. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Banjar, 2016-2020(Persen)



Sumber: PDRB Kab. Banjar, BPS 2021

2.3.3.5. Perikanan

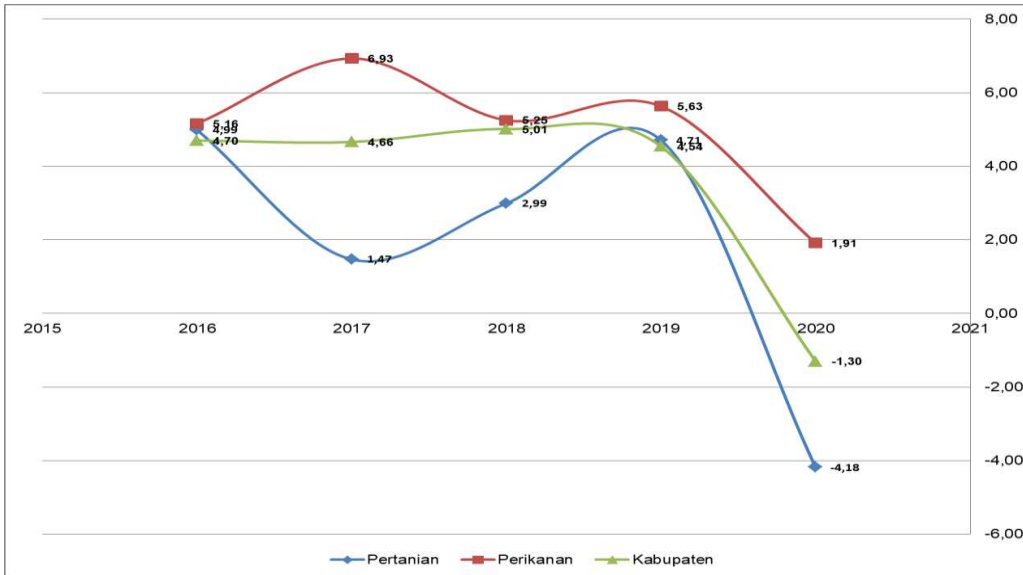
1) Pertumbuhan Sektor Perikanan

Pertumbuhan Produksi Perikanan yang terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah keseluruhan hasil budidaya selama satu tahun yang dilakukan pada wadah budidaya yang terdiri dari kolam, karamba, karamba jaring apung, dan wadah budidaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan perikanan yang berlaku. Sedangkan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah keseluruhan hasil penangkapan selama satu tahun yang dilakukan oleh nelayan perairan umum dan laut dengan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman perikanan, dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB Sub sektor perikanan dari tahun ke tahun begitu

fluktuatif. Pada tahun 2016, pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan sebesar 5,16%, pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 6,93%. Tahun 2018 pertumbuhan sub sektor perikanan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 7,92% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 5,31%. Akan tetapi, pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan hanya sebesar 1,91 %. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar sendiri sebesar -1.30%, Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan masih berada di atas. Dengan ini diketahui bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Banjar menjadi penyumbang positif untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan tetap berkontribusi positif kedepannya seperti pada tahun-tahun sebelumnya meskipun terjadi banjir di Kabupaten Banjar pada awal 2021. Lebih jelas, pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 2. 143. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHK) Di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

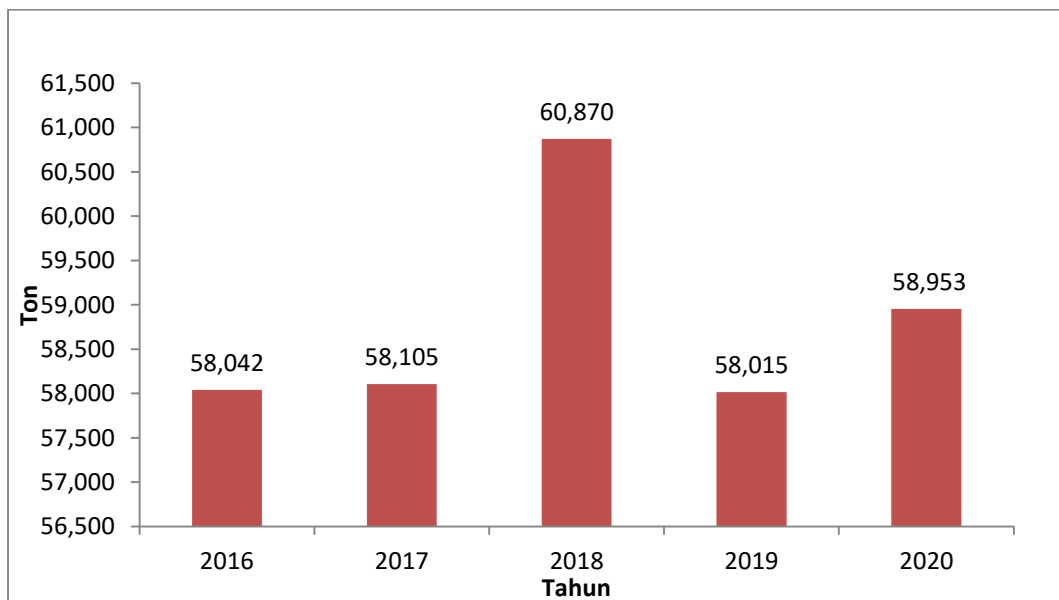


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021, diolah kembali

2) Produksi Perikanan

Produksi perikanan disini terdiri dari produksi perikanan budidaya. Dimana budidaya ikan semakin gencar dilakukan para pembudidaya ikan. Karena kebutuhan akan konsumsi ikan semakin meningkat setiap tahun. Bahkan konsumsi ikan di dunia per kapita bisa mencapai 19,6 kg di tahun 2021. Produksi perikanan budidaya adalah jumlah keseluruhan hasil budidaya selama satu tahun yang dilakukan pada wadah budidaya yang terdiri dari kolam, karamba, karamba jaring apung, dan wadah budidaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan perikanan yang berlaku. Jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 144. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat peningkatan hasil produksi perikanan budidaya dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 938 Ton. Peningkatan produksi perikanan dapat tercapai dengan keadaan dimana adanya faktor budidaya perikanan yang berbasis pemberdayaan dan kemandirian usaha budidaya ikan serta didukung dengan penerapan teknologi perikanan budidaya yang tidak mengadalkan keadaan alam dan kualitas air. Dan peningkatan pencegahan penyakit yang disebabkan bakteri, jamur dan parasite.

3) Konsumsi Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan beberapa diantaranya mengkampanyekan Gerakan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan mendorong upaya penangkapan ikan dan budidaya. Gemarikan ini juga dilaksanakan oleh Kabupaten Banjar sejak tahun 2019 s/d sekarang. Beberapa kegiatan Gemarikan diantaranya pameran produk perikanan di Kabupaten Banjar, lomba masak serba ikan, kampanye terbuka dengan dilakukannya talk show di radio serta stasion Televisi local di Kalimantan Selatan.

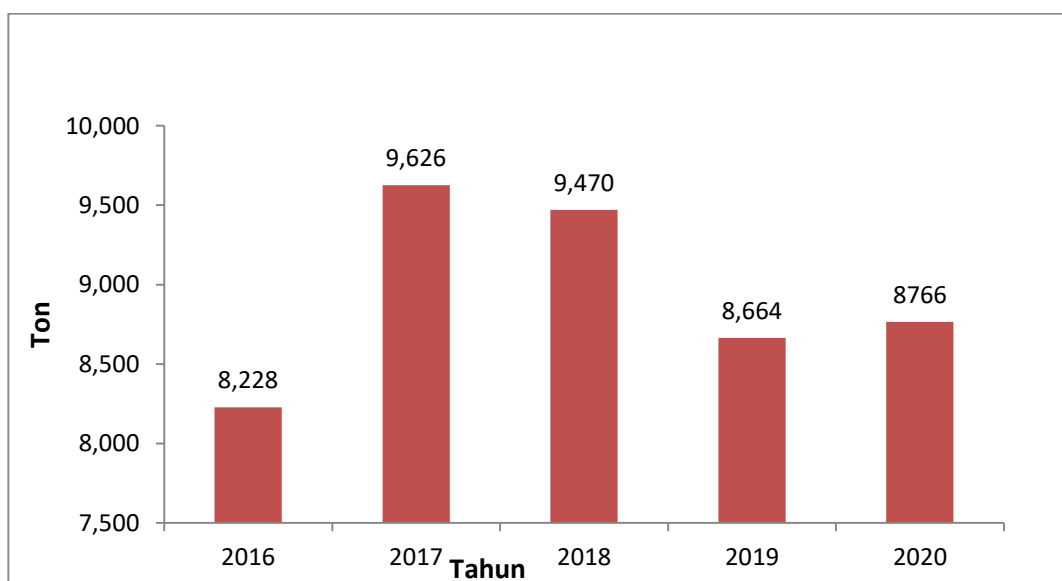
Pada periode 2020-2024, KKP Menargetkan peningkatan angka konsumsi ikan nasional dari 56,39 Kg/Kapita/Tahun pada 2020 menjadi 62,50 Kg/Kapita/Tahun pada 2024. Data konsumsi ikan nasional yang dihitung KKP merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama satu tahun yang dikonversi setara ikan utuh segar. Peningkatan angka konsumsi ikan nasional ini menggambarkan masyarakat Indonesia mulai terbiasa makan ikan dan diharapkan menjadi transformasi budaya pola makan di keluarga

4) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok nelayan disini adalah memperhitungkan hasil produksi perikanan tangkap oleh kelompok nelayan. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Sedangkan Produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah keseluruhan hasil penangkapan selama satu tahun yang dilakukan oleh nelayan perairan umum dan laut dengan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sarana produksi Salah satu permasalahan perikanan tangkap adalah kerusakan lingkungan dan menurunnya stok ikan yang diakibatkan oleh penggunaan sarana produksi yang dilarang seperti bahan peledak, bahan kimia beracun, hilangnya alat tangkap pada saat operasi, dan penggunaan alat tangkap tidak selektif. Peningkatan produksi perikanan tangkap dapat tercapai dengan keadaan dimana adanya faktor perikanan tangkap berbasis pemberdayaan dan kemandirian usaha nelayan, di dukung dengan peningkatan kelestarian sumber daya ikan dan keamanan/ ketahanan pangan melalui pengawasan terhadap sumber daya perikanan dan kelautan. Jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 145. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber :

Dinas Perikanan Kabupaten Banjar

2.3.4 Urusan Penunjang

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Indikator untuk mengukur perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2020 telah memiliki :

1. Dokumen RPJPD Periode 2005 -2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.
2. Dokumen RPJMD periode 2016 -2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021.
3. a. Dokumen RKPD 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020.
b. Dokumen RKPD 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021.
4. Dokumen RTRW Periode 2013 -2032 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032.

2.3.4.2. Keuangan

Beberapa indikator untuk menggambarkan penunjang urusan keuangan, antara lain adalah :

1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut dapat dicapai karena Kabupaten Banjar dinilai berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, memenuhi kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, memiliki kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektif dalam sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Opini WTP tersebut telah sesuai dengan target pada tahun 2020. Opini BPK WTP ini merupakan pencapaian kedelapan kalinya untuk Kabupaten Banjar, sejak tahun 2013. Ada beberapa faktor pendorong keberhasilan dalam pencapaian Opini BPK WTP untuk Kabupaten Banjar ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Banjar telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Manajemen Aset yang terintegrasi seluruh SKPD sebagai Pengelolaan Data yang akurat efektif dan dapat dipercaya untuk mendukung Laporan Keuangan.
- 2) Melakukan monitoring dan memperkuat fungsi pejabat penatausahaan keuangan SKPD dalam mengawal pelaksanaan kegiatan SKPD.
- 3) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta sosialisasi untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.

2) Persentase Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)

Salah satu instrumen untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah melihat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai rumah tangganya. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya. DOFD menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi DOFD maka semakin tinggi kemandirian daerah. Sebaliknya, semakin rendah DOFD, maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut.

Tabel 2. 72. Persentase Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020 (%)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	DOFD
2016	189.854.372.832	1.711.541.447.620	11,09 %
2017	179.714.918.680	1.629.599.468.618	11,03 %
2018	189.478.934.879	1.754.215.067.741	10,80 %
2019	223.076.411.141	1.901.737.233.534	11,73%
2020	206.237.506.290	1.755.278.507.362	11,75%
Rata-rata			11,28%

Sumber : Bapenda Kabupaten Banjar, data diolah kembali

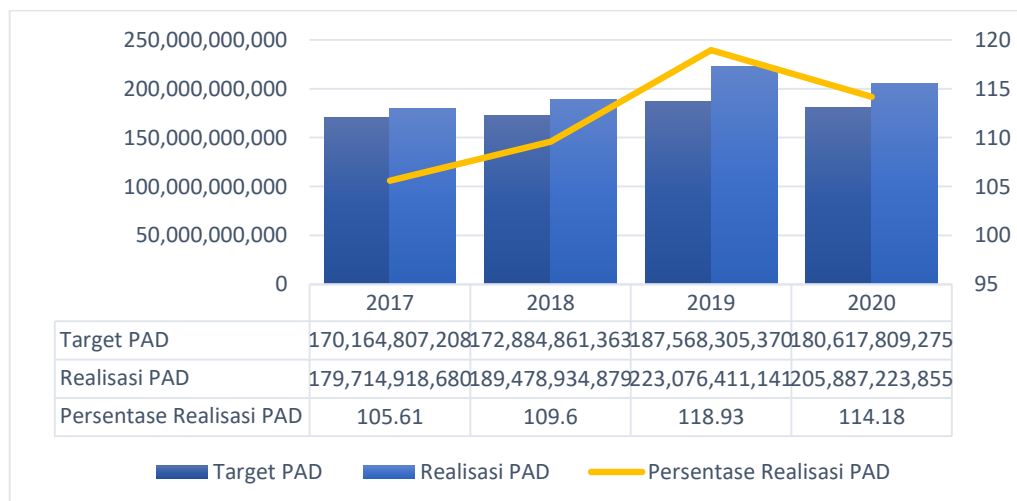
Dari tahun 2016 hingga 2020 besaran nilai DOFD Kabupaten Banjar rata-rata berada di kisaran besaran 11 % .Sementara nilai tertinggi DOFD dalam periode 2016-2020 berada pada tahun 2020, yaitu sebesar 11,75 %. Dilihat dari tingkat rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada angka 11, 28 %, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Banjar masih dalam kategori kurang baik karena masih berada di bawah angka 20 %.

3) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah sebesar Rp. 205.887.223.855,00 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 180.617.809.275,00 atau dengan capaian 113,99% . Dibandingkan dengan target pendapatan akhir periode RPJMD sebesar Rp. 192.000.000.000,00 maka capaian pada tahun 2020 ini telah melampaui target dengan capaian 107,23 %.

Pada tahun 2017 PAD dapat direalisasikan sebesar Rp. 179.714.918.680,00 Milyar atau 105,61 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 170.164.807.208,00 . Kemudian pada tahun 2018 PAD dapat ditingkatkan menjadi Rp. 189.478.934.879,00 dari target Rp. 172.884.861.363,00 Milyar atau meningkat 109,60% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan PAD sebesar Rp. 33.597.476.292,00 Milyar menjadi Rp. 223,076.411.141,00 Milyar atau meningkat sebesar 118,93 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 187.568.305.370,00 Milyar. Sedangkan untuk tahun 2020 PAD Kabupaten Banjar mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi Rp. 206.237.506.290,00 Milyar, dengan tingkat capaian sebesar 114,18 % dari target yang ditetapkan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 180.617.809.275,00. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Gambar 2. 146. Persentase Capaian Realisasi PAD Terhadap Target PAD Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah Kembali

4) Dana Perimbangan

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah masih menjadi komponen utama. Selama 5 (lima) tahun 2016 sampai dengan 2020, rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah berada di angka 67,74 %. Dilihat dari pertumbuhannya setiap tahun kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah

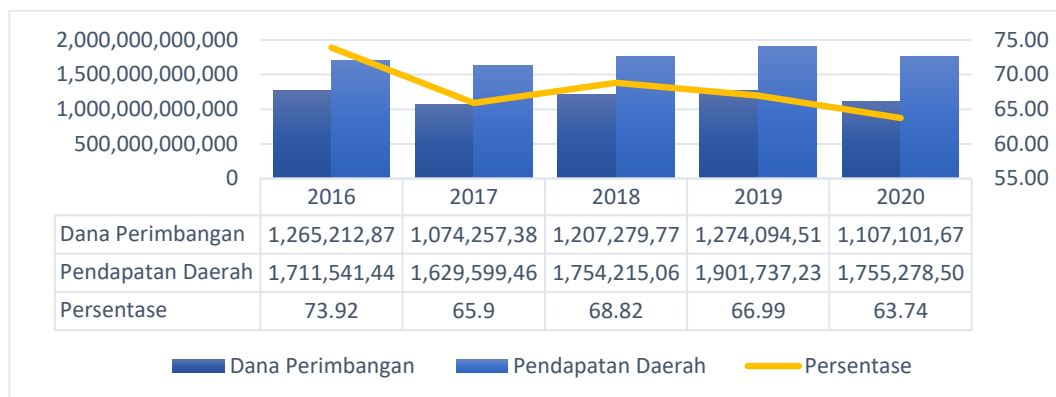
cenderung mengalami penurunan, dan penurunan tersebut tentu berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Adapun kontribusi komponen dana perimbangan terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2. 73. Persentase Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020 (%).

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	%
2016	1.265.212.875.472	1.711.541.447.620	73,92%
2017	1.074.257.384.910	1.629.599.468.618	65,90%
2018	1.207.279.772.566	1.754.215.067.741	68,82%
2019	1.274.094.517.588	1.901.737.233.534	66,99%
2020	1.107.101.678.205	1.755.278.507.362	63,07%
Rata-rata			67,74%

Sumber : Bapenda Kabupaten Banjar, data diolah kembali

Gambar 2. 147. Persentase Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



Sumber : Bapenda Kabupaten Banjar, data diolah kembali

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar terhadap anggaran dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena komponen data perimbangan ini tergantung dari kondisi APBN, apabila kondisi APBN tidak baik maka keadaan keuangan daerah akan ikut terpengaruh.

5) Komponen Lain Lain Pendapatan Daerah

Dari tahun 2016 hingga 2020 rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar 20,97%. Dilihat dari tren peningkatan per tahun, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan, sementara pendapatan daerah mengalami penurunan. Berikut ini tabel dan grafik kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2. 74. Persentase Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020 (%)

Tahun	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Pendapatan Daerah	%
2016	256.474.199.316	1.711.541.447.620	14,98 %
2017	375.627.165.028	1.629.599.468.618	23,05 %
2018	357.456.360.296	1.754.215.067.741	20,37%
2019	404.566.304.805	1.901.737.233.534	21,27%
2020	441.939.322.867	1.755.278.507.362	25,17%
Rata-rata			20,97%

Sumber : Bapenda Kabupaten Banjar, data diolah kembali

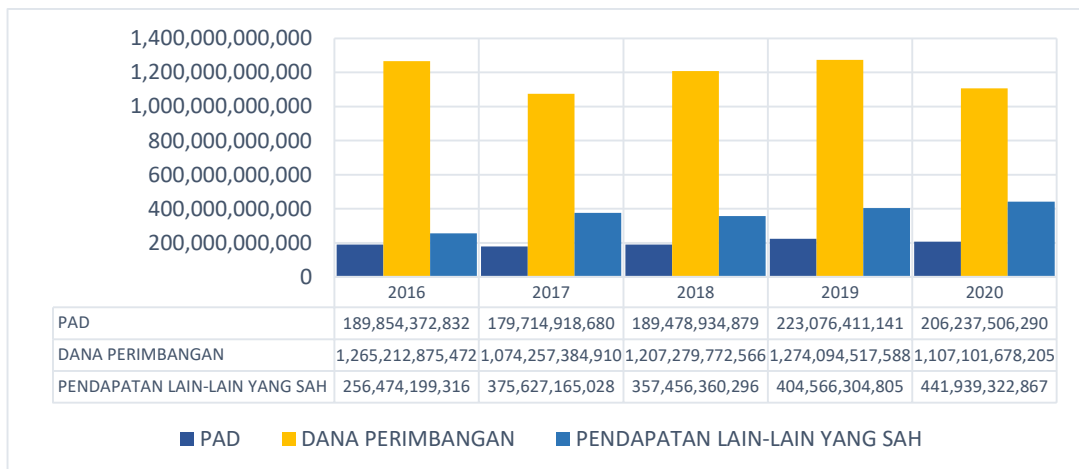
Gambar 2. 148. Persentase Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 -2020



Sumber : Bapenda Kabupaten Banjar, data diolah kembali

Secara keseluruhan berikut adalah grafik kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Gambar 2. 149. Kontribusi Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

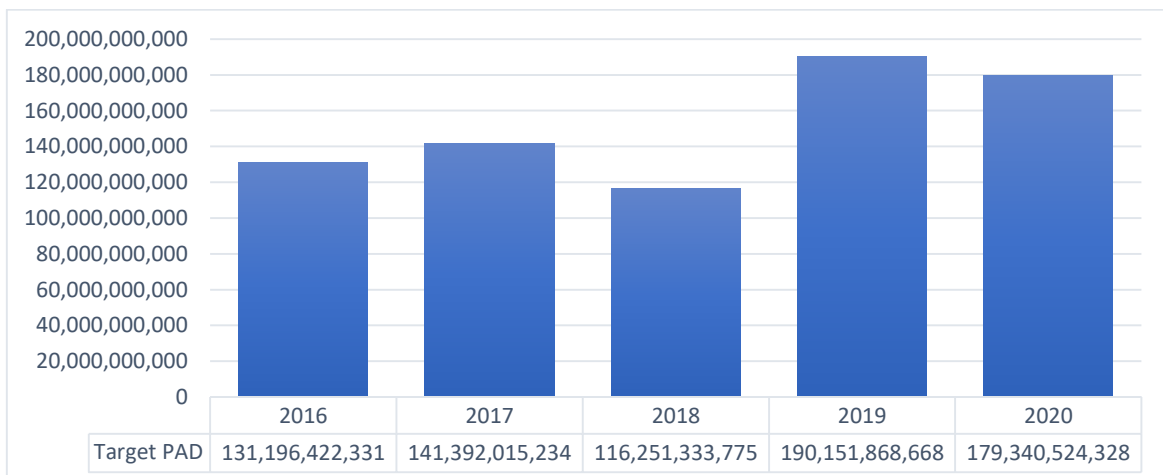


Sumber: Bapenda Kabupaten Banjar, data diolah kembali

6) Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Perkembangan SiLPA di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 150. Gambar Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020



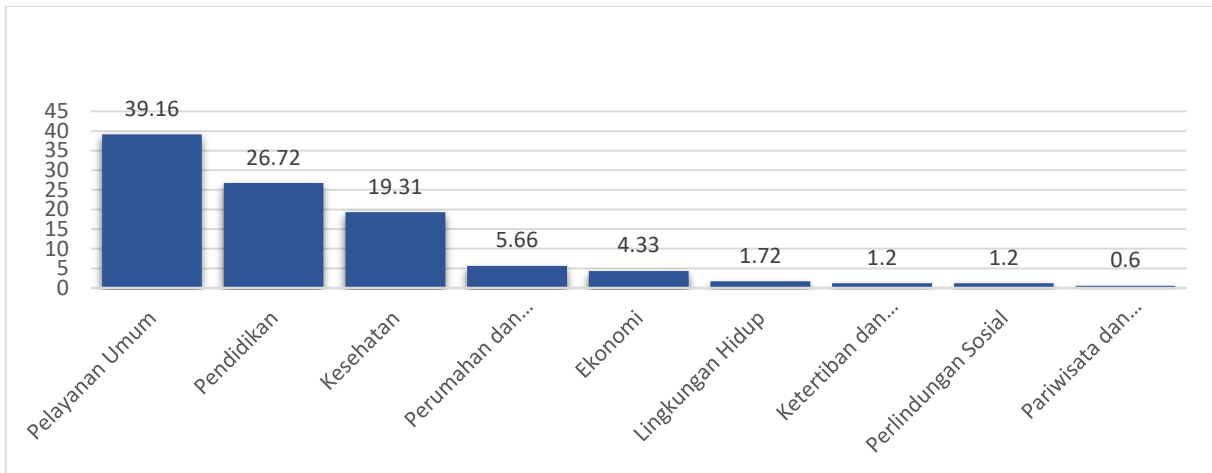
Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 dan KDA Kab. Banjar 2018,2019, BPS Kab. Banjar

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan SiLPA dalam kurun waktu 5 tahun (2016 – 2017) mengalami fluktuasi.

7) Persentase belanja Menurut Fungsi

Berikut adalah diagram persentase belanja menurut fungsi Kabupaten Banjar untuk tahun 2020

Gambar 2. 151. Persentase Belanja Menurut Fungsi Tahun 2020



Sumber : BPKAD Kabupaten Banjar

Dari gambar di atas, pada tahun 2020 dapat dilihat persentase belanja menurut fungsi yang mendapat porsi terbesar adalah belanja pelayanan umum sebesar 39,16%, kedua belanja pendidikan sebesar 26,72 % dan yang ketiga belanja kesehatan sebesar 19,31%. Belanja perumahan dan fasum sebesar 5,66% , belanja ekonomi sebesar 4,33%, belanja lingkungan hidup sebesar 1, 72 %, belanja ketenteraman dan ketertiban 1,2 %, belanja perlindungan sosial 1,2% dan belanja pariwisata dan budaya sebesar 0,6 %. Persentase belanja menurut fungsi yang terbesar adalah belanja pelayanan umum dan yang paling kecil adalah belanja pariwisata dan budaya.

8) Persentase belanja Pendidikan (20%)

Selama rentang 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, persentase belanja pendidikan sudah memenuhi bahkan melebihi dari yang diamanatkan Undang-undang sebesar 20%. Data belanja pendidikan untuk kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2. 152 Perkembangan Persentase Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2016-2019



Sumber : BPKAD Kabupaten Banjar

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat bahwa belanja Pendidikan mulai dari tahun 2017 mulai mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020

9) Persentase belanja Kesehatan (10%)

Selama rentang 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, persentase belanja kesehatan sudah memenuhi bahkan melebihi dari yang diamanatkan Undang-undang sebesar

10%. Data belanja kesehatan untuk kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2. 153. Perkembangan Persentase Belanja Fungsi Kesehatan Tahun 2016- 2020



Sumber : BPKAD Kabupaten Banjar

Perkembangan persentase belanja kesehatan selama rentang waktu 2016-2018 selalu mengalami kenaikan, puncaknya tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 18,43 %. Namun kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,13 % menjadi 17,3%, kemudian di tahun 2020 kembali naik ke angka 17,16 %.

2.3.4.3. Kepegawaian

Kinerja urusan kepegawaian diukur melalui tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN

Sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan handal merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan handal dengan meningkatkan manajemen sumber daya aparatur. Pada tahun 2020 pencapaian sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan handal menunjukkan penurunan dari 56,31 % di tahun 2019 menjadi sebesar 52,66% di tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 kategori tingkat profesional ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut :

- a. 91-100 = Sangat Tinggi
- b. 81-90 = Tinggi
- c. 71-80 = sedang
- d. 61-70 = Rendah
- e. > 60 = Sangat Rendah

Maka berdasarkan kategori tersebut maka Indeks Profesionalisme ASN di Kabupaten Banjar masih masuk dalam kategori Sangat Rendah.

2.3.4.4. Penelitian Dan Pengembangan

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan penunjang urusan penelitian dan pengembangan antara lain adalah sebagai berikut :

1) Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Kegiatan inovasi melalui Laboratorium Inovasi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Lembaga Administrasi Negara dimulai pada tahun 2017. Dari seluruh perangkat daerah/unit kerja yang ada di Kabupaten Banjar yang terdiri dari 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, ditambah dengan seluruh UPT Puskesmas dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar serta Unit Kerja /Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, seluruhnya difasilitasi dalam hal penerapan inovasi daerah, dengan persentase 100%.

2) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Jumlah inovasi daerah yang masuk ke laboratorium inovasi sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 ada sebanyak 153 inovasi. Dari 153 inovasi yang masuk tersebut, berdasarkan data yang ada pada Aplikasi Intan Bakilau sampai dengan 2019 ada 105 inovasi yang sudah berjalan dan diterapkan atau sebesar 68,62%. Sedangkan untuk tahun 2020 ada 85 inovasi

yang masuk ke laboratorium yang terdiri dari 82 usulan baru dan 3 inovasi pembaharuan 3 inovasi. Dan yang telah berjalan dan diterapkan ada sebanyak 51 inovasi atau sebesar 60 %.

2.3.4.5. Pengawasan

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan penunjang urusan pengawasan antara lain adalah sebagai berikut :

1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat selaku APIP berwenang untuk melakukan penanganan atas pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditugaskan oleh Inspektur. Pada tahun 2018 persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100% dari total 20 pengaduan yang diterima. Tahun 2019 persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100% dari total 30 pengaduan yang diterima. Sedangkan untuk tahun 2020 persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 80 % dari total 14 pengaduan yang diterima.

Tabel 2. 75. Data Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Tahun 2018 s/d 2020

No.	Tahun	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti
1	2018	20 pengaduan	20 pengaduan	100%
2	2019	30 pengaduan	30 pengaduan	100%
3	2020	14 pengaduan	14 pengaduan	100%

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Banjar , data di olah kembali

2) Persentase Pelanggaran Pegawai

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur Urusan Pengawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah Persentase Pelanggaran Pegawai, dengan Formulasi Jumlah ASN Yang Mendapat Hukuman Disiplin dibagi Jumlah Seluruh ASN dikali 100%.

Berikut adalah tabel data persentase pelanggaran ASN untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 76. Data Jumlah ASN Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Dari Tahun 2017 - 2020

No.	Tahun	Jumlah ASN	Jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	Persentase ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin
1	2017	6900	6 orang	0,086 %
2	2018	6765	9 orang	0,133 %
3	2019	6664	7 orang	0,105 %
4	2020	6288	8 orang	0,127 %

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Banjar, data diolah kembali

Dari data di atas dapat dilihat bahwa persentase penjatuhan hukuman disiplin relatif kecil dari kurun waktu 4 tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Hal menunjukkan bahwa tingkat disiplin ASN di Kabupaten Banjar sudah cukup bagus.

3) Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern adalah satuan ukuran yang dibentuk berdasarkan unsur Kinerja Utama; Kepatuhan; dan Kualitas Pelayanan Publik melalui penilaian mandiri dan penjaminan mutu yang menghasilkan baseline dan peta kinerja Perangkat Daerah yang terbentuk dari skala 1 hingga 100. Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern semakin tinggi, memberikan gambaran kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik.

Sumber Data berasal dari Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat. IKKI ini dikuatkan dengan Regulasi Peraturan Bupati. Nilai IKKI untuk tahun 2020 masih NA karena pengukuran indeks baru dilaksanakan pada tahun 2021. Rentang Penilaian IKKI adalah :

Kategori	Nilai	Interpretasi
A	>90 – 100	Memuaskan
BB	>80 – 90	Sangat Baik
B	>70 – 80	Baik
CC	>60 – 70	Cukup
C	< 60	Kurang

4) Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik

Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik diperoleh berdasarkan survei pengguna dengan responden seluruh objek pengawasan. Survei dilakukan terhadap aspek keahlian (kompetensi), aspek kinerja dan aspek perilaku. Skala yang digunakan dari Skala 1 hingga skala 5

Rumus :

Rumus Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik :

$$\frac{\text{Persepsi Keahlian} + \text{Persepsi Kinerja} + \text{Persepsi Perilaku}}{3}$$

Rentang penilaian Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik adalah:

Kategori	Kriteria	Kategori	Kriteria
1	Tidak Baik	4	Baik
2	Kurang Baik	5	Sangat Baik
3	Cukup		

Sumber : Data Inspektorat

Untuk hasil survey yang dilakukan pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Banjar memperoleh nilai persepsi **4,11** atau masuk dalam kriteria **Baik**.

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

1) Persentase Produk Hukum yang Dibahas dan Mendapat Persetujuan Dewan

Persentase produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan merupakan jumlah produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Banjar. Berdasarkan sumber data dari Sekretariat Dewan Kabupaten Banjar pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing ada 15 Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dan mendapat persetujuan Dewan. Selanjutnya pada tahun 2018 ada 13 Perda yang dibahas dan mendapat persetujuan dewan. Pada tahun 2019 terdapat 5 Perda dan selanjutnya tahun 2020 Perda yang dibahas dan mendapat persetujuan adalah sebanyak 8 Perda.

2) Rapat-rapat Paripurna DPRD

Data terkait pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna DPRD sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, berdasarkan sumber data dari Sekretariat Dewan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut : Pada tahun 2016 terlaksana sebanyak 29 kali rapat paripurna. Pada tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 27 kali rapat paripurna, 2018 dilaksanakan sebanyak 20 kali. Selanjutnya untuk tahun 2019 dan 2020 masing-masing dilaksanakan 29 kali dan 11 kali rapat paripurna.

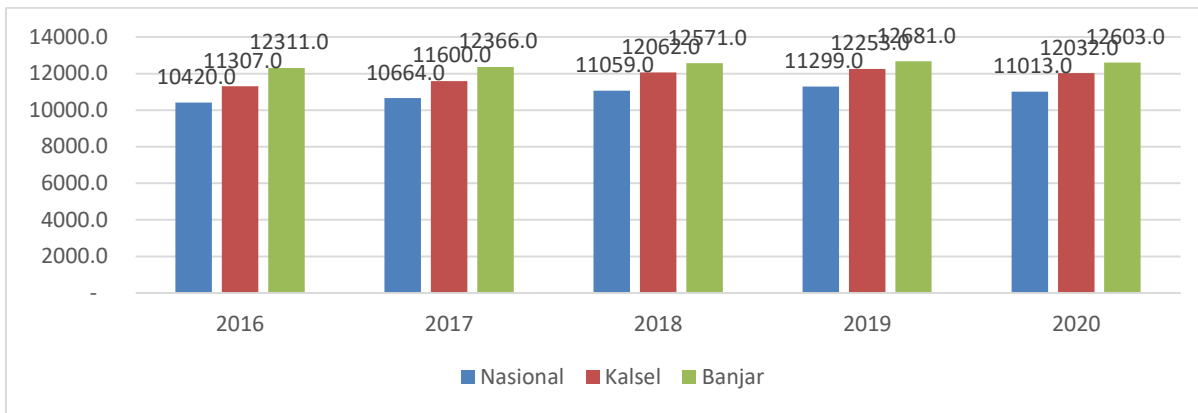
2. 4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun tetap mengalami kenaikan. Tahun 2016 pengeluaran riil perkapita sebesar 12.311 ribu rupiah per tahun terus naik hingga menjadi 12.603 ribu rupiah di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan para tahun 2020 menjadi sebesar 12.603 ribu rupiah. Terjadinya penurunan pengeluaran perkapita merupakan dampak dari pandemi covid - 19. Bila dibandingkan dengan angka provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 hingga 2020, pengeluaran riil perkapita Kabupaten Banjar selalu lebih tinggi, lebih rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut .

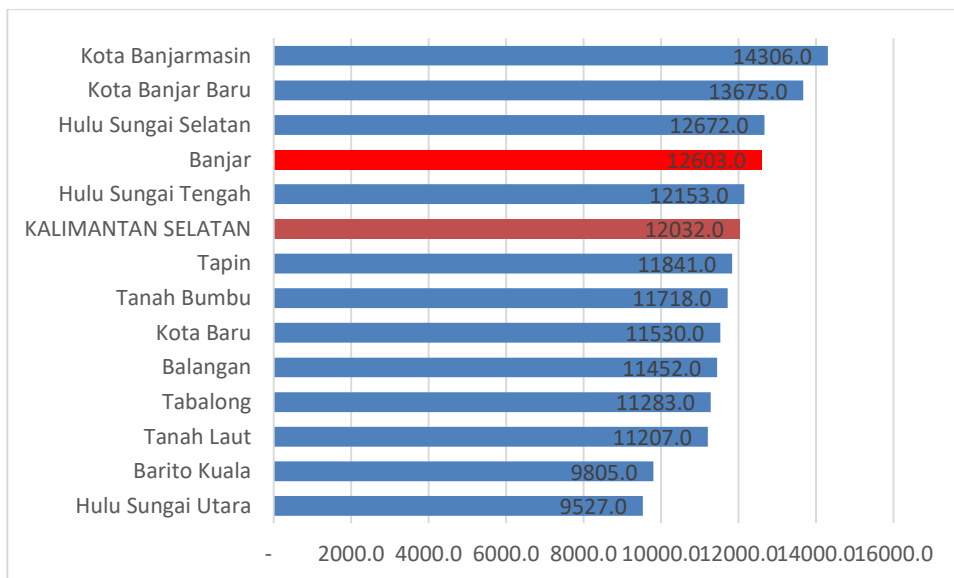
Gambar 2. 154. Pengeluaran Riil Perkapita Per tahun Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan, 2016 - 2020 (000 rupiah)



Sumber : BPS Prov. Kalsel (data diolah kembali)

Indikator pengeluaran per kapita terjadi variasi antar Kab/Kota bahkan dengan rentang yang cukup lebar dari Rp. 9,527 juta hingga Rp. 14,306 juta per kapita selama tahun 2020. Pengeluaran per kapita disesuaikan terendah tercatat di Hulu Sungai Utara, sementara tertinggi tercatat di Kota Banjarmasin. Kabupaten Banjar diatas provinsi Kalimantan selatan, berada pada posisi ke empat. Semakin besar pengeluaran per kapita disesuaikan semakin menunjukkan tingkat tinggi kemampuan penduduk dalam melakukan aktivitas konsumsi. Tingginya aktivitas konsumsi salah satu pendorong utamanya adalah pendapatan yang juga tinggi. Oleh karena itu, pengeluaran per kapita disesuaikan dapat menjadi proksi untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduknya. Dengan demikian, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru relatif lebih unggul pada aspek ekonominya dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.

Gambar 2. 155. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2020(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



Sumber : BPS Prov. Kalsel (data diolah kembali)

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan indikator Proxy kesejahteraan petani, merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian, dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan (Ib) juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

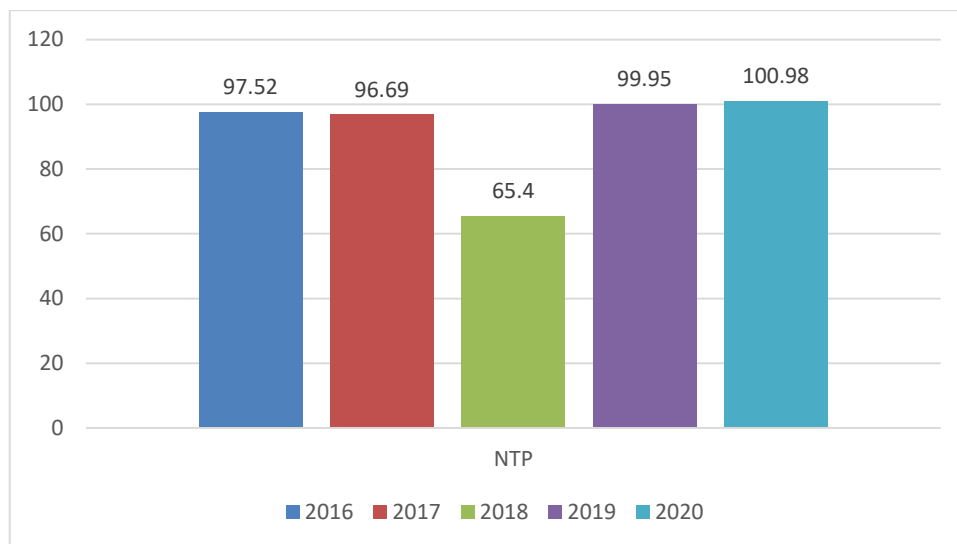
NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Cakupan Komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija. Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan. Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah. Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll). Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP). Sampai dengan tahun 2020, BPS baru bisa menyajikan indikator NTP sampai dengan tingkat provinsi, dengan asumsi kondisi NTP provinsi akan mewakili kondisi NTP di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Gambar 2. 156. NTP Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : Nilai Tukar Petani Prov. Kalsel, BPS – 2016-2020

Dilihat dari data Nilai Tukar Petani, diketahui bahwa rata-rata Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kalsel pada tahun 2020 adalah sebesar 100,98 persen. Hal ini berarti pada tahun 2020, rata-rata laju kenaikan harga hasil produksi pertanian para petani lebih cepat dibandingkan rata-rata laju barang-barang konsumsi dan rata-rata laju kenaikan harga barang-barang yang digunakan sebagai biaya produksi. Perkembangan NTP dari bulan Januari hingga Desember berfluktuasi dan cenderung meningkat. Dibandingkan dengan tahun 2019, maka terjadi kenaikan Nilai Tukar Petani sebesar 0,98 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat tercapai dengan keadaan dimana adanya faktor penunjang yaitu dengan meningkatkan hasil produksi sektor pertanian dalam arti luas . yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan dan perikanan. Dan dari hasil produksi tersebut nantinya untuk menjaga stabilitas harga dan daya saing maka perlu dilakukan sektor pertanian sub. sektor pangan dan hortikultura serta sektor perkebunan dengan memfasilitasi usaha pertanian untuk mendapatkan rekomendasi izin usaha. Sektor peternakan dengan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Sektor perikanan dengan memperhatikan Angka Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ tahun) dan Pertumbuhan/ Kenaikan Ekspor Produksi Hasil Perikanan (ton).

Dalam upaya menciptakan dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan beberapa kebijakan diantaranya berupaya melakukan hal sebagai berikut :

1. Sub. Sektor pangan dan hortikultura
 - Meningkatkan Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha.
2. Sektor Perkebunan
 - Meningkatkan jumlah unit usaha bina mutu yang menggunakan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi

- Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyampaikan LKUP (Laporan kegiatan usaha perkebunan) dan mendapatkan pembinaan.
3. Sektor Peternakan
 - Meningkatnya jumlah produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat , Utuh dan Halal)
 4. Sektor Perikanan
 - Meningkatnya jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat (Angka Konsumsi Ikan (AKI) - (Kg/ Kapita/ Tahun)
 - Meningkatnya jumlah pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Kelompok/ Orang) yang terfasilitasi bina mutu dan akses pasar.

2.4.1.3. Konsumsi Non Pangan

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran di Banjar pada tahun 2020 sebesar Rp1.144.798,- yang terdiri dari Rp 638.656,- konsumsi makanan dan Rp 516.142,- untuk konsumsi bukan makanan. Jika dilihat dari struktur pengeluaran, maka pada pengeluaran kelompok makanan didominasi oleh pengeluaran kelompok makanan dan minuman jadi. Sementara itu pada pengeluaran kelompok bukan makanan di dominasi oleh pengeluaran kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air. Dalam pemenuhan kedua kebutuhan pokok rumah tangga ini dapat dilihat dari skala prioritas. Dalam kondisi pendapatan rumah tangga yang relatif kecil/terbatas, maka pemenuhan kebutuhan makanan lebih diprioritaskan dibanding pengeluaran bukan makanan. Kondisi ini akan bergeser apabila pendapatan rumah tangga semakin tinggi, karena kelebihan pendapatan dari konsumsi bahan makanan akan dialokasikan pada kebutuhan non makanan. Adanya pergeseran pengeluaran rumah tangga dari makanan ke non makanan merupakan petunjuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Secara persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk makanan pada tahun 2020 adalah lebih besar dibandingkan non makanan, yang mana persentase pengeluaran untuk makanan adalah 54,91 persen dan untuk kebutuhan non makanan sebesar 45,09 persen.

Dengan demikian pada umumnya pengeluaran masyarakat di Kabupaten Banjar masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan untuk makanan sehingga dapat dikatakan belum mengindikasikan adanya kelebihan pendapatan yang dapat ditabung untuk memenuhi kebutuhan selain makanan seperti peningkatan kualitas rumah dan hal lainnya.

2.4.1.4. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB

Selama periode 2016 - 2020, posisi rasio perdagangan barang dan jasa Kabupaten Banjar dengan luar negeri dan antar provinsi (total keduanya), selalu menunjukkan nilai di bawah 1. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Banjar selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Kabupaten Banjar yang terjadi antara tahun 2016 sampai dengan 2020 tercatat terus mengalami peningkatan. sebesar 1.009.712 juta rupiah (2020), defisit terus melebar hingga pada tahun 2020 menjadi 1.346.505 juta rupiah, sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2016-2020 berkisar pada nilai 0,8

Tabel 2. 77 Rasio Ekspor - Impor Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Ekspor	Impor	Selisih	Rasio
2016	7,389,807	6,380,095	- 1,009,712	0.86
2017	7,917,241	6,898,103	- 1,019,138	0.87
2018	8,348,893	7,102,739	- 1,246,154	0.85
2019	8,462,746	7,264,699	- 1,198,047	0.86
2020	8,116,825	6,770,320	- 1,346,505	0.83

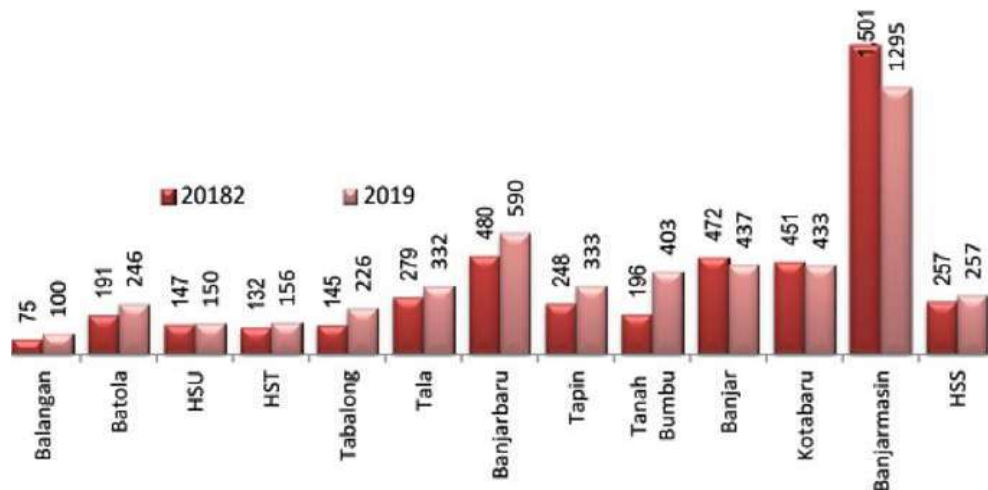
Sumber : PDRB menurut Pengeluaran, 20121

2.4.1.5. Angka Kriminalitas

Angka Kriminal merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu, semakin tinggi Angka Kriminalitas maka tingkat kerawanan suatu daerah semakin tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Capaian Indikator Angka Kriminalitas pada tahun 2020 adalah 82,17 % didapat dari realisasi sebesar 11,08 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 9,40. Capaian sebesar 82,17 % ini masuk dalam kategori cukup berhasil walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2020 menyumbang sebesar 68,75 % dari target Angka Kriminalitas yang ditetapkan sebesar 8,44 pada tahun 2021. selanjutnya bila dibandingkan dengan realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2019 sebesar 11,74 maka realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2020 ada penurunan sebesar 0,66 poin. Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan dan dengan Kabupaten/kota tetangga dapat dilihat pada tabel berikut

Gambar 2. 157 Angka Kriminalitas Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019



Sumber : Polres Banjar

Gambar diatas Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota Lain Tahun 2019. Dilihat pada gambar di atas Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan Kabupaten/kota tetangganya masih lebih rendah, kondisi ini patut di syukuri dan dipertahankan serta harus tetap selalu berusaha untuk diturunkan.

Akibat pandemi covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Alasan perusahaan melakukan pengurangan karyawan dan berakhir untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang terjadi di Indonesia karena beberapa perusahaan terkena dampak yang nyata serta terkena imbasnya oleh adanya pandemi ini. Beberapa perusahaan sedang berada di masa kondisi ekonomi yang krisis dan tidak stabil sehingga berdampak untuk para perusahaan dan penyelesaian akhir dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara terpaksa terhadap karyawan. Dampak para korban PHK menjadikan terhambatnya untuk melakukan Hubungan sosial. PHK dapat mempengaruhi beberapa dampak bagi para tenaga kerja yang terkena PHK seperti dampak ekonomi, dampak sosial bagi seseorang yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga berdampak bagi keluarga yang sudah berumah tangga yang menyebabkan hal ini semakin rumit dan kompleks karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Angka kriminalitas di tahun 2020 dominan diakibatkan dampak dari covid 19 sehingga berdampak ke seluruh lapisan masyarakat, berimbas pada kondisi ekonomi yang sulit dan tingkat PHK tinggi dan pengangguran meningkat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa pandemi dengan cara yang melanggar hukum yang berakibat kriminal.

2.4.1.6. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) kemudian jumlah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur maka Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Banjar tahun 20120 mencapai 30,73 persen. Rasio ini menyatakan jumlah penduduk non produktif yang menjadi "beban" atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif. Artinya dari 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Banjar menanggung sekitar 41 penduduk usia non produktif (usia tua dan usia muda).

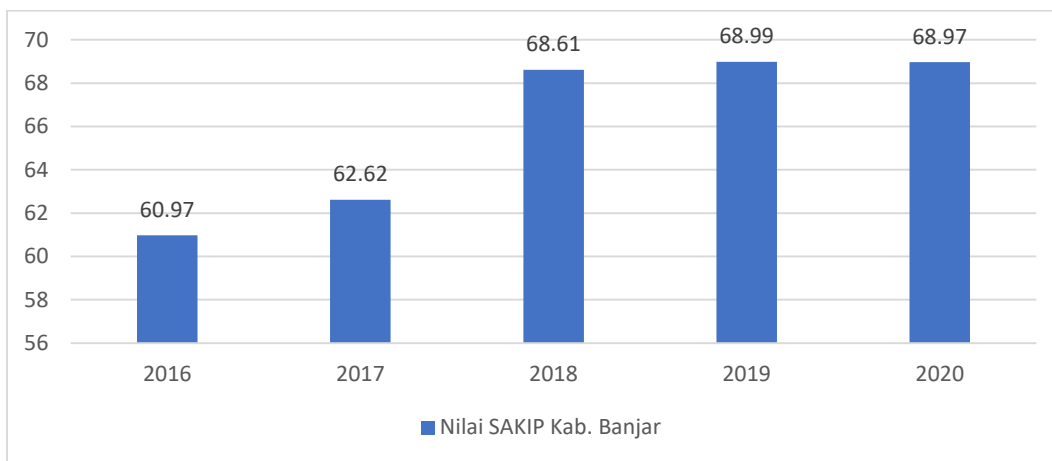
2.4.1.7. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah gambar diagram hasil penilaian SAKIP Kabupaten Banjar selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Gambar 2. 86 Nilai SAKIP Kabupaten Banjar



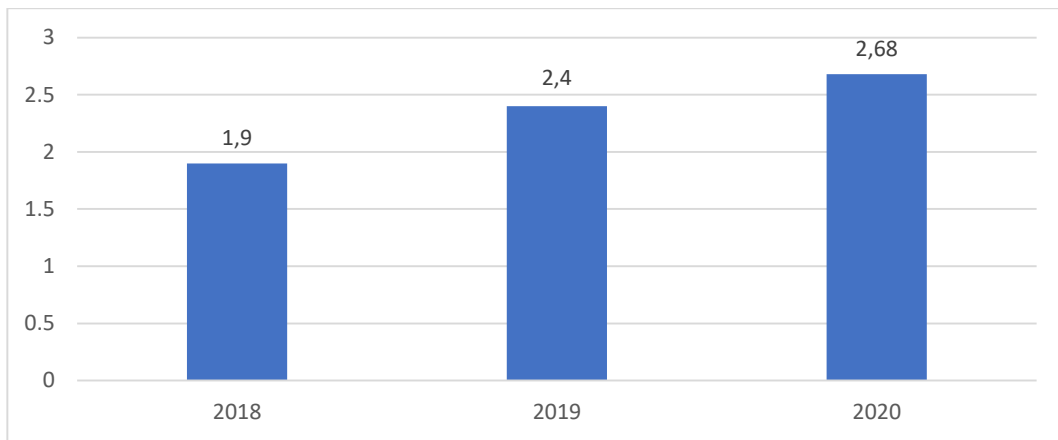
Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banjar tahun 2021

Dari gambar diagram di atas dapat dilihat trend kenaikan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Banjar setiap tahunnya. Untuk nilai SAKIP Kabupaten Banjar pada tahun 2019 berada pada angka 68,70 dan masuk dalam kategori B. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan beberapa poin menjadi 68,97 dan tetap berada di predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan hasil yang baik, namun memerlukan perbaikan lebih lanjut.

2.4.1.8. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan pengukuran Indeks SPBE oleh Kemenpan Tahun 2018 Kabupaten Banjar Mendapatkan Nilai sebesar 1,9 . Tahun 2019, Kabupaten Banjar mendapatkan nilai sebesar 2,4 dan pengukuran Indeks SPBE Tahun 2020, Kabupaten Banjar mendapatkan nilai sebesar 2,68. Terdapat peningkatan pada indeks SPBE Kabupaten Banjar.

Gambar 2. 158. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Sumber : Diskominfo, Statistik dan Persandian Banjar, 2020

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.4.2.1. Perhubungan

Moda angkutan umum merupakan salah satu perlengkapan pergerakan baik orang maupun barang. Kabupaten Banjar dilayani oleh berbagai jenis angkutan umum seperti angkutan kota, angkutan pedesaan, ojek, becak, dan delman. Sedangkan untuk pergerakan regional dari kabupaten ini dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan antar kabupaten berupa bis dan mobil penumpang. Beberapa lintas trayek angkutan umum pada pergerakan regional yang melalui Kabupaten Banjar adalah:

- 1) Martapura – Simp. Tiga L. Anggang
- 2) Martapura – Cempaka
- 3) Martapura – Riam Kanan
- 4) Martapura – Simp. Tiga Mataraman
- 5) Martapura – Sei. Tabuk
- 6) Martapura – Kelampayan
- 7) Martapura – Pengaron
- 8) Martapura – Kahelaan
- 9) Martapura – Dalam Pagar
- 10) Martapura – Tungkap
- 11) Martapura – Pulau Nyiur
- 12) Martapura – Karang Intan
- 13) Martapura – Kalampayan Ilir
- 14) Martapura – Galam Rabah
- 15) Gambut – Aluh-Aluh

1) Rasio Panjang Jalan Per jumlah Angkutan Umum yang Teregistrasi

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banjar adalah sepanjang 1.898,08 Km yang berbanding jumlah angkutan umum yang teregistrasi di Kabupaten Banjar dengan data terakhir pada tahun 2020 sebanyak 195 unit

2) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Data jumlah orang yang terangkut angkutan umum merupakan jumlah penumpang rata-rata dengan jumlah armada yang aktif adalah satu tahun. Data terakhir tahun 2020 didapat dari rata-rata 86 orang penumpang per hari dengan 195 armada yang aktif di Kabupaten Banjar dengan akumulasi tahunan sebanyak kurang lebih 844.245 orang/tahun.

2.4.2.2. Penataan Ruang

Kabupaten Banjar pada tahun 2018, telah melakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 sebagai langkah awal untuk melakukan revisi RTRW. Pada tahun 2019-2020 dilakukan proses revisi RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 oleh Dinas PUPR Kabupaten Banjar

1) Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang Kabupaten Banjar. Berdasarkan kegiatan pemanfaatan penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Banjar, data penyimpangan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2019 adalah seluas 363, 32 Km² atau 7,85%. Sedangkan penggunaan lahan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 4.263, 38 Km² atau 92,15%.

Tabel 2. 78. kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang Kabupaten Banjar

No	Pola Ruang	Eksisting Penggunaan Lahan s/d 2019 (Km ²)	PERDA NO.3 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032	
			Penyimpangan Penggunaan Lahan s/d 2019 (Km ²)	Penggunaan Lahan yang Sesuai s/d 2019 (Km ²)
1	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus	30,33	0,00	30,33
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	4,81	0,08	4,73
3	Kawasan Peruntukan Hortikultura	91,00	0,26	90,74
4	Kawasan Peruntukan Hutan Lindung	429,02	33,83	395,19
5	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	757,99	63,18	694,81
6	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Konversi	18,22	0,16	18,06
7	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas	230,69	18,43	212,26
8	Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan	16,31	0,09	16,22
9	Kawasan Peruntukan Minapolitan	50,91	0,45	50,47
10	Kawasan Peruntukan Perikanan Pesisir	7,13	0,19	6,94
11	Kawasan Peruntukan Perkebunan	1.228,60	134,71	1.093,88
12	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	208,11	100,06	108,05
13	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	210,41	0,10	210,31
14	Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan	158,29	0,35	157,94
15	Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan	173,57	1,18	172,39
16	Kawasan Peruntukan Sempadan Sungai	26,44	3,70	22,74
17	Kawasan Peruntukan Taman Hutan Raya	883,95	6,55	877,40
18	Sungai	100,92	0,00	100,92
Total		4.626,70	363,32	4.263,38
Persentase Kesesuaian Penggunaan Lahan			7,85	92,15

Sumber: Dinas PUPR Kab. Banjar

2) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Banjar merupakan luas kawasan budidaya yang dikurangi luas kawasan lindung seperti yang tercantum di RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032.

Luas kawasan lindung di Kabupaten Banjar terdiri dari Hutan Dengan Tujuan Khusus, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Hutan Lindung, Kawasan Sempadan Sungai, dan Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan total luas ±137.455 Ha.

Adapun Kawasan Budidaya di Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang produktif untuk dikelola pemanfaatan ruangnya. Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hortikultura, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Industri dan Pergudangan, Minapolitan, Perikanan Pesisir, Perkebunan, Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dengan total luas ± 329.395 Ha.

Luas wilayah produktif di Kabupaten Banjar dilihat dari perencanaan tata ruang pada tahun 2020 adalah seluas 316.416 Ha, dengan pemanfaatan luas kawasan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang berakibat berkurangnya luas kawasan produktif ± 1% per tahunnya. Luas ini di luar dari luas kawasan hutan lindung yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Banjar.

2.4.3. Fokus Sumberdaya Manusia

Penduduk kabupaten banjar yang bekerja dilihat dari tingkat pendidikan didominasi dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Perkembangan kelompok pekerja pendidikan SMP dari tahun 2015 – 2020 terus mengalami perbaikan yang menggambarkan pendidikan pekerja makin meningkat. dimana pada tahun 2015 sebesar 75,52 persen menjadi 69,90 persen pada tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 5,62 poin. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 79. Persentase penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2015	2017	2018	2019	2020
SMP Ke Bawah	75,52	75,52	76,21	70,63	69,90
SMA Ke Atas	27,49	24,43	23,79	29,37	30,10
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabuapten Banjar, 2021

Pada tahun 2018, Pencari kerja yang mendaftarkan dirinya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar berjumlah 2.928 orang dan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan melaporkan sangat sedikit yakni sebesar 212 orang. Pada tahun 2019, Pencari kerja yang

mendaftarkan berjumlah 1.792 orang dan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan melaporkan sangat sedikit yakni sebesar 411 orang. Sedangkan pada tahun 2020, Pencari kerja yang mendaftarkan dirinya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar berjumlah 1.108 orang dan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan melaporkan sangat sedikit yakni sebesar 151 orang. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 80. Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan

Tahun	Pencari Kerja	Penempatan
2018	2928	212
2019	1792	411
2020	1108	151

Sumber : BPS Kabuapten Banjar, 2021

2. 5. Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Ringkasan Kinerja Pembangunan Daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 81. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
2.2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,87	66,77	68,32	68,94	69,18	68,84	Melampaui
2.2.1.2	Indeks Pembangunan Gender	92,11	91,85	91,39	90,65	90,50	100	Setara
2.2.1.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)							
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam milyar)	13.340	14.412	15.569	16.635	16.534	-	-
	Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan	4,70	4,66	5,01	4,54	-1,96	5.36	Belum tercapai
2.2.1.4.	PDRB per kapita	23.692	25.215	26.842	28.287	27.742		
2.2.1.5.	Inflasi	3.68	3.82	2.63	4.15	1.67	3.77	Belum tercapai
2.2.1.6.	Indeks Gini	0.31	0.35	0.33	0.33	0.322	0.33	Melampaui
2.2.1.7.	Kondisi Kemiskinan							
	Jumlah Penduduk Miskin	17.360	16.850	15.610	15.910	15.120		
	Persentase Penduduk Miskin	3.1	2.96	2.7	2.72	2.55	2.50	Belum tercapai
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.32	0.31	0.39	0.26	0.26	-	-
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.07	0.05	0.1	0.03	0.04	-	-
	Garis Kemiskinan	360.494	381.862	400.081	429.422	462.375	-	-
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.2.2.1	Pendidikan							
	Angka Melek Huruf	94.7	94.69	96.64	95.84	97.41	95	Melampaui
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7	7.28	7.29	7.34	7.35	7.68	Belum tercapai
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11.41	11.76	11.99	12,28	12,44	11.90	Melampaui
2.2.2.2	Kesehatan							
	Usia Harapan Hidup	66.17	66.38	66.66	67.97	67.21	66.80	Melampaui
	Prevalensi Stunting	26.89	26.10	29.1	26.3	20.18	17.00	Belum tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.2.3	Ketenagakerjaan							
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.53	71.9	71.43	71.91	72.55	-	-
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.44	3.11	2.9	2.89	3.87	2.83	Belum tercapai
2.2.3	Fokus Seni Budaya							
2.2.3.1	Seni Budaya							
	Persentase jumlah grup kesenian aktif per 10000 penduduk	36.43	38.02	39.27	40.33	41.51	-	-
	Jumlah grup kesenian	398	405	415	424	424	-	-
2.2.3.2	Olahraga							
	Persentase fasilitas umum yang dimanfaatkan untuk olahraga	NA	NA	NA	60	60	80	Belum tercapai
	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga	NA	NA	NA	10	15	15	Sesuai
2.3	Aspek Pelayanan Umum							
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar							
2.3.1.1	Pendidikan							
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	65,36	67,8	67,86	65,83	53,95	70	Melampaui
	APS SD/MI	98,75	98,19	98,78	99,10	99,19	-	-
	APS/SMP/MTs	83.36	82.62	83.68	84.69	83.93	-	-
	APK SD/MI	114,22	111,84	112,62	111,04	109,43	101,00	Melampaui
	APK/SMP/MTs	82,53	92,00	82,24	78,93	81,47	92,60	Belum tercapai
	APM SD/MI	98,37%	96,77%	87,83%	98,52%	98,26%	93,00	Melampaui
	APM/SMP/MTs	67,28	80,53%	68,37%	70,28	70,21%	69,00	Melampaui
	Angka Putus Sekolah SD	0,33	0,28	0,17	0,05	0,46	0,24	Belum tercapai
	Angka Putus Sekolah SMP	0,23	0,35	0,36	0,17	1,72	0,30	Belum tercapai
	Angka Kelulusan SD	99,85	99,89	97,72	99,12	99,26	99,92	Belum tercapai
	Angka Kelulusan SMP	99,82	99,79	99,59	88,85	99,77	99,84	Belum tercapai
	Rasio Guru terhadap Murid SD Sederajat	13,9	12,06	12,94	12,63	13,48	-	-
	Rasio Guru terhadap Murid SMP Sederajat	10,84	10,59	11,16	11,22	10,14	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.2	Kesehatan							
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	9,57	7,09	9,98	3,88	6,5	10.70	
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	99,3	90.85	93,3	83,24	71,6		
	Jumlah Posyandu	536	543	552	561	561		
	Jumlah Balita	55.228	56.087	56.907	47.761	41.077		
	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	5,51	10,85	19,13	19.2	18.3		
	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	14,21	14,17	15,34	19.2	18.5		
	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3,72	4,2	6,03	6.3	5.4		
	Rasio Apoteker per 100.000 penduduk	2,84	2,98	4,99	6,5	15,6		
	Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	10,48	11,2	10,86	11,90	13,4		
	Rasio perawat per 100.000 penduduk	109,22	108,47	100,34	100,34	167,4		
	Rasio bidan per 100.000 penduduk	90,22	89,93	86,20	93.5	102.5		
	Rasio ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	5,86	6,99	7,41	8,20	10,2		
	Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk	7,46	7,34	7,06	7.5	8.7		
	Rasio tenaga teknisi medis per 100.000 penduduk	18,65	16,27	17,8	11,10	15,8		
	Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Banjar	8	9	9	7	7		
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	81,4%	82,7%	79,8%	77,5%	78,4%		
	Cakupan Pelayanan Nifas	88,9%	87,3%	84,3%	87,3%	93,%		
	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	55,4%	49,2%	47,8%	47,2%	48,0%		
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	71,7%	79,7%	75%	69,4%.	79,4		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100%	99%	96.5%	90,4%	51,1%		
	Perkembangan kepesertaan PBI APBD	1112	1112	6999	28847	35297		
	Angka Non Polio AFP per 100.000 Penduduk di Kabupaten Banjar	2,51	5,60	2,50	2,03	0		
	Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA (Succes Rate) di Kabupaten Banjar	94,64	90,70	93,81	93,60	95,50		
	Jumlah Pneumonia Pada Balita yang Ditemukan dan Ditangani di Kabupaten Banjar	40,07%	58,10%	40,81%	35,17%	15,44%		
	Kasus HIV/AIDS	15 kasus	36 kasus	24 kasus	61 kasus	51 kasus		
	kasus AIDS	3 kasus	4 kasus	2 kasus	17 kasus	19 kasus		
	Demam Berdarah Dengue (DBD)	552 kasus	101 kasus	305 kasus	228 kasus	126 kasus		
	Jumlah Kasus Diare Yang Ditangani	9998	11140	10437	8851	5486		
	Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1.000 Penduduk di Kabupaten Banjar	0,31/176 kasus	0,32/ 185 kasus	0,21/ 121 kasus	0,07/ 36 kasus	0,03/ 15 kasus		
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	64,8%	69,60%	71,97%	73,90%	74,40%		
	Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	80%	81,89%	81,95%	82,06%	82,06%		
	Konektivitas Wilayah Kabupaten	97,64%	98,73%	98,73%	98,73%	98,73%		
	Perkembangan SPAM cakupan layanan Air Minum Kabupaten Banjar	57,14%	67,19 %	73,20 %	74,33 %	84,33 %		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Jumlah Penduduk yang memiliki Tangki Septic (Standar PU) (Jiwa)	228.008	232.765	238.130	243.400	246.170		
	Jumlah Penduduk yang terlayani MCK Komunal (Jiwa)	18.318	19.118	19.118	19.118	19.118		
	Jumlah Penduduk yang memiliki akses ke sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan/kota (Jiwa)	7.792	7.952	7.952	7.952	7.952		
	Total Jumlah penduduk yang terlayani air limbah yang memadai Akhir Tahun Pencapaian SPM Tahun 2019 (Jiwa)	254.118	259.835	265.200	270.470	273.240		
	Nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM(%)	43,21	44,19	45,10	45,99	49,30		
	Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	16,03%	16,44%	20,56%	37,72%	38,93%		
	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya	91,91%	92,11%	92,12 %	92,13 %	92,14%		
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan							
	Persentase Rumah Layak Huni	97,91	98,60	96	95,25	95,39		
	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Intervensi	400 unit	896 unit	923 unit	309 unit	838 unit		
2.3.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
	Indeks Risiko Bencana	176,4	176,4	176,4	176,4	152,65		
	Persentase Bencana yang Ditanggulangi	100	100	100	100	100		
	Angka Kriminalitas	779	638	649	428	468		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Kasus pelanggaran Perda bernuansa kearifan lokal	13	42	52	49	9		
2.3.1.6	Sosial							
	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	26805	25181	52453	52453	60192		
	Penyandang Disabilitas	1397	2207	1704	1571	3462		
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2.3.2.1	Urusan Tenaga Kerja							
	Penurunan sengketa industrial	11	9	12	7	21		
	Besaran para pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan	NA	NA	7,24	22,94	17,60		
2.3.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	NA	24,44	24,44	31,11	31,11		
	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional(%)	NA	49,57	45,49	47,21	54,83		
	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja(%)	NA	33,22	33,27	33,29	33,56		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,37	76,49	76,51	80,73	80,52		
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	NA	57,46	56,18	61,38	NA		
	Kasus kekerasan terhadap anak	NA	621	433	532	476		
2.3.2.3	Urusan Pangan							
	Indeks Ketahanan Pangan	NA	NA	NA	69,15	69,09		
	Ketersediaan Pangan Utama (beras) Ton	156.226,43	140.775,72	130.443.01	122.717,93	94.201,50		
	Konsumsi Rumah Tangga (ton)	69.819,69	0.875,05	71.923,22	72.920,18	70.138,74		
	Ketersediaan Energi Per Kapita	3416	3075	3492	3765	3251		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Ketersediaan Protein Per Kapita	86,05	71,47	76,83	122,62	78,86		
	Skor Keamanan Pangan	-	70%	72,3%	99,9%	100%		
2.3.2.4	Urusan Pertanahan							
	Penyelesaian kasus tanah negara atau yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Banjar	NA	NA	2	3	1		
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 - 18 th	104,25	84,5	91,49	101,47	106,75	62	Berhasil
	Cakupan Kepemilikan KTP-el	88,89	74,19	88,62	98,57	99,20	80	Berhasil
	Cakupan Kepemilikan KK	119,24	97,35	96,55	126,04	102,03	95	Berhasil
	Kepemilikan KIA	KIA di Kab Banjar dimulai tahun 2019, sehingga tidak ada data di 2016 S/D 2018			57,80	86,56	0	Berhasil
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
	Status Perkembangan Desa							
	Mandiri	0	0	0	0	0		
	Maju	2	2	2	3	11		
	Berkembang	63	63	143	188	214		
	Tertinggal	181	181	115	79	49		
	Sangat Tertinggal	31	31	17	7	3		
	Persentase desa yang memiliki pengelolaan keuangan baik	NA	NA	125,94	100	80		
2.3.2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Laju pertumbuhan penduduk	1,55	1,51	1,48	1,39	1,07		
	TFR	2,40	2,27	2,30	2,38	2,38		
	Pasangan Usia Subur (PUS)	115600	97153	39355	122286	109992		
	Peserta KB aktif	87536	72011	78416	94332	88748		
2.3.2.9	Urusan Perhubungan							
	Jumlah uji kir angkutan umum	5372	5036	6372	6120	3894		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Pemasangan rambu-rambu	220	150	12	110	19		
	Ketersediaan prasarana perhubungan yang memiliki kondisi baik	NA	54,55	59,09	65	66,67		
	Angkutan umum yang masuk ke terminal	NA	73	80,30	87,84	38,79		
	Ketersediaan rambu yang layak	NA	95,20	93,78	96	92,4		
	Angkutan umum yang beroperasi	NA	73,75	93,75	78,75	51,32		
	Persentase kendaraan wajib uji yang lolos dalam PKB	76,78	62,95	93,7	87,43	57		
	Ketaatan dalam berlalu lintas	NA	80,5556	80	92,74	95,6		
2.3.2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika							
	Cakupan layanan telekomunikasi	NA	80,34	83,79	83,79	83,79		
	Indeks Keterbukaan publik	NA	NA	NA	70	75		
2.3.2.11	Urusan Koperasi dan UKM							
	Persentase koperasi yang aktif	62,87	63,9	64,2	64,92	72,18		
	Persentase untuk pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUMK	14,63	21,93	26,84	30,43	37,31		
	UM bankable	3823	4523	2595	7563	3491		
	Perkembangan UM yang Bermitra dengan Pengusaha Besar (BUMN dan Swasta)	5	10	8	76	68		
2.3.2.12	Urusan Penanaman Modal							
	Peningkatan realisasi nilai investasi	Data investasi yang dilaporkan data seluruh provinsi Kalsel		Rp 419.128.760	Rp.1,024,139,054,828.	1.414.823.443.382		
	Pertumbuhan investor	27	33	30	37	30		
2.3.2.13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	-	-	0,7	-	-		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas olahraga	-	50	57	-	60		
2.3.2.15	Urusan Kebudayaan							
	Jumlah budaya benda yang dikelola	12	16	22	28	29		
2.3.2.16	Urusan Perpustakaan							
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	23.344	23.767	30.910	32.316	8.655		
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	-	47.528	48.678	49.559		
2.3.2.17	Urusan Kearsipan							
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	-	-	15	16	14		
2.3.3	Fokus Urusan Pilihan							
2.3.3.1	Urusan Pariwisata							
	Angka Pengunjung Wisata	5.192.060	6.385.142	7.173.826	9.116.576	3.701.428		
2.3.3.2	Urusan Pertanian							
	Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan	6.92	-5.39	1.80	6.22	-7.55		
	Pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura tahunan	1.95	4.97	5.10	4.82	2.09		
	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	6.13	6.83	5.03	5.33	0.50		
	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	0.82	2.97	3.22	2.46	-0.94		
	Produksi Padi	277.868	250.388	235.517	218.680	167.551		
	Produktivitas Padi	37,45	37,19	34,65	32,11	33,02		
2.3.3.3	Urusan Perdagangan							
	Ekspor Barang Jasa	7.121.955	8.367.303	10.606.719	10.428.723	9.707.047		
	Impor Barang Jasa	8.804.514	10.079.417	12.764.197	12.903.214	12.355.639		
	Ekspor Bersih Perdagangan	1.682.559	1.712.114	2.157.478	2.474.491	2.648.592		
2.3.3.4	Urusan Perindustrian							
	Kontribusi	7,00	7,24	7,06	6,9	6,86		
	Pertumbuhan	5.74	5,87	3,88	3,5	-2,87		
2.3.3.5	Urusan Perikanan							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	5.16	6.93	7.92	5.31	1.91		
	Produksi Perikanan Budidaya	58.042	58.105	60.870	58.015	58.953		
	Produksi Perikanan Tangkap	8.228	9.626	9.470	8.664	8.766		
2.3.4	Urusan Penunjang							
2.3.4.1	Perencanaan Pembangunan							
	Dokumen RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	berhasil
	Dokumen RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Berhasil
	Dokumen RPKD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Berhasil
	Dokumen RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Berhasil
2.3.4.2	Keuangan							
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
	Persentase Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	11,09 %	11,03 %	10,80 %	11,73%	11,75%	20%	Kurang baik
	Realisasi PAD	179714918 680	179714918 680	189478934 879	223076411 141	206230417 570		
	Persentase Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020	73,92%	65,90%	68,82%	66,99%	63,07%		Ketergantungan tinggi
	Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	131,196 milyar	141,392 milyar	116,251 Milyar	190,151 milyar	179,340 milyar		
	Persentase belanja Pendidikan (20%)	27,61	28,29	27,88	27,41	25,81	20	Berhasil
	Persentase belanja Kesehatan	14,17	15,224	18,43	17,30	17,16	10	berhasil
2.3.4.3	Kepegawaian							
	Tingkat Profesionalitas ASN	Indikator ini baru dimulai tahun 2019 pada saat perubahan Renstra			56,31	52,66	70	Sangat rendah
2.3.4.4	Penelitian dan Pengembangan				68,62%	60 %		
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	NA	100%	100%	100%			
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	67,31%	67,31%	71,43%	58,82%		
2.3.4.5	Pengawasan							

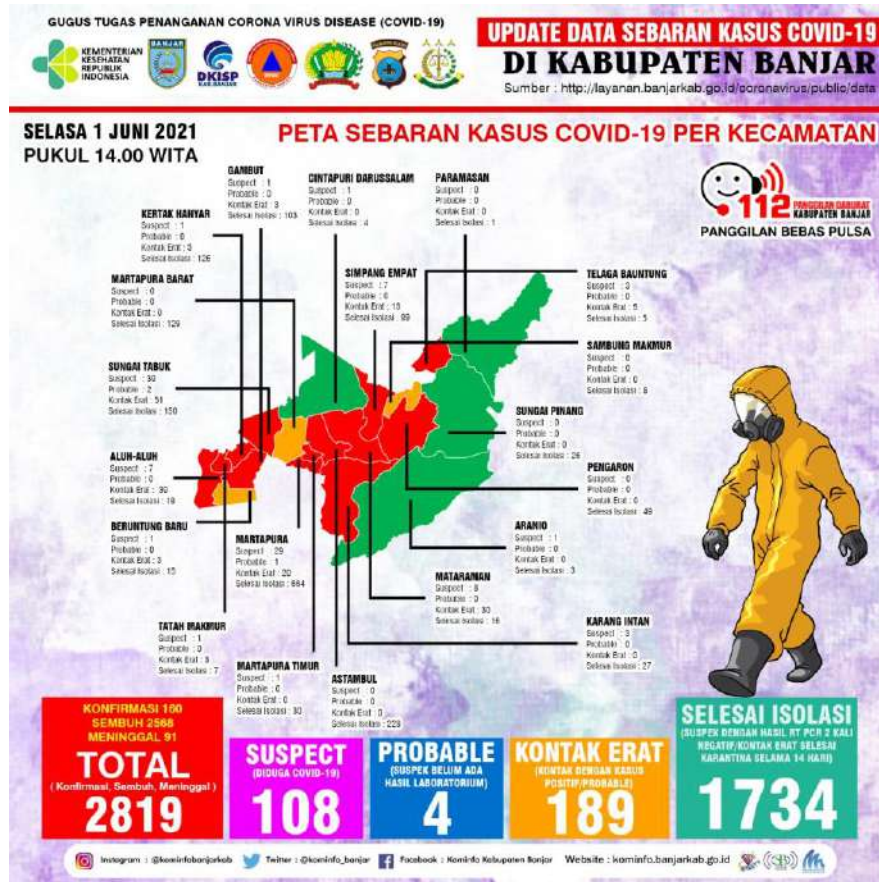
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	80%		
	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,223%	0,086 %	0,133 %	0,105 %	0,127 %		
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)					NA		
	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik					4,11		
2.3.4.6	Sekretariat Dewan							
	Produk Hukum yang Dibahas dan Mendapat Persetujuan Dewan	15 Perda	15 Perda	13 Perda	5 Perda	8 perda		
	Rapat Rapat paripurna DPRD	29 kali	26 kali	20 kali	29 kali	11 kali		
2.4	Aspek Daya Saing Daerah							
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
2.4.1.1	Pengeluaran Perkapita	12.311 ribu	12.366 ribu	12.062 ribu	12.681	12.603		
2.4.1.2	Nilai Tukar Petani	97.52	96.69	65.40	99.95	100.98		
2.4.1.3	Konsumsi Non Pangan	-	-	-	-	45,09		
2.4.1.4	Rasio Ekspor - Impor Kabupaten Banjar	0.86	0.87	0.85	0.86	0.83		
2.4.1.5	Angka Kriminalitas	-	-	-	11.74	11,08		
2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	-	-	77,24	53,76		
2.4.1.7	Nilai SAKIP	60.97	62.62	68.99	68,99 (B)	68,97 (B)		
2.4.1.8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	1,9	2,4	2,68		
2.4.2	Fokus Fasilitasi Wilayah/ Infrastruktur							
2.4.2.1	Perhubungan							
2.4.2.1.1	Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan	6,8	6,4	5,1	6,02	9,7		
2.4.2.1.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	1.226.400	1.292.100	1.642.500	1.379.700	844.245		

2. 6. Dampak Covid -19 dan Bencana Banjir

2.6.1. Dampak Covid 19

Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar telah mengganggu perekonomian dan kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar. Sebagai akibat dari pandemi covid-19 menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, turunnya pendapatan daerah, tutupnya industri dan bisnis, meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kasus kriminalitas. Hal lainnya adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat menjaga jarak sosial dan fisik, serta memanfaatkan komunikasi sistem online dalam aktifitas sehari-hari mereka.

Gambar 2. 159. Infografis Sebaran Covid 19 per Tanggal 1 Juni 2021



Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2021

Berdasarkan data sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 sejak kejadian Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar terdapat 2819 orang yang terinfeksi, sebanyak 2568 orang sembuh dan 91 orang meninggal. Untuk penanganan covid-19 di Kab Banjar disusun beberapa strategi dilihat dari aspek kebijakan daerah sebagaimana Tabel 2. 82 berikut :

Tabel 2. 82. Strategi Aspek Kebijakan Daerah Penanganan Covid !9

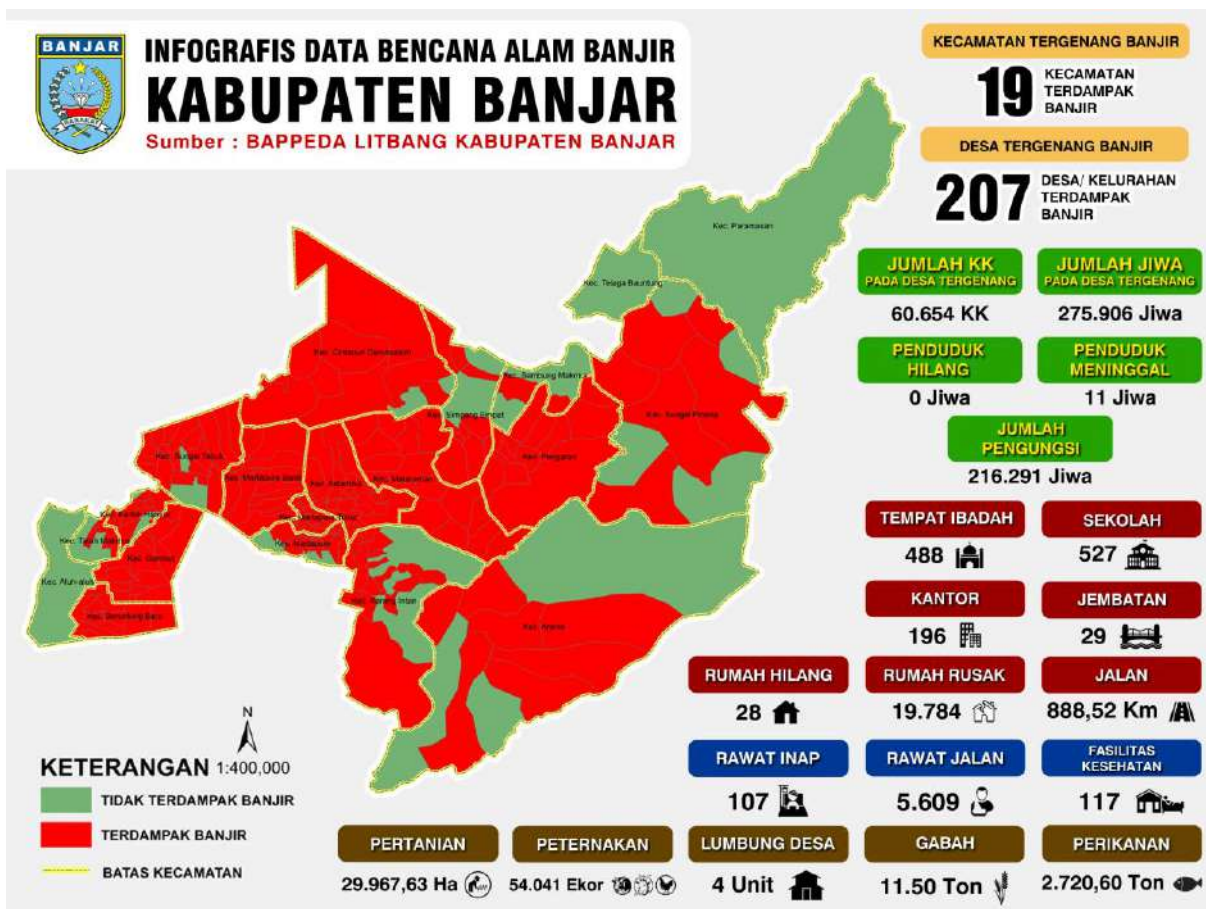
No.	Strategi	Kebijakan
1	Memperkuat dan memperketat fungsi SKPD dalam pengawasan dan penertiban	1. Melakukan koordinasi rutin setiap SKPD yang terlibat 2. Melakukan rapat dengan memanfaatkan aplikasi virtual
2	Membuat aturan dan himbauan yang mengadopsi kearifan lokal masyarakat	1. Membuat aturan dan himbauan yang berbasis kearifan lokal masyarakat 2. Mengkaji kearifan lokal yang ada dimasyarakat
3	Melakukan edukasi dan sosialisasi yang tepat dan terarah kepada seluruh golongan masyarakat	1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan pengetahuan 2. Pembuatan pamflet, brosur, booklet serta banner sebagai sarana sosialisasi dan edukasi

No.	Strategi	Kebijakan
4	Memanfaatkan sosial medial untuk mensosialisasikan peraturan yang dibuat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan memaksimalkan media online (sosial) untuk sosialisasi 2. Memasang iklan di media cetak maupun elektronik 3. Membuat akun, Facebook, Instagram, Twitter (sosial media) agar bisa dan mudah diakses semua kalangan
5	Memberikan tindakan teguran maupun hukum yang tegas pada pelanggar peraturan dan himbauan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberlakukan sanksi sosial bagi warga yang melanggar aturan

2.6.2. Dampak Bencana Banjir

Pada awal tahun 2021 terjadi bencana banjir yang sangat besar terjadi di Kalimantan Sealatan, dan Kabupaten Banjar terdampak cukup parah. Sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar PDRB Kab Banjar terpukul cukup besar dengan keadaan bencana banjir tersebut. Demikian juga infrastruktur baik pemerintah dan swasta mengalami kerusakan cukup besar. Terdapat 19 kecamatan dan 207 desa/kelurahan yang terdampak. Sebanyak 60.654 KK dan 275.906 jiwa terdampak, jumlah pengungsi 216.291 jiwa serta jumlah penduduk meninggal sebanyak 11 jiwa. Secara keseluruhan dampak bencana banjir di Kab Banjar diperlihatkan pada Gambar 2. 160 berikut :

Gambar 2. 160. Infografis Data Bencana Banjir



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Banjar, 2021

2. 7. Pencapaian SDGs Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Banjar, dari 223 indikator dapat dibagi menjadi empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda seperti pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 menunjukkan capaian indikator masing-masing TPB di Kabupaten Banjar berdasarkan pilar dan tujuan. Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 79 indikator, belum mencapai target 54 indikator, tidak ada data sebanyak 87 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator.

Tabel 2. 83. Capaian indikator masing-masing TPB Kabupaten Banjar

No.	Tujuan	Mencapai target	Belum Mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
PILAR SOSIAL						
TPB1	Tanpa Kemiskinan	6	12	6	0	24
TPB2	Tanpa Kelaparan	9	1	1	0	11
TPB3	Kehidupan Sehat dan sejahtera	13	10	11	0	34
TPB4	Pendidikan Berkualitas	2	6	5	0	13
TPB5	Kesetaraan Gender	6	0	8	0	14
PILAR EKONOMI						
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	0	0	2	0	2
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	5	8	0	19
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	3	6	3	13
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	5	2	4	0	11
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	5	3	5	0	13
TPB12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	2	2	1	0	5
TPB17	Kemitraan untuk Tujuan Mencapai	7	2	7	0	16
PILAR LINGKUNGAN						
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	4	11	0	18
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	1	0	1	0	2
TPB14	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	2	0	1	0	3
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	1	1	2	0	4
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA						
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	10	3	8	0	21
Total		79	54	87	3	223

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD

Pelaksanaan TPB Kabupaten Banjar terhadap empat pilar pembangunan yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata Kelola. Gambaran tentang indikator pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dimana pilar sosial 36 indikator, ekonomi 23 indikator, lingkungan 7 indikator, serta Hukum dan Tata Kelola 17 indikator. Grafik capaian dapat dilihat pada Gambar berikut

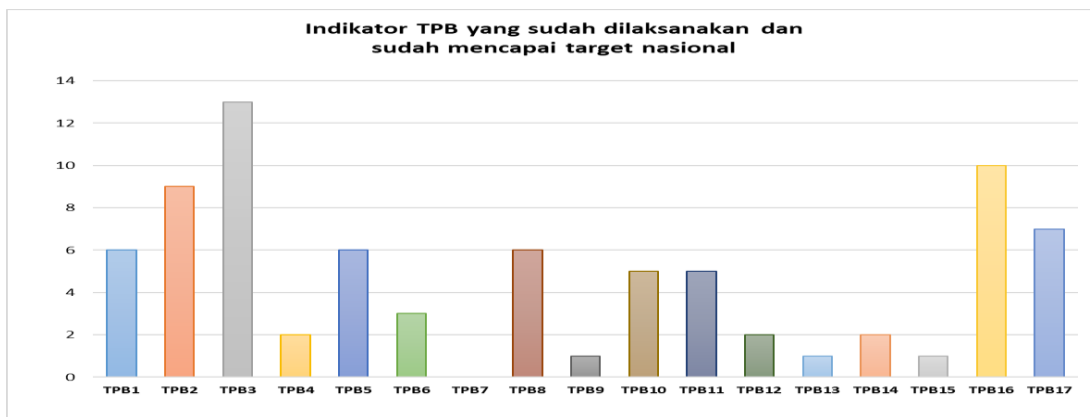
Gambar 2. 161. Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 79 indikator (35,43%). Tingkat capaian untuk masing-masing TPB secara rinci disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 2. 162. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Berdasarkan Tujuan



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Banjar, 2020

Tabel 2. 84. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Berdasarkan Tujuan

No.	Tujuan	Mencapai target	Persentase (%)
TPB1	Tanpa Kemiskinan	6	7,59
TPB2	Tanpa Kelaparan	9	11,39
TPB3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13	16,46
TPB4	Pendidikan Berkualitas	2	2,53
TPB5	Kesetaraan Gender	6	7,59
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	3,80
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	0	0,00
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	7,59
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	1,27
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	5	6,33
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	5	6,33

No.	Tujuan	Mencapai target	Persentase (%)
TPB12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	2	2,53
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	1	1,27
TPB14	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	2	2,53
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	1	1,27
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	10	12,66
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	7	8,86
	Total	79	100

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Banjar, 2020

Gambar dan Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator TPB yang paling tinggi pada tujuan kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 13 indikator (16,46%), kemudian tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan 10 indikator (12,66%), serta tujuan tanpa kelaparan sebanyak 9 indikator (11,39%)

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Secara umum terdapat dua sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Banjar. Pertama, sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Dana Konsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Bab ini menganalisis pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya serta menyusun kerangka pendanaan untuk satu periode ke depan. Analisis tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran terkait kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Banjar. Seperti yang diketahui pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada APBD itu sendiri dan kondisi neraca daerah. Dalam konteks ini, dibutuhkan data atau informasi tentang kinerja keuangan daerah minimal 5 (lima) tahun sebelumnya sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat. Dengan adanya analisis tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam pengalokasian anggaran di RPJMD Kabupaten Banjar sebagai instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah.

3. 1. Kinerja Keuangan Daerah 2016-2020

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui proses penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran ini disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Sebagai parameternya, kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 2 aspek yakni kinerja pelaksanaan APBD dan kinerja Neraca Daerah

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Di sisi lain, aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

2.4.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 UU 28/2009 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini adalah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, serta Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Terkait dengan Pendapatan Daerah sebagaimana terurai di atas, perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	1.711.541.447.620	1.619.240.365.092	1.733.871.938.923	1.901.700.204.035	1.755.293.338.641,52	0,92%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	189.854.372.832	217.734.255.687	189.058.575.505	223.039.381.642	206.230.417.570	2,99%
1.1.1	Pajak Daerah	62.158.453.851	66.629.796.066	72.020.610.626	80.830.944.474	76.884.288.781,00	5,65%
1.1.2	Retribusi daerah	8.658.316.932	7.190.396.363	4.284.662.971	6.445.233.089	5.123.544.758,50	-6,86%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	6.716.228.407	6.787.200.322	8.478.950.429	2.445.796.650	4.373.163.319	8,41%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	112.321.373.642	137.126.862.935	104.274.351.480	133.317.407.428	119.849.420.711	3,97%
1.2.	Dana Perimbangan	1.265.212.875.472	1.074.257.384.910	1.207.279.772.566	1.274.094.517.488	1.107.101.678.205	-2,57%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	293.044.452.820	143.898.088.000	225.540.392.459	256.911.597.431	186.278.367.462	-1,94%
1.2.3	Dana Alokasi Umum	722.092.250.000	709.407.411.000	709.407.411.000	754.121.572.000	684.702.334.000	-1,16%
1.2.4	Dana Alokasi khusus	250.076.172.652	222.321.166.443	272.331.969.107	263.061.348.057	236.120.976.743	-0,56%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	256.474.199.316	327.248.724.495	337.533.590.851	404.566.304.805	441.961.242.867	14,96%
1.3.1	Bagi Hasil Pajak dari Prov	86.082.859.816	94.584.429.495	102.387.965.957	119.590.061.805	109.591.460.867,00	6,64%
1.3.2	Bantuan Keu. Prov (Hibah)	1.061.432.500	16.010.000.000	29.013.682.894	47.446.470.000	73.198.935.000,00	401,84%
1.3.3	Dana Penyesuaian	169.329.907.000	--	--	--		
a	Dana Tamsil Guru	--	--	--	--		

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
b	Tunj. Profesi Guru PNSD	--	--	--	--		
c	Dana Desa	--	209.154.295.000	188.881.942.000	213.261.986.000	215.477.025.000,00	1,42%
d	Dana Insentif Daerah (DID)	--	7.500.000.000	17.250.000.000	24.267.787.000	43.693.822.000,00	83,58%

Sumber: BPKAD Kabupaten Banjar, data diolah

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar secara umum bisa dikatakan baik walau sempat mengalami fluktuasi di tahun 2018 dan 2020. Berdasarkan data pada tahun 2016, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp189.854.372.832. Sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1, dapat dilihat bahwa akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walau sempat turun di tahun 2018, hingga pada tahun 2019 terhimpun PAD sebesar Rp. 223.039. 381.642, kemudian turun lagi di tahun 2020 menjadi Rp206.230.417.570, dimana penurunan tersebut banyak diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Pada sisi Dana Perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan walau tidak konsisten karena mengalami penurunan di tahun 2017 dan tahun 2020. Tahun 2016 jumlah Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp 1.265.212.875.472. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.074.257.384.910. Tahun 2018, Dana Perimbangan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1.207.279.772. Kemudian pada Tahun 2019 volume Dana Perimbangan meningkat menjadi Rp 1.274.094.517.488, namun kembali turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.107.101.678.205,-.

Sedangkan pada sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah, dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend yang cukup bagus. Pada Tahun 2016 nilai pendapatan dari sektor ini adalah Rp. 256.474.199.316,-. Setahun berikutnya (Tahun Anggaran 2017) meningkat menjadi Rp. 327.248.724.495,-. Di tahun-tahun berikutnya terus bertambah hingga di Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp. 404.566.304.805,-. Hingga pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 441.961.242.867,-.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah, harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah semaksimal mungkin.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2016-2020 lebih fokus pada upaya untuk mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain melalui strategi sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial.
4. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak dan retribusi.
6. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat.
7. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.
8. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah tentang pendapatan daerah.

Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar menggiatkan pada upaya mencari sumber- sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar, selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah.

Upaya peningkatan perolehan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sudah tentu pula semakin dipacu. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga

diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, diarahkan pada:

1. Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalan sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan, serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ketiga;
2. Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
5. Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.
6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah,

2.4.3.2. Belanja Daerah

Sampai dengan Tahun 2020 atau sampai akhir berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum, Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar selama kurun waktu tahun 2016-2020 konsisten mengalami perkembangan yang positif. Pada Tahun 2016 Belanja Daerah Kabupaten Banjar tercatat sebesar Rp 1.670.322.354.716,-. Empat tahun kemudian yakni tahun 2019 meningkat lebih dari 400 miliar menjadi Rp 1.912.511.888.376, namun di tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 400 miliar Rupiah menjadi Rp. 1.513.766.712.153,-. Rincian perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
2	BELANJA DAERAH	1.670.322.354.716	1.642.767.202.851	1.647.849.074.724	1.912.511.888.375	1.802.710.482.044	2,24%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	960.698.190.731	964.443.731.825	950.897.897.254	1.030.496.792.327	1.094.423.973.943	3,39%
2.1.1.	Belanja Pegawai	680.007.926.993	629.431.151.102	642.155.280.875	659.945.292.937	599.640.350.207	-2,95%
2.1.2	Belanja Hibah	11.027.665.877	14.405.072.163	18.712.225.885	33.034.118.137	97.010.698.180	82,68%
2.1.3	Bantuan Sosial	3.599.603.900	4.991.687.860	4.839.275.689	7.515.290.079	7.578.886.050	22,94%
2.1.4	Belanja Bagi Hasil	2.990.106.846	5.720.260.421	5.692.162.085	8.225.518.862	4.588.942.728	22,78%
2.1.5	Bantuan Keuangan	263.072.887.115	309.895.560.278	278.723.960.700	321.776.572.312	324.742.883.232,00	6,03%
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	0	0	774.992.020	0	60.862.213.546,39	
2.2.	Belanja Langsung	709.624.163.985	678.323.471.026	696.951.177.469	882.015.096.048	708.286.508.100,48	1,30%
2.2.1.	Belanja Pegawai	117.661.226.947	130.728.227.759	124.280.679.962	116.631.324.610	93.121.418.176	-5,03%
2.2.2.	Belanja Barang & Jasa	296.037.018.577	315.141.332.889	317.808.330.042	425.655.409.918	441.735.619.844	11,25%
2.2.3.	Belanja Modal	295.925.918.461	232.453.910.377	254.862.167.465	339.728.361.520	173.429.470.081	-6,87%

Sumber: BPKAD Kabupaten Banjar, data diolah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami fluktuasi walau tidak terlalu tajam. Pada Tahun 2016 realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 960.698.190.731,-, kemudian meningkat tipis menjadi Rp. 964.443.731.825,- di Tahun Anggaran 2017. Namun pada Tahun Anggaran berikutnya (2018) turun menjadi Rp. 950.897.897.254,-. Di tahun Anggaran 2019, volume Belanja Tidak Langsung kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 1.030.496.792.327. Namun akibat pandemi Covid-19, di tahun 2020 Belanja Tidak Langsung turun menjadi Rp. 1.094.423.973.943.

Pada sisi Belanja Langsung juga menunjukkan kecenderungan yang hampir sama dalam kurun waktu 5 (lima), yakni mulai Tahun Anggaran 2016 hingga 2020. Pada Tahun 2016, total Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp. 709.624.163.985,-. Namun di tahun 2017 turun menjadi Rp. 678.323.471.026,-. Kemudian di tahun-tahun berikutnya secara konsisten terus meningkat, hingga pada Tahun Anggaran 2019 jumlah Belanja Langsung menjadi Rp882.015.096.048,-. Namun kemudian turun drastis di tahun 2020 menjadi Rp. 708.286.508.100,48

Antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2016-2020, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, bahkan dalam durasi waktu 5 Tahun Anggaran persentase serapan tertinggi adalah 92,59% yang terjadi di Tahun Anggaran 2018. Belum bisa optimalnya serapan anggaran ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat sehingga .mempengaruhi capaian realisasi penyerapan.

Khusus untuk Belanja Pegawai, yang alokasinya lebih besar dibanding alokasi belanja untuk pos-pos yang lain, sangat diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target dan realisasi belanja. Besarnya belanja pegawai selama periode 2016-2020 setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang cukup besar, namun realisasinya tidak pernah mencapai 100%.

Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Di sisi lain, semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pajak-pajak dan retribusi atau penerimaan-penerimaan yang bersumber dari masyarakat, maka akan mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian (terjadi kontraksi perekonomian).

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar untuk 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
6. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
7. Optimalisasi Belanja Langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif

8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.
9. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
10. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri
11. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan
12. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2021-2026 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2.4.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk penganggaran setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
Bersumber dari (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (c) Penerimaan Pinjaman Daerah; (d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; (e) Penerimaan Piutang Daerah, dan (f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan
Digunakan untuk (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; (c) Pembayaran Pokok Utang; dan (d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel 3.3 berikut disajikan hasil analisis tentang Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016-2020.

Tabel 3. 3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
3	PEMBIAYAAN DAERAH	131.196.422.331	141.392.015.234	116.251.333.775	190.151.868.668	179.340.524.327	11,97%
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.196.422.331	141.392.015.234	116.251.333.775	190.151.868.668	179.340.524.327	11,97%
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhit. Anggaran (SiLPA)	131.196.422.331	141.392.015.234	116.251.333.775	190.151.868.668	179.340.524.327,76	11,97%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemda	30.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	-66,67%
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	
3.2.4	Pembayaran Hutang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	

Sumber: BPKAD Kabupaten Banjar, data diolah

Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Banjar masih perlu ditingkatkan akurasi dan realibilitasnya.

Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek Pengeluaran Pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada:

1. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan yang dilakukan dalam konteks Pengeluaran Pembiayaan harus mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan

3.1.2. Neraca Daerah

Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016-2020

N o.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.	ASET LANCAR						
1.	Kas	153.624.651.100	116.260.407.774	190.151.868.668	182.486.524.327	131.927.734.925,41	12,64%
	Kas di Kas Daerah	141.713.591.998	106.221.696.490	174.175.608.624	149.299.284.276	91.143.773.781,18	9,88%
	Kas Bendahara Pengeluaran				0,00	64.500.000,00	
	Kas di Bendahara Penerimaan	20.196.818	0,00	37.867.943	0,00	7.757.840,00	-15,65%
	Kas di BLUD	8.644.847.944	6.006.345.082	11.424.252.576	27.679.055.129	37.756.032.539,23	61,56%
	Kas di Bendahara Dana Kapitasi	1.013.378.473	1.881.879.282	509.167.640	456.830.289	239.187.588,00	-10,43%
	Kas di Bendahara Dana BOS	--	2.141.412.920	4.004.971.885	1.905.354.633	2.712.129.177,00	17,30%
	Kas Lainnya	2.232.635.866	9.074.000	0,00	3.146.000.000	4.354.000,00	-62,28%
	Piutang	53.415.375.834	49.107.223.098	76.672.421.931	97.844.368.239	92.700.293.498,88	16,06%
	Piutang Pajak	48.143.434.830	52.798.219.781	56.417.306.661	57.669.423.983	61.754.954.703,00	6,78%
	Penyisihan Piutang Pajak	25.854.256.193	(30.249.883.412)	(34.899.633.221)	(38.231.399.128)	(41.612.780.830,96)	-104,84%
	Piutang Pajak Netto	22.289.178.636	22.548.336.368	21.517.673.439	19.438.024.854	20.142.173.872,04	-5,16%
	Piutang Retribusi	36.627.250	30.160.200	71.665.200	38.045.200	30.160.200,00	23,62%
	Penyisihan Piutang Retribusi	30.192.535	(30.160.200)	(30.367.725)	(30.199.625)	(30.160.200,00)	-99,97%
	Piutang Retribusi Netto	6.434.714	0,00	41.297.475	7.845.575	0,00	-90,50%
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	--	--	--	29.677.686.203	5.090.204.914,00	-
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	--	--	--	(542.940.774)	(573.913.912,20)	-
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto	--	--	--	29.134.745.428	4.516.291.001,80	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	--	--	--	5.014.326.549	31.745.992.587,00	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	--	--	--	44.231.515.832	36.289.866.038,04	-
	Bag Lancar Tuntutan Ganti Rugi	21.944.535	6.000.000	18.000.000	18.000.000	6.000.000,00	20,69%
	Penyisihan Bag Lancar Tuntutan Ganti Rugi	489.723	(30.000)	(90.000)	(90.000)	(30.000,00)	-63,36%
	Bag Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	21.454.812	5.970.000	17.910.000	17.910.000	5.970.000,00	20,57%
	Piutang Lainnya	31.458.228.538	27.084.401.985	55.785.995.644	83.799.989	83.799.989,00	-5,41%
	Penyisihan Piutang Lainnya	359.920.866	(531.485.254)	(690.454.628)	(83.799.989)	(83.799.989,00)	-126,60%
	Piutang Lainnya Netto	31.098.307.671	26.552.916.730	55.095.541.016	0,00	0,00	-5,28%

N o.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbu- han (%)
	Sewa Dibayar di Muka	12.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Persediaan	10.966.141.455	10.152.186.113	23.515.908.486	22.469.103.688	28.329.156.236,56	31,01%
	Jumlah Aset Lancar	218.018.668.390	175.519.816.986	290.340.199.086	302.799.996.255	252.957.184.660,85	14,27%
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.108.021.659.578	1.148.071.311.064	1.143.695.057.986	1.143.066.082.112	1.140.633.653.672,57	1,37%
	Jumlah Investasi Permanen	1.108.021.659.578	1.148.071.311.064	1.143.695.057.986	1.143.066.082.112	1.140.633.653.672,57	1,37%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.108.021.659.578	1.148.071.311.064	1.143.695.057.986	1.143.066.082.112	1.140.633.653.672,57	1,37%
	ASET TETAP						
	Tanah	462.519.123.963	462.485.874.786	538.397.353.739	588.237.572.448	592.020.671.103,99	4,22%
	Peralatan dan Mesin	348.279.714.553	390.398.971.444	483.629.378.438,	600.347.430.464	687.383.393.120,51	15,11%
	Gedung dan Bangunan	829.063.788.999	840.114.242.495	902.438.124.724	1.005.243.502.112	1.051.707.179.096,36	4,14%
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.170.289.146.076	1.279.501.306.104	1.393.943.867.315	1.586.560.599.418	1.648.588.405.116,25	10,08%
	Aset Tetap lainnya	42.352.576.446	50.793.534.309	62.990.479.503	74.885.965.095	76.862.175.490,43	15,79%
	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.164.102.300	13.608.554.140	3.342.071.200	8.157.443.500	919.330.250,00	54,45%
	Akumulasi Penyusutan	1.053.815.751.679	1.228.228.481.622	(1.450.417.306.530)	(1.680.257.752.566)	(1.924.780.169.632,84)	-98,64%
	Jumlah Aset tetap	1.803.852.700.658	1.808.674.001.657	1.934.323.968.391	2.183.174.760.472	2.132.700.984.544,71	4,06%
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ASET LAINNYA						
	Tagihan Penjualan Angsuran	112.500.000	112.500.000	112.500.000	60.000.000	60.000.000,00	-11,67%
	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	112.500.000	(112.500.000)	(112.500.000)	(60.000.000)	(60.000.000,00)	-61,67%
	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tuntutan perbendaharaan	5.849.877.797	5.849.877.797	5.849.877.797	5.849.877.797	5.849.877.797,00	0,00%
	Penyisihan Tuntutan perbendaharaan	5.849.877.797	5.849.877.797	5.849.877.797	5.849.877.797	(5.849.877.797,00)	0,00%

N o.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbu- han (%)
	Tuntutan Perbendaharaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tuntutan Ganti Rugi	238.528.250	232.528.250	241.778.250	223.778.250	214.528.250,00	-2,88%
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	185.295.750	(185.325.750)	(185.312.000)	(185.222.000)	(185.175.750,00)	-0,01%
	Tuntutan Ganti Rugi Netto	53.232.500	47.202.500	56.466.250	38.556.250	29.352.500,00	-25,58%
	Aset Tak Berwujud	5.799.363.109	6.009.896.473	6.392.423.673	9.501.218.212	10.418.915.720,0	17,22%
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.016.115.805	(4.871.220.146)	(5.585.532.094)	(5.973.899.487)	(7.096.421.233,0	-107,97%
	Aset Tak Berwujud Netto	1.783.247.303	1.138.676.326	806.891.578	3.527.318.725	3.322.494.487,00	63,03%
	Aset Lain-lain	294.844.460.3	284.719.781.617	239.382.672.69	227.766.148.411	222.576.232.769,	117,02%
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(88.781.863.52	(80.809.210.804	(68.940.197.14	(71.376.299.605	(68.196.579.670,	-6,71%
	Aset Lain-Lain Netto	206.062.596.8	203.910.570.812	170.442.475.54	156.389.848.806	154.379.653.098,	-8,57%
	Aset Non Lancar	17.159.056.15	3.943.541.721	0,00	0,00	0,00	-56,91%
	Jumlah Aset lainnya	225.058.132.	209.039.991.36	171.305.833.3	159.955.723.78	157.731.500.08	42,72%
	JUMLAH ASET	3.354.951.16	3.341.305.121.	3.539.665.058	3.788.996.562.	3.684.023.322.9	3,97%
		1.457	068	.842	622	64,02	
	KEWAJIBAN						
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Uang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Pendapatan Diterima Di Muka	2.019.572.729	615.852.948	794.639.714	1.809.655.251	1.966.935.807,50	13,39%
	Utang Belanja				14.657.393.946	4.793.130.826,00	-
	Utang Jangka Pendek lainnya	19.285.421.32	15.995.639.095	17.172.075.677	107.146.689.750	97.076.856.287,0	164,94%
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	21.304.994.0	16.611.492.043	17.966.715.39	123.613.738.94	103.836.922.92	171,05%
	Kewajiban- Penerimaan Dana Reklamasi & Jaminan Kesungguhan	17.159.056.15	3.943.541.721	0,00	0,00	0,00	-42,68%
	JUMLAH KEWAJIBAN	38.464.050.2	20.555.033.764	17.966.715.39	123.613.738.94	103.836.922.92	142,75%
		16		1	9	0,50	
	EKUITAS DANA						
	EKUITAS DANA LANCAR						
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	--	--	--	--	--	-
	Pendapatan yang Ditangguhkan	--	--	--	--	--	-
	Cadangan Piutang	--	--	--	--	--	-

N o.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbu han (%)
	Cadangan Persediaan	--	--	--	--	--	-
	Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	--	--	--	--	--	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	--	--	--	--	--	-
		--	--	--	--	--	-
	EKUITAS DANA INVESTASI	--	--	--	--	--	-
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka panjang	--	--	--	--	--	-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	--	--	--	--	--	-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya	--	--	--	--	--	-
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	--	--	--	--	--	-
		--	--	--	--	--	-
	EKUITAS DANA CADANGAN	--	--	--	--	--	-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	--	--	--	--	--	-
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	--	--	--	--	--	-
	JUMLAH EKUITAS/ EKUITAS DANA	--	--	--	--	--	-
	JUMLAH EKUITAS	3.316.487.11 1.240	3.320.750.087. 304,32	3.521.698.343 .450	3.665.382.823. 672	3.580.186.400.0 43,52	3,31%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.354.951.16 1.457	3.341.305.121. 068,80	3.539.665.058 .842	3.788.996.562. 622	3.684.023.322.9 64,02	3,97%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banjar

Secara umum jumlah aset Pemerintah Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, serta aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya). Semua asset tersebut dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Di sisi lain, kondisi keuangan daerah secara keseluruhan bisa dikatakan baik jika rasio antara kewajiban (hutang) dan aset daerah adalah kecil. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa jika rasio antara jumlah hutang dan jumlah aset semakin kecil persentasenya, maka kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut semakin sehat (baik).

Rasio hutang terhadap total aset menunjukkan tingkat *leverage* Pemerintah Kabupaten Banjar. Nilai *leverage* menunjukkan kisaran angka maksimal pada 3,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kabupaten Banjar didanai dari modal sendiri. Tingkat *leverage* tersebut mengindikasikan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar pada kondisi yang sehat. Sedangkan rasio aktivitas yang dihitung rata-rata umur piutang, menunjukkan lama terbayarnya piutang yang cukup pendek. Kondisi ini juga menunjukkan membaiknya kemampuan untuk aktivitas kinerja keuangan. Secara umum kondisi keuangan daerah dicerminkan melalui rasio kemandirian keuangan daerah yang dapat ditunjukkan pada uraian di bawah ini

3. 2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2016-2020

Pada bagian ini dijelaskan mengenai (1) Proporsi Penggunaan Anggaran dan (2) Analisis pembiayaan di Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2016 – 2020

3.2.1. Proporsi Pengguna Anggaran

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (terhadap Pengeluaran) dalam kurun Tahun Anggaran 2016-2020 dapat dideskripsikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banjar

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
1	2016	797.669.153.940	1.700.322.354.716	46,91%
2	2017	760.159.378.861	1.652.767.202.851	45,99%
3	2018	766.435.960.837	1.647.849.074.724	46,51%
4	2019	776.576.617.547	1.912.511.888.376	40,60%
5	2020	791.816.559.157	1.802.710.482.044	38,43%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banjar, Data Diolah

Data di atas menunjukkan bahwa prosentase belanja untuk aparatur terhadap total pengeluaran daerah adalah berkisar antara 38,43% hingga 46,91%. Itu berarti bahwa dari total pengeluaran pemerintah daerah, sekitar 38,43% hingga 46,91% dipergunakan untuk Belanja Aparatur (Belanja Pegawai). Dalam konteks ini, semakin rendah persentase pemenuhan Belanja Aparatur maka akan semakin baik karena akan semakin besar alokasi untuk belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang dialokasikan untuk Belanja Modal. Dari tahun ke tahun prosentase belanja untuk aparatur terhadap total pengeluaran daerah semakin menurun.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perkembangan defisit riil APBD Kabupaten Banjar dalam kurun Tahun Anggaran 2016-2020 dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016-2020 (*dalam jutaan rupiah*)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	1.711.541	1.619.240	1.733.871	1.901.700	1.755.293
Dikurangi realisasi					
Belanja Daerah	1.670.322	1.642.767	1.647.849	1.912.511	1.802.710
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30.000	10.000	-	-	-
Defisit riil	(11.219)	(33.527)	86.022	(10.811)	(47.417)

Sumber: BPKAD Kabupaten Banjar

Sebagaimana tertuang pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa defisit riil terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 10.811.684.341,-. Sedangkan defisit tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak Rp. 47.147.143.402,-. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Banjar juga pernah mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp. 86.022.864.199,- yang terjadi pada Tahun Anggaran 2018.

Dari defisit riil sebagaimana tertuang pada tabel di atas, keseluruhan defisit tersebut 100% ditutup oleh dana yang berasal dari SiLPA. Hal ini bisa dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banjar

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	-	10.811.684.341	47.147.143.402
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Banjar, Data Diolah

Sedangkan data tentang realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2018-2020 dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banjar

Uraian	2018		2019		2020	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	116.251.333.775	-	190.151.868.668	-	179.340.524.327	-
Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
Sisa penghematan	-	-	-	-	-	-

belanja atau akibat lainnya						
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Banjar, Data Diolah

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total Pendapatan dan Penerimaan Daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan Lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk 5 Tahun ke depan diproyeksikan meningkat. Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang fluktuatif dan tidak menentu selama beberapa tahun terakhir terutama akibat adanya pandemi Covid-19, maka pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat yakni rata-rata 4% per-tahun, sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan tumbuh pada angka yang sama yaitu 4% per-tahun. Proyeksi ini disusun dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari Dana Perimbangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di samping itu juga didasarkan pada realitas dan proporsionalitas pertumbuhan Belanja Daerah baik yang dialokasikan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, maupun Belanja Tidak Terduga.

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021-2016 disajikan dalam tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3. 9 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021-2026

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	4%	1.230.526.395.000	1.277.688.120.000	1.326.736.316.000	1.377.746.441.000	1.430.796.969.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4%	221.010.476.000	229.850.893.000	239.044.929.000	248.606.727.000	258.550.995.000
1.1.1	Pajak Daerah	4%	82.145.126.000	85.430.931.000	88.848.168.000	92.402.095.000	96.098.178.000
1.1.2	Retribusi daerah	4%	7.020.131.000	7.300.936.000	7.592.973.000	7.896.692.000	8.212.560.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	4%	11.480.574.000	11.939.796.000	12.417.388.000	12.914.084.000	13.430.647.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	4%	120.364.645.000	125.179.230.000	130.186.400.000	135.393.856.000	140.809.610.000
1.2	Pendapatan Transfer	4%	958.032.708.000	996.354.016.000	1.036.208.176.000	1.077.656.503.000	1.120.762.763.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pem. Pusat	4%	827.271.656.000	860.362.522.000	894.777.023.000	930.568.104.000	967.790.828.000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	4%	827.271.656.000	860.362.523.000	894.777.023.000	930.568.105.000	967.790.829.000
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	4%	153.190.255.000	159.317.866.000	165.690.580.000	172.318.204.000	179.210.932.000
b.	Dana Alokasi Umum	4%	674.081.401.000	701.044.657.000	729.086.443.000	758.249.901.000	788.579.897.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4%	130.761.052.000	135.991.494.000	141.431.153.000	147.088.399.000	152.971.935.000
1.2.2.1	Bagi Hasil Pajak	4%	130.761.052.000	135.991.494.000	141.431.154.000	147.088.400.000	152.971.936.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	4%	51.483.211.000	51.483.211.000	51.483.211.000	51.483.211.000	51.483.211.000

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	4%	51.483.211.000	51.483.211.000	51.483.211.000	51.483.211.000	51.483.211.000
2	BELANJA	4%	1.418.086.157.000	1.449.502.255.000	1.484.548.930.000	1.520.769.134.000	1.558.207.532.000
2.1.	Belanja Operasi	4%	1.208.148.528.000	1.233.867.124.000	1.260.388.392.000	1.287.742.176.000	1.315.959.494.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1%	753.578.120.000	761.113.901.000	768.725.040.000	776.412.290.000	784.176.413.000
2.1.2	Belanja Barang & Jasa	4%	432.994.309.000	450.314.081.000	468.326.644.000	487.059.710.000	506.542.098.000
2.1.3	Belanja Hibah	4%	18.005.449.000	18.725.666.000	19.474.693.000	20.253.681.000	21.063.828.000
2.1.4	Bantuan Sosial	4%	3.570.650.000	3.713.476.000	3.862.015.000	4.016.495.000	4.177.155.000
2.2	Belanja Modal	4%	84.492.135.000	87.871.818.000	91.386.692.000	95.042.158.000	98.843.846.000
2.2.1	Belanja Modal Tanah	4%	1.900.000.000	1.976.000.000	2.055.040.000	2.137.241.000	2.222.731.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	4%	21.906.364.000	22.782.618.000	23.693.923.000	24.641.680.000	25.627.347.000
2.2.3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	4%	14.048.448.000	14.610.385.000	15.194.801.000	15.802.593.000	16.434.697.000
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4%	46.008.952.000	47.849.310.000	49.763.282.000	51.753.813.000	53.823.966.000
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	4%	628.371.000	653.505.000	679.646.000	706.831.000	735.105.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	4%	5.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
2.4	Belanja Transfer	4%	120.445.494.000	125.263.313.000	130.273.846.000	135.484.800.000	140.904.192.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4%	8.916.525.000	9.273.186.000	9.644.114.000	10.029.878.000	10.431.073.000
2.4.2	Bantuan Keuangan	4%	111.528.969.000	115.990.127.000	120.629.732.000	125.454.922.000	130.473.119.000
3	PEMBIAYAAN DAERAH		187.559.762.000	171.814.135.000	157.812.614.000	143.022.693.000	127.410.563.000

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		191.659.762.000	175.914.135.000	161.912.614.000	147.122.693.000	131.510.563.000
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perit. Anggaran (SiLPA)		191.659.762.000	175.914.135.000	161.912.614.000	147.122.693.000	131.510.563.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemda		2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan data tentang proyeksi Pendapatan dan Belanja sebagaimana tersaji di atas, maka dapat dihitung proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar untuk mendanai Pembangunan Daerah. Data tentang proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar untuk Mendanai Pembangunan Daerah dituangkan dalam Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3. 10. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.230.526.395.000	1.277.688.120.000	1.326.736.316.000	1.377.746.441.000	1.430.796.969.000
2	Penerimaan Pembiayaan	191.659.762.000	175.914.135.000	161.912.614.000	147.122.693.000	131.510.563.000
	Total Penerimaan	1.422.186.157.000	1.453.602.255.000	1.488.648.930.000	1.524.869.134.000	1.562.307.532.000
	<i>Dikurangi:</i>					
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
4	Belanja Transfer	120.445.494.000	125.263.313.000	130.273.846.000	135.484.800.000	140.904.192.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.292.640.663.000	1.321.738.942.000	1.351.775.084.000	1.382.784.334.000	1.414.803.340.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Banjar, Data Diolah

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana tertuang pada tabel 3.10 di atas, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas Pertama, Prioritas Kedua, dan Prioritas Ketiga. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
Program Prioritas Pertama harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Di samping itu, prioritas pertama juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dan mengikat untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas I diarahkan pada Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin;
2. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
Program-Program yang masuk dalam Prioritas ini merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah.
Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada:
 - a. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan;
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
 - c. Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, Mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
3. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
Kategori ini merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja operasi seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada Prioritas Ketiga dengan memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada Prioritas Pertama dan Kedua terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 Mengacu pada skema di atas, berikutnya ditentukan prosentase anggaran yang dialokasikan untuk mendanai prioritas-prioritas di atas dengan komposisi sebagai berikut:
 - Prioritas I sebesar 50% dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
 - Prioritas II sebesar 30% dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
 - Prioritas III sebesar 20% dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
 Dari formula di atas, dapat diketahui besaran proyeksi alokasi anggaran untuk masing-masing Prioritas sebagaimana dituangkan pada tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3. 11 Kapasitas Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.292.640.663.000	1.321.738.942.000	1.351.775.084.000	1.377.746.441.000	1.430.796.969.000
2	Prioritas I (50%)	646.320.331.500	660.869.471.000	675.887.542.000	688.873.220.500	715.398.484.500
3	Prioritas II (30%)	387.792.198.900	396.521.682.600	405.532.525.200	413.323.932.300	429.239.090.700
4	Prioritas III (20%)	258.528.132.600	264.347.788.400	270.355.016.800	275.549.288.200	286.159.393.800

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Banjar dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun kerangka perencanaan RPJMD. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional, maupun tingkat nasional.

Ada 5 permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Banjar. Permasalahan pokok adalah permasalahan yang sifatnya makro yang dapat diselesaikan oleh Kepala Daerah karena sifatnya lintas urusan yang memerlukan wewenang yang lebih tinggi untuk penyelesaiannya. Permasalahan pokok ini disebabkan masalah dimasing-masing urusan dan akar masalah yang menyebabkannya. Pada bab 2 gambaran umum sudah dipaparkan kinerja pemerintah daerah dalam 5 tahun yang lalu. Berdasarkan uraian di bab 2 tersebut maka dapat dirumuskan ada 5 permasalahan pokok di Kabupaten Banjar yaitu:

1. Permasalahan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Permasalahan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata
3. Permasalahan Lingkungan Hidup
4. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal
5. Permasalahan penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis

Permasalahan pokok diatas disebabkan oleh masalah dan akar masalah yang akan diuraikan sebagaimana dibawah ini :

4.1.1 Permasalahan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan sumber daya manusia masih merupakan hal pokok yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Oleh karena itu pembangunan manusia yang berkualitas diyakini sebagai penggerak (*driver*) untuk aspek lainnya seperti kesejahteraan. Pada hakekatnya pembangunan SDM merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyeimbangkan pembangunan manusia agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun daya beli maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Banjar fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.

Pada sektor kesehatan berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pemerintah Daerah juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat diantara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga. Selain itu, guna memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah juga fokus terhadap pemenuhan alat kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Pemerintah kabupaten juga memperhatikan kemampuan/ daya beli masyarakat yang semakin menurun di masa Covid 19 ini. Perlu upaya-upaya terukur dan sistematis untuk membantu masyarakat menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut. Adapun permasalahan pokok diatas tersebut disebabkan masalah sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Problem pendidikan antara lain belum meratanya akses karena keterbatasan jumlah dan kualitas tentang prasarana dan sarana sekolah dan SDM tenaga didik; Problem rata-rata lama

sekolah dan tingkat partisipasi sekolah, problem literasi yang masih rendah berhubungan dengan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perpustakaan.

- b. Problem kesehatan antara lain: angka AKI dan AKB, angka kesakitan (menular: TBC, HIV dan tidak menular: Hipertensi, diabetes & obesitas), belum meratanya distribusi kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, stunting masih 20,18%, kepesertaan jaminan sosial belum maksimal, *Open Defecation Free* (ODF) masih tinggi, gizi rendah dipedesaan, dan kesiapsiagaan masa pandemi Covid 19, kuantitas & kualitas sarana prasarana & SDM Rumah Sakit.
- c. Problem lainnya berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang menurun, apalagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini. Berkurangnya daya beli masyarakat dapat menyebabkan kekurangan asupan pangan dan gizi sehingga mempengaruhi kualitas SDM.
- d. Problem konsumsi energi dan protein yang masih rendah; skor PPH yg masih dibawah target
- e. Problem gender, perkembangan IPG di Kabupaten Banjar selama 5 tahun menunjukkan tren penurunan

4.1.2 Permasalahan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata

Permasalahan ekonomi meliputi 2 hal yang berjalan bersama-sama yaitu permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil ekonomi. Pemerataan hasil ekonomi mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Jumlah penduduk miskin yang besar, walaupun angka kemiskinan rendah menunjukkan masih adanya permasalahan kesejahteraan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan di tingkat nasional maupun provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia terus berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Angka kemiskinan bersamaan dengan angka pengangguran, tingkat pendapatan dan lain-lain memperlihatkan masalah-masalah pemerataan hasil pembangunan ekonomi sebagaimana disebutkan dalam hal-hal dibawah ini:

- a. Problem kemiskinan masyarakat yang semakin terdampak akibat pandemi Covid 19.
- b. Problem pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya kompetensi pencari kerja, hubungan industri pekerja dan perusahaan yg belum berjalan dengan baik; sistem pengupahan dan jaminan sosial yang belum berjalan dengan optimal.
- c. Problem Koperasi dan usaha Mikro yang belum terkelola secara profesional dan berkualitas, SDM yang rendah, akses permodalan yang masih terbatas, produk yang masih lemah daya saingnya dan pemasaran yang terbatas.
- d. Problem rendahnya pendapatan buruh tani/ kebun, petani gurem dan peternak, usaha yang belum berorientasi agribisnis, sarana prasarana yang masih terbatas dan belum optimal, SDM yang masih rendah, pemasaran produk hasil yang terbatas, pengelolaan produk yang belum terstandarisasi.
- e. Problem masih rendahnya pemberdayaan pelaku usaha perikanan, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan, menurunnya sumber daya ikan dan kebijakan/ regulasi pemerintah yang belum memadai.
- f. Problem perindustrian meliputi bahan baku, SDM dan SDA; lemahnya promosi, industri yang dibina dan dikembangkan belum terfokus; kualitas dan kapasitas industri kecil dan menengah yg masih lemah; dan jejaring yang masih terbatas pada pasar lokal.
- g. Problem pengelolaan pariwisata yang belum optimal (amenitas, atraksi, aksesibilitas); pemasaran belum optimal; SDM dan kelembagaan yang belum mendukung
- h. Problem masih lemahnya perkembangan investasi & penanaman modal, kualitas SDM dan sarpras yang belum mendukung, pelayanan ijin yang masih terkendala, belum optimalnya penggunaan IT.

4.1.3 Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga patut untuk mempertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah mempunyai kaitan erat dengan Rencana Kebijakan dan Program (RKP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu

dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten *yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan*.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Banjar, dari 223 indikator dapat dibagi menjadi empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata Kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Menunjukkan capaian indikator masing-masing TPB di Kabupaten Banjar berdasarkan pilar dan tujuan. Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 79 indikator, belum mencapai target 54 indikator, tidak ada data sebanyak 87 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator.

Tabel 4. 1. Capaian indikator masing-masing TPB Kabupaten Banjar

No.	Tujuan	Mencapai target	Belum Mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
PILAR SOSIAL						
TPB1	Tanpa Kemiskinan	6	12	6	0	24
TPB2	Tanpa Kelaparan	9	1	1	0	11
TPB3	Kehidupan Sehat dan sejahtera	13	10	11	0	34
TPB4	Pendidikan Berkualitas	2	6	5	0	13
TPB5	Kesetaraan Gender	6	0	8	0	14
PILAR EKONOMI						
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	0	0	2	0	2
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	5	8	0	19
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	3	6	3	13
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	5	2	4	0	11
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	5	3	5	0	13
TPB12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	2	2	1	0	5
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	7	2	7	0	16
PILAR LINGKUNGAN						
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	4	11	0	18
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	1	0	1	0	2
TPB14	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	2	0	1	0	3
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	1	1	2	0	4
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA						

No.	Tujuan	Mencapai target	Belum Mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	10	3	8	0	21
	Total	79	54	87	3	223

Adapun beberapa masalah lingkungan hidup di Kabupaten Banjir adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- Masih tingginya polusi air dan udara;
- Sarana prasarana armada persampahan yang belum memadai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah sembarangan;
- Masih terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH);
- Masih seringnya terjadi kejadian banjir dan kebakaran hutan yang mempengaruhi kualitas Lingkungan Hidup;
- Kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana masih rendah; perlu dibentuknya desa-desa tangguh bencana;

4.1.4 Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan kadang belum mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan seharusnya tidak inkremental dan perlu didukung oleh teknologi informasi dan internet. Hal ini dikarenakan perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Disamping itu reformasi yang dilakukan sering belum berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat. Beberapa masalah dalam tata kelola pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja.
- Problem perencanaan dalam menetapkan target kinerja dan anggaran;; penentuan pagu anggaran masih berdasarkan *historical budget* belum *money follow function*; penurunan pendapatan dikarenakan pemberlakuan *Omni Bus Law*; sumber pendanaan yg belum mengoptimalkan kerjasama pemerintah dan badan usaha.
- Masih belum optimalnya komitmen perangkat daerah terhadap upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Pelayan publik yang belum optimal dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang belum maksimal.
- Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang belum optimal.

4.1.5 Permasalahan penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Permasalahan adanya perubahan nilai budaya masyarakat karena adanya perubahan besar akibat dampak Covid-19, membuat masyarakat lebih tergantung pada media online dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Problem yang terjadi masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Problem konflik yang masih berpotensi terjadi dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.
- Problem perilaku masyarakat yang beralih ke media sosial (medsos) secara online sebagai sarana komunikasi memudahkan terjadi gesekan dan infiltrasi budaya yang belum tentu sejalan dengan budaya lokal.
- Problem pelanggaran terhadap peraturan dan aturan hukum yang ada sehingga menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan.
- Problem gesekan antara pendukung masyarakat dalam bidang politik dan agenda demokrasi lokal yang menyebabkan terjadinya ketegangan diantara masyarakat.

4.2. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar

rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Banjar 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

4.2.1 Isu Eksternal

Isu Strategis Eksternal yang berdampak terhadap daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

4.2.1.1. Isu Strategis Internasional

Isu Strategis Dunia Internasional secara garis besar hanya terdapat 3 (tiga) kelompok isu utama yaitu :

1. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 sudah tersebar di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia sehingga menjadi isu nasional untuk tahun ini dan beberapa tahun kedepan. Mengingat dampaknya terhadap resesi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai akibat dari pandemic covid 19 ini menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, turunnya pendapatan negara, tutupnya industri dan bisnis, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan dan meningkatnya kasus kriminalitas. Hal lainnya adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat menjaga jarak sosial dan fisik, serta memanfaatkan komunikasi sistem online dalam aktifitas sehari-hari mereka.

a) Revolusi Industri 4.0

Percepatan Revolusi Industri 4.0 dari Dampak Pandemi Covid 19, pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan pemanfaatan infrastruktur digital. Era Revolusi Industri 4.0 sudah di depan mata. Era itu ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong otomasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Era ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak soal pekerjaan manusia yang akan digantikan teknologi mutakhir. Dalam konteks di Indonesia, Revolusi Industri Keempat telah mengeliminasi beberapa pekerjaan saat ini, karena tenaga kerja yang ada telah banyak berkurang yang dinilai karena akumulasi beberapa faktor di antaranya efisiensi dan disrupti teknologi. Tidak hanya menjadi perbincangan di tanah air, Revolusi Industri Keempat juga menjadi pembahasan utama di dunia. Revolusi teknologi ini akan mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat akan mengacu pada bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan teknologi ini secara drastis akan mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah bekerja yang pada akhirnya mengarah pada transformasi masyarakat yang serupa dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri ini tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Bagi Indonesia, fenomena revolusi industri 4.0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Dalam rangka ini, Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan *roadmap* revolusi industri 4.0 yang diberi nama "Making Indonesia 4.0" untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Oleh karenanya, langkah tersebut juga menuntut pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti *roadmap* yang telah tersusun.

b) Gejolak Perekonomian Global

Krisis ekonomi global adalah peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan / degresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi global ini adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Dan ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap perubahannya, kadang sistem ekonomi dunia naik kadang merosot drastis. Ini menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat langsungnya adalah meledaknya harga kebutuhan pokok di Indonesia. Isu strategis internasional terkait perekonomian global yang ditandai hal-hal sebagai berikut :

- Pertama, Pertumbuhan minus ekonomi dunia. Ekonomi global mengalami perlambatan ditahun 2019. Perlambatan ekonomi dunia tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas ekonomi yang melambat ditengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan kepercayaan bisnis, pengetatan kondisi keuangan, dan ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi di banyak negara. Bahkan ditahun 2020 yang paling signifikan adalah dampak dari Pandemi Covid 19, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi minus.

- Kedua, terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok berdampak pada ekonomi dunia. Pertumbuhan Tiongkok yang menurun setelah kombinasi pengetatan regulasi yang diperlukan untuk mengendalikan shadow banking dan peningkatan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat.
- Ketiga, Kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin Protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan. Kebijakan proteksionisme perdagangan ini dapat memberikan sentiment negatif terhadap perdagangan dunia maupun pasar keuangan global.
- Keempat, pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Kebijakan pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, didorong oleh pembalikan modal kembali ke AS seiring dengan penguatan ekonomi negara tersebut serta normalisasi kebijakan moneter. Adanya prediksi peningkatan tiga kali kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2019 dapat mendorong tren apresiasi dolar AS ke depan.

c) **de-Globalisasi pada Rantai Pasok Global dari Dampak Pandemi Covid-19**

De-Globalisasi pada Rantai Pasok Global dari Dampak Pandemi Covid 19, dimana banyak negara yang menutup diri terhadap interaksi dengan negara lain, menyebabkan distribusi logistik juga semakin terbatas, sehingga masing-masing negara memiliki kepentingan untuk memprioritaskan kebutuhannya masing-masing. Bagi Indonesia hal ini tidak terlalu berpengaruh untuk komoditas pangan, karena sebagian besar telah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Untuk beberapa negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap pasokan bahan pokok seperti Singapura dan Korea Utara akan merasakan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok. Di Indonesia sendiri proteksi atau kebijakan untuk menutup negara tidak dilakukan secara penuh, namun bagi beberapa daerah lain di Indonesia yang memiliki sifat neraca produksi lebih tinggi dan biasanya memasok ke daerah atau negara lain, akan mengalami penurunan pendapatan hingga harus memusnahkan produksinya.

2. **Perubahan Iklim (*Climate Change*)**

Perubahan iklim yang terjadi di dunia mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, seperti pemanasan global akibat tingginya emisi gas rumah kaca menjadi isu internasional yang banyak diperbincangkan. Mencairnya es di kutub utara dan selatan bumi, mengakibatkan muka air laut meningkat dan perubahan musim yang terjadi di beberapa belahan bumi, bencana banjir, badai, kenaikan Muka Air Pasang, Banjir ROB dan Perubahan Garis Pantai Kawasan Pesisir, serta tenggelamnya beberapa pulau akibat tingginya emisi gas rumah kaca tersebut. Perubahan iklim dunia juga mendorong gerakan *net zero emission* atau nol emisi karbon, salah satunya dilakukan melalui peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT).

Atas dasar isu tersebut, Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RANGRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RADGRK) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur serta dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API). Kebijakan penurunan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termuat dalam RPJMN dengan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3. **Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.

4.2.1.2. Isu Strategis Nasional

Isu Strategis Nasional secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok isu utama yaitu :

1. Isu yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Nasional

a) RPJPN Tahun 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-4)

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

b) RPJMN Tahun 2020-2024

Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 meliputi beberapa hal dibawah ini:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar
- 6) Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

2. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan-kebijakan nasional terkait pengembangan energi dan sumber daya mineral, menjadi salah satu isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Beberapa isu strategis dalam hal ini kebijakan nasional terkait energi sumber daya mineral yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Banjar diantaranya adalah program pengembangan jaringan gas, serta target rasio elektrifikasi. Pembangunan jaringan gas menjadi salah satu prioritas nasional bidang energi sumber daya mineral, dimana pemerintah akan membangun jaringan gas (jargas). Untuk merealisasikan program ini, kementerian telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi dengan pemerintah daerah terkait. Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui pipa (jargas) ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung program diversifikasi energi. Pembangunan jargas ini merupakan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga perlunya dukungan pemda dalam memberikan perizinan pembangunan Jargas sangat penting. Kebijakan nasional lain yang sekaligus juga menjadi target pembangunan bidang energi sumber daya mineral yaitu rasio elektrifikasi (RE), dimana secara nasional ditargetkan sebesar 100% pada Tahun 2020. Target ini harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan, mengingat masih terdapat sejumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik.

3. Isu yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja

a) Penyederhanaan Regulasi, Mendorong Investasi dan Kemudahan Berusaha

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berorientasi terhadap Penyederhanaan Regulasi, Mendorong Investasi dan Kemudahan Berusaha, dimana terdapat lebih dari 70 (tujuh puluh) undang-undang dilakukan perubahan dan atau dicabut dan dilengkapi lebih dari 40 (empat puluh) peraturan pelaksanaannya, baik berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Investasi dan Ketenagakerjaan. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja pada bagian kedua tentang Ketenagakerjaan, dimulai dalam Pasal 81 mengatur perubahan beberapa bagian dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf ini meliputi:

1. Ketentuan tentang lembaga pelatihan kerja (termasuk lembaga pelatihan kerja dengan penyertaan modal asing) wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan Pemda, dan diatur lebih operasional dalam PP.
2. Ketentuan tenaga kerja asing.
3. Ketentuan tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
4. Ketentuan tentang waktu kerja, termasuk waktu lembur, dan soal waktu istirahat dan cuti.
5. Ketentuan soal upah minimum dan hak serta kewajiban pengusaha dan buruh.
6. Ketentuan tentang dewan pengupahan yang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah.
7. Ketentuan tentang PHK.

Adapun amanah penanaman modal dalam skala besar harus bermitra dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah yang cukup besar akan pentingnya kolaborasi kemitraan antara pemodal besar dengan Koperasi dan UMKM dalam memulihkan perekonomian nasional.

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. UU Cipta Kerja mengubah sebagian ketentuan dalam UU tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan dengan merujuk pada ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Dalam hal ketentuan melakukan Amdal Lingkungan yang hanya diperuntukkan pada jenis industri yang beresiko menyebabkan pencemaran lingkungan, maka perlu disusun langkah-langkah strategis agar kemudahan investasi dalam ijin lingkungan ini tidak akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dalam skala yang lebih luas lagi.

b) Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pemulihan perekonomian daerah melalui perdagangan yang adil dan setara di masa Pandemi Covid 19

Amanah UU Tentang Cipta Kerja berkaitan dengan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah Kabupaten Banjar dalam 5 tahun ke depan perlu menyiapkan langkah-langkah strategis dalam merespon amanah UU Cipta Kerja tersebut, termasuk dalam hal ini bidang ketenagakerjaan, investasi, dan pemberdayaan UMKM merupakan isu-isu utama yang sesuai dengan kondisi nyata yang ada di Kabupaten Banjar. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dalam rangka pemulihan perekonomian daerah yang sangat terdampak oleh adanya pandemi Covid 19, sangat diperlukan langkah nyata intervensi Pemerintah Daerah, terutama perlindungan dan pemberdayaan sektor UMKM.

Dalam hal perdagangan, Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur Pasar Rakyat pada Pasal 71 hingga Pasal 84.

4. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur merupakan *Major Project* di dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Biaya pembangunan ibu kota negara ini direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 466 triliun. Sebanyak 19 % akan diambilkan dari APBN, dan sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kabupaten Banjar akan terdampak dengan perpindahan Ibu kota Negara ini, terutama aspek-aspek seperti pertanian, perikanan, produk-produk domestik yang dapat mensuplai kebutuhan Ibu Kota Negara baru tersebut.

5. Isu yang berkaitan dengan Kesehatan, Pangan dan Kependudukan

a) Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Sedangkan untuk rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaannya JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

- Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

b) Stunting

Angka prevalensi stunting Indonesia lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20 persen. Diprediksi bahwa 4 tahun ke depan dari 20 juta kelahiran bayi, tujuh juta di antaranya berpotensi mengalami stunting. Maka presentase bayi yang mengalami stunting di Indonesia akan meningkat. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 kasus stunting di Indonesia bisa ditekan hingga berada di angka 14 persen. Penyebab tingginya angka stunting di Indonesia dikarenakan sebagian kelahiran bayi di Indonesia sudah dalam kondisi kekurangan nutrisi, lalu dibesarkan juga dengan kekurangan zat gizi. kondisi stunting atau gagal tumbuh pada anak sangat terkait dengan gizi penduduk yang buruk dalam periode cukup panjang. Masa 1.000 hari pertama atau sekitar tiga tahun kehidupan sejak masih dalam kandungan, merupakan masa penting pembangunan ketahanan.

c) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Amanah UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar pemerintah daerah melakukan perencanaan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam bidang:

- 1) Bidang kesehatan;
- 2) Bidang pendidikan;
- 3) Bidang industri;
- 4) Bidang fasilitas umum;

Dalam hal ini pemerintah daerah diberi amanah untuk mengurangi hambatan dan menciptakan suasana dan lingkungan yang membuat penyandang disabilitas dapat memenuhi hak-haknya di beberapa bidang sebagaimana disebutkan, sehingga tercipta kesetaraan dalam mengakses hak dan tercipta *equality before the law*.

d) Kedaulatan Pangan

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini adalah merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan Bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan ekonomi lainnya. Kedaulatan pangan merupakan sebuah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal, dimana terdapat 7 (tujuh) prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, yakni : pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan SDA secara berkelanjutan, pangan untuk pangan (tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan), pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

e) **Jaminan Produk Halal**

Pemberlakuan kewajiban bagi setiap pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi produk makanan dan minumannya merupakan hal saat ini menjadi perhatian secara nasional. Amanah itu tercantum dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perlu adanya pendampingan dan fasilitasi serta bantuan keuangan bagi pelaku usaha yang terkategori UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi produk makanan dan minuman serta produk jasa yang menunjang makanan dan minuman. Sertifikasi produk makanan dan minuman bukanlah hal yang mudah bagi pelaku usaha yang terkategori UMKM untuk dapat mengakses dan memenuhi ketentuan sertifikasi tersebut. Oleh karena itu Perangkat Daerah yang mengurus hal ini menjadi *leading sector* dan diberikan wewenang yang cukup untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi.

f) **Bonus Demografi**

Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

g) **Pengarusutamaan Gender.**

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian persepektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

4.2.1.3. **Isu Strategis Regional Pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Selatan**

Isu Strategis Regional Pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Selatan secara garis besar hanya terdapat 6 (enam) kelompok isu utama yaitu :

1. **Pengembangan Wilayah Kalimantan**

- a) Mempertahankan peran Pulau Kalimantan sebagai lumbung energi nasional melalui hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi terbarukan
- b) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, biji besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa
- c) Peran Penyangga Rencana IKN
- d) Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung dan hutan produksi
- e) Mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan

2. **Major Project Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan**

Major Project Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan yang berpengaruh bagi Kabupaten Banjar

- Geo Park Meratus

- Jalan Lintas Batulicin Tanah Bumbu – Kabupaten Banjar – Kota Banjarbaru yang melalui Pegunungan Meratus
- Rencana Pembangunan Bendungan Rian Kiwa
- Rencana Pengembangan Kawasan Bandara dan Sekitar Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru; Aerocity, Kawasan TOD Bandara, Sistem Jaringan Kereta Api Kalimantan Selatan, Kawasan TOD Stasiun Kereta Api.

3. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Metropolitan Banjarbakula

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) merupakan salah satu produk perencanaan tata ruang di tingkat nasional. RTR KSN memiliki urgensi untuk direncanakan mengingat Indonesia memiliki banyak wilayah strategis baik dari kepentingan ekonomi maupun sosial budaya. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut (Banjarbakula). Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan melalui PP 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu disusun rencana tata ruangnya. Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan akan menjadi kota metropolitan dalam 20 tahun kedepan, sehingga rencana tata ruangnya memerlukan pengaturan lebih lanjut agar kabupaten dan kota di sekitarnya termasuk dalam hal ini Kabupaten Banjar dapat mendukung dan menopang perkembangan kota Banjarmasin. Potensi ekonomi yang dimiliki Kawasan Banjarbakula dapat dimanfaatkan sebagai pendukung perkembangan kota, antara lain potensi ekspor industri, dan kawasan lumbung pangan nasional. Pengembangan perkotaan di Banjarbakula diharapkan dapat menerapkan konsep keseimbangan dan keteradilan agar tidak terjadi ketimpangan, karena ketimpangan ini adalah penyebab kotakota di sekitarnya tidak bisa membangun daerahnya sendiri.

4. Isu yang berkaitan dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Pembangunan Kabupaten Banjar tidak hanya memperhatikan isu-isu internasional maupun nasional saja, namun juga memperhatikan isu provinsi. Isu-isu provinsi ini menjadi perhatian dalam pengkajian isu-isu strategis Kabupaten Banjar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar. Berikut ini isu-isu provinsi yang menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis Kabupaten Banjar :

a) Ekonomi Melambat

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang berada di kawasan tropis sehingga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi pelaksana pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan baik secara makro maupun mikro. Sumber daya alam tersebut berpotensi meningkatkan daya dukung perkembangan perekonomian melalui eksploitasi sumber daya alam baik terbaharui maupun tak terbaharukan.

Seiring berjalannya waktu, eksploitasi sumber daya alam mulai memunculkan sebuah permasalahan terkait lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam memberikan efek negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dimana terjadi degradasi yang mengancam masa depan generasi mendatang. Eksploitasi yang paling mengkhawatirkan adalah eksploitasi sumber daya mineral yang merupakan sumber daya tak terbaharui. Meskipun sudah ada UU minerba, namun perihal pertambangan dan penggalian sumber daya mineral harus tetap mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan pergerakan perekonomian wilayah.

Keterkaitan eksploitasi sumber daya mineral dan perekonomian daerah sangat erat terutama di Provinsi Kalimantan Selatan mengingat dominasi struktur ekonomi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang paling tinggi. Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan iklim global akibat degradasi kualitas lingkungan hidup serta menurunnya produksi bahan tambang dan galian, maka perlu perlahan-lahan dilakukan perubahan dominasi struktur ekonomi di Kalimantan Selatan.

Jika melihat salah satu tujuan pembangunan internasional terkait pembangunan berkelanjutan, maka perubahan struktur perekonomian Kalimantan Selatan adalah pergeseran dominasi sector pertambangan dan penggalian menjadi sector pertanian sebagai sector yang memiliki kontribusi terbesar kedua sekaligus sector yang megeksplorasi sumber daya alam terbaharukan. Meskipun kedua sector tersebut memiliki gap yang jauh dalam andil struktur ekonomi, namun jika shifting sector ekonomi dominan ini dilaksanakan dengan kontinu dan komitmen tinggi, maka bukan tidak mungkin pergeseran dominasi struktur akan terjadi dengan dampak positif pada lingkungan hidup.

b) Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

c) Lingkungan Hidup

Proses pemanfaatan Sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Namun Tidak dapat dipungkiri, penambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dinilai berdasarkan kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan/hutan. Permasalahan lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

d) Sarana Prasarana Dan Energi

Pembangunan daerah merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu regional wilayah sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun perlu digarisbawahi bahwa salah satu inti dari tujuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan daerah juga dapat diartikan sebagai pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai, dan sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil batubara di Indonesia. Namun dalam pemanfaatannya, batubara belum menjadi salah satu sumber energi di Kalimantan Selatan. Konsep membangun sejatinya perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan atas dasar penambahan nilai sumber daya. Hal ini merupakan amanat menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 disertai Peraturan menteri ESDM No. 25 tahun 2013, tentang pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Saat ini peningkatan kebutuhan

energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, panas bumi, mini/mickro hidro, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, biogas, dan sampah kota.

e) Pandemi Covid 19

Pada Awal Tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami penyebaran pandemi Novel Corona Virus-2019 (Covid-19). Pandemi ini menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan resesi di seluruh dunia. Dampak negatif yang menjadi permasalahan nasional bahkan global yaitu terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya pengangguran karena banyak pekerja pada perusahaan yang dirumahkan dan di PHK, meningkatnya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan serta menurunnya kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian.

f) Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah perlu adanya perwujudan good governance pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan agar capaian kinerja lebih optimal.

Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparat pemerintah daerah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan perekonomian regional melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup.

g) Ibu Kota Negara Di Kaltim

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai Ibu Kota Negara baru, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelah timurnya berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Sementara itu, sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemindahan Ibu Kota Negara sudah termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan salah satu kegiatan prioritas pengembangan kawasan perkotaan. Salah satu yang mendasari pemindahan ibukota negara yaitu mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris sehingga merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.

Pemindahan Ibukota Negara keluar pulau Jawa untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

5. **Isu yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026**

Kota Banjarbaru memiliki visi pembangunan periode 2021-2026, yaitu “Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera”. Visi tersebut ditopang oleh tiga misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia;
2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah;

Visi dan misi pembangunan Kota Banjarbaru sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunannya. kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan Pembangunan secara umum adalah Terbatasnya anggaran, Ketersediaan infrastruktur dan Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi. Permasalahan utama ini terdiri dari beberapa permasalahan pokok yang menjadi basis bagi penyusunan isu strategis. Berikut ini adalah isu-isu strategis Kota Banjarbaru:

1. Kurangnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat yang Belum Merata
3. Belum terpenuhinya Infrastruktur Daerah yang berkualitas dan masih rendahnya kualitas Lingkungan Hidup.
4. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Letak wilayah Kota Banjarbaru berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Pembangunan di Kota Banjarbaru dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Kabupaten Banjar. Pada konteks ini, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar bisa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarbaru yang dapat berkaitan dengan Kabupaten Banjar antara lain:

Tabel 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 yang berimplikasi pada Kabupaten Banjar

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan 2. Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

6. **Isu yang berkaitan dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2025**

Isu Strategis Kota Banjarmasin akan terpengaruh oleh kondisi pandemi covid-19 yang saat ini melanda seluruh daerah di Indonesia. Adapun Isu Strategis Kota Banjarmasin meliputi :

1. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dengan daya saing yang tinggi dengan tetap memperhatikan keberpihakan kebijakan (advokasi kebijakan) terhadap SDM yang kurang beruntung dan termarginalkan. Permasalahan sumber daya manusia meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menjadi isu strategis dalam lima tahun kedepan.
2. Pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran secara terpadu melalui gerakan masyarakat sadar miskin dan implementasi kebijakan yang inklusif.
3. Peningkatan kualitas Lingkungan hidup dan infrastruktur yang menunjang kelestarian lingkungan. Keseimbangan dan keharmonisan pembangunan infrastruktur dalam menunjang aktifitas ekonomi dan sosial harus disinergikan dengan kebutuhan lingkungan sehingga terjadi *sustainable development*. Pembangunan infrastruktur harus memadukan kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial kemanusiaannya. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, transportasi perhubungan, kawasan kumuh, rumah layak huni, kota layak anak dan perempuan, air minum, limbah rumah tangga dan persampahan, saluran air dan sebagainya perlu mengintegrasikan kepentingan manusia dan lingkungannya.
4. Pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin tersedianya lapangan kerja untuk golongan masyarakat yang

termarginalkan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi menjamin terjadinya pemerataan ekonomi terutama pada golongan masyarakat rentan dan miskin.

5. Reformasi birokrasi (sistem dan aparatur) berbasis Teknologi dan Informasi (sistem daring/online & *smart governance*) yang terintegrasi dengan supra sistemnya untuk mendukung kinerja tinggi sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Peningkatan kapasitas infrastruktur IT harus didukung oleh peningkatan kapasitas ASN.

4.2.2 Isu Internal

Isu internal menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan dari hasil kajian lingkungan hidup strategis maupun dari perumusan permasalahan pembangunan pembangunan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah, antar negara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.2.1 Isu yang berkaitan dengan RPJP Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

Penekanan tahapan pembangunan lima tahunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020-2025 adalah Pemantapan perekonomian daerah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing berbasis agro industri dengan ditunjang peningkatan jaringan pemasaran yang luas, penguatan industri pengolahan, jasa dan perdagangan. Tahapan pembangunan Kalimantan Selatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi

Pengembangan ekonomi Kabupaten Banjar diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor utama yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia; penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi; penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu-hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan; serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.

a. Pengembangan Sektor Utama

Pengembangan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Banjar diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor-sektor utama yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain itu, pengembangan sektor utama juga diarahkan pada peningkatan dan penguatan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri terpadu yang menghasilkan komoditas unggulan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, pengadaan prasarana dan sarana, penguatan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan penguatan pelaku usaha dalam bentuk kemitraan usaha.

b. Pengembangan Kehutanan

Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor utama dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan, percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

c. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.

Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*), keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal; pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah; serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi, dan telekomunikasi.

d. **Pembangunan Infrastruktur.**

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi mengarah pada perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Banjar.

e. **Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah.**

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor utama, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif. Disamping itu, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD) dan penataan manajemen SKPD yang menarik Pajak dan Retribusi Daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar juga perlu melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan berupaya untuk menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah.

f. **Penjaminan Kepastian Hukum.**

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perijinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan; pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

2. **Pembangunan Wilayah**

Pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antar wilayah; pemerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah kabupaten Banjar; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah pedesaan, daerah pedalaman tertinggal dan daerah perbatasan.

Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah, maka arah pengembangan wilayah setiap kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Banjar mengarah menjadi wilayah pengembangan pertanian ke arah agribisnis berbasis perkebunan, kehutanan, dan perikanan; pengembangan transportasi darat dan sungai yang dapat meningkatkan aksesibilitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Kabupaten Banjar;
- Kabupaten Banjar melakukan pengembangan transportasi darat dan sungai yang menghubungkan wilayah terpencil dan terisolir yang pada masa akan datang akan dijadikan wilayah-wilayah pertumbuhan baru; pengembangan industri pengolahan.
- Kabupaten Banjar melakukan pengembangan wilayah untuk pembangunan pusat perkantoran terpadu.
- Kabupaten Banjar menjadi *Hinterland* bagi Kota Banjarbaru dan Banjarmasin yang memasok kebutuhan barang dan jasa bagi kota tersebut.
- Kabupaten Banjar menjadi wilayah pengembangan pariwisata dan pengembangan hutan konservasi

4.2.2.2 **Isu Pembangunan Berkelanjutan**

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana Tabel 4. 3 berikut :

Tabel 4. 3. Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Isu PB Fisik Lingkungan	Isu PB Ekonomi	Isu PB Sosial
1. Sampah	1. Infrastruktur	1. Kesehatan (akses air minum, akses jamban sehat)
2. Alih Fungsi Lahan	2. Sumber Daya Manusia	2. Kemiskinan
3. Air (Kualitas, Kuantitas dan Kotinuitas)	3. Budidaya Perikanan	3. Pendidikan Berkualitas
4. Banjir	4. Pangan dan Gizi	4. Kesetaraan Gender
5. Karhutla	5. Pariwisata	5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
6. Ketersediaan Air Minum	6. Daya Saing Usaha Mikro dan Koperasi	6. Stunting (Kekurangan Gizi)
7. Perubahan Iklim	7. Tenaga Kerja	7. Pernikahan Dini
8. Lahan Kritis		8. NAPZA
9. Limbah B3		

3. Isu PB Strategis Berdasarkan Capaian TPB

Berdasarkan capaian indikator SDGs/TPB, maka diperoleh isu PB strategis berdasarkan capaian TPB adalah:

- a. Kemiskinan
- b. Pendidikan
- c. Air bersih dan sanitasi
- d. Energi bersih dan terjangkau
- e. Industri inovasi dan infrastruktur
- f. Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem

4. Isu PB Strategis Berdasarkan 6 Muatan Lingkungan Hidup

Berdasarkan kondisi 6 muatan terdiri atas DDDT, Jasa Ekosistem (JE) dan lainnya diperoleh isu PB strategis sebagai berikut:

- a. Alih Fungsi Lahan
- b. Penurunan kualitas dan kuantitas air
- c. Kebakaran Hutan dan Lahan
- d. Ketahanan Pangan
- e. Penurunan Kualitas Udara
- f. Sampah dan limbah B3
- g. Sinkronisasi Tata Ruang dan Status Lahan

5. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banjar, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup, maka isu PB Prioritas sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Alih Fungsi Lahan
- d. Air (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas)
- e. Infrastruktur
- f. Sanitasi (Sampah dan Limbah)

4.2.2.3 Isu Prioritas Kabupaten Banjar

Isu prioritas yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia

Pembangunan manusia yang berkualitas pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi jangka panjang. Upaya pemerintah Kabupaten Banjar dalam pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan dan pendidikan maka akan berkesempatan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif dalam berkarya maka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kebijakan sumber daya manusia yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Banjar fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.

Pada sektor kesehatan Pemerintah Kabupaten Banjar berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puseksmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pemerintah Kabupaten Banjar juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dll. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Banjar juga fokus terhadap pemenuhan alat kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, AKB, Stunting, pemberantasan penyakit, penyediaan air bersih dan sanitasi. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta sumber daya manusia kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Pemerintah Kabupaten Banjar juga memperhatikan kemampuan daya beli kesehatan dan pendidikan masyarakat yang semakin menurun di era

Covid 19 ini, maka perlu upaya-upaya terukur dan sistematis untuk membantu masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut.

2. Peningkatan Ekonomi Yang Berkualitas untuk Pemerataan hasil pembangunan daerah Yang berkeadilan

Kabupaten Banjar mengupayakan pembangunan kemandirian ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan ketimpangan pendapatan serta menurunkan pengangguran melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah, pengembangan komoditas unggulan dan sumber daya alam. Selanjutnya kabupaten Banjar juga berupaya meningkatkan daya saing pertanian tanaman pangan untuk swasembada pangan serta keunggulan sektor perikanan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha perikanan. Pengembangan industri pengolahan, industri kreatif, pariwisata dan digital seiring dengan pengembangan Koperasi & UMKM yang sehat dan berkualitas.

Pemanfaatan e-ekonomi juga perlu diperhatikan. Karena perubahan pola interaksi masyarakat yang saat ini beralih ke pelayanan bisnis menggunakan fasilitas IT dan internet. Salah satu upaya meningkatkan pajak daerah seharusnya didorong sistem transaksi dengan menggunakan e-payment. Pemanfaatan sistem ini akan memudahkan deteksi pembayaran pajak pendapatan. Hal ini diimbangi dengan restrukturisasi kebijakan keuangan melalui alokasi dan distribusi anggaran yang adil dan berpihak kepada masyarakat marginal yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. Seluruh Kab/Kota di Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayahnya baik sifatnya mendukung program kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan juga sebagai pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sebagai pelaku mengandung maksud bahwa Pemerintah Daerah juga turut berpartisipasi mengarahkan program/kegiatan yang ada untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Masyarakat yang termarginalkan lainnya juga harus dimasukkan dalam agenda pembangunan. Termasuk dalam hal ini masyarakat yang terkena dampak covid 19 sehingga menjadi tidak berdaya, termasuk kaum difabel yang kurang berdaya. Kebijakan sosial yang inklusif tidak membiarkan warga masyarakatnya yang termarginalkan tanpa perhatian dari pemerintah. Termasuk dalam hal ini warga yang menganggur karena adanya pemutusan hubungan kerja atau kegiatan usaha masyarakat yang gagal dalam situasi covid saat ini. Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar. Oleh Karena itu perlu adanya peningkatan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berkelanjutan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup masih merupakan isu utama, apalagi adanya kewajiban untuk memenuhi standar SDGs yang telah disepakati bersama secara internasional. Pembangunan fisik/ infrastruktur memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tercipta lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan tata ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan perlunya penataan ruang terbuka hijau yang lebih optimal. Pembangunan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni akan menjadi prioritas utama melalui peningkatan prasarana, sarana & utilitas pemukiman.

Kejadian bencana alam seperti banjir dan kebakaran dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Lingkungan hidup merupakan isu strategis baik di level internasional, regional dan local. Keseimbangan dan keharmonisan pembangunan infrastruktur dalam menunjang aktifitas ekonomi dan sosial harus disinergikan dengan kebutuhan lingkungan sehingga terjadi sustainable development. Pembangunan infrastruktur harus memadukan kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial kemanusiaannya. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, transportasi perhubungan, pemukiman, rumah layak huni, kota layak anak dan perempuan, air minum, limbah rumah tangga dan persampahan, saluran air dan sebagainya perlu mengintegrasikan kepentingan manusia dan lingkungannya.

4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, terpercaya dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan cultureset.

Selain itu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih dalam rangka m Salah satu prasyarat pembangunan yang berkualitas adalah terciptanya keamanan dan ketertiban. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan IoT (internet of thing). Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan Prima sebagaimana menuntut pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat dan hemat di Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui reformasi pelayanan publik. Peningkatan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah terus diupayakan optimal. Refromasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitasnya dilaksanakan melalui dukungan e-gov yang terintegrasikan.

5. Perwujudan masyarakat yg agamis, berakhlak baik dan berkepribadian luhur untuk menjaga kerukunan umat dalam suasana aman, tertib dan demokratis

Berakhlak adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kesalehan sosial yg tinggi, keadaban sosial dan karakter yang luhur. Berakhlak berarti harus terjadi keseimbangan budi pekerti yaitu akhlak yang mulia berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya. Akhlak adalah jiwa yang mewarnai seluruh aspek pembangunan dalam strategi, kebijakan dan program2 prioritas pembangunan untuk pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing. Berakhlak berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga dengan kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga dapat membangun warga yang memiliki nilai solidaritas yang tinggi dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, serta memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berakhlak. Warg masyarakat yang menghormati keragaman dalam suasana demokratis untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersaha, sehingga terhindar dari konflik vertical dan horizontal.

Tabel 4. 4. . Rekapitulasi Isu Eksternal yang berdampak pada Daerah dan Isu Internal Daerah Kabupaten Banjar dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026

Asal Isu	Dampaknya terhadap Kabupaten Banjar
Isu Strategis Eksternal Dunia Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemi Covid-19, reaksi hingga dampaknya 2. Perubahan Iklim (Climate Change) 3. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
Isu Strategis Eksternal Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Nasional 2. Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya 4. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur 5. Kesehatan, Pangan dan Kependudukan

Asal Isu	Dampaknya terhadap Kabupaten Banjar
Isu Strategis Eksternal Regional Pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Kalimantan lumbung energi nasional 2. Pengembangan industri berbasis komoditas 3. Peran Penyangga Rencana IKN 4. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Metropolitan Banjarbakula
Isu Strategis Internal Daerah Kabupaten Banjar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia 2. Peningkatan Ekonomi Yang Berkualitas untuk Pemerataan hasil pembangunan daerah Yang berkeadilan 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang berkelanjutan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, terpercaya dan Akuntabel 5. Perwujudan masyarakat yg agamis, berkahlak baik dan berkepribadian luhur untuk menjaga kerukunan umat dalam suasana aman, tertib dan demokratis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar. Upaya mengelaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pelayanan publik dan daya saing di Kabupaten Banjar. Berikut akan dibahas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ini.

Kabupaten Banjar merupakan “*Serambi Mekkah*” dan Kota Intan yang belum optimal dikembangkan. Berbagai permasalahan yang masih belum selesai dan pencapaian indikator-indikator pembangunan yang belum optimal merupakan tantangan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis. Kekuatan kerja bersama adalah modal utama dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar. Maka, dalam lima tahun ke depan, dengan nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat bekerja bersama dapat membawa Kabupaten Banjar menjadi daerah yang maju, mandiri, dan agamis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

5. 1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 5. 1. Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MAJU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang. ○ Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau <i>Human Development Index</i> (HDI).

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MANDIRI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. ○ Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. ○ Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
AGAMIS	<p>Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.</p>

Kabupaten Banjar maju merupakan manifestasi dari upaya melakukan Perubahan. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Banjar. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Banjar di semua aspek kehidupan. Kabupaten Banjar maju berarti lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental–spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Kabupaten Banjar Mandiri yaitu mengupayakan pelaksanaan pembangunan secara mandiri dengan mengurangi ketergantungan dari pihak-pihak lain. Kemandirian daerah bermakna suatu kondisi dimana daerah tersebut tidak tergantung pada pihak lain seperti daerah lain ataupun pusat dalam pembangunan didaerahnya. Kemandirian ekonomi (keuangan) dan non ekonomi mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah.

Kabupaten Banjar melaksanakan pembangunan berlandaskan nilai-nilai dan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.

5. 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Lima butir misi diatas merupakan janji politis Kepala Daerah Kabupaten Banjar terpilih kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Kelima misi tersebut diatas dijelaskan pada uraian berikut ini.

▪ MISI 1 : PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Kualitas hidup sudah menjadi isu utama di banyak negara saat ini (Molnar, 2009), tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah konsep meningkatnya popularitas yang bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan menyeluruh dalam jangka panjang melalui penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi yang bijak, dan melalui penghormatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya (Grizans, 2009). Kesejahteraan tersebut mengacu pada kesejahteraan anggota masyarakat, dan kesejahteraan sendiri dapat diukur melalui indeks kualitas hidup (Appulembang & Dewi, 2017). Kualitas hidup atau *Quality of Life* (QoL) merupakan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh individu atau sekelompok orang (Molnar, 2009). Kualitas hidup adalah konsep multidimensional yang kompleks (RADF, 2009). Kualitas hidup merupakan keadaan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia atau lebih dipertajam lagi berkaitan erat dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

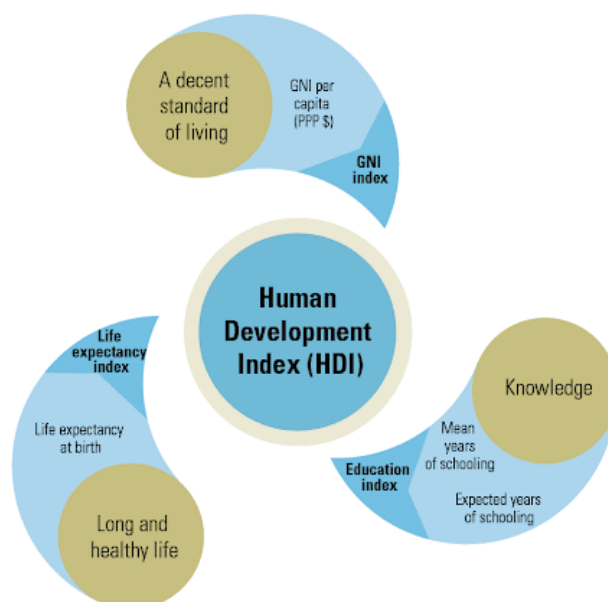
Dalam perspektif *the United Nation Development Program* (UNDP) pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf/ tingkat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/ keterampilan tersebut.

Konsep pembangunan manusia menurut UNDP mengandung empat unsur yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan pembangunan tentang penduduk (*of people*), untuk penduduk (*for people*) dan oleh penduduk (*by people*) dimana:

- Unsur Tentang Penduduk (*of people*), adalah pemberdayaan penduduk diupayakan melalui investasi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pelayanan sosial lainnya.
- Unsur Untuk Penduduk (*for people*), adalah pemberdayaan penduduk yang dapat diupayakan melalui program penciptaan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan berusaha (dengan cara memperluas kegiatan ekonomi suatu wilayah).

Unsur Oleh Penduduk (*by people*), adalah pemberdayaan penduduk yang dapat meningkatkan harkat dan martabat melalui peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam bidang politik dan proses pembangunan.

Gambar 5. 1. Konsep Indeks Pembangunan Manusia Menurut UNDP



▪ MISI 2 : PENINGKATAN EKONOMI YANG BERKUALITAS BERBASIS KERAKYATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKEADILAN

Pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang di mana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan yang lainnya adalah suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat

memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 negara memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi kerakyatan, melalui Badan Usaha Milik Negara, yang menguasai produksi hajat hidup orang banyak. Ciri dari sistem ekonomi kerakyatan adalah :

1. Peranan pemerintah yang menunjang terbentuk ekonomi kerakyatan, yang tidak saja terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian melalui badan usaha negara, tetapi tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
2. Efisiensi ekonomi berdasarkan keadilan, partisipasi dan berkelanjutan, kedua, mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan kerjasama.
3. Pemerataan penguasaan faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.
4. Pola hubungan produksi kemitraan, sebagaimana ditegaskan Bung Hatta pada koperasi tak ada majikan dan buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”, ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan tidak adanya individualistis dan kapitalistis.
5. Kepemilikan saham oleh pekerja, Mekanisme pasarnya, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui usaha bersama koperasi. Mekanisme pasar koperasi sama dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Konsep ekonomi kerakyatan dengan pemerataan secara operasional dapat dibagi pada dua konsep besar, yakni konsep kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan lain-lain, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum disebut lebih dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang luas. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai motor penggerak sistem ekonomi kerakyatan mampu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Banjar dititikberatkan pada ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas sehingga mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, menurunkan angka pengangguran dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

▪ **MISI 3 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang muncul dan berawal dari rasa keprihatinan negara-negara dunia terhadap timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akan keberlangsungan fungsi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya terhadap kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pemahaman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang sangat luas, integratif dan komprehensif, tidak saja mengandung dimensi fisik-ekologis, melainkan juga sosial, budaya, politik dan hukum. Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting dan mendasar dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang oleh karena ketimpangan itu cukup besar. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan bukan merupakan konsep yang statis dan deterministik (tidak dapat dirubah), namun merupakan suatu konsep yang dinamis dan terbuka sehingga perlu terus untuk dikaji dan dikembangkan.

▪ **MISI 4 : PENYELENGGARAAN KEPEREMINTAHAN YANG AMANAH, BAIK, BERSIH DAN EFEKTIF**

Konsep “*governance*” bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki kesamaan arti yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi lembaga atau negara. Definisi *government* atau pemerintah adalah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan *governance* seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak (World Bank, 1989).

Selanjutnya, banyak definisi tentang *good governance*, namun definisi yang paling umum adalah pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a).

Tata kelola pemerintahan dalam hukum Islam menghendaki pemerintahan yang bersih dan lembaga-lembaga pemerintahan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan profesional. Tugas dan tujuan utama pemerintahan adalah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat.

Kabupaten Banjar sebagai kabupaten yang religius dengan julukan “*Serambi Mekkah*” memiliki ciri khas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni pemerintahan yang amanah, baik, bersih, dan efektif. Sesuai dengan nilai-nilai Akhlak yang Baik (*Akhlakul Karimah*) seperti jujur yang tinggi (integritas), amanah atau tingkat kepercayaan yang tinggi (kredibilitas) oleh masyarakat.

▪ **MISI 5 : PENGUATAN KARAKTER MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERAKHLAK BAIK DAN BERKEPRIBADIAN LUHUR, SERTA MENCIPTAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, DAN DEMOKRATIS**

Karakter merupakan suatu ciri khas yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karakter adalah hal dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada masa sekarang, banyak kasus kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat. Darwis, (2010) menyebutkan ada lima fungsi yang dapat diperankan oleh agama, yaitu:

1. Memberikan arti (*value*) hidup manusia, dalam arti keyakinan hidup dalam emosi dan afeksi manusia. Keyakinan hidup ini mendorong adanya perilaku ibadah, yaitu kepasrahan kepada Tuhan yang memberikan hidup dan perilaku manusia dalam berdoa mengharapkan pertolongan Tuhan;
2. Memberikan dukungan psikologis untuk mendapatkan ketenangan hidup, mengatasi dan terhindar dari kegoncangan jiwa, memperkuat kestabilan psikologis dengan konsep sabar, syukur, ikhlas, tawakal, sakinah, sakinah, qanaah, dsb;
3. Membentuk solidaritas sosial dengan memberikan tuntunan bagi kehidupan umat manusia untuk menjalin ukhuwah islamiyah, hidup saling menghargai, memupuk kerukunan dan kedamaian, saling menolong yang dalam konteks ibadah dituntunkan dengan shalat berjamaah, konsep jamaah, konsep zakat, dan tuntunan suka berderma kepada anak yatim, orang miskin serta orang lain yang memerlukan pertolongan;
4. Mengendalikan kehidupan manusia secara dinamis ke arah yang baik dan menjauhi perbuatan tercela, berkaitan dengan norma-norma kehidupan, adanya konsep pahala dan dosa yang menuntun perilaku manusia menuju perilaku yang baik untuk mendapatkan pahala dan dapat dijadikan contoh, bukan perilaku yang menimbulkan kerusakan dan mendatangkan dosa; dan
5. Memacu perubahan sosial secara dinamis untuk menjadi yang terbaik dengan konsep khaira ummah dalam mengejar dari ketertinggalannya, memajukan pendidikan, meraih prestasi, menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kemampuan profesionalisme untuk kemanfaatan bersama menuju kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 2. Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Banjar Tahun 2021 2026

VISI	Pokok Pokok VISI	Penjelasan
Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis	Maju	MISI 1: Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas sumber daya manusia MISI 4: Penyelenggaraan kePemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif

VISI	Pokok Pokok VISI	Penjelasan
	Mandiri	MISI 2: Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan MISI 3: Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
	Agamis	MISI 5: Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Misi ke 1 “Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia dan misi ke 4 yaitu “Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif berhubungan dengan pokok Visi “Banjar Maju”. Maju dalam hal ini bila posisi peringkat indikator pembangunan meningkat dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya , pokok-pokok Visi “Banjar Mandiri” berhubungan dengan Misi ke 2 “Peningkatan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah Yang Berkeadilan” dan Misi ke 3 yaitu “Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”. Dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif serta potensi daerah, Masyarakat Banjar Mandiri dalam hal pembangunan dengan meminimalisasi bantuan dari pihak lain tetapi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.

Pada akhirnya pokok-pokok visi “Banjar Agamis” berhubungan dengan misi ke 5 yaitu “Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis”. Masyarakat Banjar melaksanakan pembangunan berlandaskan nilai-nilai dan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakatnya. Masyarakat mengutamakan kerukunan inter dan antar umat beragama yaitu diantara umat yang seagama dan berbeda agama. Hal ini diharapkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis. Masyarakat yang terhindar dari konflik vertikal dan horizontal. Masyarakat bersatu untuk kemajuan pembangunan di daerahnya.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banjar yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan kepala daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD. Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

5.3.1. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Misi Pertama mempunyai 1 tujuan yaitu: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan ini dibagi menjadi 5 sasaran yaitu:

- Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan
- Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan
- Sasaran 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat
- Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat
- Sasaran 5 : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak

5.3.2. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Misi kedua adalah Peningkatan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan Dan Pemerataan Pembangunan Daerah Yang Berkeadilan dengan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut ini:

- Tujuan 1 : Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas
- Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi
- Sasaran 2 : Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan
- Sasaran 3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital
- Tujuan 2 : Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran
- Sasaran 1 : Menurunnya Angka Pengangguran

- Sasaran 2 : Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM
- Sasaran 3 : Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
- Sasaran 4 : Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial
- Sasaran 5 : Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan Perdesaan
- Sasaran 6 : Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga
- Sasaran 7 : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Misi ketiga adalah Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, untuk lebih mengoperasionalkan misi tersebut diperlukan tujuan dan sasaran sebagai berikut ini.

- Tujuan : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan
- Sasaran 1 : Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah
- Sasaran 2 : Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni
- Sasaran 3 : Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan
- Sasaran 4 : Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup

5.3.4. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Misi keempat adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif. Dalam upaya lebih mengoperasionalkan misi keempat tersebut maka disusun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif
- Sasaran 1 : Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah
- Sasaran 2 : Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik
- Sasaran 3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja
- Sasaran 4 : Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Sasaran 5 : Berkembangnya profesional ASN
- Sasaran 6 : Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik

5.3.5. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Misi kelima RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah Penguatan Karakter Masyarakat Yang Religius, Berakhlak Baik Dan Berkepribadian Luhur, Serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Dan Demokratis. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan tujuan dan sasaran yakni:

- Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur
- Sasaran 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;
- Sasaran 2 : Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter & kepribadian luhur masyarakat Banjar
- Sasaran 3 : Meningkatkan peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga
- Sasaran 4 : Meningkatkan ketertiban umum & ketenteraman di masyarakat

Selanjutnya ditampilkan tabel tujuan sasaran beserta indikator dan target kerjanya sebagaimana disebutkan dalam Tabel 5.3. dibawah

Tabel 5. 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)/ 2020	Target Capaian Kinerja					Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
M1	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia									
	Tujuan 1.1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IPM	69,18	70,18	70,64	71,09	71,55	72,01	72,01	Kepala Daerah
		IPG	90,50	92,03	92,17	92,32	92,47	92,61	92,61	Kepala Daerah
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan	Indeks Kesehatan	72,63	73,36	73,76	74,15	74,55	74,94	74,94	Dinas Kesehatan
	Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	Indeks Pendidikan	59,06	60,39	60,79	61,24	61,74	62,29	62,29	Dinas Pendidikan
	Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	77,21	78,04	78,29	78,53	78,78	79,02	79,02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Sasaran 1.1.4 : Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,19	80,19	80,29	80,39	80,49	80,59	80,59	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)/ 2020	Target Capaian Kinerja					Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Sasaran 1.1.5 : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,52	81,02	81,52	82,02	82,52	83,02	83,02	DP2KBP3A
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	NA	65,64	67,43	69,24	71,06	72,89	72,89	DP2KBP3A
M2	Misi 2 : Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan									
	Tujuan 2.1 : Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,96	2,50%	2,80%	3,53%	4,27%	5,01%	5,01%	Kepala Daerah
		Pendapatan Per Kapita	Rp19.688.020,0 0	Rp20.882.0 00,00	Rp21.177.0 00,00	Rp21.628.0 00,00	Rp22.247.0 00,00	Rp23.046.0 00,00	Rp23.046.0 00,00	
	Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas	NA	68,28	72,70	75,46	78,21	80,96	80,96	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
	Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	-4,18%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		LPE sub sektor perikanan	1,91%	3,60%	3,74%	3,88%	4,04%	4,21%	4,21%	Dinas Peternakan dan Perkebunan Dinas Perikanan

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)/ 2020	Target Capaian Kinerja					Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	-2,87%	1,98%	2,02%	2,07%	2,11%	3,42%	3,42%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah kunjungan wisatawan	3.702.958	4.000.000	4.250.000	4.500.000	4.750.000	5.000.000	5.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Tujuan 2.2 : Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran	Persentase Penduduk miskin	2,55%	2,83%	2,72%	2,70%	2,67%	2,64%	2,64%	Kepala Daerah
		Indeks Gini	0,322	0,313	0,312	0,311	0,310	0,309	0,309	Kepala Daerah
	Sasaran 2.2.1 : Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,87	3,11	3,09	3,06	3,04	3,01	3,01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Sasaran 2.2.2 : Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	34,23%	36,94%	39,64%	42,34%	45,05%	47,75%	47,75%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	4,77%	7,74%	10,72%	13,69%	16,66%	19,64%	19,64%	
	Sasaran 2.2.3 : Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,37 (NTP : Kalsel)	103,82	104,36	104,90	105,44	105,98	105,98	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)/ 2020	Target Capaian Kinerja					Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
	untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan									Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan
	Sasaran 2.2.4 : Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mandiri	NA	15%	17%	20%	25%	27%	27%	Dinas Sosial
	Sasaran 2.2.5 : Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6451	0,6679	0,6793	0,6907	0,7021	0,7135	0,7135	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Sasaran 2.2.6 : Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	58,82%	72,22%	82,14%	86,84%	89,58%	91,38%	91,38%	DP2KBP3A
	Sasaran 2.2.7 : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	NA	73,25	74,74	76,14	77,41	78,82	78,82	Dinas PUPR

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)/ 2020	Target Capaian Kinerja					Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
M3	Misi 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan									
	Tujuan 3.1 : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,25	61,93	62,25	62,58	62,78	62,93	62,93	Kepala Daerah
	Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	92,14%	94,512%	94,519%	94,526%	94,533%	94,540%	94,540%	Dinas PUPR Dinas Pertanahan
	Sasaran 3.1.2 : Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase kawasan kumuh	10,76%	9,67%	9,52%	9,36%	9,20%	9,05%	9,05%	Dinas Perumahan dan Pemukiman dan DLH
	Sasaran 3.1.3 : Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	152,60	151,6	150,6	149,6	148,6	147,6	147,6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sasaran 3.1.4 : Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup	Jumlah pelanggaran LH	NA	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
M4	Misi 4 : Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif									
	Tujuan 4.1 : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	53,76	60,5	65	70,5	75	80,05	80,05	Kepala Daerah

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)/ 2020	Target Capaian Kinerja					Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
		Indeks Inovasi Daerah		49,10	50,05	54,20	58,15	60,10	60,10	Kepala Daerah
	Sasaran 4.1.1 : Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-7,55%	4%	4%	4%	4%	4%	4,00%	Badan Pendapatan Daerah
	Sasaran 4.1.2 : Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,44	84,00	85,00	86,00	87,00	88,31	88,31	Sekretariat Daerah Seluruh SKPD
	Sasaran 4.1.3: Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai Sakip	68,97	72,65	74,49	76,32	78,16	80,00	80,00	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang, Inspektorat
	Sasaran 4.1.4 : Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi	NA	3,05	3,19	3,31	3,48	3,69	3,69	Inspektorat
	Sasaran 4.1.5 : Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	52,66	60,00	61,50	65,50	69,00	73,00	73,00	BKDPSDM
	Sasaran 4.1.6 : Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	NA	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistika

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)/ 2020	Target Capaian Kinerja					Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
M5	Misi 5 : Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis									
	Tujuan 5.1 : Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur	Rasio Kriminalitas	11,08	7,73	7,70	7,67	7,64	7,61	7,61	Kepala Daerah
		Persentase Forum Komunikasi Umat Beragama yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Daerah
	Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;	Angka kasus konflik ideologi Pancasila & Agama	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sasaran 5.1.2 : Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar;	Jumlah apresiasi Budaya Banjar	NA	6	7	8	9	10	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan Santri dalam Olahraga	60 medali	166 medali	108 medali	69 medali	261 medali	29 medali	633 medali	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)/ 2020	Target Capaian Kinerja					Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Sasaran 5.1.4: Meningkatkan ketertiban umum & ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran perda dan trantibum	2,19	2,01	1,92	1,84	1,75	1,67	1,67	Satuan Polisi Pamong Praja

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Banjar mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Banjar diarahkan dalam rangka untuk menumbuhkan ketahanan dan sikap kemandirian anggota masyarakat serta peningkatan peran segenap unsur masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kepercayaan kepada penyelenggaraan pemerintah daerah, mewujudkan keamanan dan ketenteraman serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah.

6.1. Strategi Kabupaten Banjar

Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

6.1.1. Strategi Umum

Secara umum, strategi pembangunan adalah cara/pendekatan/kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode RPJMD. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun **Strategi Umum**, yang menggambarkan mengenai cara/ pendekatan/ kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah.

Strategi Umum RPJMD Kabupaten Banjar terdiri atas lima poin sebagai pengejawantahan dari semangat Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. Adapun lima Strategi Umum tersebut adalah:

Strategi Umum 1: Pembangunan Berpusat pada Manusia (*people centered development*)

Pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusatkan pada manusia/ rakyat (*People Centered Development*), diawali dengan pemahaman tentang Ekologi Manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Ekologi manusia dalam ekosistem merupakan salah satu kajian dari Ekologi. Ekologi Manusia menjadi landasan berkembangnya paradigma pembangunan yang berpusatkan pada masyarakat. Pembangunan yang berpusat pada manusia memiliki dampak strategis, dalam jangka pendek dapat menstimulus masyarakat untuk dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahannya dan dalam jangka Panjang sumberdaya manusia (*human resources*) merupakan unsur utama pendukung kemajuan daerah.

Strategi Umum 2: Penguatan Ekonomi Berkualitas Simultan dengan Percepatan Ekonomi Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan

Posisi penting Kabupaten Banjar dalam konstelasi pembangunan Kalimantan Selatan, maka memerlukan strategi pembangunan yang tepat. Struktur perekonomian Kabupaten Banjar di dukung oleh sektor primer serta ekonomi rakyat lainnya. Level sektor dengan kontribusi besar dan kecil ini tidak dapat diposisikan berdiri sendiri-sendiri. Namun perlu dikelola secara simultan agar

memiliki daya ungkit yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pada titik inilah, strategi ini menemukan relevansinya dalam pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2021-2026.

Strategi Umum 3: Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan berdasarkan pendekatan “Triple Bottom Line”

Pembangunan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan yang ada namun tetap menjaga kelestariannya. Strategi “Triple Bottom Line” mengharuskan pembangunan yang seimbang antara sektor ekonomi dengan sosial dan lingkungan. Industrialisasi tidak boleh mengorbankan atau merusak sektor lingkungan dan sosial masyarakat. Oleh karena keberhasilan pembangunan tergantung pada sejauh mana keberhasilan pembangunan diimbangi dengan kelestarian lingkungan alam dan manusianya.

Strategi Umum 4: Penguatan Tatakelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi syarat wajib bagi lancarnya roda pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka strategi ini menjadi poin penting dalam pembangunan Kabupaten Banjar Penguatan tata kelola pemerintahan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas

Strategi Umum 5: Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Spirit Pembangunan.

Bagian utama pembentuk karakter masyarakat tidak lepas dari nilai (value) yang mendasarinya. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang besar adalah negara yang berpijak pada akar nilai budaya dan tradisi yang telah membentuknya dalam kurun waktu yang lama. Keberhasilan mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan tradisi akan menjadi petunjuk jalan bagi pengembangan dan kemajuan daerah. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah kabupaten Banjar menempatkan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit pembangunan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi disharmonisasi atau konflik yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

6.1.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Banjar juga merumuskan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran, yaitu cara/pendekatan/kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD. Strategi Umum memiliki lingkup tingkat daerah, sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran memiliki lingkup tingkat Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Strategi Umum ini menjadi dasar dalam perumusan Strategi Tujuan dan Sasaran. Sedangkan rumusan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran disajikan secara detail dalam Tabel 6.1.

Tabel 6. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Banjar

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Sasaran 1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan	Strategi 1.1 Menedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat
	Sasaran 1.2 Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	Strategi 1.2 Meningkatkan <i>hard skill & soft skill</i> berlandaskan etika budaya & agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil & produktif
	Sasaran 1.3 Meningkatnya daya beli masyarakat	Strategi 1.3a Melakukan upaya untuk menstabilkan harga & akses masyarakat miskin & berdaya beli

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		rendah terhadap barang2 kebutuhan pokok
		Strategi 1.3b Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
	Sasaran 1.4 Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Strategi 1.4 Melakukan upaya diversifikasi keanekaragaman pangan serta upaya ketahanan pangan dan gizi masyarakat secara terpadu
	Sasaran 1.5 Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Strategi 1.5 Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/ advokasi dan pemberdayaan terhadap perempuan & anak
Misi 2: Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan		
Tujuan 2.1: Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif & berkualitas	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Strategi 2.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pembangunan sektor unggulan
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	Strategi 2.1.2a Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian masyarakat, mekanisasi pertanian
		Strategi 2.1.2b Ekstensifikasi pertanian melalui revitalisasi dan rehabilitasi lahan tidur dan lahan pertanian yang rusak menjadi lahan pertanian yang produktif.
		Strategi 2.1.2c Meningkatkan produktivitas hasil perikanan melalui penyediaan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		infrastruktur pendukung, sarana dan prasarana, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kemampuan nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan serta pemasar hasil perikanan
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	Strategi 2.1.3a Meningkatkan daya saing industri besar, menengah & kecil serta industri kreatif, serta meningkatkan fasilitas sarana & prasarana pelayanan untuk menunjang perkembangan Industri. Hulunilasaki dan hilirisasi sektor industri yang terintegrasi dengan baik
		Strategi 2.1.3b Peningkatan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif
		Strategi 2.1.3c Pengembangan infrastruktur digital dan program-program inovasi digital sektor perekonomian dan usaha produktif masyarakat dengan mengutamakan produk unggulan Kabupaten Banjar
Tujuan 2.2 Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran	Sasaran 2.2.1 Menurunnya Angka Pengangguran	Strategi 2.2.1a Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui <i>link & match</i> antara kebutuhan <i>suply & demand</i> tenaga kerja, terutama tenaga kerja penganggur
		Strategi 2.2.1b Mempercepat tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan, sektor ekonomi kreatif, dan sektor ekonomi unggulan
	Sasaran 2.2.2 Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Strategi 2.2.2a Meningkatkan upaya pemulihan & pengembangan Koperasi Sehat & UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing & terserap pasar melalui kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, swasta, media & akademisi
	Sasaran 2.2.3 Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Strategi 2.2.3 Upaya pengembangan hasil pertanian & perikanan yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani/ Nelayan & Masyarakat Pengguna hasil pertanian/perikanan
	Sasaran 2.2.4	Strategi 2.2.4a

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS Strategi 2.2.4b Reformasi sistem penyaluran bantuan sosial sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM
	Sasaran 2.2.5 Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan	Strategi 2.2.5 Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa untuk melakukan inovasi, partisipatif inklusif, transparan serta akuntabel.
	Sasaran 2.2.6 Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Strategi 2.2.6 Upaya peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera khususnya melalui usaha mandiri ibu rumah tangga
	Sasaran 2.2.7 Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Strategi 2.2.7 Upaya membangun infrastruktur fisik dan non fisik termasuk komunikasi dan informasi melalui IT dll untuk pembangunan yang berkeadilan antar wilayah dan masyarakat.
Misi 3: Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		
Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Sasaran 3.1 Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Strategi 3.1 Upaya mensinkronkan rencana tata ruang dengan realisasi pembangunan
	Sasaran 3.2 Terciptanya permukiman yang nyaman dan layak huni	Strategi 3.2 Upaya penataan permukiman padat guna mewujudkan permukiman yang nyaman dan layak huni
	Sasaran 3.3 Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan	Strategi 3.3 Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar siap, tangguh dan sadar akibat bencana alam
	Sasaran 3.4 Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup	Strategi 3.4 Upaya penataan sarana & prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja
Misi 4: Penyelenggaraan kePemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif		

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 4: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih & efektif	Sasaran 4.1 Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah	Strategi 4.1 Upaya ekstensi dan intensifikasi sumber PAD seperti penggalian potensi transaksi perdagangan dan ekonomi berbasis elektronik
	Sasaran 4.2 Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Strategi 4.2a Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat
		Strategi 4.2a Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
	Sasaran 4.3 Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Strategi 4.3a Upaya peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan sistem yang terintegrasi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pelaporan
		Strategi 4.3b Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh SKPD berdasar standar akuntansi pemerintah
		Strategi 4.3c Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	Sasaran 4.4 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Strategi 4.4 Upaya pengembangan kinerja sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yang akuntabel, bersih & berintegritas
Sasaran 4.5 Berkembangnya profesionalitas ASN	Strategi 4.5 Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit	
Sasaran 4.6 Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Strategi 4.6 Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana & prasarana IT yang memadai	
		Strategi 4.7 Percepatan dalam koordinasi dan kolaborasi pengembangan e-government yang terintegrasi
Misi 5: Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis		
Tujuan 5 Terwujudnya masyarakat yang berakhlak dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan	Sasaran 5.1 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;	Strategi 5.1 Pengarusutamaan nilai-nilai pancasila dan agama dalam bidang pendidikan sejak usia dini
	Sasaran 5.2 Mengembangkan seni budaya Banjar & seni budaya religius yang mencerminkan karakter	Strategi 5.2 Upaya mendorong pengembangan kelompok budaya dan seni khas Banjar secara berkelanjutan secara nasional maupun internasional

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
berkepribadian luhur	& kepribadian luhur masyarakat Banjar	
	Sasaran 5.3 Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Strategi 5.3 Upaya fasilitasi peran pemuda dan santri yang berkinerja tinggi dalam seni budaya dan olah raga
	Sasaran 5.4 Meningkatkan ketertiban umum & ketenteraman di masyarakat	Strategi 5.4 Upaya pencegahan terjadi konflik ideologi dan SARA dimasyarakat melalui kolaborasi dengan sektor keamanan dan pertahanan lintas wilayah dan nasional
		Strategi 5.5 Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholders* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan untuk apa yang harus dilakukan yang kemudian dijadikan tema RKPD. Berikut arah kebijakan tahunan Kabupaten Banjar disajikan dalam Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar

Arah Kebijakan				
2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan kualitas SDM khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan daya beli serta pemulihan ekonomi masyarakat dalam koridor karakter masyarakat yang agamis	Kemandirian ekonomi rakyat dengan dukungan SDM berkualitas serta Infrastruktur dan tata kelola pemerintahan baik sebagai penunjangnya	Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pengembangan SDM dan Ekonomi kerakyatan yang berorientasi lingkungan	Pembangunan Lingkungan yang berkelanjutan dengan dukungan hasil reformasi birokrasi dan ekonomi hijau lingkungan dengan dukungan pemenuhan infrastruktur penunjangnya	Pembentukan karakter masyarakat yang religius agamis dalam mendukung SDM yang berkualitas dan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Kepala daerah yang dijabarkan selanjutnya adalah program prioritas II, sedangkan program prioritas I dan III lainnya ada di Bab VII. Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah. RPJMD tahun 2021-2026 ini berusaha diarahkan pada program dan kegiatan-kegiatan strategis guna mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis dalam penyelesaian yang telah dimulai perencanaan dan pelaksanaannya pada Tahun 2022. Penjabaran dari program prioritas Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang tersaji dalam Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6. 3. Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Dengan Pagu Indikatif Kabupaten Banjar

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia																		
			Tujuan 1.1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,18	70,18	170.407.263.100	70,64	175.646.314.881	71,09	181.052.428.509	71,55	186.643.377.520	72,01	192.426.025.707	72,01	906.175.409.717	Kepala Daerah
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,50	92,03		92,17		92,32		92,47		92,61		92,61		
			Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan	Indeks Kesehatan	72,63	73,36	84.423.702.600	73,76	86.200.592.684	74,15	88.016.557.211	74,55	89.872.519.135	74,94	91.769.425.530	74,94	440.282.797.160	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	16,67%	40,00%	80.002.901.000	52,00%	81.602.959.020	52,00%	83.235.018.200	84,00%	84.899.718.564	88,00%	86.597.712.936	88,00%	416.338.309.721	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	70,83%	72,00%	4.420.801.600	80,00%	4.597.633.664	88,00%	4.781.539.011	96,00%	4.972.800.571	100,00%	5.171.712.594	100,00%	23.944.487.439	Dinas Kesehatan
			Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	Indeks Pendidikan	59,06	60,39	84.432.402.000	60,79	87.809.698.080	61,24	91.322.086.003	61,74	94.974.969.443	62,29	98.773.968.221	62,29	457.313.123.748	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah (APS) SD	99,19%	99,64%	84.372.402.000	99,84%	87.747.298.080	99,88%	91.257.190.003	99,92%	94.907.477.603	99,96%	98.703.776.707	99,96%	456.988.144.394	Dinas Pendidikan
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP	83,93%	87,13%		88,93%		89,00%		89,15%		89,30%		89,30%		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	109,43%	100%		100,00%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	81,47%	87,09%		88,44%		89,80%		91,16%		92,51%		92,51%			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	98,26%	98,82%		99,12%		99,32%		99,52%		99,82%		99,82%			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	70,21%	75,31%		77,61%		80,10%		83,15%		85,51%		85,51%			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	53,95%	63,90%		64,32%		64,74%		65,16%		65,58%		65,58%			
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru - Siswa PAUD	18,20	18,20	60.000.000	18,10	62.400.000	18,00	64.896.000	17,90	67.491.840	17,80	70.191.514	17,80	324.979.354	Dinas Pendidikan
				Rasio Guru - Siswa jenjang SD	13,48	12,89		12,87		12,84		12,81		12,79				
				Rasio Guru - Siswa jenjang SMP	10,14	10,48		10,41		10,33		10,25		10,17				
			Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	77,21	78,04	912.535.400	78,29	949.036.816	78,53	986.998.289	78,78	1.026.478.220	79,02	1.067.537.349	79,02	4.942.586.074	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	NA	18,75%	844.792.000	18,75%	878.583.680	18,75%	913.727.027	18,75%	950.276.108	0,25	988.287.153	0,25	4.575.665.968	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	NA	9,00%	67.743.400	9,00%	70.453.136	9,00%	73.271.261	9,00%	76.202.112	0,09	79.250.196	0,09	366.920.106	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Sasaran 1.1.4 : Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,09	80,19	463.125.400	80,29	481.650.416	80,39	500.916.433	80,49	520.953.090	80,59	541.791.214	80,59	2.508.436.552	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Harga Pangan	NA	≤25	12.552.500	≤20	13.054.600	≤15	13.576.784	≤12,5	14.119.855	≤10	14.684.650	≤10	67.988.389	Dinas Ketahanan Pangan
				Ketersediaan Pangan Utama	NA	0,122171946	194.459.900	23,53%	202.238.296	34,84%	210.327.828	46,15%	218.740.941	57,47%	227.490.579	57,47%	1.053.257.543	
				Skor PPH Konsumsi	NA	0,7471	256.113.000	75,58%	266.357.520	76,74%	277.011.821	77,91%	288.092.294	79,07%	299.615.985	0,790697674	1.387.190.620	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Sasaran 1.1.5 : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,52	81,02	175.497.700	81,52	205.336.885	82,02	225.870.574	82,52	248.457.631	83,02	273.303.394	83,02	1.128.466.183	DP2KBP3A		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	NA	65,64		67,43		69,24		71,06		72,89		72,89				
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks PUG	0	0,5025	105.207.100	0,5025	120.988.165	0,6375	133.086.982	0,6375	146.395.680	0,7724	161.035.248	0,7724	666.713.174	DP2KBP3A
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	0	20%	33.599.900	20%	40.319.880	20%	44.351.868	20%	48.787.055	20%	53.665.760	0,2	220.724.463	DP2KBP3A
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga berkualitas	0,00%	5,00%	36.690.700	10,00%	44.028.840	15,00%	48.431.724	20,00%	53.274.896	25,00%	58.602.386	25,00%	241.028.546	DP2KBP3A
Misi 2 : Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan																		
			Tujuan 2.1 : Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,96	2,50%	26.733.764.150	2,80%	27.803.114.716	3,53%	28.915.239.305	4,27%	30.071.848.876	5,01%	31.274.722.832	5,01%	144.798.689.879	Kepala Daerah
				Pendapatan Per Kapita	Rp19.688.020,00	Rp20.882.000,00		Rp21.177.000,00		Rp21.628.000,00		Rp22.247.000,00		Rp23.046.000,00		Rp23.046.000,00		
			Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas	NA	68,28	24.486.253.697	72,70	25.465.703.845	75,46	26.484.331.999	78,21	27.543.705.278	80,96	28.645.453.490	80,96	132.625.448.309	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten	0,00%	72,14%	22.666.938.897	72,84%	23.573.616.453	73,54%	24.516.561.111	74,24%	25.497.223.555	74,94%	26.517.112.498	74,94%	122.771.452.514	Dinas PUPR

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			dalam Kondisi Mantap															
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	70,47%	70,08%	1.819.314.800	70,11%	1.892.087.392	70,15%	1.967.770.888	70,19%	2.046.481.723	70,23%	2.128.340.992	70,23%	9.853.995.795	Dinas Perhubungan
				Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	67,00%	63,00%		70,00%		75,00%		80,00%		86,00%		86,00%		
				V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,41	0,4		0,39		0,38		0,37		0,36		0,36		
			Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	-4,18%	2,00%	1.567.700.253	2,25%	1.630.408.263	2,50%	1.695.624.594	2,75%	1.763.449.577	3,00%	1.833.987.560	3,00%	8.491.170.248	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perikanan dan Perkebunan
				LPE sub sektor perikanan	1,91%	3,60%		3,74%		3,88%		4,04%		4,21%		4,21%		Dinas Perikanan
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan produktivitas komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura unggulan	NA	1,00%	1.012.862.053	1,08%	1.053.376.535	1,12%	1.095.511.597	1,35%	1.139.332.060	1,23%	1.184.905.343	1,23%	5.485.987.588	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan	NA	0,08%	66.505.000	0,09%	69.165.200	0,10%	71.931.808	0,11%	74.809.080	0,12%	77.801.444	0,12%	360.212.532	Dinas Perikanan dan Perkebunan
				Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	NA	2,50%	80.538.000	2,60%	83.759.520	2,70%	87.109.901	2,80%	90.594.297	2,90%	94.218.069	2,90%	436.219.786	Dinas Perikanan dan Perkebunan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	53.116	53,926	407.795.200	54.422	424.107.008	54,923	441.071.288	55,417	458.714.140	55,916	477.062.705	55,916	2.208.750.342	Dinas Perikanan
			Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	-2,87%	1,98%	281.761.500	2,02%	293.031.960	2,07%	304.753.238	2,11%	316.943.368	3,42%	329.621.103	3,42%	1.526.111.169	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	92,07%	92,25%	281.761.500	92,37%	293.031.960	92,49%	304.753.238	92,62%	316.943.368	92,75%	329.621.103	92,75%	1.526.111.169	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	Jumlah kunjungan wisatawan	3.702.958	4.000.000	398.048.700	4.250.000	413.970.648	4.500.000	430.529.474	4.750.000	447.750.653	5.000.000	465.660.679	5.000.000	2.155.960.154	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase destinasi wisata yang representatif	44%	46,00%	318.653.200	48,00 %	331.399.328	52,00 %	344.655.301	56,00 %	358.441.513	58,00 %	372.779.174	58,00 %	1.725.928.516	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	75 unit	10%	79.395.500	10%	82.571.320	10%	85.874.173	10%	89.309.140	10%	92.881.505	10%	430.031.638	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Tujuan 2.2 : Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran	- Persentase Penduduk miskin - Indeks Gini	2,55%	2,83%	157.123.668.525,00	2,72%	160.403.620.212,33	2,70%	164.161.060.544,63	2,67%	168.034.800.634,34	2,64%	172.029.670.332,48	2,64%	821.752.820.248,78	Kepala Daerah
			Sasaran 2.2.1 : Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,87	3,11	448.556.600	3,09	466.498.864	3,06	485.158.819	3,04	504.565.171	3,01	524.747.778	3,01	2.429.527.232	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.11.734.080.000.0000:306.060 : 1.920 = Rp. 19.968/jam (posisi Tahun 2020)	Rp.20.367	91.493.600	Rp. 20.774	95.153.344	Rp.21.189	98.959.478	Rp.21.612	102.917.857	s	107.034.571	Rp.22.044	495.558.850	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	18,00%	21,00%	357.063.000	24,00%	371.345.520	27,00%	386.199.341	30,00%	401.647.314	33,00%	417.713.207	33,00%	1.933.968.382	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Sasaran 2.2.2 : Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	34,23%	36,94%	712.900.400	39,64%	741.416.416	42,34%	771.073.073	45,05%	801.915.996	47,75%	833.992.635	47,75%	3.861.298.520	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	4,77%	7,74%		10,72%		13,69%		16,66%		19,64%		19,64%		
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	NA	33,74	347.900.400	10,00%	361.816.416	10,00%	376.289.073	10,00%	391.340.636	10,00%	406.994.261	10,00%	1.884.340.785	DISKOP
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	NA	8,36%	365.000.000	8,37%	379.600.000	8,39%	394.784.000	8,40%	410.575.360	8,42%	426.998.374	8,42%	1.976.957.734	
			Sasaran 2.2.3 : Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,37 (NTP : Kalsel)	103,82	3.088.286.149	104,36	3.211.817.595	104,90	3.340.290.299	105,44	3.473.901.911	105,98	3.612.857.987	105,98	16.727.153.941	DTPH, Disnabun, Diskan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	NA	75,00%	151.698.432	76,00%	157.766.369	77,00%	164.077.024	78,00%	170.640.105	80,00%	177.465.709	80,00%	821.647.640	DISNAKBUN
				Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan	NA	20,00%	31.031.900	20,00%	32.273.176	20,00%	33.564.103	20,00%	34.906.667	20,00%	36.302.934	100,00%	168.078.780	DISNAKBUN

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			NA	0,33%	111.655.500	0,32%	116.121.720	0,31%	120.766.589	0,30%	125.597.252	0,29%	130.621.142	0,29%	604.762.204	DISNAKBUN		
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri	NA	4,00%	2.594.101.717	4,15%	2.697.865.786	4,30%	2.805.780.417	4,45%	2.918.011.634	4,60%	3.034.732.099	4,60%	14.050.491.653	DTPH
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	56,39	59,53	199.798.600	61,02	207.790.544	61,02	216.102.166	63,08	224.746.252	64,11	233.736.102	64,11	1.082.173.665	Dinas Perikanan
				Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan	7%	7,50%		8,00%		8,00%		9,00%		9,50%		9,50%		
			Sasaran 2.2.4 : Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	NA	15%	3.039.452.176	17%	3.390.686.607	20%	3.526.314.071	25%	3.667.366.634	27%	3.814.061.300	27%	17.437.880.788	Dinas Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	100%	100%	2.105.005.500	100%	2.189.205.720	100%	2.276.773.949	100%	2.367.844.907	100%	2.462.558.703	100%	11.401.388.779	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	33,57%	9,87%	632.267.276	13,50%	657.557.967	15,75%	683.860.286	17,41%	711.214.697	18,64%	739.663.285	75,17%	3.424.563.511	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	49,11%	50%	302.179.400	55%	543.922.920	60%	565.679.837	70%	588.307.030	75%	611.839.311	75%	2.611.928.499	Dinas Sosial

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Sasaran 2.2.5 : Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6451	0,6679	123.012.4 27.200	0,6793	123.686.9 16.794	0,6907	124.962.0 61.674	0,7021	126.251.4 89.032	0,7135	127.555.4 02.932	0,7135	625.468.2 97.632	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	2,53	1,44%	81.258.27 5	2,89%	101.572.8 44	4,33%	105.635.7 58	5,78%	109.861.1 88	7,22%	114.255.6 35	21,66%	512.583.6 99	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	7,22	25,27%	121.802.0 49.475	43,32%	122.411.0 59.722	62,09%	123.635.1 70.320	80,87%	124.871.5 22.023	100,00 %	126.120.2 37.243	100,00%	618.840.0 38.783	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	75,00%	75,00%	1.129.119. 450	81,23%	1.174.284. 228	87,45%	1.221.255. 597	93,68%	1.270.105. 821	100,00 %	1.320.910. 054	100,00%	6.115.675. 150	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa
			Sasaran 2.2.6 : Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	58,82%	72,22%	70.975.60 0	82,14%	85.170.72 0	86,84%	102.204.8 64	89,58%	122.645.8 37	91,38%	147.175.0 04	91,38%	528.172.0 25	DP2KBP3A
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	58%	59%	70.975.60 0	60,32%	85.170.72 0	62,44%	102.204.8 64	64,55%	122.645.8 37	64,55%	147.175.0 04	64,55%	528.172.0 25	DP2KBP3A
			Sasaran 2.2.7 : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	NA	73,25	26.751.07 0.400	74,74	28.821.11 3.216	76,14	30.973.95 7.745	77,41	33.212.91 6.054	78,82	35.541.43 2.696	78,82	155.300.4 90.111	Dinas PUPR

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase	38,93%	45,98%	1.959.067.530	46,20%	2.037.430.231	46,41%	2.118.927.440	46,62%	2.203.684.538	48,26%	2.291.831.920	48,26%	10.610.941.659	Dinas PUPR
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	75,73%	80,57%	6.314.782.925	81,61%	6.567.374.242	82,64%	6.830.069.212	83,66%	7.103.271.980	84,67%	7.387.402.859	84,67%	34.202.901.218	Dinas PUPR
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	49,30%	76,74%	3.365.927.347	79,68%	4.500.564.441	82,27%	5.680.587.019	84,38%	6.907.810.499	86,49%	8.184.122.919	86,49%	28.639.012.225	Dinas PUPR
				Persentase Akses Sanitasi Aman		7,63%		7,89%		8,15%		8,49%		8,84%		8,84%		
				Persentase Akses Sanitasi Layak		76,74%		79,68%		82,27%		84,38%		86,49%		86,49%		
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap		72,27%	15.111.292.598	73,47%	15.715.744.302	74,67%	16.344.374.074	75,87%	16.998.149.037	77,07%	17.678.074.998	77,07%	81.847.635.009	Dinas PUPR
Misi 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan																		
			Tujuan 3.1 : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,25	61,93	19.352.095.000	62,25	21.826.893.228	62,58	21.983.225.952	62,78	21.822.554.990	62,93	22.695.457.190	62,93	107.680.226.360	Kepala Daerah
			Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	92,14	94,512	442.621.400	94,519	510.326.256	94,526	530.739.306	94,533	551.968.878	94,540	574.047.634	94,540	2.609.703.474	Dinas PUPR Dinas Pertanahan
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan	92,14%	92,16%	442.621.400	92,17%	460.326.256	92,18%	478.739.306	92,19%	497.888.878	92,20%	517.804.434	92,20%	2.397.380.274	Dinas PUPR

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	NA	100,00 %	0	100,00%	50.000.000	100,00 %	52.000.000	100,00 %	54.080.000	100,00 %	56.243.200	100,00%	212.323.200	Dinas Pertanahan
			Sasaran 3.1.2 : Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	10,76%	9,67%	16.222.685.400	9,52%	18.522.307.244	9,36%	18.546.456.529	9,20%	18.248.314.790	9,05%	18.978.247.381	9,05%	90.518.011.344	Disperkim
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan	100,00%	100,00 %	733.417.000	100,00%	762.753.680	100,00 %	793.263.827	100,00 %	824.994.380	100,00 %	857.994.155	100,00%	3.972.423.043	DISPERKIM
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	0,00%	10,13%	1.057.004.100	15,23%	1.099.284.264	20,23%	1.143.255.635	25,23%	1.188.985.860	30,23%	1.236.545.294	30,23%	5.725.075.153	DISPERKIM
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24,00%	24,10%	14.432.264.300	24,20%	16.660.269.300	24,30%	16.609.937.067	24,40%	16.234.334.550	24,50%	16.883.707.932	24,50%	80.820.513.148	DLH
			Sasaran 3.1.3 : Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	152,60	151,6	1.041.267.100	150,6	1.082.917.784	149,6	1.126.234.495	148,6	1.171.283.875	147,6	1.218.135.230	147,6	5.639.838.485	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,36	0,37	1.041.267.100	0,38	1.082.917.784	0,39	1.126.234.495	0,40	1.171.283.875	0,41	1.218.135.230	0,41	5.639.838.485	BPBD
				Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan	0,65	0,66		0,67		0,68		0,69		0,70				

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan reses	NA	73,00	19.568.589.500	74,00	20.351.333.080	76,00	21.165.386.403	78,00	22.012.001.859	80,00	22.892.481.934	80,00	105.989.792.776	SET DPRD
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	82,00%	82,00%	5.999.964.688	83,00%	8.099.952.329	83,00%	11.744.930.877	84,00%	12.214.728.112	85,00%	12.703.317.236	85,00%	50.762.893.242	RSUD RATU ZALECHA
				Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar	80,00%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	6.748.000	100,00%	7.017.920	100,00%	7.298.637	100,00%	7.590.582	100,00%	7.894.206	100,00%	36.549.345	Kecamatan Kertak Hanyar
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	13.256.000	100,00%	13.786.240	100,00%	14.337.690	100,00%	14.911.197	100,00%	15.507.645	100,00%	71.798.772	Kecamatan Astambul
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu	100,00%	100,00%	50.143.800	100,00%	52.149.552	100,00%	54.235.534	100,00%	56.404.955	100,00%	58.661.154	100,00%	271.594.995	Kecamatan Gambut

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 11.900.000	100,00%	12.376.000	100,00 % 0	12.871.040	100,00 % 0	13.385.882	100,00 % 7	13.921.317	100,00%	64.454.238	Kecamatan Karang Intan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 5.582.000	100,00%	5.805.280	100,00 % 0	6.037.491	100,00 % 0	6.278.991	100,00 % 9	6.530.150	100,00%	30.233.913	Kecamatan Martapura
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 12.820.600	100,00%	13.461.630	100,00 % 0	14.134.712	100,00 % 7	14.841.447	100,00 % 9	15.583.519	100,00%	70.841.908	Kecamatan Aranio
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 47.500.000	100,00%	49.400.000	100,00 % 0	51.376.000	100,00 % 0	53.431.040	100,00 % 2	55.568.282	100,00%	257.275.322	Kecamatan Sungai Tabuk

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 %	65.669.400	100,00%	68.296.176	100,00 %	71.028.023	100,00 %	73.869.144	100,00 %	76.823.910	100,00%	355.686.653	Kecamatan Aluh-Aluh
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 %	1.042.100.000	100,00%	1.083.784.000	100,00 %	1.127.135.360	100,00 %	1.172.220.774	100,00 %	1.219.109.605	100,00%	5.644.349.740	Kecamatan Mataraman
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 %	10.571.200	100,00%	10.994.048	100,00 %	11.433.810	100,00 %	11.891.162	100,00 %	12.366.809	100,00%	57.257.029	Kecamatan Simpang Empat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 %	54.795.600	100,00%	56.987.424	100,00 %	59.266.921	100,00 %	61.637.598	100,00 %	64.103.102	100,00%	296.790.644	Kecamatan Pengaron
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	100,00%	100,00 %	11.251.000	100,00%	11.701.040	100,00 %	12.169.082	100,00 %	12.655.845	100,00 %	13.162.079	100,00%	60.939.045	Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Kecamatan Yang Terlaksana														
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 15.274.600	100,00%	15.885.584	100,00 %	16.521.007	100,00 %	17.181.848	100,00 %	17.869.122	100,00%	82.732.161	Kecamatan Beruntung Baru
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 22.979.200	100,00%	23.898.368	100,00 %	24.854.303	100,00 %	25.848.475	100,00 %	26.882.414	100,00%	124.462.759	Kecamatan Martapura Barat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 13.896.000	100,00%	14.451.840	100,00 %	15.029.914	100,00 %	15.631.110	100,00 %	16.256.355	100,00%	75.265.218	Kecamatan Sambung Makmur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 12.000.000	100,00%	12.480.000	100,00 %	12.979.200	100,00 %	13.498.368	100,00 %	14.038.303	100,00%	64.995.871	Kecamatan Martapura Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 % 20.105.900	100,00%	20.910.136	100,00 %	21.746.541	100,00 %	22.616.403	100,00 %	23.521.059	100,00%	108.900.040	Kecamatan Paramasan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 %	5.506.000	100,00%	5.726.240	100,00 %	5.955.290	100,00 %	6.193.501	100,00 %	6.441.241	100,00%	29.822.272	Kecamatan Tatah Makmur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 %	26.300.000	100,00%	27.352.000	100,00 %	28.446.080	100,00 %	29.583.923	100,00 %	30.767.280	100,00%	142.449.283	Kecamatan Telaga Bauntung
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00 %	0	100,00%	10.000.000	100,00 %	10.400.000	100,00 %	10.816.000	100,00 %	11.248.640	100,00%	42.464.640	Kecamatan Cinta Puri Darussalam
			Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	68,97	72,65	5.012.818.400	74,49	5.223.551.416	76,32	5.443.735.781	78,16	5.673.851.751	80,00	5.914.409.014	80,00	27.268.366.360,88	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	68,97	70	170.338.000	72,5	187.371.800	75	206.108.980	77,5	226.719.878	80,05	249.391.866	80,05	1.039.930.524	SEKRETARIA T DAERAH
5	01	02	Program Perencanaan,	Persentase Dokumen	100%	100%	1.419.420.800	100%	1.476.197.632	100%	1.535.245.537	100%	1.596.655.359	100%	1.660.521.573	100%	7.688.040.901	BAPPEDA LITBANG

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu															
			Persentase Perencanaan Daerah yang Selaras	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	75,45	3.423.059.600	76,79	3.559.981.984	78,15	3.702.381.263	79,67	3.850.476.514	80,00	4.004.495.574	80,00	18.540.394.936	BAPPEDA LITBANG	
			Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA		77,06		78,04		79,02		80		80,98		80,98			
			indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan		73,03		74,03		75,03		76,03		77,03		77,03			
			Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	8.995.750.600	WTP	9.355.580.624	WTP	9.729.803.849	WTP	10.118.996.003	WTP	10.523.755.843	WTP	48.723.886.919	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	85,18%	87,03%	8.257.949.000	88,88%	8.588.266.960	90,73%	8.931.797.638	92,58%	9.289.069.544	95,05%	9.660.632.326	95,05%	44.727.715.468	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Perangkat Daerah		94,44%	96,29%		98,14%		98,14%		100%		100%		100%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik															
			Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	81,48%	83,33%		85,18%		87,03%		88,88%		90,73%		90,73%			
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	83,33%	85,18%	737.801.600	87,03%	767.313.664	88,88%	798.006.211	90,73%	829.926.459	92,58%	863.123.517	92,58%	3.996.171.451	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Sasaran 4.1.4 : Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi	NA	3,05	2.477.550.000	3,19	2.576.652.000	3,31	2.679.718.080	3,48	2.786.906.803	3,69	2.898.383.075	3,69	13.419.209.959	INSPEKTORAT
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	NA	73	1.458.650.000	74	1.516.996.000	76	1.577.675.840	78	1.640.782.874	80	1.706.414.189	80	7.900.518.902	INSPEKTORAT
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4,11	4,20	1.018.900.000	4,25	1.059.656.000	4,30	1.102.042.240	4,40	1.146.123.930	4,50	1.191.968.887	4,50	5.518.691.056	INSPEKTORAT
			Sasaran 4.1.5 : Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	52,66	60,00	5.070.152.800	61,50	5.272.958.912	65,50	5.483.877.268	69,00	5.703.232.359	73,00	5.931.361.654	73,00	27.461.582.993	BKDPSDM
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	41,6	42,00	2.208.500.800	42,10	2.296.840.832	42,20	2.388.714.465	42,30	2.484.263.044	42,50	2.583.633.566	42,50	11.961.952.707	BKDPSDM
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kompetensi	11,06	18,00	2.861.652.000	19,40	2.976.118.080	23,30	3.095.162.803	26,70	3.218.969.315	30,50	3.347.728.088	30,50	15.499.630.286	BKDPSDM

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 4.1.6 : Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	NA	2,20	6.224.546.900	2,30	6.473.528.776	2,40	6.732.469.927	2,50	7.001.768.724	2,60	7.281.839.473	2,60	33.714.153.800	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian
2 16 02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	71%	0,71	3.672.513.500	0,71	3.819.414.040	0,71	3.972.190.602	0,71	4.131.078.226	0,71	4.296.321.355	0,71	19.891.517.722	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian
2 16 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	40,87%	42,79%	2.495.736.600	43,75%	2.595.566.064	44,71%	2.699.388.707	45,67%	2.807.364.255	45,67%	2.919.658.825	45,67%	13.517.714.450	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	163	170	56.296.800	180	58.548.672	190	60.890.619	200	63.326.244	240	65.859.293	240	304.921.628	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian
Misi 5 : Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis																
	Tujuan 5.1 : Terwujudnya masyarakat yang berakarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur	Rasio Kriminalitas	11,08	7,73	9.778.986.866	7,70	4.873.980.085	7,67	5.068.939.288	7,64	8.780.616.075	7,61	5.346.240.718	7,61	32.377.487.032	Kepala Daerah
		Persentase Forum Komunikasi Umat Beragama yang ditindaklanjuti		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai- nilai agama;	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat	0	0	1.532.132.500	0	63.290.760	0	65.822.390	0	68.455.286	0	71.193.497	0	329.618.434	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	NA	0,08%	60.856.500	0,090%	63.290.760	0,120%	65.822.390	0,140%	68.455.286	0,160%	71.193.497	0,160%	329.618.434	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	NA	0,23%	1.471.276.000	0,41%	1.530.127.040	0,23%	41.591.332.122	0,41%	1.654.985.406	0,41%	1.721.184.822	0,41%	47.968.905.390	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Sasaran 5.1.2 : Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar;	Jumlah apresiasi Budaya Banjar	NA	6	363.528.000	7	378.069.120	8	393.191.885	9	408.919.560	10	425.276.343	10	1.968.984.908	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	33,33%	44,44%	363.528.000	55,56%	378.069.120	66,67%	393.191.885	77,78%	408.919.560	88,89%	425.276.343	88,89%	1.968.984.908	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan Santri dalam Olahraga	60 medali	166 medali	6.650.980.396	108 medali	3.150.980.396	69 medali	3.277.019.612	261 medali	6.917.019.612	29 medali	3.408.100.396	633 medali	23.404.100.412	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	25%	25%	6.650.980.396	37,50%	3.150.980.396	38,75%	3.277.019.612	40%	6.917.019.612	42,50%	3.408.100.396	42,50%	23.404.100.412	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Sasaran 5.1.4 : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio pelanggaran perda dan trantibum	2,19	2,01	1.232.345.970	1,92	1.281.639.809	1,84	1.332.905.401	1,75	1.386.221.617	1,67	1.441.670.482	1,67	6.674.783.279	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Penanganan Terhadap Tramtibum, Perda/Perkada dan LinMas	100%%	100%%	1.232.345.970	100%%	1.281.639.809	100%%	1.332.905.401	100%%	1.386.221.617	100%%	1.441.670.482	100%%	6.674.783.279	Satuan Polisi Pamong Praja
			TOTAL				444.183.315.200		455.653.299.723		472.216.602.642		489.242.843.387		500.631.099.490		2.360.455.884.442	

6.4. Major Project

Ada beberapa *Major project* yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banjar, diantaranya:

1. Pembangunan Martapura Manis

Pembangunan Martapura Manis adalah strategi pemulihan ekonomi di Kabupaten Banjar dengan melaksanakan penataan serta revitalisasi perkotaan Martapura melalui pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai branding daerah dan menyelesaikan permasalahan permukiman tidak layak huni, penanggulangan banjir, dan persoalan sosial ekonomi lainnya.

Tujuan pembangunan adalah *Rebranding* Martapura, untuk mewujudkan perkotaan Martapura yang dapat mewadahi berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan bertumpu kepada pengembangan ekonomi melalui potensi Religi dan Potensi Kota Martapura sesuai letak geografis kota sebagai simpul Provinsi, serta pengembangan pemanfaatan potensi warisan sejarah perkembangan Islam di Kalimantan khususnya. Dan misi pembangunan kawasan adalah:

- Menciptakan kondisi ruang kota yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensinya, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi khas Martapura / Permata yang berdaya saing global.
- Menciptakan kondisi ruang kota yang mampu menciptakan mewujudkan sinkronisasi antara Religi dan ekonomi Masyarakat.
- Memelihara dan merevitalisasi semua potensi kesejarahan Religi yang mampu menciptakan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkualitas.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Martapura Manis yaitu penataan kawasan kumuh Murung Kenanga sebagai perwujudan penyediaan permukiman layak huni; penataan Pertokoan CBS, penataan koridor Martapura, dan Penataan kawasan sekumpul sebagai ikon atau *landmark* kawasan wisata, sehingga mampu membangkitkan destinasi wisata baru dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal; serta pembangunan Bendung Riam Kiwa sebagai pengendali banjir. Selain pembangunan perkotaan juga akan dilaksanakan pembangunan di perdesaan sebagai kawasan *hinterland* pendukung perkotaan seperti penataan Kawasan Gambut, Kertak Hanyar, dan Sungai Tabuk; serta penataan permukiman bantaran sungai Martapura.

2. Pembangunan Smart Kampung Manis

Pembangunan *Smart* Kampung Manis bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan desa melalui pengembangan teknologi informatika, pemenuhan kelengkapan fasilitas desa, mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa, sehingga menggerakkan ekonomi lokal untuk mewujudkan masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Agamis. Desa diarahkan untuk penyediaan fasilitas sesuai parameter yang ditetapkan dalam *Smart* Kampung Manis, serta teknologi informatika dimaksimalkan pemafaatannya di semua lini pelayanan publik di desa.

3. Pembangunan Air Santri

Pembangunan Air Santri adalah penataan kawasan permukiman kumuh di Murung Kenanga dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan permukiman tidak layak serta memiliki potensi pengembangan wilayah sebagai kawasan kota santri. Selain itu, pertumbuhan kawasan pinggiran sungai tidak terkendali sehingga pembangunan tidak kontekstual. Tujuan Pembangunan Air Santri adalah mengembalikan kawasan sebagai permukiman yang layak huni serta mengembalikan identitas sebagai pusat pembelajaran islam dan wilayah dengan nilai religius tinggi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan jalan akses dan jalan lingkungan, pembangunan Ruang Terbuka Hujau (RTH) dan plaza publik, pembangunan siring sungai/dinding pengendali banjir, pembangunan dermaga, pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah, penyediaan pelayanan air minum, pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan dan fasilitas pendukung lainnya.

4. Penataan Kawasan Sekumpul

Penataan kawasan untuk mewujudkan Kawasan Sekumpul sebagai kawasan Religius yang dinamis, tertata dan dapat meningkatkan kegiatan Religi, sosial dan ekonomi Masyarakat di kawasan tersebut. Dan misi pembangunan kawasan adalah:

- Melestarikan aset-aset Religius dan historis baik berupa bangunan, makam abah sekumpul dan Masjid yang ada di Kawasan
- Membangun Infrastruktur Kawasan Sekumpul mengoptimalkan fungsi bangunan dan kawasan yang mengarah ke wisata religi, dan peningkatan perekonomian Masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas infrastruktur (drainase, persampahan, pemadam kebakaran, air bersih, air limbah); redevelopmen kawasan (penataan koridor sekumpul, pembangunan gerbang kawasan); Fasilitas Umum pendukung kawasan (area parkir, MCK, aula, pusat informasi, persampahan, air bersih); serta penataan koridor irigasi.

5. Pembangunan Bendung Riam Kiwa

Pembangunan Bendungan Riam Kiwa adalah upaya pemerintah untuk peningkatan produksi pangan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi daerah irigasi Kabupaten Banjar. Kebutuhan Air Baku yang belum terpenuhi di wilayah Kabupaten Banjar disebabkan:

- Terbatasnya akses terhadap sumber air baku pada desa rawan air
- Kapasitas sistem persediaan air baku terbatas
- Pasokan air baku dari Sungai Martapura pada musim kemarau menurun drastis

Selain itu permasalahan banjir di Kabupaten Banjar terjadi setiap tahunnya yang disebabkan daerah resapan semakin menyempit sehingga pada musim hujan terjadi bencana alam baik banjir dan tanah longsor, serta pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Banjar akibat defisit pasokan listrik di beberapa desa. Sehingga dengan pembangunan bendungan riam kiwa dapat menyelesaikan permasalahan diatas dengan fungsi bendungan sebagai berikut:

- Air Baku 4500 L/detik
- Potensi Tenaga Listrik 6 MW
- Potensi Irigasi 1800 Ha
- Reduksi Banjir 516 m³/detik

6. Pengembangan Mall Pelayanan Publik

Akan dilaksanakan pengembangan Mall Pelayanan Publik dan Plaza Pelayanan Publik pada beberapa kawasan non perkotaan dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Tujuan pembangunan Plaza dan Mall Pelayanan Publik untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha. Karena hal ini akan mempengaruhi indikator Kemudahan Berusaha serta dimensi pembangunan pemerintahan.

Indikator Kemudahan Berusaha (EoDB); Memulai usaha, Perizinan terkait mendirikan bangunan/ IMB dll, Penyambungan Listrik, Pendaftaran Properti, Akses Per-Kreditasi, Perlindungan terhadap Investor Minoritas, Pembayaran Pajak, Pedagangan Lintas Negara, Penegakan Kontrak, dan Penyelesaian Perkara Kepailitan, serta perizinan lainnya sesuai kebutuhan.

7. Proyek Strategis Lainnya

Proyek Strategis lainnya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 4. Proyek Strategis Kabupaten Banjar

Dimensi Pembangunan	Proyek Strategis
Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Perluasan layanan dan akses cakupan kesehatan semesta (UHC)
	Optimalisasi fungsi dan peningkatan kinerja RSUD
	Optimalisasi fungsi dan kinerja puskesmas rawat inap di kecamatan
	Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan membangun posyandu dan puskesmas di desa
	Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tenaga kesehatan di desa
	Penurunan Prevalensi Stunting
Kepemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pembangunan plaza pelayanan publik
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada level A
	Sistem remunerasi yang lebih adil, dan kompetitif
	Akselerasi penerapan pemerintahan berbasis elektronik
	Nilai akuntabilitas kinerja pada level A
	Nilai Pengelolaan Keuangan yang WTP
Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi pada level 3	
Ekonomi dan Kesenjangan	Penguatan permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen
	Bantuan prasarana dan sarana kepada kelompok usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan
	Pembangunan pasar desa yang representatif di desa
	Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional yang modern
	Membangun pariwisata berbasis potensi daerah
	Peningkatan jalan penghubung antar kawasan strategis

Dimensi Pembangunan	Proyek Strategis
	<p>Pengembangan Infrastruktur TIK mendukung transformasi digital hingga desa</p> <p>Pembangunan sarana olah raga di desa</p>
Pendidikan Masyarakat	<p>Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (formal/non formal) melalui sertifikasi guru sebanyak 2.650 guru</p> <p>Peningkatan kesejahteraan guru agama (pesantren)</p> <p>Bantuan beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi pelajar dan mahasiswa, khususnya masyarakat miskin</p> <p>Pengembangan Rumah AI-Qur'an di desa</p> <p>Pendidikan vokasi berbasis potensi daerah berbasis kejuruan dan pesantren</p> <p>Menyelenggarakan even-even keagamaan dan kebudayaan Banjar</p> <p>Pengarustamaan nilai-nilai Pancasila dan Agama serta Akhlak Mulia dalam bidang pendidikan</p>
Infrastruktur dan lingkungan hidup	<p>Jalan mantap sepanjang 1.898 kilometer dan jembatan sebanyak 294 unit</p> <p>Jalan baru sepanjang 100 kilometer dan jembatan 10 unit</p> <p>Jalan Lingkungan permukiman mantap sepanjang 100 km</p> <p>Penataan Kawasan Wisata Religius Sekumpul</p> <p>Penataan Perkotaan Martapura</p> <p>Pembangunan Bendungan dan jaringan irigasinya</p> <p>Peningkatan kinerja irigasi mendukung kenaikan produktivitas pertanian</p> <p>Fasilitas penyediaan rumah umum sebanyak 1000</p> <p>Peningkatan layanan akses sanitasi 10.000 SR</p> <p>Peningkatan akses layanan air minum perpipaan 10.000 SR</p> <p>Peningkatan akses layanan air minum non-perpipaan 100 unit</p> <p>Penyediaan 100 TPS tersebar di kecamatan</p>
Kemiskinan dan Lapangan Kerja	<p>Perluasan bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa rehabilitasi rumah dan bantuan sosial lainnya seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pangan non-tunai</p> <p>Menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan baru sebanyak 15.000 lapangan pekerjaan</p> <p>Menyediakan 15.000 pelatihan kerja sesuai dengan potensi daerah</p>

BAB VII**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Berbagai program yang dirumuskan dalam bab ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya. Berikut program perangkat daerah yang dijabarkan pada masing-masing misi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 :

Sasaran dan program prioritas **“Misi 1: Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia”** adalah:

1. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
2. Sasaran Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengembangan Kurikulum
 - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
3. Sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat, Programnya adalah :
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - Program Pengembangan Ekspor
 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, Programnya adalah :
 - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Sasaran dan program prioritas **“Misi 2: Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan”** adalah:

1. Sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Program Pengelolaan Pelayaran
2. Sasaran 1.2 Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Program Penyuluhan Pertanian
 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Program Perizinan Usaha Pertanian
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3. Sasaran Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Program Pemasaran Pariwisata
4. Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Program Hubungan Industrial
5. Sasaran Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Program Pengembangan UMKM
6. Sasaran Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Program Penyuluhan Pertanian
 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Program Perizinan Usaha Pertanian
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
7. Sasaran Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pemberdayaan Sosial
 - Program Rehabilitasi Sosial
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Program Penanganan Bencana
8. Sasaran Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan , Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Program Penataan Desa
9. Sasaran Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Program pengendalian Penduduk
10. Sasaran Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengembangan Pemukiman
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Sasaran dan program prioritas **“Misi 3: Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”** adalah:

1. Sasaran Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Program Pengelolaan Izin Lokasi
 - Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 - Program Penatagunaan Tanah
 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
2. Sasaran Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - Program Kawasan Permukiman
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Sasaran Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan, Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penanggulangan Bencana
4. Sasaran Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup, Programnya adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Persampahan

Sasaran dan program prioritas **“Misi 4: Penyelenggaraan Kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif”** adalah:

1. Sasaran Terselenggaranya Reformasi sumber- sumber pendapatan daerah, Programnya adalah:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Sasaran Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik, Programnya adalah:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Program Promosi Penanaman Modal
 - Program Pelayanan Penanaman Modal

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Program Pembinaan Perpustakaan
 - Program Pengelolaan Arsip
 - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - Program Perizinan Penggunaan Arsip
 - Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Sasaran Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja, Programnya adalah:
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Sasaran Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel, Programnya adalah:
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
5. Sasaran Berkembangnya profesional ASN, Programnya adalah:
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Sasaran Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, Programnya adalah:
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Program Aplikasi Informatika
 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sasaran dan program prioritas **“Misi 5: Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis”** adalah:

1. Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama, Programnya adalah:
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
2. Sasaran Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar, Programnya adalah:
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengembangan Kebudayaan
 - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Program Pembinaan Sejarah
3. Sasaran Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga, Programnya adalah:
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Sasaran Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat Programnya adalah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran

Selama lima tahun ke depan program-program yang dijabarkan dengan berbasiskan urusan pemerintahan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. 1. Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banjar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01			Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan														
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	NA	73,00	315.313.311.000	74,00	327.925.864.240	76,00	341.042.898.810	78,00	354.684.614.762	80,00	368.871.999.352	80,00	1.707.838.708.164	DISDIK
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah (APS) SD	99,19%	99,64%	84.372.402.000	99,84%	87.747.298.080	99,88%	91.257.190.003	99,92%	94.907.477.603	99,96%	98.703.776.707	99,96%	456.988.144.394	
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP	83,93%	87,13%		88,93%		89,00%		89,15%		89,30%		89,30%		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	109,43%	100 %		100%		100 %		100 %		100 %		100 %		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	81,47%	87,09%		88,44%		89,80%		91,16%		92,51%		92,51%		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	98,26%	98,82%		99,12%		99,32%		99,52%		99,82%		99,82%		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	70,21%	75,31%		77,61%		80,10%		83,15%		85,51%		85,51%		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	53,95%	63,90%		64,32%		64,74%		65,16%		65,58%		65,58%		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum	50%	52%	0	67%	100.000.000	82%	104.000.000	100%	108.160.000	100%	112.486.400	100%	424.646.400	
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru - Siswa PAUD	18,20	18,20	60.000.000	18,1	62.400.000	18	64.896.000	17,9	67.491.840	17,8	70.191.514	17,8	324.979.354	
				Rasio Guru - Siswa jenjang SD	13,48	12,89		12,87		12,84		12,81		12,79		12,79		
				Rasio Guru - Siswa jenjang SMP	10,14	10,48		10,41		10,33		10,25		10,17		10,17		
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah dan lembaga pendidikan yang memiliki izin operasional	100%	100%	0	100%	100.000.000	100%	104.000.000	100%	108.160.000	100%	112.486.400	100%	424.646.400	
1	02			Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan	NA	73,00	124.368.501.411	74,00	125.612.186.425	76,00	126.868.308.289	78,00	128.136.991.372	80,00	129.418.361.286	80,00	634.404.348.784	DINKES
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	16,67%	40,00%	80.002.901.000	52,00%	81.602.959.020	52,00%	83.235.018.200	84,00%	84.899.718.564	88,00%	86.597.712.936	88,00%	416.338.309.721	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	70,83%	72,00%	4.420.801.600	80,00%	4.597.633.664	88,00%	4.781.539.011	96,00%	4.972.800.571	100,00%	5.171.712.594	100,00%	23.944.487.439	
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	88,96%	92,90%	6.696.800	93,75%	6.964.672	94,54%	7.243.259	95,23%	7.532.989	95,93%	7.834.309	95,93%	36.272.029	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	72,83%	80,20%	250.000.000	86,80%	260.000.000	93,40%	270.400.000	99,66%	281.216.000	100,00%	292.464.640	100,00%	1.354.080.640	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	NA	73,00	139.511.485.350	74,00	145.091.944.764	76,00	150.895.622.555	78,00	156.931.447.457	80,00	163.208.705.355	80,00	755.639.205.480	RSUD RAZA
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	82,00%	82,00%	5.999.964.688	83,00%	8.099.952.329	83,00%	11.744.930.877	84,00%	12.214.728.112	85,00%	12.703.317.236	85,00%	50.762.893.242	
				Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar	80,00%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan keadaan tertentu oleh tenaga kesehatan di RS	100,00%	100,00%	10.184.477.469	100,00%	10.591.856.568	100,00%	11.015.530.830	100,00%	11.456.152.064	100,00%	11.914.398.146	100,00%	55.162.415.077	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	03	Usuran Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	73,00	10.258.085.883	74,00	10.668.409.318	76,00	11.095.145.691	78,00	11.538.951.519	80,00	12.000.509.579	80,00	55.561.101.991	PUPR
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	37,54%	37,87%	2.103.129.550	38,54%	2.187.254.732	39,20%	2.274.744.921	39,87%	2.365.734.718	64,47%	2.460.364.107	64,47%	11.391.228.028	
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten		62,50%		62,96%		63,43%		63,89%		64,51%		64,51%		
				Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik		64,47%		65,11%		65,77%		66,42%		67,09%		67,09%		
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	75,73%	80,57%	6.314.782.925	81,61%	6.567.374.242	82,64%	6.830.069.212	83,66%	7.103.271.980	84,67%	7.387.402.859	84,67%	34.202.901.218	
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	49,30%	76,74%	3.365.927.347	79,68%	4.500.564.441	82,27%	5.680.587.019	84,38%	6.907.810.499	86,49%	8.184.122.919	86,49%	28.639.012.225	
				Persentase Akses Sanitasi Aman		7,63%		7,89%		8,15%		8,49%		8,84%		8,84%		
				Persentase Akses Sanitasi Layak		76,74%		79,68%		82,27%		84,38%		86,49%		86,49%		
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase	38,93%	45,98%	1.959.067.530	46,20%	2.037.430.231	46,41%	2.118.927.440	46,62%	2.203.684.538	48,26%	2.291.831.920	48,26%	10.610.941.659	
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Strategis		83,41%	7.764.813.064	84,57%	8.015.405.587	85,54%	6.776.021.810	86,52%	7.047.062.683	87,58%	7.328.945.190	87,58%	36.932.248.334	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	0,00%	10,13%	1.057.004.100	15,23%	1.099.284.264	20,23%	1.143.255.635	25,23%	1.188.985.860	30,23%	1.236.545.294	30,23%	5.725.075.153	DISPERKIM
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas RTLH	22,57%	22,62%	5.485.501.200	22,68%	504.921.248	22,78%	525.118.098	22,83%	546.122.822	22,89%	567.967.735	22,89%	7.629.631.102	
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20,77%	20,96%	11.271.441.400	21,14%	11.722.299.056	21,33%	12.191.191.018	21,52%	12.678.838.659	21,71%	13.185.992.205	21,71%	61.049.762.339	
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja	NA	73,00	14.027.297.481	74,00	14.588.389.380	76,00	15.171.924.955	78,00	15.778.801.954	80,00	16.409.954.032	80,00	75.976.367.802	SATPOL PP
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Penanganan Terhadap Tramtibum, Perda/Perkada dan LinMas	100%	100%	1.232.345.970	100%	1.281.639.809	100%	1.332.905.401	100%	1.386.221.617	100%	1.441.670.482	100%	6.674.783.279	
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kebakaran yang terlayani	100%	100%	271.029.600	100%	281.870.784	100%	293.145.615	100%	304.871.440	100%	317.066.298	100%	1.467.983.737	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	NA	73,00	8.118.033.045	74,00	8.442.754.367	76,00	8.780.464.541	78,00	9.131.683.123	80,00	9.496.950.448	80,00	43.969.885.524	BPBD
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,36	0,37	1.041.267.100	0,38	1.082.917.784	0,39	1.126.234.495	0,40	1.171.283.875	0,41	1.218.135.230	0,41	5.639.838.485	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				0,65	0,66		0,67		0,68		0,69		0,70		0,70			
				0,51	0,52		0,53		0,54		0,55		0,56		0,56			
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial	NA	73,00	5.506.504.754	74,00	5.726.764.944	76,00	5.955.835.542	78,00	6.194.068.964	80,00	6.441.831.722	80,00	29.825.005.926	DINSOS
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	100%	100%	2.105.005.500	100%	2.189.205.720	100%	2.276.773.949	100%	2.367.844.907	100%	2.462.558.703	100%	11.401.388.779	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	33,57%	9,87%	632.267.276	13,50%	657.557.967	15,75%	683.860.286	17,41%	711.214.697	18,64%	739.663.285	75,17%	3.424.563.511	
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	49,11%	50%	302.179.400	55%	543.922.920	60%	565.679.837	70%	588.307.030	75%	611.839.311	75%	2.611.928.499	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	100%	100%	389.360.500	100%	404.934.920	100%	421.132.317	100%	437.977.609	100%	455.496.714	100%	2.108.902.060	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NA	73,00	5.274.765.843	74,00	5.485.756.477	76,00	5.705.186.736	78,00	5.933.394.205	80,00	6.170.729.973	80,00	28.569.833.234	DISNAKER
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	NA	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.11.734.080.000.000:306.060 : 1.920 = Rp. 19.968/jam (posisi Tahun 2020)	Rp.20.367	91.493.600	Rp. 20.774	95.153.344	Rp.21.189	98.959.478	Rp.21.612	102.917.857	Rp.22.044	107.034.571	Rp.22.044	495.558.850	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	18,00%	21,00%	357.063.000	24,00%	371.345.520	27,00%	386.199.341	30,00%	401.647.314	33,00%	417.713.207	33,00%	1.933.968.382	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	21,00%	23,00%	128.060.000	25,00%	133.182.400	27,00%	216.320.000	29,00%	224.972.800	31,00%	233.971.712	31,00%	936.506.912	
2	08		Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks PUG	0	0,5025	105.207.100	0,5025	120.988.165	0,6375	133.086.982	0,6375	146.395.680	0,7724	161.035.248	0,7724	666.713.174	DP2KBP3A
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	0	20%	33.599.900	20%	40.319.880	20%	44.351.868	20%	48.787.055	20%	53.665.760	20%	220.724.463	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga berkualitas	0,00%	5,00%	36.690.700	10,00%	44.028.840	15,00%	48.431.724	20,00%	53.274.896	25,00%	58.602.386	25,00%	241.028.546	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase elemen data terpilah	0	100,00%	7.960.300	100,00%	8.437.918	100,00%	8.944.193	100,00%	9.480.845	100,00%	10.049.695	100,00%	44.872.951	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)	58.5%	53,40%	57.322.000	56,80%	64.322.000	62,20%	70.754.200	63,60%	77.829.000	67%	85.611.900	67%	94.173.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	0	0,616	33.711.320	0,62	40.453.584	0,624	44.498.942	0,628	48.948.837	0,632	53.843.720	0,632	221.456.403	
2 09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																		
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Ketahanan Pangan	NA	73,00	4.509.411.019,00	74,00	4.689.787.459,76	76,00	4.877.378.958,15	78,00	5.072.474.116,48	80,00	5.275.373.081,14	80,00	24.424.424.635	DKP
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Berkembangnya Desa Mandiri Pangan	2 LPM (100%)	1 Desa	372.341.700	1 Desa	387.235.368	1 Desa	402.724.783	1 Desa	418.833.774	1 Desa	435.587.125	1 Desa	2.016.722.750	
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Harga Pangan	NA	≤25	12.552.500	≤20	13.054.600	≤15	13.576.784	≤12,5	14.119.855	≤10	14.684.650	≤10	67.988.389	
				Ketersediaan Pangan Utama	NA	12,22%	194.459.900	23,53%	202.238.296	34,84%	210.327.828	46,15%	218.740.941	57,47%	227.490.579	57,47%	1.053.257.543	
				Skor PPH Konsumsi	NA	74,71%	256.113.000	75,58%	266.357.520	76,74%	277.011.821	77,91%	288.092.294	79,07%	299.615.985	79,07%	1.387.190.620	
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan (persen)	NA	3,57%	56.504.700	7,14%	58.764.888	10,71%	61.115.484	14,29%	63.560.103	17,86%	66.102.507	17,86%	306.047.681	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Skor Keamanan Pangan	100,00%	65,00%	41.014.100	65,00%	42.654.664	70,00%	44.360.851	75,00%	46.135.285	80,00%	47.980.696	80,00%	222.145.595	
2 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																		
2	10	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pertanahan	NA	73,00	4.326.255.880	74,00	4.499.306.115	76,00	4.679.278.360	78,00	4.866.449.494	80,00	5.061.107.474	80,00	23.432.397.323	DISPERTAN
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang	NA	100,00%	0	100,00%	50.000.000	100,00%	52.000.000	100,00%	54.080.000	100,00%	56.243.200	100,00%	212.323.200	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah	NA	100,00%	226.571.100	100,00%	235.633.944	100,00%	245.059.302	100,00%	254.861.674	100,00%	265.056.141	100,00%	1.227.182.160	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase koordinasi, fasilitasi dan informasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria	NA	100,00%	40.000.000	100,00%	41.600.000	100,00%	43.264.000	100,00%	44.994.560	100,00%	46.794.342	100,00%	216.652.902	
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luasan aset tanah pemkab yang tersertifikasi	NA	29,22%	108.000.000	46,67%	112.320.000	64,12%	116.812.800	78,66%	121.485.312	90,06%	126.344.724	90,06%	584.962.836	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan	NA	100,00%	129.910.200	100,00%	135.106.608	100,00%	140.510.872	100,00%	146.131.307	100,00%	151.976.560	100,00%	703.635.547	
2 11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																		
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Lingkungan Hidup	NA	73,00	9.441.971.147	74,00	9.819.649.993	76,00	10.212.435.993	78,00	10.620.933.432	80,00	11.045.770.770	80,00	51.140.761.334	DLH
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase dokumen perencanaan LH yang tersedia	100,00%	100,00%	114.542.800	100,00%	419.124.512	100,00%	123.889.492	100,00%	128.845.072	100,00%	133.998.875	100,00%	920.400.752	
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran Air	5,5	5,4	1.410.855.100	5,3	1.467.289.304	5,2	1.525.980.876	5,1	1.587.020.111	5,1	1.650.500.916	5,1	7.641.646.307	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase lokasi kawasan keanekaragaman hayati yang ditangani	NA	100	3.970.808.100	100	4.129.640.424	100	4.294.826.041	100	4.466.619.083	100	4.645.283.846	100	21.507.177.493	
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	100,00%	100,00%	229.958.400	100,00%	239.156.736	100,00%	248.723.005	100,00%	258.671.926	100,00%	269.018.803	100,00%	1.245.528.870	
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	NA	100,00%	234.666.000	100,00%	244.052.640	100,00%	253.814.746	100,00%	263.967.335	100,00%	274.526.029	100,00%	1.271.026.750	
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang mengelola lingkungan hidup	0,00%	25,00%	50.000.000	50,00%	52.000.000	75,00%	54.080.000	100,00%	56.243.200	100,00%	58.492.928	100,00%	270.816.128	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	NA	73,00	6.246.464.724	74,00	6.496.323.313	76,00	6.756.176.245	78,00	7.026.423.295	80,00	7.307.480.227	80,00	33.832.867.805	DPMD
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase penataan administrasi batas wilayah desa	6,50%	8,31%	0	10,12%	14.836.000	11,93%	15.429.440	13,74%	16.046.618	15,55%	16.688.482	15,55%	63.000.540	
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	2,53	1,44%	81.258.275	2,89%	101.572.844	4,33%	105.635.758	5,78%	109.861.188	7,22%	114.255.635	21,66%	512.583.699	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	7,22	25,27%	121.802.049.475	43,32%	122.411.059.722	62,09%	123.635.170.320	80,87%	124.871.522.023	100,00%	126.120.237.243	100,00%	618.840.038.783	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	75,00%	75,00%	1.129.119.450	81,23%	1.174.284.228	87,45%	1.221.255.597	93,68%	1.270.105.821	100,00%	1.320.910.054	100,00%	6.115.675.150	
2	14		Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	NA	73,00	6.995.658.283	74,00	7.275.484.614	76,00	7.566.503.999	78,00	7.869.164.159	80,00	8.183.930.725	80,00	37.890.741.780	DP2KBP3A
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,10%	8,10%	205.425.600	9,10%	217.751.136	10,10%	230.816.204	11,10%	244.665.176	12,10%	259.345.087	12,10%	1.158.003.204	
				Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	0	67,15%		67,56%		68,09%		70,00%		63,40%		63,40%		
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	58%	59%	70.975.600	60,32%	85.170.720	62,44%	102.204.864	64,55%	122.645.837	64,55%	147.175.004	64,55%	528.172.025	
2	14	02	Program pengendalian Penduduk	Median Usia Perempuan Kawin Pertama	NA	16th	37.126.200	17 th	42.000.000	18 th	55.000.000	19 th	56.000.000	20 th	69.000.000	20.1 th	259.126.200	
2	15		Usuran Pemerintahan Bidang Perhubungan															
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	NA	73,00	6.928.916.545	74,00	7.206.073.207	76,00	7.494.316.135	78,00	7.794.088.780	80,00	8.105.852.332	80,00	37.529.246.999	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	70,47%	70,08%	1.819.314.800	70,11%	1.892.087.392	70,15%	1.967.770.888	70,19%	2.046.481.723	70,23%	2.128.340.992	70,23%	9.853.995.795	
				Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	67,00%	63,00%		70,00%		75,00%		80,00%		86,00%		86,00%		
				V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,41	0,4		0,39		0,38		0,37		0,36		0,36		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan sertakelaikan kapal		22,50%	83.792.400	30,00%	87.144.096	50,00%	90.629.860	70,00%	94.255.054	80,00%	98.025.256	90,00%	453.846.666	
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	NA	73,00	6.552.099.960	74,00	6.814.183.958	76,00	7.086.751.317	78,00	7.370.221.369	80,00	7.665.030.224	80,00	35.488.286.829	DISKOMINFO
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	71,00%	71,00%	3.672.513.500	71,00%	3.819.414.040	71,00%	3.972.190.602	71,00%	4.131.078.226	71,00%	4.296.321.355	71,00%	19.891.517.722	
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	40,87%	42,79%	2.495.736.600	43,75%	2.595.566.064	44,71%	2.699.388.707	45,67%	2.807.364.255	45,67%	2.919.658.825	45,67%	13.517.714.450	
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	NA	73,00	4.742.346.187	74,00	4.932.040.034	76,00	5.129.321.636	78,00	5.334.494.501	80,00	5.547.874.281	80,00	25.686.076.640	DISKOP
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam	46,55%		-	74,14%	55.000.000	84,48%	57.200.000	94,83%	59.488.000	100,00%	61.867.520	100,00%	233.555.520	
				Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu	0,00%	100%		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan	7,36%	19,63%	90.000.000	39,26%	93.600.000	58,90%	97.344.000	78,53%	101.237.760	98,16%	105.287.270	98,16%	487.469.030	
				Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan	13,79%	29,31%		44,83%	0	60,34%	0	75,86%	0	91,38%	0	91,38%		
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/ USP Sehat	8,62%	13,79%	90.000.000	18,97%	93.600.000	24,14%	97.344.000	29,31%	101.237.760	34,48%	105.287.270	34,48%	487.469.030	
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	347 (Data total pengawas dan pengurus)	17,29%	90.000.000	34,58%	93.600.000	51,87%	97.344.000	69,16%	101.237.760	86,46%	105.287.270	86,46%	487.469.030	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	NA	33,74	347.900.400	10,00%	361.816.416	10,00%	376.289.073	10,00%	391.340.636	10,00%	406.994.261	10,00%	1.884.340.785	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	NA	8,36%	365.000.000	8,37%	379.600.000	8,39%	394.784.000	8,40%	410.575.360	8,42%	426.998.374	8,42%	1.976.957.734	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	NA	9,35%	173.334.200	18,70%	180.267.568	28,05%	187.478.271	37,41%	194.977.402	46,76%	202.776.498	46,76%	938.833.938	
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal															
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	NA	73,00	7.245.611.103	74,00	7.535.435.547	76,00	7.836.852.969	78,00	8.150.327.088	80,00	8.476.340.171	80,00	39.244.566.878	DPMPSTP
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi		30,00%	114.000.000	20,00 %	118.560.000	20,00%	123.302.400	15,00 %	128.234.496	15,00 %	133.363.876	100,00%	617.460.772	
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru		8	88.250.000	13	91.780.000	13	95.451.200	13	99.269.248	13	103.240.018	60	477.990.466	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	100,00%	108.357.800	100,00%	112.692.112	100,00%	117.199.796	100,00%	121.887.788	100,00 %	126.763.300	100,00%	586.900.797	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase LKPM	NA	100,00%	62.429.000	100,00%	64.926.160	100,00%	67.523.206	100,00%	70.224.135	100,00 %	73.033.100	100,00%	338.135.601	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	18	06	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem perizinan yang mudah diakses	0	100,00%	53.750.000	100,00%	55.900.000	100,00%	58.136.000	100,00%	60.461.440	100,00%	62.879.898	100,00%	291.127.338	
2 19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga																		
2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemuda dan Olahraga	NA	73,00	4.473.253.586	74,00	4.652.183.729	76,00	4.838.271.079	78,00	5.031.801.922	80,00	5.233.073.999	80,00	24.228.584.314	DISPORA
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang berdaya saing	15,00%	15,75%	1.369.511.600	16,5%	1.424.292.064	17,25%	1.481.263.747	18%	1.540.514.296	18,75%	1.602.134.868	18,75%	7.417.716.575	
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	25%	25%	6.650.980.396	37,50%	3.150.980.396	38,75%	3.277.019.612	40%	6.917.019.612	42,50%	3.408.100.396	42,50%	23.404.100.412	
2 20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	70.000.000	100,00%	72.800.000	100,00%	75.712.000	100,00%	78.740.480	100,00%	81.890.099	100,00%	379.142.579	DISKOMINFO
2 21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	163	170	56.296.800	180	58.548.672	190	60.890.619	200	63.326.244	240	65.859.293	240	304.921.628	DISKOMINFO
2 22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																		
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	NA	73,00	5.101.260.491	74,00	5.305.310.911	76,00	5.517.523.347	78,00	5.738.224.281	80,00	5.967.753.252	80,00	27.630.072.282	DISBUDPAR
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	33,33%	44,44%	363.528.000	55,56%	378.069.120	66,67%	393.191.885	77,78%	408.919.560	88,89%	425.276.343	88,89%	1.968.984.908	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan	0,00%	20,00%	26.417.300	40,00%	27.473.992	60,00%	28.572.952	80,00%	29.715.870	100,00%	30.904.505	100,00%	143.084.618	
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya	55,00%	62,50%	276.612.700	65,00%	287.677.208	67,50%	299.184.296	70,00%	311.151.668	72,50%	323.597.735	72,50%	1.498.223.607	
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan															
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	NA	73,00	4.504.722.767	74,00	4.684.911.678	76,00	4.872.308.145	78,00	5.067.200.471	80,00	5.269.888.489	80,00	24.399.031.549	DISPERSIP
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	9,50%	9,51%	380.572.400	9,52%	395.795.296	9,53%	411.627.108	9,54%	428.092.192	9,55%	445.215.880	9,55%	2.061.302.876	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	81,35	82,20		82,40		82,60		82,80		83,00		83,00		
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan	98,61%	98,89%	16.600.000	99,17%	17.264.000	99,45%	17.954.560	99,72%	18.672.742	100%	19.419.652	100%	89.910.954	
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan															
2	24	01	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	75,70%	76,00%	275.619.300	76,50%	286.644.072	77,00%	298.109.835	77,50%	310.034.228	78,00%	322.435.597	78,00%	1.492.843.033	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan	82,53	84,75		84,95		85,15		85,35		85,55		8,55		
2	24	02	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	84,20%	84,70%	31.056.000	85,20%	32.298.240	85,70%	33.590.170	86,20%	34.933.776	86,70%	36.331.127	86,70%	168.209.313	
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat perijinan penggunaan arsip	-	7,50%	0	10,50%	10.500.000	13,00%	10.920.000	15,00%	11.356.800	17,50%	11.811.072	17,50%	44.587.872	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perikanan	NA	73,00	6.549.119.867	74,00	6.811.084.662	76,00	7.083.528.048	78,00	7.366.869.170	80,00	7.661.543.937	80,00	35.472.145.684	DISKAN
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	8.766	8.900	52.906.100	8.982	55.022.344	9,064	57.223.238	9,146	59.512.167	9,228	61.892.654	9,228	286.556.503	
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	53.116	53,926	407.795.200	54,422	424.107.008	54,923	441.071.288	55,417	458.714.140	55,916	477.062.705	55,916	2.208.750.342	
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan	66,40%	70,00%	63.623.000	71,00%	66.167.920	72,00%	68.814.637	73,00%	71.567.222	74,00%	74.429.911	74,00%	344.602.690	
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	56,39	59,53	199.798.600	61,02	207.790.544	61,02	216.102.166	63,08	224.746.252	64,11	233.736.102	64,11	1.082.173.665	
				Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan	7%	7,50%		8,00%		8,00%		9,00%		9,50%		9,50%		
3	26		Urusan Pemerintaan Bidang Pariwisata															
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase destinasi wisata yang representatif	44%	46,00%	318.653.200	48,00 %	331.399.328	52,00 %	344.655.301	56,00 %	358.441.513	58,00 %	372.779.174	58,00 %	1.725.928.516	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan	8%	8,00%	496.121.300	9%	515.966.152	9 %	536.604.798	10 %	558.068.990	10 %	580.391.750	10%	2.687.152.990	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	75 unit	10%	79.395.500	10%	82.571.320	10%	85.874.173	10%	89.309.140	10%	92.881.505	10%	430.031.638	
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (TPH)															
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	NA	73,00	27.119.361.042	74,00	28.204.135.484	76,00	29.332.300.903	78,00	30.505.592.939	80,00	31.725.816.657	80,00	146.887.207.025	DTPH
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan produktivitas komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura unggulan	NA	1,00%	1.012.862.053	1,08%	1.053.376.535	1,12%	1.095.511.597	1,35%	1.139.332.060	1,23%	1.184.905.343	1,23%	5.485.987.588	
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian	NA	6,43%	41.472.100	11,79%	43.130.984	17,74%	44.856.223	24,29%	46.650.472	31,43%	48.516.491	31,43%	224.626.271	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	NA	6,70%	82.502.800	6,60%	85.802.912	6,50%	89.235.028	6,40%	92.804.430	6,30%	96.516.607	6,30%	446.861.777	
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	NA	8,00%	25.070.000	8,00%	26.072.800	10,00%	27.115.712	12,00%	28.200.340	16,00%	29.328.354	53,60%	135.787.207	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri	NA	4,00%	2.594.101.717	4,15%	2.697.865.786	4,30%	2.805.780.417	4,45%	2.918.011.634	4,60%	3.034.732.099	4,60%	14.050.491.653	
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Nakbun)															
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Peternakan dan Perkebunan	NA	73,00	7.772.862.683	74,00	8.083.777.190	76,00	8.407.128.278	78,00	8.743.413.409	80,00	9.093.149.945	80,00	42.100.331.506	DISNAKBUN
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan	NA	0,08%	66.505.000	0,09%	69.165.200	0,10%	71.931.808	0,11%	74.809.080	0,12%	77.801.444	0,12%	360.212.532	
				Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	NA	2,50%	80.538.000	2,60%	83.759.520	2,70%	87.109.901	2,80%	90.594.297	2,90%	94.218.069	2,90%	436.219.786	
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas perkebunan yang mendapatkan fasilitasi prasarana perkebunan	NA	100%	0	100%	30.000.000	100%	31.200.000	100%	32.448.000	100%	33.745.920	100%	127.393.920	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	NA	75,00%	151.698.432	76,00%	157.766.369	77,00%	164.077.024	78,00%	170.640.105	80,00%	177.465.709	80,00%	821.647.640	
				Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan	NA	20,00%	31.031.900	20,00%	32.273.176	20,00%	33.564.103	20,00%	34.906.667	20,00%	36.302.934	100,00%	168.078.780	
				Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar	NA	0,33%	111.655.500	0,32%	116.121.720	0,31%	120.766.589	0,30%	125.597.252	0,29%	130.621.142	0,29%	604.762.204	
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian	NA	3,00%	48.140.000	12,00%	50.065.600	20,00%	52.068.224	30,00%	54.150.953	35,00%	56.316.991	35,00%	260.741.768	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Perkebunan yang Tertib administrasi	NA	100%	11.264.000	100%	11.714.560	100%	12.183.142	100%	12.670.468	100%	13.177.287	100,00%	61.009.457	
				Persentase Usaha Peternakan yang Tertib administrasi	NA	100%	432.260.000	100%	449.550.400	100%	29.696.576	100%	30.884.439	100%	32.119.817	100,00%	974.511.232	
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan															
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan	NA	100%	1.600.000	100%	1.664.000	100%	1.730.560	100%	1.799.782	100%	1.871.774	100%	8.666.116	DISPERIND AG
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	NA	18,75%	844.792.000	18,75%	878.583.680	18,75%	913.727.027	18,75%	950.276.108	25,00%	988.287.153	25,00%	4.575.665.968	
3	30	04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	NA	9,00%	67.743.400	9,00%	70.453.136	9,00%	73.271.261	9,00%	76.202.112	9,00%	79.250.196	9,00%	366.920.106	
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan daerah yang dikembangkan	NA	100%	227.000	100%	83.473.000	100%	86.811.920	100%	90.284.397	100%	93.895.773	100%	354.692.089	
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Tertib Ukur	NA	32,00%	78.589.825	33%	81.733.418	35%	85.002.755	37%	88.402.865	40%	91.938.980	40%	425.667.842	
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk daerah yang dipromosikan	NA	100%	13.850.000	100%	14.404.000	100%	14.980.160	100%	15.579.366	100%	16.202.541	100%	75.016.067	
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian															
3	31	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	NA	73,00	7.893.804.691	74,00	8.209.556.879	76,00	8.537.939.154	78,00	8.879.456.720	80,00	9.234.634.989	80,00	42.755.392.432	DISPERIND AG
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	92,07%	92,25%	281.761.500	92,37%	293.031.960	92,49%	304.753.238	92,62%	316.943.368	92,75%	329.621.103	92,75%	1.526.111.169	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)		95,00%	10.636.800	95,00%	11.062.272	95,00%	11.504.763	95,00%	11.964.953	95,00%	12.443.552	95,00%	57.612.340	
3	31		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang Memiliki Izin		-	100,00%	166.400.000	100,00%	173.056.000	100,00%	179.978.240	100,00%	187.177.370	100,00%	706.611.610		
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan ex. transmigrasi		10,53%	81.999.900	21,05%	85.279.896	31,58%	88.691.092	42,11%	92.238.736	52,63%	95.928.285	52,63%	444.137.908	Disnakertrans
4			URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		Sekretariat Daerah															
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	36.975.075.352	74,00	38.454.078.366	76,00	39.992.241.501	78,00	41.591.931.161	80,00	43.255.608.407	80,00	200.268.934.787	SETDA
				Nilai SAKIP	68,97	70,00		72,50		75,00		77,50		80,05		80,05		
				Nilai IKM Kab. Banjar	82,44	84,00		85,00		86,00		87,00		88,31		88,31		
				Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat Daerah	NA	73,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	7.054.368.000	100%	7.336.542.720	100%	7.630.004.429	100%	7.935.204.606	100%	8.252.612.790	100%	38.208.732.545	
				Nilai LPPD	3,5065	3,1107		3,1100		3,1120		3,1150		3,1170		3,1170		
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100%	100%	1.384.537.700	100%	1.439.919.208	100%	1.497.515.976	100%	1.557.416.615	100%	1.619.713.280	100%	7.499.102.780	
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	40		50		60		70		81		81		
4	02		Sekretariat DPRD															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat DPRD	NA	73,00	60.721.724.290	74,00	63.150.593.262	76,00	65.676.616.992	78,00	68.303.681.672	80,00	71.035.828.939	80,00	328.888.445.154	SET DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas	100%	100%	2.412.486.000	100%	2.508.985.440	100%	2.609.344.858	100%	2.713.718.652	100%	2.822.267.398	100%	13.066.802.347	
				Persentase fasilitasi pelaksanaan resees	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		Perencanaan															
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	NA	73,00	7.529.250.806	74,00	7.830.420.838	76,00	8.143.637.672	78,00	8.469.383.179	80,00	8.808.158.506	80,00	40.780.851.000	BAPPEDA LITBANG
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	1.419.420.800	100%	1.476.197.632	100%	1.535.245.537	100%	1.596.655.359	100%	1.660.521.573	100%	7.688.040.901	
				Persentase Perencanaan Daerah yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		75,45	3.423.059.600	76,79	3.559.981.984	78,15	3.702.381.263	79,67	3.850.476.514	80,00	4.004.495.574	80,00	18.540.394.936	
				Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA		77,06		78,04		79,02		80		80,98		80,98		
				Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Wilayah		73,03		74,03		75,03		76,03		77,03		77,03		
5	02		Keuangan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	NA	73,00	32.741.528.356	74,00	34.051.189.490	76,00	35.413.237.070	78,00	36.829.766.553	80,00	38.302.957.215	80,00	177.338.678.683	BPKAD
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	85,18%	87,03%	8.257.949.000	88,88%	8.588.266.960	90,73%	8.931.797.638	92,58%	9.289.069.544	95,05%	9.660.632.326	95,05%	44.727.715.468	
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	94,44%	96,29%		98,14%		98,14%		100%		100%		100%		
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	81,48%	83,33%		85,18%		87,03%		88,88%		90,73%		90,73%		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	83,33%	85,18%	737.801.600	87,03%	767.313.664	88,88%	798.006.211	90,73%	829.926.459	92,58%	863.123.517	92,58%	3.996.171.451	
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Pendapatan Daerah	NA	73,00	10.497.767.661	74,00	10.917.678.367	76,00	11.354.385.502	78,00	11.808.560.922	80,00	12.280.903.359	80,00	56.859.295.812	BAPENDA
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian Dana Transfer	95%	94%	31.307.100	96%	32.559.384	98%	33.861.759	100%	35.216.230	100%	36.624.879	100%	169.569.352	
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114,18%	94%	1.395.237.571	95%	1.451.047.074	96%	1.509.088.957	98%	1.569.452.515	100%	1.632.230.616	100%	7.557.056.732	
5	03		Kepegawaian															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	73,00	8.134.620.339	74,00	8.460.005.153	76,00	8.798.405.359	78,00	9.150.341.573	80,00	9.516.355.236	80,00	44.059.727.659	BKDPSDM
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	41,6	42,00	2.208.500.800	42,10	2.296.840.832	42,20	2.388.714.465	42,30	2.484.263.044	42,50	2.583.633.566	42,50	11.961.952.707	
5	04		Pendidikan dan Pelatihan															
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kompetensi	11,06	18,00	2.861.652.000	19,40	2.976.118.080	23,30	3.095.162.803	26,70	3.218.969.315	30,50	3.347.728.088	30,50	15.499.630.286	BKDPSDM
5	05		Penelitian dan Pengembangan															
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	700.000.000	100%	728.000.000	100%	757.120.000	100%	787.404.800	100%	818.900.992	100%	3.791.425.792	BAPPEDA LITBANG
				Persentase Inovasi yang diterapkan		100%		100%		100%		100%		100%				
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		Inspektorat Daerah															
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah	NA	73,00	9.789.566.039	74,00	10.181.148.681	76,00	10.588.394.628	78,00	11.011.930.413	80,00	11.452.407.629	80,00	53.023.447.390	INSPEKTOR AT
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	NA	73	1.458.650.000	74	1.516.996.000	76	1.577.675.840	78	1.640.782.874	80	1.706.414.189	80	7.900.518.902	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4,11	4,20	1.018.900.000	4,25	1.059.656.000	4,30	1.102.042.240	4,40	1.146.123.930	4,50	1.191.968.887	4,50	5.518.691.056	
7			UNSUR KEWILAYAHAN															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	Kecamatan Kertak Hanyar																
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	NA	73,00	4.884.237.717	74,00	5.079.607.226	76,00	5.282.791.515	78,00	5.494.103.175	80,00	5.713.867.302	80,00	26.454.606.935	Kec. Kertak Hanyar
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	6.748.000	100,00%	7.017.920	100,00%	7.298.637	100,00%	7.590.582	100,00%	7.894.206	100,00%	36.549.345	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100,00%	100,00%	981.070.200	100,00%	1.020.313.008	100,00%	1.061.125.528	100,00%	1.103.570.549	100,00%	1.147.713.371	100,00%	5.313.792.657	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	9.000.000	100,00%	9.360.000	100,00%	9.734.400	100,00%	10.123.776	100,00%	10.528.727	100,00%	48.746.903	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	118.560.000	100,00%	123.302.400	100,00%	128.234.496	100,00%	133.363.876	100,00%	138.698.431	100,00%	642.159.203	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	15.050.000	100,00%	15.652.000	100,00%	16.278.080	100,00%	16.929.203	100,00%	17.606.371	100,00%	81.515.655	
7	01	Kecamatan Astambul																
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul	NA	73,00	2.548.442.453	74,00	2.650.380.151	76,00	2.756.395.357	78,00	2.866.651.171	80,00	2.981.317.218	80,00	13.803.186.351	Kec. Astambul
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	100,00%	100,00%	13.256.000	100,00%	13.786.240	100,00%	14.337.690	100,00%	14.911.197	100,00%	15.507.645	100,00%	71.798.772	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	24.155.000	100,00%	25.121.200	100,00%	26.126.048	100,00%	27.171.090	100,00%	28.257.934	100,00%	130.831.271	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	11.435.000	100,00%	11.892.400	100,00%	12.368.096	100,00%	12.862.820	100,00%	13.377.333	100,00%	61.935.648	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	103.212.000	100,00%	107.340.480	100,00%	111.634.099	100,00%	116.099.463	100,00%	120.743.442	100,00%	559.029.484	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	10.700.000	100,00%	11.128.000	100,00%	11.573.120	100,00%	12.036.045	100,00%	12.517.487	100,00%	57.954.651	
7	01		Kecamatan Gambut															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	NA	73,00	4.924.894.493	74,00	5.121.890.273	76,00	5.326.765.884	78,00	5.539.836.519	80,00	5.761.429.980	80,00	26.674.817.148	Kecamatan Gambut
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	50.143.800	100,00%	52.149.552	100,00%	54.235.534	100,00%	56.404.955	100,00%	58.661.154	100,00%	271.594.995	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	545.765.000	100,00%	567.595.600	100,00%	590.299.424	100,00%	613.911.401	100,00%	638.467.857	100,00%	2.956.039.282	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	14.940.000	100,00%	15.537.600	100,00%	16.159.104	100,00%	16.805.468	100,00%	17.477.687	100,00%	80.919.859	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	99.660.000	100,00%	103.646.400	100,00%	107.792.256	100,00%	112.103.946	100,00%	116.588.104	100,00%	539.790.706	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	26.570.000	100,00%	27.632.800	100,00%	28.738.112	100,00%	29.887.636	100,00%	31.083.142	100,00%	143.911.690	
7	01		Kecamatan Karang Intan															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan	NA	73,00	2.903.644.583	74,00	3.019.790.366	76,00	3.140.581.981	78,00	3.266.205.260	80,00	3.396.853.471	80,00	15.727.075.661	Kecamatan Karang Intan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	11.900.000	100,00%	12.376.000	100,00%	12.871.040	100,00%	13.385.882	100,00%	13.921.317	100,00%	64.454.238	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	49.999.400	100,00%	51.999.376	100,00%	54.079.351	100,00%	56.242.525	100,00%	58.492.226	100,00%	270.812.878	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	25.000.000	100,00%	26.000.000	100,00%	27.040.000	100,00%	28.121.600	100,00%	29.246.464	100,00%	135.408.064	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	166.200.000	100,00%	172.848.000	100,00%	179.761.920	100,00%	186.952.397	100,00%	194.430.493	100,00%	900.192.809	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	48.500.000	100,00%	50.440.000	100,00%	52.457.600	100,00%	54.555.904	100,00%	56.738.140	100,00%	262.691.644	
7	01		Kecamatan Martapura															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	NA	73,00	10.357.781.210	74,00	10.772.092.458	76,00	11.202.976.157	78,00	11.651.095.203	80,00	12.117.139.011	80,00	56.101.084.039	Kec. Martapura
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	5.582.000	100,00%	5.805.280	100,00%	6.037.491	100,00%	6.278.991	100,00%	6.530.150	100,00%	30.233.913	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	2.636.725.400	100,00%	2.742.194.416	100,00%	2.851.882.193	100,00%	2.965.957.480	100,00%	3.084.595.780	100,00%	14.281.355.269	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	6.406.800	100,00%	6.663.072	100,00%	6.929.595	100,00%	7.206.779	100,00%	7.495.050	100,00%	34.701.295	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	91.082.400	100,00%	94.725.696	100,00%	98.514.724	100,00%	102.455.313	100,00%	106.553.525	100,00%	493.331.658	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	17.375.800	100,00%	18.070.832	100,00%	18.793.665	100,00%	19.545.412	100,00%	20.327.228	100,00%	94.112.938	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	Kecamatan Aranio																
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	NA	73,00	2.221.474.378	74,00	2.332.548.097	76,00	2.449.175.502	78,00	2.571.634.277	80,00	2.700.215.991	80,00	12.275.048.244	Kec. Aranio
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	12.820.600	100,00%	13.461.630	100,00%	14.134.712	100,00%	14.841.447	100,00%	15.583.519	100,00%	70.841.908	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	40.486.600	100,00%	42.510.930	100,00%	44.636.477	100,00%	46.868.300	100,00%	49.211.715	100,00%	223.714.022	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	6.298.000	100,00%	6.612.900	100,00%	6.943.545	100,00%	7.290.722	100,00%	7.655.258	100,00%	34.800.426	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	71.000.000	100,00%	74.550.000	100,00%	78.277.500	100,00%	82.191.375	100,00%	86.300.944	100,00%	392.319.819	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	17.581.600	100,00%	18.460.680	100,00%	19.383.714	100,00%	20.352.900	100,00%	21.370.545	100,00%	97.149.438	
7	01	Kecamatan Sungai Tabuk																
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	NA	73,00	3.577.380.053	74,00	3.720.475.255	76,00	3.869.294.265	78,00	4.024.066.036	80,00	4.185.028.677	80,00	19.376.244.287	Kec. Sungai Tabuk
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	100,00%	100,00%	47.500.000	100,00%	49.400.000	100,00%	51.376.000	100,00%	53.431.040	100,00%	55.568.282	100,00%	257.275.322	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	508.114.700	100,00%	528.439.288	100,00%	549.576.860	100,00%	571.559.934	100,00%	594.422.331	100,00%	2.752.113.113	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	21.575.800	100,00%	22.438.832	100,00%	23.336.385	100,00%	24.269.841	100,00%	25.240.634	100,00%	116.861.492	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	20.621.400	100,00%	21.446.256	100,00%	22.304.106	100,00%	23.196.270	100,00%	24.124.121	100,00%	111.692.154	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	31.456.200	100,00%	32.714.448	100,00%	34.023.026	100,00%	35.383.947	100,00%	36.799.305	100,00%	170.376.926	
7	01		Kecamatan Aluh-Aluh															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aluh-Aluh	NA	73,00	1.975.427.841	74,00	2.054.444.955	76,00	2.136.622.753	78,00	2.222.087.663	80,00	2.310.971.169	80,00	10.699.554.381	Kec. Aluh-Aluh
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	65.669.400	100,00%	68.296.176	100,00%	71.028.023	100,00%	73.869.144	100,00%	76.823.910	100,00%	355.686.653	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	NA	100,00%	38.998.700	100,00%	40.558.648	100,00%	42.180.994	100,00%	43.868.234	100,00%	45.622.963	100,00%	211.229.539	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	18.622.800	100,00%	19.367.712	100,00%	20.142.420	100,00%	20.948.117	100,00%	21.786.042	100,00%	100.867.092	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	49.513.200	100,00%	51.493.728	100,00%	53.553.477	100,00%	55.695.616	100,00%	57.923.441	100,00%	268.179.462	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	17.482.200	100,00%	18.181.488	100,00%	18.908.748	100,00%	19.665.097	100,00%	20.451.701	100,00%	94.689.234	
7	01		Kecamatan Mataraman															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman	NA	73,00	2.481.679.428	74,00	2.580.946.605	76,00	2.684.184.469	78,00	2.791.551.848	80,00	2.903.213.922	80,00	13.441.576.273	Kec. Mataraman
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	1.042.100.000	100,00%	1.083.784.000	100,00%	1.127.135.360	100,00%	1.172.220.774	100,00%	1.219.109.605	100,00%	5.644.349.740	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	32.700.000	100,00%	34.008.000	100,00%	35.368.320	100,00%	36.783.053	100,00%	38.254.375	100,00%	177.113.748	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	15.100.000	100,00%	15.704.000	100,00%	16.332.160	100,00%	16.985.446	100,00%	17.664.864	100,00%	81.786.471	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	35.150.000	100,00%	36.556.000	100,00%	38.018.240	100,00%	39.538.970	100,00%	41.120.528	100,00%	190.383.738	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	28.170.000	100,00%	29.296.800	100,00%	30.468.672	100,00%	31.687.419	100,00%	32.954.916	100,00%	152.577.807	
7	01		Kecamatan Simpang Empat															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	NA	73,00	2.197.798.340	74,00	2.285.710.274	76,00	2.377.138.685	78,00	2.472.224.232	80,00	2.571.113.201	80,00	11.903.984.731	Kec. Simpang Empat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	10.571.200	100,00%	10.994.048	100,00%	11.433.810	100,00%	11.891.162	100,00%	12.366.809	100,00%	57.257.029	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	19.569.800	100,00%	20.352.592	100,00%	21.166.696	100,00%	22.013.364	100,00%	22.893.898	100,00%	105.996.349	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	10.354.700	100,00%	10.768.888	100,00%	11.199.644	100,00%	11.647.629	100,00%	12.113.534	100,00%	56.084.395	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	57.500.000	100,00%	59.800.000	100,00%	62.192.000	100,00%	64.679.680	100,00%	67.266.867	100,00%	311.438.547	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	19.808.000	100,00%	20.600.320	100,00%	21.424.333	100,00%	22.281.306	100,00%	23.172.558	100,00%	107.286.517	
7	01		Kecamatan Pengaron															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	NA	73,00	2.619.364.237	74,00	2.724.138.806	76,00	2.833.104.359	78,00	2.946.428.533	80,00	3.064.285.674	80,00	14.187.321.610	Kec. Pengaron
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	54.795.600	100,00%	56.987.424	100,00%	59.266.921	100,00%	61.637.598	100,00%	64.103.102	100,00%	296.790.644	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	45.000.000	100,00%	46.800.000	100,00%	48.672.000	100,00%	50.618.880	100,00%	52.643.635	100,00%	243.734.515	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	13.429.600	100,00%	13.966.784	100,00%	14.525.455	100,00%	15.106.474	100,00%	15.710.733	100,00%	72.739.045	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	42.354.400	100,00%	44.048.576	100,00%	45.810.519	100,00%	47.642.940	100,00%	49.548.657	100,00%	229.405.092	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	30.303.200	100,00%	31.515.328	100,00%	32.775.941	100,00%	34.086.979	100,00%	35.450.458	100,00%	164.131.906	
7	01		Kecamatan Sungai Pinang															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	NA	73,00	2.169.876.088	74,00	2.256.671.132	76,00	2.346.937.977	78,00	2.440.815.496	80,00	2.538.448.116	80,00	11.752.748.808	Kec. Sungai Pinang
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	100,00%	100,00%	11.251.000	100,00%	11.701.040	100,00%	12.169.082	100,00%	12.655.845	100,00%	13.162.079	100,00%	60.939.045	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	25.804.000	100,00%	26.836.160	100,00%	27.909.606	100,00%	29.025.991	100,00%	30.187.030	100,00%	139.762.787	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	17.610.000	100,00%	18.314.400	100,00%	19.046.976	100,00%	19.808.855	100,00%	20.601.209	100,00%	95.381.440	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	100.268.200	100,00%	104.278.928	100,00%	108.450.085	100,00%	112.788.089	100,00%	117.299.612	100,00%	543.084.914	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	12.956.000	100,00%	13.474.240	100,00%	14.013.210	100,00%	14.573.738	100,00%	15.156.688	100,00%	70.173.875	
7	01		Kecamatan Beruntung Baru															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	NA	73,00	2.546.759.785	74,00	2.648.630.176	76,00	2.754.575.383	78,00	2.864.758.399	80,00	2.979.348.735	80,00	13.794.072.478	Kec. Beruntung Baru
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	15.274.600	100,00%	15.885.584	100,00%	16.521.007	100,00%	17.181.848	100,00%	17.869.122	100,00%	82.732.161	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	NA	100,00%	44.878.900	100,00%	46.674.056	100,00%	48.541.018	100,00%	50.482.659	100,00%	52.501.965	100,00%	243.078.599	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	9.105.200	100,00%	9.469.408	100,00%	9.848.184	100,00%	10.242.112	100,00%	10.651.796	100,00%	49.316.700	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	102.584.000	100,00%	106.687.360	100,00%	110.954.854	100,00%	115.393.049	100,00%	120.008.771	100,00%	555.628.033	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	19.844.800	100,00%	20.638.592	100,00%	21.464.136	100,00%	22.322.701	100,00%	23.215.609	100,00%	107.485.838	
7	01		Kecamatan Martapura Barat															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	NA	73,00	2.611.337.789	74,00	2.715.791.301	76,00	2.824.422.953	78,00	2.937.399.871	80,00	3.054.895.866	80,00	14.143.847.778	Kec. Martapura Barat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	22.979.200	100,00%	23.898.368	100,00%	24.854.303	100,00%	25.848.475	100,00%	26.882.414	100,00%	124.462.759	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	19.000.000	100,00%	19.760.000	100,00%	20.550.400	100,00%	21.372.416	100,00%	22.227.313	100,00%	102.910.129	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan	NA	100,00%	6.800.000	100,00%	7.072.000	100,00%	7.354.880	100,00%	7.649.075	100,00%	7.955.038	100,00%	36.830.993	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		masyarakat di kecamatan																
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	113.306.000	100,00%	117.838.240	100,00%	122.551.770	100,00%	127.453.840	100,00%	132.551.994	100,00%	613.701.844	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	6.440.000	100,00%	6.697.600	100,00%	6.965.504	100,00%	7.244.124	100,00%	7.533.889	100,00%	34.881.117	
7	01		Kecamatan Sambung Makmur															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur	NA	73,00	1.955.067.937	74,00	2.033.270.654	76,00	2.114.601.481	78,00	2.199.185.540	80,00	2.287.152.961	80,00	10.589.278.574	Kec. Sambung Makmur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	13.896.000	100,00%	14.451.840	100,00%	15.029.914	100,00%	15.631.110	100,00%	16.256.355	100,00%	75.265.218	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	29.840.000	100,00%	31.033.600	100,00%	32.274.944	100,00%	33.565.942	100,00%	34.908.579	100,00%	161.623.065	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	11.205.000	100,00%	11.653.200	100,00%	12.119.328	100,00%	12.604.101	100,00%	13.108.265	100,00%	60.689.894	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	102.233.800	100,00%	106.323.152	100,00%	110.576.078	100,00%	114.999.121	100,00%	119.599.086	100,00%	553.731.237	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	63.969.300	100,00%	66.528.072	100,00%	69.189.195	100,00%	71.956.763	100,00%	74.835.033	100,00%	346.478.363	
7 01 Kecamatan Martapura Timur																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur	NA	73,00	2.452.988.839	74,00	2.551.108.393	76,00	2.653.152.728	78,00	2.759.278.837	80,00	2.869.649.991	80,00	13.286.178.788	Kec. Martapura Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	12.000.000	100,00%	12.480.000	100,00%	12.979.200	100,00%	13.498.368	100,00%	14.038.303	100,00%	64.995.871	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	20.218.000	100,00%	21.026.720	100,00%	21.867.789	100,00%	22.742.500	100,00%	23.652.200	100,00%	109.507.210	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	8.000.000	100,00%	8.320.000	100,00%	8.652.800	100,00%	8.998.912	100,00%	9.358.868	100,00%	43.330.580	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	80.450.000	100,00%	83.668.000	100,00%	87.014.720	100,00%	90.495.309	100,00%	94.115.121	100,00%	435.743.150	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	24.250.000	100,00%	25.220.000	100,00%	26.228.800	100,00%	27.277.952	100,00%	28.369.070	100,00%	131.345.822	
7 01 Kecamatan Paramasan																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan	NA	73,00	2.184.334.819	74,00	2.271.708.212	76,00	2.362.576.540	78,00	2.457.079.602	80,00	2.555.362.786	80,00	11.831.061.959	Kec. Paramasan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	20.105.900	100,00%	20.910.136	100,00%	21.746.541	100,00%	22.616.403	100,00%	23.521.059	100,00%	108.900.040	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	39.385.000	100,00%	40.960.400	100,00%	42.598.816	100,00%	44.302.769	100,00%	46.074.879	100,00%	213.321.864	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	16.411.500	100,00%	17.067.960	100,00%	17.750.678	100,00%	18.460.706	100,00%	19.199.134	100,00%	88.889.978	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	68.959.200	100,00%	71.717.568	100,00%	74.586.271	100,00%	77.569.722	100,00%	80.672.510	100,00%	373.505.271	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	36.840.900	100,00%	38.314.536	100,00%	39.847.117	100,00%	41.441.002	100,00%	43.098.642	100,00%	199.542.198	
7	01		Kecamatan Tatah Makmur															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	NA	73,00	2.305.070.286	74,00	2.397.273.097	76,00	2.493.164.021	78,00	2.592.890.582	80,00	2.696.606.205	80,00	12.485.004.192	Kec. Tatah Makmur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	100,00%	100,00%	5.506.000	100,00%	5.726.240	100,00%	5.955.290	100,00%	6.193.501	100,00%	6.441.241	100,00%	29.822.272	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	27.513.400	100,00%	28.613.936	100,00%	29.758.493	100,00%	30.948.833	100,00%	32.186.787	100,00%	149.021.449	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	9.303.200	100,00%	9.675.328	100,00%	10.062.341	100,00%	10.464.835	100,00%	10.883.428	100,00%	50.389.132	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	87.299.900	100,00%	90.791.896	100,00%	94.423.572	100,00%	98.200.515	100,00%	102.128.535	100,00%	472.844.418	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	10.000.000	100,00%	10.400.000	100,00%	10.816.000	100,00%	11.248.640	100,00%	11.698.586	100,00%	54.163.226	
7	01		Kecamatan Telaga Bauntung															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung	NA	73,00	2.260.511.653	74,00	2.350.932.119	76,00	2.444.969.404	78,00	2.542.768.180	80,00	2.644.478.907	80,00	12.243.660.263	Kec. Telaga Bauntung
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	26.300.000	100,00%	27.352.000	100,00%	28.446.080	100,00%	29.583.923	100,00%	30.767.280	100,00%	142.449.283	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	NA	100,00%	23.700.000	100,00%	24.648.000	100,00%	25.633.920	100,00%	26.659.277	100,00%	27.725.648	100,00%	128.366.845	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	6.500.000	100,00%	6.760.000	100,00%	7.030.400	100,00%	7.311.616	100,00%	7.604.081	100,00%	35.206.097	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	45.000.000	100,00%	46.800.000	100,00%	48.672.000	100,00%	50.618.880	100,00%	52.643.635	100,00%	243.734.515	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	7.200.000	100,00%	7.488.000	100,00%	7.787.520	100,00%	8.099.021	100,00%	8.422.982	100,00%	38.997.522	
7	01		Kecamatan Cinta Puri Darussalam															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam	NA	73,00	2.316.809.574	74,00	2.409.481.957	76,00	2.505.861.235	78,00	2.606.095.685	80,00	2.710.339.512	80,00	12.548.587.963	Kec. Cintapuri Darussalam
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	0	100,00%	10.000.000	100,00%	10.400.000	100,00%	10.816.000	100,00%	11.248.640	100,00%	42.464.640	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	16.332.400	100,00%	16.985.696	100,00%	17.665.124	100,00%	18.371.729	100,00%	19.106.598	100,00%	88.461.547	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan	NA	100,00%	3.375.000	100,00%	3.510.000	100,00%	3.650.400	100,00%	3.796.416	100,00%	3.948.273	100,00%	18.280.089	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		masyarakat di kecamatan																
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	74.281.400	100,00%	64.281.400	100,00%	66.852.656	100,00%	69.526.762	100,00%	72.307.833	100,00%	347.250.051	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	21.825.600	100,00%	22.698.624	100,00%	23.606.569	100,00%	24.550.832	100,00%	25.532.865	100,00%	118.214.490	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik															
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	NA	73,00	4.340.217.112	74,00	4.513.825.796	76,00	4.694.378.828	78,00	4.882.153.981	80,00	5.077.440.141	80,00	23.508.015.859	KESBANGPOL
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	NA	0,08%	60.856.500	0,090%	63.290.760	0,120%	65.822.390	0,140%	68.455.286	0,160%	71.193.497	0,160%	329.618.434	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	NA	0,23%	1.471.276.000	0,41%	1.530.127.040	0,23%	41.591.332.122	0,41%	1.654.985.406	0,41%	1.721.184.822	0,41%	47.968.905.390	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Dibina	NA	14%	159.590.800	25,00%	165.974.432	30,00%	172.613.409	31,00%	179.517.946	32,00%	186.698.663	32%	864.395.250	
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana	100%	100%	250.423.800	100%	260.440.752	100%	270.858.382	100%	281.692.717	100%	292.960.426	100%	1.356.376.078	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial	NA	100%	311.769.100	100%	324.239.864	100%	337.209.459	100%	350.697.837	100%	364.725.750	100,00%	1.688.642.010	
			TOTAL				1.481.979.768.580		1.528.974.790.427		1.621.778.196.680		1.639.404.979.342		1.692.992.740.916		7.964.868.809.845	

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*benefit*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan ditetapkan.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, merupakan suatu kondisi yang menggambarkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga; yang diukur melalui indikator makro sebagai indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan bidang ekonomi sosial
2. **Aspek Pelayanan Umum**, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan urusan, baik wajib maupun pilihan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. **Aspek Daya Saing Daerah**, merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Secara detail indikator kinerja daerah (IKD) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.2. di bawah ini:

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Kesehatan	72,63	73,36	73,76	74,15	74,55	74,94	74,94
2	Indeks Pendidikan	59,06	60,39	60,79	61,24	61,74	62,29	62,29
3	Indeks Daya beli	77,21	78,04	78,29	78,53	78,78	79,02	79,02
4	Indeks Ketahanan Pangan	80,09	80,19	80,29	80,39	80,49	80,59	80,59
5	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-7,55%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,44	84	85,00	86,00	87,00	88,31	88,31
7	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Jumlah apresiasi Budaya Banjar	NA	6	7	8	9	10	10
9	Prestasi pemuda dan Santri dalam Olahraga	60 medali	166 medali	108 medali	69 medali	261 medali	29 medali	633 medali
10	Berkembangnya Desa Mandiri Pangan	2 LPM (100%)	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
11	Skor PPH Konsumsi	NA	74,71%	75,58%	75,58%	76,74%	77,91%	77,91%
12	Skor Keamanan Pangan	100,00%	65,00%	65,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD	99,19%	99,64%	99,84%	99,88%	99,92%	99,96%	99,96%
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP	83,93%	87,13%	88,93%	89,00%	89,15%	89,30%	89,30%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	109,43%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	81,47%	87,09%	88,44%	89,80%	91,16%	92,51%	92,51%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	98,26%	98,82%	99,12%	99,32%	99,52%	99,82%	99,82%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	70,21%	75,31%	77,61%	80,10%	83,15%	85,51%	85,51%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	53,95%	63,90%	64,32%	64,74%	65,16%	65,58%	65,58%
	Persentase implementasi penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum	50%	52%	67%	82%	100%	100%	100%
	Rasio Guru - Siswa PAUD	18,20	18,20	18,1	18	17,9	17,8	17,8
	Rasio Guru - Siswa jenjang SD	13,48	12,89	12,87	12,84	12,81	12,79	12,79
	Rasio Guru - Siswa jenjang SMP	10,14	10,48	10,41	10,33	10,25	10,17	10,17
	Persentase sekolah dan lembaga pendidikan yang memiliki izin operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	16,67%	40,00%	52,00%	52,00%	84,00%	88,00%	88,00%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	70,83%	72,00%	80,00%	88,00%	96,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	88,96%	92,90%	93,75%	94,54%	95,23%	95,93%	95,93%
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	72,83%	80,20%	86,80%	93,40%	99,66%	100,00%	100,00%
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	82,00%	82,00%	83,00%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%
	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase pelayanan kesehatan keadaan tertentu oleh tenaga kesehatan di RS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Indeks Infrastruktur	NA	73,25	74,74	76,14	77,41	78,82	78,82
	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	92,14	94,51	94,52	94,53	94,53	94,54	94,54
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	37,54%	37,87%	38,54%	39,20%	39,87%	64,47%	64,47%
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	0,00%	62,50%	62,96%	63,43%	63,89%	64,51%	64,51%
	Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	0,00%	64,47%	65,11%	65,77%	66,42%	67,09%	67,09%
	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	75,73%	80,57%	81,61%	82,64%	83,66%	84,67%	84,67%
	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	49,30%	76,74%	79,68%	82,27%	84,38%	86,49%	86,49%
	Persentase Akses Sanitasi Aman	0,00%	7,63%	7,89%	8,15%	8,49%	8,84%	8,84%
	Persentase Akses Sanitasi Layak	0,00%	76,74%	79,68%	82,27%	84,38%	86,49%	86,49%
	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase	38,93%	45,98%	46,20%	46,41%	46,62%	48,26%	48,26%
	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	0,00%	83,41%	84,57%	85,54%	86,52%	87,58%	87,58%
	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	0,00%	78,00%	81,00%	84,00%	87,00%	90,00%	90,00%
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	0,00%	72,14%	72,84%	73,54%	74,24%	74,94%	74,94%
	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	0,00%	72,27%	73,47%	74,67%	75,87%	77,07%	77,07%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kebakaran yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Resiko Bencana	152,6	151,6	150,6	149,6	148,6	147,6	147,6
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41
	Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,70
	Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56
1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	NA	15,00%	17,00%	20,00%	25,00%	27,00%	27,00%
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	33,57%	9,87%	13,50%	15,75%	17,41%	18,64%	75,17%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	49,11%	50%	55%	60%	70%	75%	75%
	Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	NA	100%	-	-	-	-	0
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,52	81,02	81,52	82,02	82,52	83,02	83,02
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	NA	65,64	67,43	69,24	71,06	72,89	72,89
	Indeks PUG	0	0,5025	0,5025	0,6375	0,6375	0,7724	0,7724
	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	0	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase keluarga berkualitas	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%
	Persentase elemen data terpilah	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)	58.5%	53,40%	56,80%	62,20%	63,60%	67%	67%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	0	0,616	0,62	0,624	0,628	0,632	0,632
2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Ketahanan Pangan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Stabilitas Harga Pangan	NA	≤25	≤20	≤15	≤12,5	≤10	≤10
	Ketersediaan Pangan Utama	NA	12,22%	23,53%	34,84%	46,15%	57,47%	57,47%
	Persentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan (persen)	NA	3,57%	7,14%	10,71%	14,29%	17,86%	17,86%
2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pertanahan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase koordinasi, fasilitasi dan informasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase luasan aset tanah pemkab yang tersertifikasi	NA	29,22%	46,67%	64,12%	78,66%	90,06%	90,06%
	Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
	Jumlah pelanggaran Lingkungan Hidup	NA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Lingkungan Hidup	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	persentase dokumen perencanaan LH yang tersedia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tingkat Pencemaran Air	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,1	5,1
	Persentase lokasi kawasan keanekaragaman hayati yang ditangani	NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang mengelola lingkungan hidup	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	persentase sekolah yang berwawasan lingkungan	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	45,00%
	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24%	24,10%	24,20%	24,30%	24,40%	24,50%	24,50%
2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,20%	99,25%	99,26%	99,27%	99,28%	99,29%	99,29%
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	79,04%	85,00%	87,00%	89,00%	91,00%	93,00%	93,00%
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	12,96%	40,00%	62,00%	74,00%	88,00%	100,00%	100,00%
2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase penataan administrasi batas wilayah desa	6,50%	8,31%	10,12%	11,93%	13,74%	15,55%	15,55%
	Persentase peningkatan kerjasama desa	2,53	1,44%	2,89%	4,33%	5,78%	7,22%	21,66%
	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	7,22	25,27%	43,32%	62,09%	80,87%	100,00%	100,00%
	Persentase desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	75,00%	75,00%	81,23%	87,45%	93,68%	100,00%	100,00%
2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	58,82%	72,22%	82,14%	86,84%	89,58%	91,38%	91,38%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,10%	8,10%	9,10%	10,10%	11,10%	12,10%	12,10%
	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	0	67,15%	67,56%	68,09%	70,00%	63,40%	63,40%
	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	58%	59%	60,32%	62,44%	64,55%	64,55%	64,55%
	Median Usia Perempuan Kawin Pertama	NA	16th	17 th	18 th	19 th	20 th	20.1 th
2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
	Indeks Konektivitas	NA	68,28	72,70	75,46	78,21	80,96	80,96
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	70,47%	70,08%	70,11%	70,15%	70,19%	70,23%	70,23%
	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	67,00%	63,00%	70,00%	75,00%	80,00%	86,00%	86,00%
	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,41	0,4	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36
	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan sertakelaikan kapal	0,00000	22,50%	30,00%	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	40,87%	42,79%	43,75%	44,71%	45,67%	45,67%	45,67%
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
	Persentase Koperasi Berkualitas	34,23%	36,94%	39,64%	42,34%	45,05%	47,75%	47,75%
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	4,77%	7,74%	10,72%	13,69%	16,66%	19,64%	19,64%
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Koperasi yang memiliki rekomendasi ijin usaha simpan pinjam	46,55%	0	74,14%	84,48%	94,83%	100,00%	100,00%
	Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan	7,36%	19,63%	39,26%	58,90%	78,53%	98,16%	98,16%
	Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan	13,79%	29,31%	44,83%	60,34%	75,86%	91,38%	91,38%
	Persentase KSP/ USP Sehat	8,62%	13,79%	18,97%	24,14%	29,31%	34,48%	34,48%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	347 (Data total pengawas dan pengurus)	17,29%	34,58%	51,87%	69,16%	86,46%	86,46%
	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	NA	33,74	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	NA	8,36%	8,37%	8,39%	8,40%	8,42%	8,42%
	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	NA	9,35%	18,70%	28,05%	37,41%	46,76%	46,76%
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	0	30,00%	20,00 %	20,00%	15,00 %	15,00 %	100,00%
	Jumlah Investor Baru	0,00%	8	13	13	13	13	60
	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase LKPM	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase data dan sistem perizinan yang mudah diakses	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemuda dan Olahraga	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pemuda yang berdaya saing	15,00%	15,75%	16,5%	17,25%	18%	18,75%	18,75%
	Persentase atlet yang berdaya saing	25%	25%	37,50%	38,75%	40%	42,50%	42,50%
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
	Indeks KAMI	163	170	180	190	200	240	240
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	33,33%	44,44%	55,56%	66,67%	77,78%	88,89%	88,89%
	Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
	Prosentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya	55,00%	62,50%	65,00%	67,50%	70,00%	72,50%	72,50%
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	9,50%	9,51%	9,52%	9,53%	9,54%	9,55%	9,55%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	81,35	82,20	82,40	82,60	82,80	83,00	83,00
	Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan	98,61%	98,89%	99,17%	99,45%	99,72%	100%	100%
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							
	Tingkat ketersediaan arsip	75,70%	76,00%	76,50%	77,00%	77,50%	78,00%	78,00%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan	82,53	84,75	84,95	85,15	85,35	85,55	8,55
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	84,20%	84,70%	85,20%	85,70%	86,20%	86,70%	86,70%
	Tingkat perijinan penggunaan arsip	-	7,50%	10,50%	13,00%	15,00%	17,50%	17,50%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan							
	LPE sub sektor perikanan	1,91%	3,60%	3,74%	3,88%	4,04%	4,21%	4,21%
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perikanan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	8.766	8.900	8.982	9,064	9,146	9,228	9,228
	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	53.116	53,926	54.422	54,923	55,417	55,916	55,916
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan	66,40%	70,00%	71,00%	72,00%	73,00%	74,00%	74,00%
	Angka Konsumsi Ikan	56,39	59,53	61,02	61,02	63,08	64,11	64,11

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan	7%	7,50%	8,00%	8,00%	9,00%	9,50%	9,50%
3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
	Jumlah kunjungan wisatawan	3.702.958	4.000.000	4.250.000	4.500.000	4.750.000	5.000.000	5.000.000
	Prosentase destinasi wisata yang representatif	44%	46,00%	48,00 %	52,00 %	56,00 %	58,00 %	58,00 %
	Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan	8%	8,00%	9%	9 %	10 %	10 %	10%
	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	75 unit	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (TPH)							
	LPE sub sektor pertanian	-4,18%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Pertumbuhan produktivitas komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura unggulan	NA	1,00%	1,08%	1,12%	1,35%	1,23%	1,23%
	Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian	NA	6,43%	11,79%	17,74%	24,29%	31,43%	31,43%
	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	NA	6,70%	6,60%	6,50%	6,40%	6,30%	6,30%
	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	NA	8,00%	8,00%	10,00%	12,00%	16,00%	53,60%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
	Persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	NA	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	25,00%	25,00%
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	NA	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
	Persentase produk unggulan daerah yang dikembangkan	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tertib Ukur	NA	32,00%	33%	35%	37%	40%	40%
	Persentase produk daerah yang dipromosikan	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
	LPE sektor industri Pengolahan	-2,87%	1,98%	2,02%	2,07%	2,11%	3,42%	3,42%
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	92,07%	92,25%	92,37%	92,49%	92,62%	92,75%	92,75%
	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	0,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	Persentase IKM yang Memiliki Izin	0,00%	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.7	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi							
	Persentase pengembangan kawasan ex. transmigrasi	0,00%	10,53%	21,05%	31,58%	42,11%	52,63%	52,63%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.1	Sekretariat Daerah							
	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat Daerah	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai LPPD	3,5065	3,1107	3,1100	3,1120	3,1150	3,1170	3,1170
	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	40	50	60	70	81	81
4.2	Sekretariat DPRD							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat DPRD	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi pelaksanaan reses	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.1	Perencanaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perencanaan Daerah yang Selaras	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	75,45	76,79	78,15	79,67	80,00	80,00
	Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA	0%	77,06	78,04	79,02	80	80,98	80,98
	Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	0%	73,03	74,03	75,03	76,03	77,03	77,03
5.2	Keuangan							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	85,18%	87,03%	88,88%	90,73%	92,58%	95,05%	95,05%
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	94,44%	96,29%	98,14%	98,14%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.1	Inspektorat Daerah							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat Daerah	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	NA	73	74	76	78	80	80
	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4,11	4,20	4,25	4,30	4,40	4,50	4,50
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.1	Kecamatan							
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aluh-Aluh	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	NA	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	NA	0,08%	0,090%	0,120%	0,140%	0,160%	0,160%
	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	NA	0,23%	0,41%	0,23%	0,41%	0,41%	0,41%
	Persentase Ormas Yang Dibina	NA	14%	25,00%	30,00%	31,00%	32,00%	32%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penanganan konflik sosial	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
ASPEK DAYA SAING								
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,37 (NTP : Kalsel)	103,82	104,36	104,90	105,44	105,98	105,98
2	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6451	0,6679	0,6793	0,6907	0,7021	0,7135	0,7135
3	Nilai SAKIP	68,97	72,65	74,49	76,32	78,16	80,00	80,00
4	Indeks SPBE	NA	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60
5	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,14%	92,16%	92,17%	92,18%	92,19%	92,20%	92,20%
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.11.734.080.000.000:306.060 : 1.920 = Rp. 19.968/jam (posisi Tahun 2020)	Rp.20.367	Rp. 20.774	Rp.21.189	Rp.21.612	Rp.22.044	Rp.22.044
8	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	18,00%	21,00%	24,00%	27,00%	30,00%	33,00%	33,00%

BAB IX PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum, serta prioritas program APBD masa transisi, yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagai pedoman, sebagaimana dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan : menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD, dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya; Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini.
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya, disusun melalui RKPD Kabupaten Banjar yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, Bappeda Litbang Kabupaten Banjar berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026, ke dalam Rencana Strategis SKPD, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
4. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 minimal dilakukan satu kali pada masa jabatan Bupati, terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program, dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi,
5. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Banjar merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, akan menjadi acuan bagi SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, dalam menjabarkannya menjadi indikator kinerja eselon dan jabatan fungsional, secara berjenjang.
7. Untuk kepentingan evaluasi akuntabilitas kinerja, dapat dilakukan elaborasi antara indikator kinerja per sasaran pembangunan dengan indikator kinerja per urusan pemerintahan daerah, dengan memperhatikan relevansi substansinya.

BUPATI BANJAR,

ttd

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom